SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 122 TAHUN 2020

TENTANG

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;

b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, telah disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu dilakukan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

d. bahwa . . .

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021.

Pasal 1

Dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 merupakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

(1) Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, memuat:

a. Narasi, yang terdiri atas:

1. Bab 1, Pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika;
2. Bab 2, Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat Hasil Evaluasi RKP Tahun 2019, Pemulihan Pembangunan Nasional Pascapandemi Covid-19, Kerangka Ekonomi Makro, Strategi Pengembangan Wilayah, dan Strategi Pendanaan Pembangunan;
3. Bab 3, Tema dan Sasaran Pembangunan yang memuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Arahan Presiden, Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan, serta Prioritas Nasional;
4. Bab 4, Prioritas Nasional dan Pendanaannya yang menjabarkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional dan masing-masing memuat sasaran Prioritas Nasional, Program Prioritas, Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Pendanaan untuk Prioritas Nasional;
5. Bab 5, Kaidah Pelaksanaan yang memuat Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, serta Kerangka Evaluasi dan Pengendalian; dan
6. Bab 6, Penutup,

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

b. Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, target, serta alokasi pendanaannya, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

c. Matriks . . .

c. Matriks *Major Project* yang memuat Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* pada Prioritas Nasional beserta alokasi pendanaannya, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2) Proyek Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabarkan dalam Daftar Proyek Prioritas yang ditetapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 3

(1) Dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan oleh:

a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional;

b. menteri/kepala lembaga untuk melakukan perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2021; dan

c. Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah Tahun 2021.

(2) Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 304

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2020
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH TAHUN 2021

NARASI

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021

SK No 051500 A

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN **I.1**

BAB II SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL **II.1**

2.1 Evaluasi RKP Tahun 2019 ..... II.1

2.2 Pemulihan Pembangunan Nasional Pascapandemi COVID-19 ..... II.4

2.3 Kerangka Ekonomi Makro II.10

2.4 Strategi Pengembangan Wilayah II.46

2.5 Strategi Pendanaan Pembangunan II.61

BAB III TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN **III.1**

3.1 RPJMN 2020-2024 dan Arahan Presiden III.1

3.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan III.2

3.3 Prioritas Nasional III.4

BAB IV PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA **IV.1**

4.1 Prioritas Nasional IV.1

4.1.1 Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan IV.2

4.1.2 Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan IV.18

4.1.3 Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing IV.43

4.1.4 Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan IV.59

4.1.5 Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar IV.65

4.1.6 Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim IV.80

4.1.7 Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik IV.86

4.2 Pendanaan pada Prioritas Nasional IV.93

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN V.1

5.1 Kerangka Kelembagaan V.1

5.2 Kerangka Regulasi V.4

5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian V.9

BAB VI PENUTUP VI.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2019	II.2
Tabel 2.2	Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2019-2020 (Persen)	II.15
Tabel 2.3	Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2019-2020 (Persen)	II.17
Tabel 2.4	Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2019-2020 (Persen)	II.18
Tabel 2.5	Target Pembangunan Tahun 2020 (Persen)	II.19
Tabel 2.6	Neraca Pembayaran Indonesia 2019-2020 (Miliar US$)	II.21
Tabel 2.7	Gambaran APBN (Persen PDB)	II.23
Tabel 2.8	Stimulus Kebijakan Sektor Jasa Keuangan	II.28
Tabel 2.9	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2021	II.33
Tabel 2.10	Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2021 (Persen)	II.36
Tabel 2.11	Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021 (Persen)	II.37
Tabel 2.12	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2021 (Persen)	II.38
Tabel 2.13	Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2021 (Miliar US$)	II.40
Tabel 2.14	Sasaran Fiskal Tahun 2021 (Persen)	II.42
Tabel 2.15	Kebutuhan Investasi Tahun 2021 (Persen)	II.45
Tabel 2.16	Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2021 (Persen)	II.46
Tabel 2.17	Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Persentase Perubahan terhadap Tahun Sebelumnya)	II.48
Tabel 2.18	Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Penurunan Tingkat Kemiskinan Wilayah (Persentase Penduduk Miskin)	II.48
Tabel 2.19	Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Penurunan Tingkat Pengangguran Wilayah (Persentase Angkatan Kerja yang Menganggur)	II.49
Tabel 2.20	Target Pengembangan Wilayah Papua Per Provinsi Tahun 2021 (Persen)	II.50
Tabel 2.21	Target Pengembangan Wilayah Maluku Per Provinsi Tahun 2021 (Persen)	II.52
Tabel 2.22	Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2021 (Persen)	II.53
Tabel 2.23	Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2021 (Persen)	II.55
Tabel 2.24	Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2021 (Persen)	II.57

Tabel 2.25	Target Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2021 (Persen)	II.58
Tabel 2.26	Target Pengembangan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2021 (Persen)	II.60
Tabel 3.1	Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan Tahun 2021	III.2
Tabel 4.1	Sasaran, Indikator, dan Target PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	IV.3
Tabel 4.2	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	IV.5
Tabel 4.3	Sasaran, Indikator dan Target PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	IV.19
Tabel 4.4	Indikator Pembangunan Kewilayahan	IV.20
Tabel 4.5	Sasaran, Indikator dan Target PP pada PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	IV.25
Tabel 4.6	Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Sumatera	IV.28
Tabel 4.7	Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Jawa–Bali	IV.29
Tabel 4.8	Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Kepulauan Nusa Tenggara	IV.30
Tabel 4.9	Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Kalimantan	IV.31
Tabel 4.10	Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Sulawesi	IV.32
Tabel 4.11	Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Kepulauan Maluku	IV.33
Tabel 4.12	Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Papua	IV.34
Tabel 4.13	Sasaran, Indikator, dan Target PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	IV.46
Tabel 4.14	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	IV.49
Tabel 4.15	Sasaran, Indikator, dan Target PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	IV.61
Tabel 4.16	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	IV.62
Tabel 4.17	Sasaran, Indikator, dan Target PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	IV.68

Tabel 4.18	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	IV.70
Tabel 4.19	Sasaran, Indikator, dan Target PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	IV.81
Tabel 4.20	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	IV.82
Tabel 4.21	Sasaran, Indikator, dan Target PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	IV.87
Tabel 4.22	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	IV.89
Tabel 4.23	Alokasi Pada PN Tahun 2021	IV.94
Tabel 5.1	Metodologi Evaluasi RKP: Kinerja Pencapaian PN	V.11
Tabel 5.2	Metodologi Evaluasi RKP: Kinerja Pelaksanaan MP	V.12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Prioritas Nasional RKP 2019	II.1
Gambar 2.2	Ruang Lingkup Evaluasi RKP 2019	II.2
Gambar 2.3	Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi Dunia	II.6
Gambar 2.4	Ilustrasi Transformasi Struktural Ekonomi dan Digital	II.8
Gambar 2.5	Perbedaan antara Prosedur Rantai Pasok Tradisional dan Digital	II.8
Gambar 2.6	*Baltic Dry Indeks* (BDI)	II.11
Gambar 2.7	PMI *Manufacturing Global*	II.11
Gambar 2.8	Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen)	II.12
Gambar 2.9	CBOE *Volatility Index* (VIX)	II.12
Gambar 2.10	Indeks MSCI	II.12
Gambar 2.11	Harga Komoditas Internasional	II.13
Gambar 2.12	Stimulus Fiskal Negara Dunia (Persen PDB)	II.14
Gambar 2.13	Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan (Persen)	II.24
Gambar 2.14	Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (Persen, yoy)	II.24
Gambar 2.15	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US$ (Rp/US$)	II.25
Gambar 2.16	Perkembangan *Yield Government Bonds*	II.26
Gambar 2.17	Perkembangan IHSG dan ICBI	II.26
Gambar 2.18	Pertumbuhan Kredit dan DPK	II.27
Gambar 2.19	Rasio Kredit Bermasalah	II.27
Gambar 2.20	Proyeksi Penurunan Emisi GRK	II.31
Gambar 2.21	Struktur Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020	II.64
Gambar 3.1	Tema dan Strategi Pembangunan Tahun 2021	III.3
Gambar 3.2	Beberapa *Major Project* (MP) pada Prioritas Nasional yang Akan Dilaksanakan Tahun 2021	III.6
Gambar 4.1	Kerangka Prioritas Nasional RKP 2021	IV.1
Gambar 4.2	Kerangka PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	IV.4
Gambar 4.3	*Major Project* Industri 4.0 di 5 Sub-Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia, dan Farmasi	IV.10

Gambar 4.4 *Major Project* 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai IV.11

Gambar 4.5 *Major Project* 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter IV.12

Gambar 4.6 *Major Project* Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan IV.13

Gambar 4.7 *Major Project* Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit IV.14

Gambar 4.8 *Major Project* Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng IV.15

Gambar 4.9 *Major Project* Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional IV.16

Gambar 4.10 *Major Project Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) IV.17

Gambar 4.11 Kerangka PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan IV.25

Gambar 4.12 Peta Pembangunan Wilayah Sumatera IV.27

Gambar 4.13 Peta Pengembangan Wilayah Jawa-Bali IV.28

Gambar 4.14 Peta Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara IV.29

Gambar 4.15 Peta Pembangunan Wilayah Kalimantan IV.30

Gambar 4.16 Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi IV.31

Gambar 4.17 Peta Pembangunan Wilayah Maluku IV.32

Gambar 4.18 Peta Pembangunan Wilayah Papua IV.33

Gambar 4.19 *Major Project* Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar IV.36

Gambar 4.20 *Major Project* Pembangunan Wilayah Batam – Bintan IV.37

Gambar 4.21 *Major Project* Pembangunan Kota Baru Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong IV.38

Gambar 4.22 *Major Project* Pemulihan Pascabencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda) IV.39

Gambar 4.23 *Major Project* Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, PKSN Merauke IV.40

Gambar 4.24 *Major Project* Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) IV.41

Gambar 4.25 *Major Project* Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay IV.42

Gambar 4.26 Kerangka PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing IV.48

Gambar 4.27 *Major Project* Penguatan Sistem Kesehatan Nasional IV.54

Gambar 4.28 *Major Project* Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting* IV.55

Gambar 4.29 *Major Project* Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 ..... IV.56

Gambar 4.30 *Major Project* Pembangunan *Science Technopark* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 *Major* Universitas) IV.57

Gambar 4.31 *Major Project* Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh IV.57

Gambar 4.32 Kerangka PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan IV.62

Gambar 4.33 Dukungan PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan terhadap Pelaksanaan *Major Project* IV.64

Gambar 4.34 Kerangka PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar IV.69

Gambar 4.35 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar IV.75

Gambar 4.36 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* dalam Program Prioritas Infrastruktur Perkotaan IV.75

Gambar 4.37 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* dalam Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar IV.76

Gambar 4.38 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* dalam Program Prioritas Infrastruktur Ekonomi IV.77

Gambar 4.39 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* dalam Program Prioritas Energi dan Ketenagalistrikan serta Transformasi Digital IV.78

Gambar 4.40 Kerangka PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim IV.82

Gambar 4.41 *Major Project* Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 ..... IV.84

Gambar 4.42 *Major Project* Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana IV.85

Gambar 4.43 Kerangka PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik IV.89

Gambar 4.44 *Major Project* Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT IV.92

Gambar 4.45 *Major Project* Penguatan Keamanan Laut di Natuna IV.92

Gambar 5.1 Kedudukan Kerangka Kelembagaan dalam Pembangunan V.1

Gambar 5.2 Prinsip Kerangka Kelembagaan V.2

Gambar 5.3 Tahapan Penilaian Kelayakan V.2

Gambar 5.4 Prioritas Penataan Kelembagaan pada Prioritas Nasional RKP 2021 ... V.3

Gambar 5.5 Peran Kerangka Regulasi dalam Pembangunan V.4
Gambar 5.6 Alur Pikir Sinergi Kebijakan dan Regulasi V.5
Gambar 5.7 Urgensi Integrasi Kerangka Regulasi dalam RKP 2021 ..... V.5
Gambar 5.8 Prinsip–Prinsip Kerangka Regulasi V.6
Gambar 5.9 Batu Uji Pengusulan Kerangka Regulasi V.6
Gambar 5.10 Alur Evaluasi RKP V.10
Gambar 5.11 Cakupan Pengendalian Pembangunan V.12
Gambar 5.12 Mekanisme Pengendalian RKP V.13

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 1
PENDAHULUAN

SK No 054511 A

BAB I
PENDAHULUAN

"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" adalah tema yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 menanggapi bencana pandemi COVID-19.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Dokumen RKP tahun 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.86/2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Sesuai dengan Pasal 5 Perpres tersebut, RKP tahun 2021 dimutakhirkan berdasarkan UU No.9/2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dan ditetapkan dengan Perpres.

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pandemi COVID-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan ditekankan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar. Disisi lain, hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2019 menunjukkan bahwa PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air dan PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya masih memberikan ruang untuk dilakukan peningkatan kinerjanya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan hasil evaluasi tersebut dan kondisi Indonesia pada tahun 2020 maka tema RKP tahun 2021 adalah "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial".

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 memiliki tujuh Agenda Pembangunan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya, yaitu memuat 41 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) dengan daya ungkit tinggi. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah

SK No 054512 A

maka tujuh PN dalam RKP tahun 2021 ini tetap dipertahankan hingga 2024 dengan mengacu pada Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 juga telah menetapkan MP sebagai fokus dalam penyusunan dan pendanaan RKP, dengan demikian maka beberapa MP langsung dikaitkan dan difokuskan dalam rangka mendukung tema RKP tahun 2021 ini. Dengan mempertimbangkan isu yang berkembang, terutama terkait dengan pandemi COVID-19, maka untuk merespon isu tersebut telah dilakukan penambahan dua MP sehingga seluruhnya menjadi 43 MP.

Guna memperkuat keterpaduan dan sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan MP, maka para gubernur telah dilibatkan untuk mematangkan rencana kerja awal sebelum penetapan rancangan awal RKP dan Pagu Indikatif.

Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan RKP tahun 2021 dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan (1) menjaga kesinambungan melalui penyesuaian PN dengan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan MP; (3) menjadikan konsep pengembangan wilayah sebagai basis dalam pelaksanaan PP dan KP; serta (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup belanja kementerian/ lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dokumen RKP tahun 2021 menjabarkan rencana pembangunan secara lebih rinci ke dalam PN, PP, KP, dan MP dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Adapun tujuh PN RKP tahun 2021 meliputi (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

1.2. Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Bagi pemerintah pusat, RKP tahun 2021 digunakan sebagai pedoman bagi K/L pada saat menjabarkan PN ke dalam Rencana Kerja (Renja) K/L 2021 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L 2021, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN)

2021. Sedangkan bagi pemerintah daerah, RKP tahun 2021 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah tahun 2021, yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2021.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RKP tahun 2021 adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN yang memuat latar belakang, tujuan, dan sistematika.

BAB II SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL yang memuat hasil evaluasi RKP tahun 2019, pemulihan pembangunan nasional pascapandemi COVID-19, kerangka ekonomi makro, strategi pengembangan wilayah, dan strategi pendanaan pembangunan.

BAB III TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN yang memuat RPJMN 2020-2024 dan arahan presiden, tema, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan, serta Prioritas Nasional.

BAB IV PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA yang menjabarkan tujuh PN dan masing-masing memuat sasaran PN, PP, MP, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta diakhiri dengan penjelasan pendanaan untuk seluruh PN.

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN yang memuat kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian.

BAB VI PENUTUP.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 2

SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SK No 054515 A

BAB II

SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

2.1. Evaluasi RKP Tahun 2019

Kinerja pencapaian Prioritas Nasional RKP 2019 berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan rasio gini menjadi 9,22 persen dan 0,380. Pemilu juga berjalan baik dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi (81,97 persen untuk pilpres dan 81,69 persen untuk pileg). Namun demikian, tantangan pada peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja serta ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air perlu terus didorong ke depan sejalan dengan upaya pemulihan pascapandemi COVID-19.

Sebagai upaya memberikan umpan balik dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 dilaksanakan dengan memperhatikan kesinambungan hierarki sasaran di setiap tingkatan kinerja, yaitu Prioritas Nasional (PN)-Program Prioritas (PP)-Kegiatan Prioritas (KP). Adapun pelaksanaan RKP 2019 dijabarkan ke dalam lima PN sebagaimana Gambar 2.1. berikut.

Gambar 2.1

Prioritas Nasional RKP 2019



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Evaluasi RKP 2019 merupakan evaluasi *ex-post* yang mencakup evaluasi atas pencapaian sasaran dari 5 PN, 24 PP, dan 100 KP serta evaluasi atas dukungan *output* kementerian/lembaga (K/L) terhadap pencapaian PN. Gambaran ruang lingkup evaluasi RKP 2019 seperti Gambar 2.2.

Pencapaian lima PN dalam RKP 2019 hingga triwulan IV sebagian besar menunjukkan kinerja yang baik (3 PN; 60 persen) dan cukup baik (2 PN; 40 persen). Prioritas Nasional yang memiliki kinerja terbaik adalah PN 1 Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, diikuti PN 5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Pencapaian seluruh PN RKP 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Gambar 2.2

Ruang Lingkup Evaluasi RKP 2019



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Tabel 2.1

Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2019

Prioritas Nasional		Kinerja PN Berdasarkan				Rata-Rata Kinerja PN		Kesimpulan Kinerja
		Capaian Sasaran PN (%)		Dukungan *Output* K/L (%)				
1	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	99,73	🟢	96,67	🟢	**98,20**	🟢	Baik
2	Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	90,64	🟢	93,99	🟢	**92,32**	🟢	Baik
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya	73,88	🟡	98,08	🟢	**85,98**	🟡	Cukup Baik
4	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	64,05	🟡	93,00	🟢	**78,53**	🟡	Cukup Baik
5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	99,30	🟢	94,11	🟢	**96,71**	🟢	Baik

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Keterangan: 🟢 realisasi >90% target (kinerja baik);
🟡 realisasi 60-90% target (kinerja cukup baik);
🔴 realisasi <60% target (kinerja kurang baik).

Secara umum, hubungan sebagian besar pencapaian sasaran PN-PP-KP telah selaras dengan dukungan *output* K/L yang diberikan. Artinya program dan kegiatan K/L (1) telah dijaga keterkaitan dan kontribusinya dalam pelaksanaan PN-PP-KP RKP 2019 dan (2) telah optimal berperan dalam mendukung pencapaian PN-PP-KP RKP 2019 sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, keselarasan tersebut masih perlu ditingkatkan pada PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya dan PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air.

Pencapaian PN hingga triwulan IV tahun 2019 menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target pembangunan. Permasalahan umum yang dihadapi dalam pelaksanaan PN RKP 2019 di antaranya permasalahan regulasi, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM). Masalah regulasi tercermin dalam pelaksanaan PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya yang terkendala oleh tidak adanya sinkronisasi kebijakan antarinstansi terkait serta pada PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air yang terkendala oleh masih adanya peraturan pemerintah level teknis yang kurang memberikan suasana kondusif bagi pelaku usaha sehingga perlu percepatan perumusan regulasi yang mendukung pelaksanaan PN. Selanjutnya, permasalahan sarana dan prasarana yang terjadi yaitu kurangnya peningkatan sarana dan prasarana sehingga menjadi faktor penghambat peningkatan produksi barang dan jasa terutama dalam pelaksanaan PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air. Adapun permasalahan SDM yaitu masih rendahnya kualitas SDM dan ketidakselarasan antara tingkat kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau dunia industri juga menjadi permasalahan dalam pencapaian PN RKP 2019.

Berikut penjelasan ringkas pencapaian setiap PN, yang memuat capaian beberapa indikator penting (*outcome)* dan simpulan kinerja pelaksanaan PP yang menggambarkan capaian *immediate outcome.*

Prioritas Nasional 1 Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar menunjukkan pencapaian kinerja yang baik pada tahun 2019. Dari tiga indikator sasaran PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, sebanyak dua indikator telah tercapai (realisasi ≥100 persen target), yaitu tingkat kemiskinan sebesar 9,22 persen dan rasio gini sebesar 0,380. Dari lima PP yang dilaksanakan (sebagai pencapaian *immediate outcome*), tiga PP di antaranya memiliki kinerja >90 persen, yaitu PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan, PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, serta PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak.

Prioritas Nasional 2 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman menunjukkan pencapaian kinerja yang baik pada tahun 2019. Dari empat indikator sasaran PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, sebanyak satu indikator yang telah tercapai (realisasi ≥100 persen target), yaitu *Information Communication Technology* (ICT) *Development Index* dengan nilai 4,99. Dari lima PP yang dilaksanakan (sebagai pencapaian *immediate outcome*), tiga PP di antaranya memiliki kinerja >90 persen, yaitu PP Peningkatan Konektivitas dan TIK, PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa, serta PP Penanggulangan Bencana.

Prioritas Nasional 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya menunjukkan pencapaian kinerja yang cukup baik pada tahun 2019. Dari delapan indikator sasaran PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya, hanya satu indikator yang telah tercapai (realisasi ≥100 persen target), yaitu nilai devisa pariwisata sebesar Rp278,60 triliun. Dari lima PP yang dilaksanakan (sebagai pencapaian *immediate outcome*), dua PP di antaranya memiliki kinerja >90 persen, yaitu PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian dan PP Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas.

Prioritas Nasional 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air menunjukkan pencapaian kinerja yang cukup baik pada tahun 2019. Dari 12 indikator sasaran PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air, empat di antaranya telah tercapai (realisasi ≥100 persen target), yaitu pertumbuhan produksi jagung (4,30 persen), pertumbuhan produksi ikan (8,84 persen), kapasitas air baku (81,40 m^3/detik), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/IKLH (66,56). Dari empat PP yang dilaksanakan (sebagai pencapaian *immediate outcome*), terdapat dua PP yang memiliki kinerja >90 persen, yaitu PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air dan PP Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan.

Prioritas Nasional 5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu menunjukkan pencapaian kinerja yang baik pada tahun 2019. Dari lima indikator sasaran PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu, empat di antaranya telah tercapai (realisasi ≥100 persen target), yaitu *clearance rate* penyelesaian kejahatan (65 persen), *response time* kehadiran aparat penegak hukum di TKP (15 menit, 0 detik), *Global Military Index* (0,28), dan tingkat partisipasi pemilih (81,97 persen untuk pilpres dan 81,69 persen untuk pileg). Dari lima PP yang dilaksanakan (sebagai pencapaian *immediate outcome*), sebanyak empat PP memiliki kinerja >90 persen, yaitu PP Kamtibmas dan Keamanan Siber, PP Kesuksesan Pemilu, PP Pertahanan Wilayah Nasional, serta PP Efektivitas Diplomasi.

2.2 Pemulihan Pembangunan Nasional Pascapandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial. Pascapandemi COVID-19, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (new normal), yang proses tranformasinya akan terjadi di empat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan internasional.

2.2.1 Pendahuluan

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 atau COVID-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus tersebut dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 59 juta jiwa (data per 24 November 2020 berdasarkan *Johns Hopkins University*). Kasus terkonfirmasi positif pertama COVID-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi dengan kasus virus tertinggi

tercatat di DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Barat, dan Jawa Timur. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Sebelum itu, pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, serta pertahanan dan keamanan.

2.2.2 Analisa Situasi Dampak COVID-19

Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran COVID-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, serta daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security),* dan SDM kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif COVID-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, dan pengendalian penyakit terhambat.

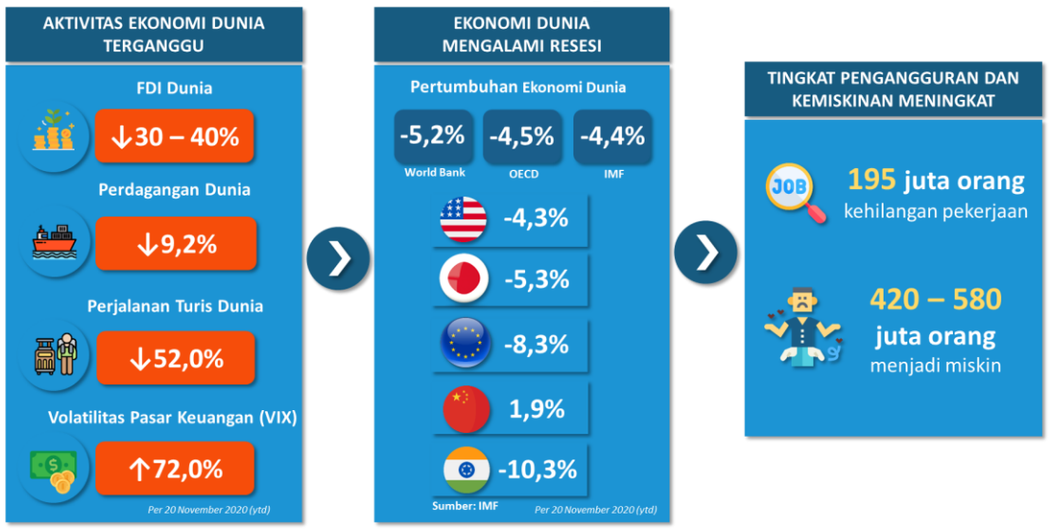
Dari sisi ekonomi, COVID-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan (Gambar 2.3). Berbeda dengan pengalaman saat *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS) yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara (membentuk pola pemulihan berbentuk huruf V), dampak COVID-19 diperkirakan akan lebih besar dan lama, membentuk huruf U bahkan huruf L atau M jika kasusnya meningkat kembali. Ekonomi dunia diperkirakan mengalami resesi pada tahun 2020, lebih buruk dari saat krisis keuangan global tahun 2008/2009. Pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi sebesar 0,1 persen.

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif COVID-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan

meningkatnya *non performing loan* (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan akan terkontraksi hingga mencapai 2,0 persen, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi COVID-19 berlangsung lebih lama. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.

Gambar 2.3

Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi Dunia



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejolak perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Penurunan PDB di tingkat regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama terjadi di provinsi yang merupakan zona merah COVID-19, yaitu wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 12 juta kunjungan atau setara penerimaan devisa sebesar US$15 miliar, serta penurunan wisatawan nusantara. Sektor pariwisata memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, agen travel dan operator pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga trasportasi domestik, dan industri penerbangan.

Pandemi COVID-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem *online* memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan

kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari *baseline*, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik. Jumlah orang miskin dan rentan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, dengan tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 9,7-10,2 persen pada akhir 2020, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai. Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran diperkirakan meningkat sebesar 2,67 juta jiwa dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,07 persen. Interupsi kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama juga berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran. Risiko yang lebih besar dialami siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan literasi digital atau kesulitan mendapatkan akses informasi (*World Bank*, 2020).

Selain itu, pandemi COVID-19 juga berdampak pada kebijakan pengetatan bahkan pelarangan mobilitas warga negara Indonesia (WNI) dari dan ke luar negeri. Berbagai protokol keamanan dilakukan untuk mencegah impor penyakit COVID-19. Upaya ini diambil untuk membendung lonjakan kasus COVID-19 yang pada akhirnya melemahkan sistem pertahanan dan keamanan sebagai dampak dari krisis ekonomi dan sosial. Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) turut mengawal pelaksanaan berbagai protokol keamanan serta menyiapkan fasilitas kesehatan di kawasan isolasi bagi WNI yang datang dari luar negeri.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan tatanan pola perdagangan dan rantai pasok. Disrupsi sisi produksi telah menyebabkan masing-masing negara lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan rakyatnya dibandingkan untuk ekspor, karena keterbatasan pasokan. Pengalaman dalam menghadapi pandemi COVID-19 akan memberikan pelajaran berharga bagi setiap negara maupun pelaku pasar untuk segera melakukan transformasi dan penyesuaian, sebagai upaya pemulihan pascapandemi COVID-19 agar dapat pulih dan tumbuh lebih cepat ataupun sebagai upaya antisipatif agar dapat lebih berdaya tahan (*resilience*) dalam menghadapi kondisi tak terduga di masa datang. Pascapandemi COVID-19, ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru (*new normal*), yang proses tranformasinya diperkirakan akan terjadi di empat area.

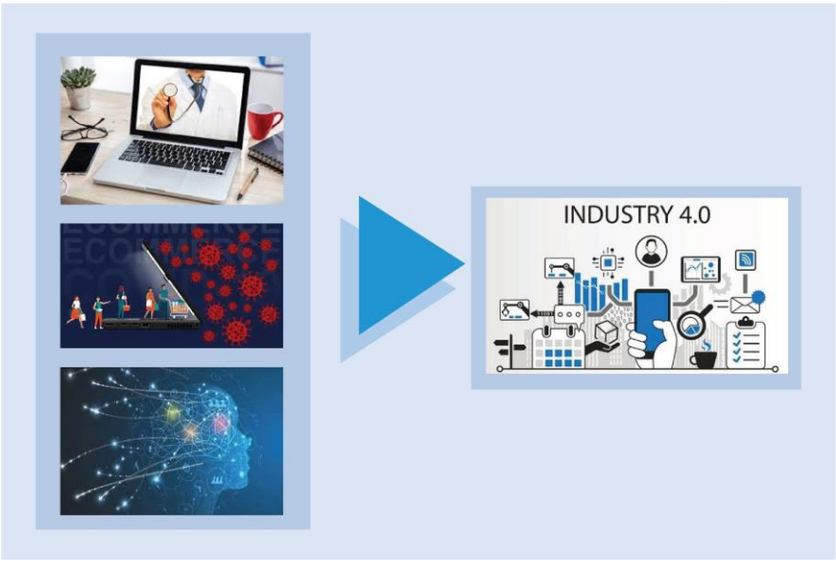
Pertama, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya. *Telemedicine* dan *e-commerce* merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi COVID-19, dan akan terus berlanjut secara pesat pascapandemi COVID-19. Ilustrasi transformasi struktural ekonomi dan digital seperti Gambar 2.4 berikut.

Kedua, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produksi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemi terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, *mall-online*, konsultasi dokter *online*, dan pertemuan/pembelajaran *online*.

Ketiga, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (*digital supply network*), sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui platform digital (Gambar 2.5). Jaringan pasok digital ini akan padat teknologi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 4.0, seperti *Artificial Intelligence, Internet of Things, Cloud Computing, 3D Printing,* dan *Robotics.*

Gambar 2.4

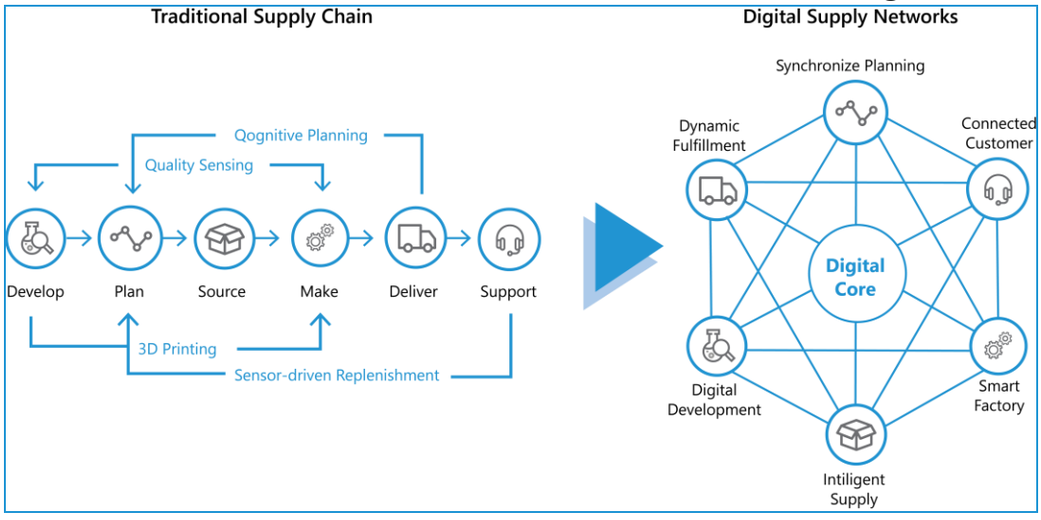
Ilustrasi Transformasi Struktural Ekonomi dan Digital



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Gambar 2.5

Perbedaan antara Prosedur Rantai Pasok Tradisional dan Digital



Sumber: Deloitte (2020)

Keempat, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis COVID-19 berpotensi menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan

dalam negerinya (*inward-looking policies*) yang berorientasi pada nasionalisme dan deglobalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya. Sementara itu, paradigma pembangunan negara-negara utara-selatan pun akan mengalami pergeseran, sebagai implikasi kebijakan Amerika yang menghentikan bantuannya untuk *World Health Organization* (WHO), sementara China berperan aktif membantu WHO dan negara-negara lain yang membutuhkan dalam penanganan COVID-19.

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan penanganan COVID-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur. Demikian pula, sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2021. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, kepala daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan COVID-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya.

2.2.3 Kebijakan Mitigasi Dampak COVID-19

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, pemerintah perlu mengambil respon kebijakan secara cepat dan benar. Belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi dampak COVID-19 dapat dibagi menjadi empat tahap: pertama adalah menguatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascapandemi COVID-19.

Tahap pertama hingga ketiga telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan menetapkan Undang-Undang (UU) No.2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Dalam UU ini, pemerintah merelaksasi batas defisit anggaran yang sebelumnya di bawah 3,0 persen PDB untuk dapat meningkatkan alokasi kesehatan, memberikan stimulus untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dan mencegah dunia usaha mengalami kebangkrutan yang masif. Selain stimulus fiskal, langkah-langkah stimulus moneter dan keuangan juga diambil untuk mengurangi tekanan di sektor keuangan dan meringankan beban dunia usaha di antaranya melalui restrukturisasi pinjaman dan penundaan pembayaran bunga.

Dampak pandemi COVID-19 dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi Indonesia untuk masuk menjadi negara maju dalam jangka menengah. Pandemi COVID-19 akan mempengaruhi pencapaian berbagai sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Oleh karena itu, tahap keempat merupakan tahap penting setelah penurunan kasus pandemi COVID-19 yang diarahkan untuk mengurangi gap target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini dibutuhkan program pemulihan kehidupan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, pariwisata, dan

SK No 054524 A

ekspor. Mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya.

2.3 Kerangka Ekonomi Makro

COVID-19 memberikan tekanan negatif terhadap ekonomi global dan Indonesia, akibat terganggunya sisi permintaan dan penawaran. Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh sangat lambat pada tahun 2020, dan pemulihan ekonomi diharapkan berlangsung pada tahun 2021. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2021, kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar Rp5.817,3 hingga Rp5.912,1 triliun.

Indonesia dalam visi 2045 ditargetkan telah keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap),* sehingga pada tahun 2045 sudah sejajar dengan negara maju lainnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, lima tahun ke depan menjadi periode yang krusial mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi titik awal pencapaian visi tersebut. Dalam RPJMN 2020-2024, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh rata-rata 5,7–6,0 persen per tahun.

Namun demikian, pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN yaitu pada tahun 2020, ekonomi Indonesia dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024. Sasaran ekonomi terkoreksi cukup tajam pada tahun 2020 dan berpengaruh pada tahun 2021.

Dihadapkan pada permasalahan tersebut, agenda pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKP tahun 2021. Berbagai langkah kebijakan yang telah diambil pemerintah diharapkan dapat menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 dan memberikan bantalan terhadap turunnya kondisi ekonomi Indonesia pada tahun tersebut. Namun mengingat besarnya dampak yang dihasilkan dan ketidakpastian penyelesaian pandemi COVID-19, langkah-langkah pemulihan yang cepat diperlukan untuk mengejar gap sasaran RPJMN dan mewujudkan visi Indonesia masuk menjadi negara maju pada tahun 2045.

2.3.1 Perkembangan Ekonomi Terkini: Dampak COVID-19 dan Kebijakan Penanganannya

Pandemi COVID-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun dalam negeri. Oleh karenanya, evaluasi dampak COVID-19 dan langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2020 menjadi bagian penting perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2021.

2.3.1.1 Dampak terhadap Ekonomi Dunia

Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Pada awal penyebaran pandemi COVID-19 di kota Wuhan, China, dampak terhadap ekonomi dunia diperkirakan akan mengikuti pola SARS pada tahun 2003. Negara yang terkena wabah akan mengalami penurunan pertumbuhan yang tajam dalam satu triwulan,

tetapi akan pulih dengan cepat pada triwulan berikutnya, membentuk pola huruf V. Ekonomi dunia diperkirakan menurun, tetapi masih positif.

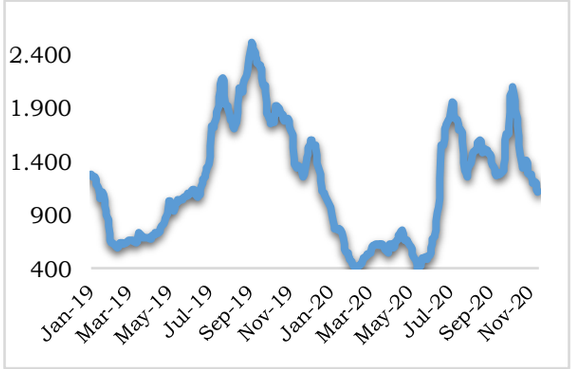
Namun demikian, kondisi berubah sangat cepat ketika penyebaran pandemi COVID-19 mulai menyebar ke berbagai negara di luar China pada akhir Februari 2020. Episentrum penyebaran pandemi COVID-19 tidak lagi di China, beralih ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa serta negara-negara berkembang di antaranya Brazil, India, Rusia, Peru, Chili, Meksiko, Pakistan, Afrika Selatan, dan Turki. Perkembangan yang ada mendorong berbagai negara menutup perbatasan dan menerapkan kebijakan *social distancing* dan *lockdown*, yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi.

Aktivitas dunia mengalami gangguan besar dan menurun tajam, tercermin dari penurunan *Baltic Dry Index* (BDI) dan *Purchasing Manager Index* (PMI) *Manufacturing* global. *Baltic Dry Index* masih menunjukkan perlambatan aktivitas perdagangan dunia meski mulai meningkat setelah sempat menurun tajam sejak Januari hingga pertengahan Mei 2020 (Gambar 2.6). Sementara itu, PMI *Manufacturing* global mulai meningkat di atas level 50 sejak Juli, menggambarkan mulai adanya ekspansi industri secara global meski masih belum sepenuhnya stabil (Gambar 2.7). Pada tahun 2020, nilai investasi langsung asing (*Foreign Direct Investment*/FDI) dunia diperkirakan turun tajam hingga 30,0–40,0 persen[1]. Aktivitas perdagangan dunia juga diperkirakan mengalami gangguan, turun hingga sekitar 9,2 persen[2]. Di sisi pariwisata, perjalanan wisata ke luar negeri juga diperkirakan turun hingga 52,0 persen[3].

Dengan berbagai perkembangan tersebut, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia direvisi dengan cepat. Dampak ekonomi yang pada awalnya diperkirakan akan berbentuk V, berubah menjadi huruf U atau bahkan huruf L. International Monetary Fund (IMF) yang pada awal tahun memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai 3,3 persen, merevisi proyeksi tersebut menjadi -4,4 persen pada Oktober 2020 (Gambar 2.8). Lembaga internasional lain, World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), juga memperkirakan terjadinya resesi dunia, dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar -5,2 persen dan -4,5 persen pada tahun 2020.

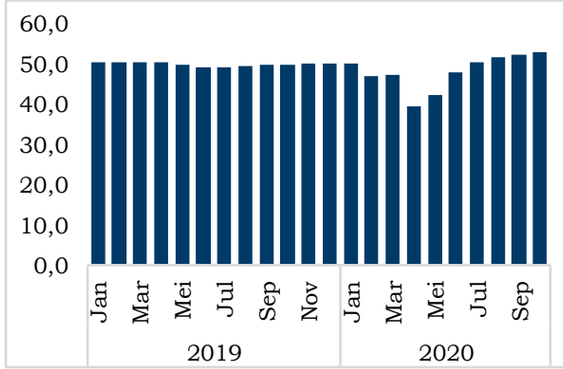
Gambar 2.6

***Baltic Dry Index* (BDI)**



Gambar 2.7

PMI *Manufacturing* Global

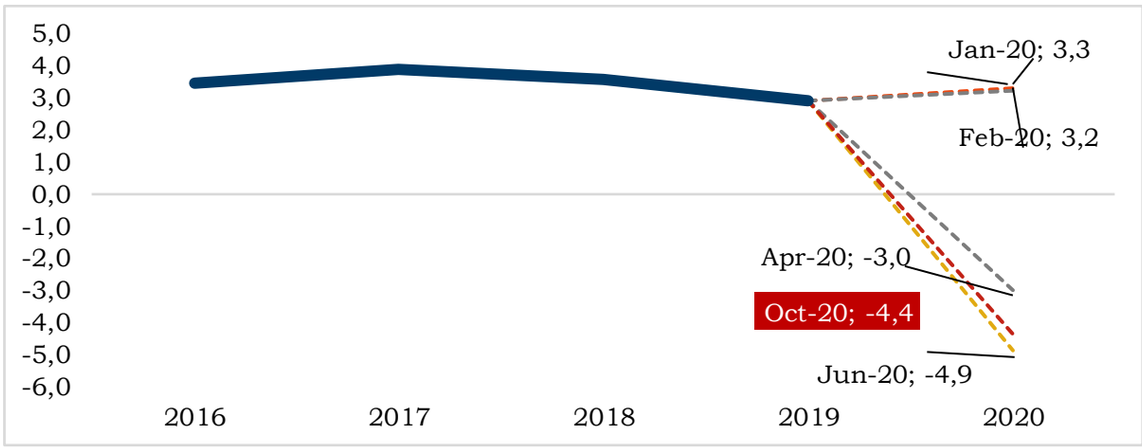


Sumber: Bloomberg, CEIC, 2020

[1] *Investment Trend Monitor* UNCTAD (Oktober 2020)
[2] *Trade Statistics and Outlook* WTO (Oktober 2020)
[3] *Global Travel Services Oxford Economics* (Juni 2020)

Gambar 2.8

Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen)



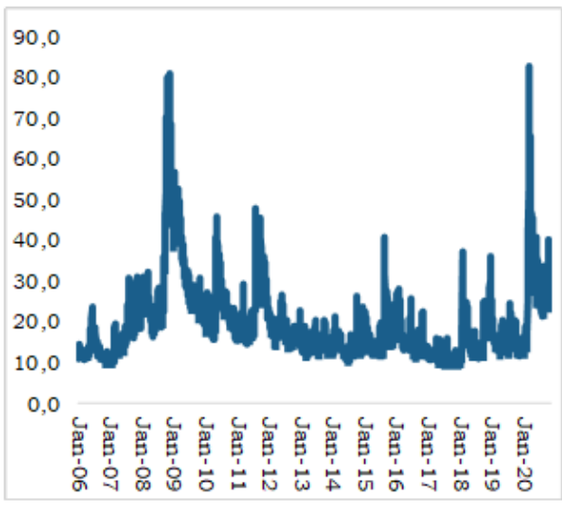
Sumber: IMF WEO Oktober 2020

Dampak terhadap Sektor Keuangan Dunia

Pandemi COVID-19 memicu peningkatan sentimen negatif di pasar keuangan global dan kepanikan pasar, tercermin dari peningkatan *Volatility Index* (Indeks VIX) yang mencapai titik lebih tinggi dibandingkan saat krisis keuangan global 2008 (Gambar 2.9). Sebagian besar investor mengalihkan dananya ke aset *safe haven*, seperti surat berharga AS dan emas, tercermin dari *yield* obligasi pemerintah AS yang terkoreksi tajam dan harga emas meningkat.

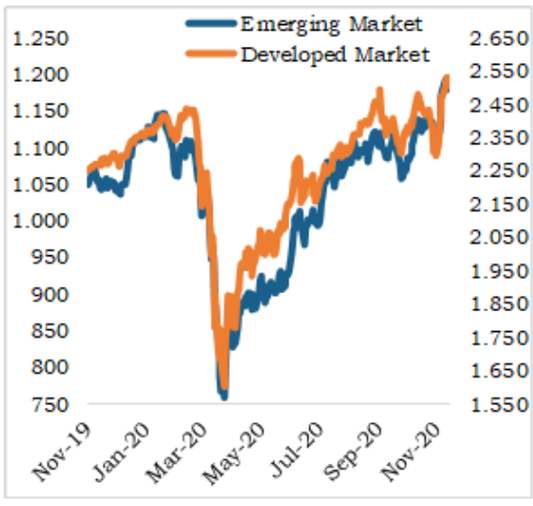
Gambar 2.9

CBOE *Volatility Index* (VIX)



Gambar 2.10

Indeks MSCI



Sumber: Bloomberg, November 2020

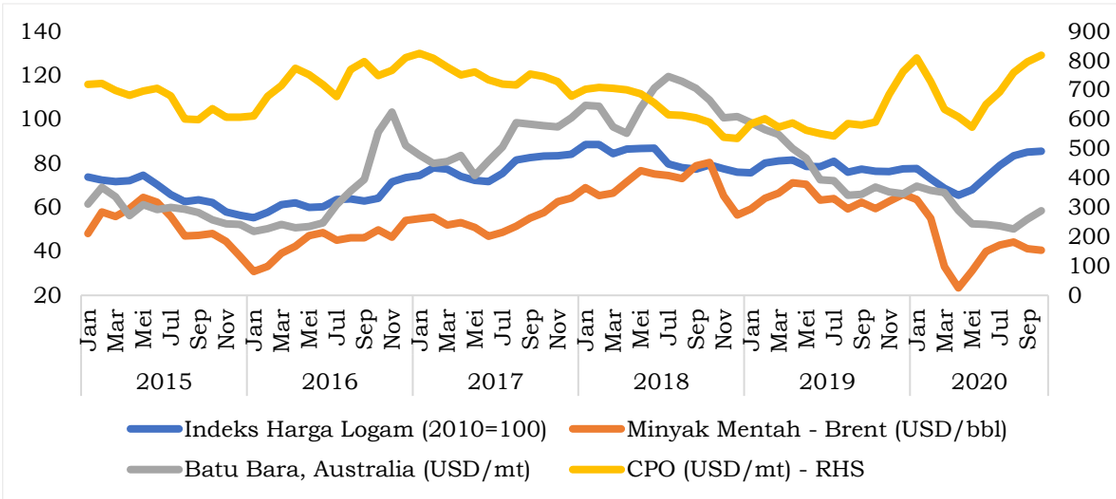
Sementara itu, pasar saham global mengalami koreksi tajam akibat penyebaran pandemi COVID-19. Namun sejak awal April, kondisinya membaik, seiring dengan respon positif investor terhadap langkah kebijakan stimulus yang diambil oleh banyak negara dan tanda-tanda *flattening the curve* di Eropa (Gambar 2.10).

Dampak terhadap Harga Komoditas Dunia

Harga komoditas (Gambar 2.11) yang pada akhir tahun 2019 meningkat seiring dengan optimisme perbaikan ekonomi dunia, mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak dari penyebaran pandemi COVID-19. Penurunan harga komoditas didorong oleh penurunan permintaan sebagai dampak penurunan aktivitas industri global dan perjalanan internasional.

Gambar 2.11

Harga Komoditas Internasional



Sumber: *World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet)*, Oktober 2020

Harga komoditas yang paling terkena dampak adalah minyak mentah dunia, turun hingga ke kisaran US$30 per barel. Selain karena disebabkan penurunan permintaan, penurunan harga minyak mentah dunia dipicu oleh gagalnya kesepakatan antara Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan Rusia. Ketidaksepakatan tersebut memicu perang harga yang diawali dengan kebijakan Arab Saudi meningkatkan produksi yang mendorong penurunan tajam harga minyak mentah dunia. Pada pertengahan April 2020, OPEC mencapai kesepakatan penurunan produksi, tetapi harga minyak mentah dunia diperkirakan akan tetap rendah akibat rendahnya permintaan.

Kebijakan Stimulus Ekonomi Dunia

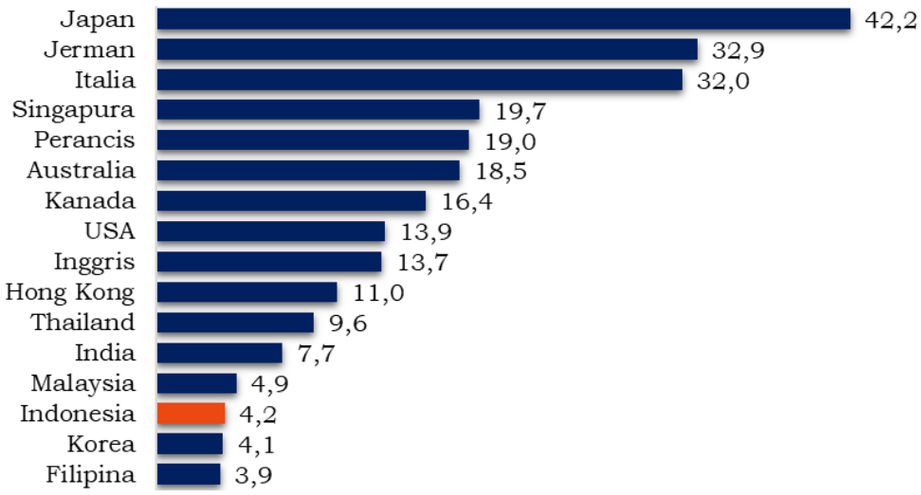
Dihadapkan pada dampak ekonomi yang besar dari pandemi COVID-19, pemerintah berbagai negara dunia mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, baik negara maju maupun berkembang memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak.

Dari sisi moneter dan keuangan, bank sentral di beberapa negara telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan di beberapa negara juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui *rediscount* kredit.

Di samping itu, bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 (Gambar 2.12). Sebagai contoh, IMF menyatakan siap memobilisasi kapasitas pinjaman sebesar US$1,0 triliun untuk membantu anggota IMF, sementara World Bank mengumumkan paket pinjaman hingga US$12,0 miliar untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 dengan komposisi US$8,0 miliar pinjaman baru, dan sisanya sebesar US$4,0 miliar akan dialihkan ke *credit line* yang sudah ada.

Gambar 2.12

Stimulus Fiskal Negara Dunia (Persen PDB)



Sumber: IMF per 10 November 2020, diolah Bappenas

2.3.1.2 Dampak terhadap Ekonomi Domestik

Pertumbuhan Ekonomi

Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Hingga triwulan III 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,0 persen (ctc). Perlambatan pertumbuhan hingga triwulan III 2020 terjadi pada semua komponen PDB baik pengeluaran (Tabel 2.2) dan lapangan usaha (Tabel 2.3), serta wilayah (Tabel 2.4).

Dari sisi PDB pengeluaran, hingga triwulan III 2020, konsumsi masyarakat (konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)) terkontraksi sebesar 2,4 persen (ctc), seiring dengan penurunan pendapatan masyarakat dan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Konsumsi pemerintah mampu tumbuh positif sebesar 2,0 persen (ctc) didorong oleh kenaikan realisasi belanja bantuan sosial, belanja barang, dan belanja lainnya, sejalan dengan akselerasi belanja Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pembentukan modal tetap

bruto atau investasi terkontraksi sebesar 4,5 persen (ctc) sejalan dengan pelemahan investasi baik swasta maupun pemerintah. Ekspor barang dan jasa merupakan komponen yang terkena dampak negatif terbesar, dengan kontraksi sebesar 7,5 persen (ctc). Komponen ekspor jasa terkontraksi cukup dalam akibat penurunan jumlah wisatawan mancanegara secara signifikan sementara kontraksi ekspor barang diakibatkan oleh turunnya aktivitas ekonomi dan perdagangan dunia. Impor barang dan jasa terkontraksi sebesar 13,9 persen (ctc), dengan barang migas terkontraksi seiring dengan penurunan nilai dan volume impor migas, sementara impor jasa tumbuh negatif didorong oleh menurunnya jasa angkutan untuk ekspor impor barang.

Tabel 2.2

Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2019-2020 (Persen)

Uraian	2019[a)]	Realisasi Hingga Triwulan III 2020[b)]	2020: Sebelum COVID-19[c)]	2020: COVID-19[d)]
Pertumbuhan PDB	**5,0**	**(2,0)**	**5,3**	**(2,0)**
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,2	(2,4)	4,9	(2,4)
Konsumsi Pemerintah	3,2	2,0	4,3	2,0
Investasi (PMTB)	4,4	(4,5)	6,0	(4,8)
Ekspor Barang dan Jasa	(0,9)	(7,5)	3,7	(7,5)
Impor Barang dan Jasa	(7,7)	(13,9)	3,2	(14,7)

Sumber: a) BPS, 2019; b) BPS (ctc), 2020; c) Sasaran RKP 2020; d) Perkiraan Bappenas, November 2020

Dari sisi lapangan usaha, sebagian besar sektor lapangan usaha mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan relaksasi penerapan PSBB di berbagai wilayah. Sektor yang mampu bertahan dan tumbuh positif adalah jasa kesehatan, informasi dan komunikasi, pengadaan air, pertanian, jasa pendidikan, real estat, dan administrasi pemerintahan. Sementara itu, sektor yang terkena dampak negatif terdalam hingga triwulan III 2020 adalah transportasi dan penyediaan akomodasi dan makan minum.

Berdasarkan wilayah, hingga triwulan III 2020, Jawa-Bali dan Kalimantan merupakan dua wilayah yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Wilayah-wilayah lain masih mampu tumbuh positif dengan Sulawesi, Maluku dan Papua masih mencatat pertumbuhan masing-masing sebesar 0,0; 1,6; dan 0,9 persen.

Meski hingga triwulan III 2020 pertumbuhan ekonomi masih mengalami kontraksi, tetapi tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai terlihat. Selepas relaksasi PSBB, aktivitas ekonomi mulai meningkat ditandai dengan kembali meningkatnya mobilitas masyarakat, PMI di sektor manufaktur, dan kinerja baik ekspor maupun impor. Selain itu, percepatan realisasi belanja pemerintah dan Program PEN akan menjadi faktor kunci pendorong pemulihan ekonomi pada semester II 2020.

Dengan perkembangan tersebut, prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi ke bawah menjadi minus 2,0 persen dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB.

Dari sisi PDB pengeluaran konsumsi masyarakat diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 2,4 persen pada tahun 2020, lebih rendah dari sasaran RKP 2020 sebesar 4,9

persen. Perlambatan tersebut salah satunya disebabkan oleh berkurangnya permintaan masyarakat, terutama untuk wisata dan hiburan, sebagai dampak dari pembatasan sosial (*social distancing*) untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19. Daya beli masyarakat juga turun disebabkan oleh hilangnya pendapatan sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan potensi kenaikan harga karena gangguan di sisi penawaran. Perluasan bantuan sosial yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menahan laju perlambatan konsumsi masyarakat.

Investasi diperkirakan terkena dampak negatif yang besar, mengalami kontraksi sebesar 4,8 persen pada tahun 2020, lebih rendah dari sasaran RKP 2020 sebesar 6,0 persen. Tekanan pada neraca keuangan perusahaan akibat rendahnya penerimaan seiring penurunan permintaan, ketidakpastian penyelesaian COVID-19 yang mendorong investor asing maupun domestik menunda keputusan investasi, dan ditunda atau dihentikannya proyek infrastruktur pemerintah menjadi beberapa faktor yang mendorong perlambatan investasi.

Ekspor barang dan jasa yang pada awalnya ditargetkan tumbuh 3,7 persen, diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 7,5 persen pada tahun 2020. Kontraksi tersebut utamanya didorong oleh turunnya permintaan dunia akan barang ekspor Indonesia. Selain ekspor barang, penurunan ekspor jasa juga akan mengalami penurunan, terutama jasa transportasi dan jasa perjalanan. Turunnya ekspor perjalanan didorong oleh penurunan wisatawan mancanegara sebagai dampak penutupan perbatasan Indonesia dan negara lainnya untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Sementara itu, impor barang dan jasa diperkirakan juga mengalami kontraksi sebesar 14,7 persen dari sebelumnya diperkirakan tumbuh sebesar 3,2 persen, akibat turunnya aktivitas ekonomi domestik.

Pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 2,0 persen menjadi satu-satunya komponen PDB pengeluaran yang diperkirakan tidak akan terlalu berbeda dari sasaran dalam RKP 2020 sebesar 4,3 persen. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didorong oleh peningkatan belanja untuk memberikan stimulus terhadap kelompok masyarakat dan industri yang terkena dampak COVID-19.

Dari sisi PDB lapangan usaha, revisi ke bawah terhadap sasaran pertumbuhan dilakukan pada hampir semua sektor. Sebagai gambaran, pada RKP tahun 2020 sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor yang diharapkan tumbuh tinggi (6,0 persen) seiring dengan salah satu prioritas pembangunan di sektor pariwisata. Namun pembatasan pergerakan manusia, penutupan perbatasan, dan penghentian sebagian besar penerbangan internasional dan domestik menyebabkan aktivitas pariwisata, baik wisatawan mancanegara maupun domestik, turun tajam. Selain itu, pembatasan pergerakan manusia berdampak pula terhadap restoran dan warung makanan yang pada akhirnya hanya bisa melayani *delivery* atau *take away*. Sebagai akibatnya, pertumbuhan sektor ini diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 9,7 persen.

Sektor industri pengolahan mengalami tekanan yang cukup besar, baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Dari sisi *supply*, gangguan pada rantai pasok global menyebabkan kenaikan biaya produksi terutama untuk memenuhi pasokan bahan baku impor. Selain itu, kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat berdampak pada tenaga kerja sektor industri pengolahan yang mendorong turunnya aktivitas produksi.

Dari sisi *demand*, di satu sisi industri pengolahan secara keseluruhan dihadapkan pada turunnya permintaan masyarakat akan produk industri, terutama produk yang bukan kebutuhan dasar. Namun demikian, di sisi lain terdapat juga industri yang berkembang di

antaranya industri makanan minuman, produk kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan farmasi. Dengan perkembangan tersebut, sektor ini diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 2,7 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.3

Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2019-2020 (Persen)

Uraian	2019[a)]	Realisasi Hingga Triwulan III 2020[b)]	2020: Sebelum COVID-19[c)]	2020: COVID-19[d)]
Pertumbuhan PDB	**5,02**	**(2,0)**	**5,3**	**(2,0)**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,6	1,5	3,7	1,7
Pertambangan dan Penggalian	1,2	(2,2)	1,9	(2,1)
Industri Pengolahan	3,8	(2,9)	5,0	(2,7)
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	4,0	(1,4)	4,2	(1,5)
Pengadaan Air	6,8	5,1	4,0	4,8
Konstruksi	5,8	(2,4)	5,7	(2,6)
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,6	(3,7)	5,5	(3,5)
Transportasi dan Pergudangan	6,4	(15,6)	7,0	(13,8)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,8	(10,7)	6,0	(9,7)
Informasi dan Komunikasi	9,4	10,4	7,3	10,8
Jasa Keuangan	6,6	3,5	6,3	2,5
Real Estate	5,7	2,7	4,9	2,6
Jasa Perusahaan	10,3	(4,9)	8,3	(4,9)
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,7	0,6	4,5	0,7
Jasa Pendidikan	6,3	3,1	5,1	3,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,7	9,8	7,5	11,6
Jasa Lainnya	10,6	(3,8)	8,9	(3,4)

Sumber: a) BPS, 2019; b) BPS (ctc), 2020; c) Sasaran RKP 2020; d) Perkiraan Bappenas, November 2020

Turunnya volume dan aktivitas perdagangan, baik domestik maupun internasional, memberikan pengaruh bagi kinerja sektor perdagangan. Sektor ini diperkirakan terkontraksi sebesar 3,5 persen. Sementara itu sektor transportasi dan pergudangan diperkirakan terkontraksi sebesar 13,8 persen, sebagai dampak dari pembatasan pergerakan masyarakat dan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan terhadap permintaan angkutan transportasi, terutama transportasi udara. Sektor lainnya yaitu sektor konstruksi, terkena dampak penundaan atau penghentian berbagai proyek

SK No 054532 A

pembangunan infrastruktur pemerintah yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan dan diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 2,6 persen.

Sektor lain yang perlu mendapat perhatian adalah sektor pertanian yang diperkirakan tumbuh sebesar 1,6 persen dan pengadaan listrik yang diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 1,5 persen. Sektor pertanian subsektor tanaman pangan diperkirakan tidak akan mengalami gangguan dalam jangka pendek, tetapi gangguan diperkirakan terjadi pada subsektor perkebunan dan perikanan, terutama dari sisi ekspor. Sektor pengadaan listrik terbantu oleh peningkatan konsumsi listrik rumah tangga yang meningkat seiring dengan kebijakan *work from home* (WFH) dan pembebasan tarif listrik, meski permintaan listrik industri dan bisnis mengalami penurunan. Sementara itu, sektor pertambangan diperkirakan terkena dampak tidak langsung dari penyebaran pandemi COVID-19 terkait dengan penurunan permintaan dan harga komoditas di tingkat internasional, sehingga diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 2,1 persen.

Selanjutnya, sektor jasa kesehatan dan informasi komunikasi menjadi sektor yang diperkirakan dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Jasa kesehatan merupakan kebutuhan esensial terutama dalam hal pemenuhan obat-obatan, farmasi, dan alat kesehatan. Selain itu, permintaan akan produk sektor informasi dan komunikasi meningkat cukup signifikan, khususnya pada paket data untuk memenuhi kebutuhan selama WFH. Sektor jasa kesehatan dan informasi dan komunikasi diperkirakan masing-masing tumbuh sebesar 11,6 persen dan 10,8 persen pada tahun 2020.

Dari sisi kewilayahan, Wilayah Jawa-Bali diperkirakan akan mengalami kontraksi hingga 2,7 persen. Penurunan kinerja ekonomi ini disebabkan karena adanya pemberlakuan PSBB lanjutan di Provinsi DKI Jakarta yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi. Lebih lanjut, dampak pandemi COVID-19 di Wilayah Jawa-Bali juga berdampak pada menurunnya kinerja sektor penyediaan akomodasi dan makan minum seiring dengan aktivitas pariwisata yang belum pulih. Sementara itu, Wilayah Sumatera dan Kalimantan yang memiliki ketergantungan terhadap komoditas primer juga mengalami dampak perlambatan pada pertumbuhan ekonominya. Wilayah Sumatera dan Kalimantan diperkirakan akan tumbuh terkontraksi sebesar 0,8 persen dan 2,3 persen yang utamanya disebabkan oleh penurunan perdagangan luar negeri akibat penurunan harga komoditas dunia, seperti batubara dan turunnya *supply* input antara pada industri pengolahan khususnya di Wilayah Jawa-Bali.

Tabel 2.4

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2019-2020 (Persen)

Uraian	2019[a)]	Realisasi Hingga Triwulan III 2020[b)]	2020: Sebelum COVID-19[c)]	2020: COVID-19[d)]
Sumatera	4,6	(0,7)	4,8	(0,8)
Jawa – Bali	5,5	(2,6)	5,4	(2,7)
Nusa Tenggara	4,5	(0,1)	5,9	(0,2)
Kalimantan	5,0	(2,1)	6,4	(2,3)
Sulawesi	6,7	0,0	6,8	0,0
Maluku	5,8	1,6	6,1	1,7
Papua	(10,7)	0,9	6,0	0,9

Sumber: a) BPS, 2019; b) BPS (ctc), 2020; c) Sasaran RKP 2020; d) Perkiraan Bappenas, November 2020

Untuk Nusa Tenggara, COVID-19 berdampak pada pelemahan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi, dan perdagangan seiring dengan jumlah kunjungan wisatawan yang belum pulih, di samping belum optimalnya pemulihan pembangunan pascagempa. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini diperkirakan terkontraksi sebesar 0,2 persen. Sementara itu, Sulawesi diperkirakan hanya tumbuh 0,0 persen yang disebabkan oleh tertahannya laju investasi dan turunnya sektor pendukung pariwisata, seperti perdagangan, transportasi, dan penyediaan akomodasi makan-minum. Pertumbuhan ekonomi Wilayah Maluku diperkirakan masih mampu tumbuh hingga 1,7 persen dengan didorong oleh investasi dan industri pengolahan feronikel di Maluku Utara yang masih dapat tumbuh cukup tinggi. Namun, pertumbuhan perekonomian Wilayah Maluku diperkirakan akan tertahan oleh perlambatan pada sektor perikanan, perdagangan, dan transportasi. Selanjutnya, perekonomian Papua akan mengalami tekanan dampak COVID-19 yang relatif terbatas karena efek tekanan sektor tambang di Papua yang sudah menurun dan diperkirakan tumbuh positif. Namun, tekanan diperkirakan terjadi di sektor perdagangan dan transportasi. Papua diperkirakan mampu tumbuh mencapai 0,9 persen.

Target Pembangunan

Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan meningkat, tingkat kesenjangan melebar, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurun (Tabel 2.5).

Tabel 2.5

Target Pembangunan Tahun 2020 (Persen)

Target Pembangunan	2019 a)	2020: Sebelum COVID-19 b)	2020: COVID-19c)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,3	4,8–5,0	7,07d)
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2	8,5–9,0	9,7–10,2
Rasio Gini (nilai)	0,380	0,375–0,380	0,379–0,381
IPM (nilai)	71,92	72,51	71,99

Sumber: a) BPS, 2019; b) Sasaran RKP 2020; c) Perkiraan Bappenas, November 2020; d) Sakernas, Agustus 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka

Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengakibatkan tingginya pekerja yang menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Tingginya pekerja ter-PHK tersebut, masuknya angkatan kerja baru ke pasar kerja, dan keterbatasan ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja menambah pengangguran sebanyak 2,67 juta jika dibandingkan dengan tahun 2019. Tingginya jumlah penganggur tersebut membuat TPT pada tahun 2020 mencapai 7,07 persen.

Tingkat Kemiskinan

Penyebaran pandemi COVID-19 berdampak juga terhadap pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun 2020. Namun pemerintah terus berupaya menekan tingkat kemiskinan melalui

pemberian stimulus fiskal berupa bantuan sosial yang cakupannya diperluas dan indeks bantuan yang dinaikkan, antara lain (1) Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang ditingkatkan indeks bantuannya sebesar 25 persen serta penyaluran dilakukan setiap bulan; (2) Program Sembako yang diperluas menjadi 20 juta KPM dengan indeks bantuan yang meningkat menjadi Rp200.000,00/KPM/bulan; (3) Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp600.000,00/bulan diberikan selama 9 bulan bagi 9 juta KPM di luar Wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; (4) bantuan sosial khusus dalam bentuk paket sembako bagi keluarga terdampak di Wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, bagi 1,9 juta KPM selama 9 bulan; (5) bantuan pembebasan serta pengurangan tarif listrik 450 VA dan 900 VA bagi penduduk miskin dan rentan; serta (6) pemanfaatan Dana Desa untuk mengurangi dampak COVID-19. Dengan bantuan tersebut diharapkan angka kemiskinan dapat ditekan pada kisaran 9,7–10,2 persen pada akhir tahun 2020.

Rasio Gini

Rasio gini yang mengalami penurunan secara bertahap sejak tahun 2015 hingga mencapai 0,380 pada September 2019 diperkirakan akan kembali meningkat sebagai dampak penyebaran pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, capaian rasio gini diperkirakan bisa menyentuh kisaran angka 0,379-0,381. Angka ini lebih tinggi 0,004 gini poin dari batas bawah dan 0,001 gini poin dari batas atas target RKP 2020 sebelumnya.

Indeks Pembangunan Manusia

Perlambatan pertumbuhan ekonomi berdampak pula pada IPM, terutama pada komponen pengeluaran per kapita yang merupakan indikator standar hidup layak. Penurunan pengeluaran per kapita ini disebabkan oleh merosotnya konsumsi rumah tangga akibat menurunnya pendapatan dan daya beli. Pembatasan aktivitas penduduk selama pandemi menyebabkan banyaknya pekerja yang dirumahkan atau diberhentikan, serta terhentinya aktivitas ekonomi pekerja informal.

Tekanan yang cukup besar bagi perekonomian ini dapat diminimalisir jika sistem kesehatan mampu mengendalikan pandemi. Kecepatan menghentikan penularan akan mencegah jumlah kematian yang besar, mempercepat selesainya pandemi dan membatasi penyebaran COVID-19 pada wilayah tertentu (*disease containment*). Namun saat ini sistem kesehatan Indonesia masih relatif lemah disebabkan oleh kecilnya investasi di sektor kesehatan, khususnya sektor kesehatan publik (*public health*) termasuk infrastruktur dan kemampuan sumber daya pada aspek promotif, preventif, maupun kuratif. Alhasil, tekanan besar pada sistem kesehatan untuk mencegah penularan dan menekan kematian karena COVID-19 berdampak pada terhambatnya penanganan pelayanan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, dan pengendalian penyakit.

Pandemi COVID-19 juga berdampak nyata pada penyelenggaraan pendidikan dengan pengalihan proses pembelajaran dari sekolah ke rumah (keluarga), melalui pembelajaran daring berbasis teknologi informasi. Sebagai langkah darurat, sekolah di rumah tentu saja penting, namun proses pembelajaran daring tidak sepenuhnya efektif. Dampak lain yang juga harus mendapat perhatian serius adalah kemampuan finansial keluarga (rumah tangga) yang menurun karena kehilangan pekerjaan, sehingga tidak dapat membiayai pendidikan bagi anak-anak mereka. Kondisi demikian dapat menyebabkan siswa-siswa putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, IPM diperkirakan akan mencapai 71,99 lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan dalam RKP tahun 2020 sebesar 72,51.

Neraca Pembayaran

Kinerja neraca pembayaran Indonesia tahun 2020 (Tabel 2.6) mengalami tekanan terutama pada neraca modal dan finansial, seiring dengan rendahnya FDI dan arus modal asing keluar Indonesia (*capital outflow*). Penyebaran pandemi COVID-19 di berbagai negara dan ketidakpastian waktu penyelesaiannya menyebabkan turunnya aliran FDI di tingkat global, termasuk ke Indonesia. Sementara itu, kepanikan di pasar keuangan dunia memicu larinya investasi portofolio keluar Indonesia, meski pasca-April mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dengan perkembangan tersebut, surplus neraca modal dan finansial diperkirakan turun hingga sebesar US$20,6 miliar pada tahun 2020, didorong oleh penurunan investasi langsung dan portofolio berturut-turut menjadi sebesar US$13,9 miliar dan US$8,4 miliar.

Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan menurun hingga mencapai 1,1 persen PDB pada tahun 2020. Turunnya defisit transaksi berjalan didorong oleh peningkatan surplus neraca perdagangan barang pada kisaran US$17,6 miliar. Peningkatan surplus neraca perdagangan barang disebabkan oleh penurunan impor yang lebih dalam daripada ekspor, seiring dengan penurunan aktivitas ekonomi domestik. Defisit neraca perdagangan jasa diperkirakan pada kisaran US$8,8 miliar didorong salah satunya oleh penurunan ekspor jasa perjalanan, seiring dengan terhentinya aktivitas perjalanan internasional.

Pada akhir tahun 2020 neraca pembayaran Indonesia diperkirakan akan mengalami surplus sebesar US$7,7 miliar. Cadangan devisa Indonesia meningkat menjadi 136,8 miliar.

Tabel 2.6
Neraca Pembayaran Indonesia 2019-2020 (Miliar US$)

Uraian	2019[a)]	2020 (*Outlook*)[b)]
Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan	4,7	7,7
Neraca Transaksi Berjalan - dalam persen PDB	(30,4) (2,7)	(11,67) (1,1)
Perdagangan Barang	3,5	17,6
Perdagangan Jasa	(7,8)	(8,8)
Pendapatan Primer	(33,8)	(26,4)
Pendapatan Sekunder	7,6	5,97
Neraca Modal dan Finansial - dalam persen PDB	36,4 3,2	20,6
Investasi Langsung	20,0	13,9
Investasi Portofolio	21,5	8,4
Investasi Lainnya	(5,4)	(1,8)
Posisi Cadangan Devisa - dalam bulan impor	129,2 7,3	136,8 10,0

Sumber: a) Bank Indonesia, 2020; b) Perkiraan Bappenas, November 2020

Keuangan Negara

Pendapatan negara dan hibah tahun 2020 diperkirakan turun seiring dengan melambatnya kondisi ekonomi global dan domestik, serta menurunnya harga komoditas, utamanya minyak dunia. Pemberian stimulus berupa insentif fiskal dan penurunan tarif Pajak Penghasilan (tarif PPh) Badan dari 25 persen menjadi 22 persen pada tahun 2020 turut menyebabkan penerimaan perpajakan terkoreksi lebih dalam. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga terimbas dari sisi melemahnya permintaan dan berkurangnya aktivitas ekspor-impor dari sektor-sektor produktif, termasuk sektor manufaktur yang berkontribusi terbesar terhadap PPN. Kondisi tersebut berdampak pada penerimaan perpajakan yang diperkirakan akan mencapai Rp1.261,5 triliun atau 8,0 persen PDB. Perkiraan tersebut turun 18,4 persen dari realisasi tahun 2019. Selanjutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga diperkirakan menurun akibat harga komoditas migas terutama harga minyak mentah Indonesia yang menurun cukup tajam dan harga komoditas nonmigas yang relatif berfluktuasi. PNBP diperkirakan turun menjadi sebesar Rp319,4 triliun pada tahun 2020.

Dari sisi belanja negara, pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan yang signifikan untuk akselerasi penanganan dampak COVID-19. Akselerasi tersebut diperlukan untuk mencegah berbagai krisis, baik kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Dibutuhkan tambahan belanja dan pembiayaan anggaran untuk akselerasi penanganan pandemi COVID-19 yang diperkirakan mencapai Rp695,20 triliun untuk kebutuhan sebagai berikut (1) pendanaan kesehatan sebesar Rp87,55 triliun; (2) pendanaan perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun; (3) pendanaan insentif usaha sebesar Rp120,61 triliun; (4) pendanaan UMKM sebesar Rp123,46 triliun; (5) pendanaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun; dan (6) pendanaan sektoral K/L dan pemda sebesar Rp106,11 triliun. Tambahan belanja berupa stimulus fiskal diharapkan mampu meningkatkan daya tahan sektor-sektor terdampak COVID-19, menjaga daya beli masyarakat, serta memelihara keberlanjutan dunia usaha.

Seiring dengan akselerasi penanganan COVID-19 tersebut di atas, belanja negara diperkirakan mencapai Rp2.631,9 triliun, meningkat 14,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2019, atau mencapai sebesar 16,7 persen PDB. Berdasarkan komponennya, belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp1.868,2 triliun atau 11,9 persen PDB. Selanjutnya, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diperkirakan mencapai Rp763,7 triliun atau 4,9 persen PDB. Peningkatan realisasi belanja negara tersebut terutama dipengaruhi oleh belanja untuk penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan perkiraan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp1.043,2 triliun atau 6,6 persen terhadap PDB (Tabel 2.7). Defisit tersebut dibiayai utamanya dari pembiayaan utang yang diperkirakan mencapai sebesar Rp1.143,5 triliun (rasio utang diperkirakan sebesar 39,0 persen PDB). Selain itu, pembiayaan defisit bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp70,6 triliun dan pembiayaan investasi sekitar negatif Rp174,7 triliun.

Langkah-langkah akselerasi penanganan pandemi COVID-19 dituangkan dalam Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No.2/2020 tentang Penetapan Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

SK No 054537 A

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Melalui UU tersebut pemerintah berwenang melakukan relaksasi kebijakan defisit anggaran melampaui tiga persen PDB paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Undang-Undang tersebut juga mengatur kebijakan di bidang keuangan daerah, perpajakan, dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.

Tabel 2.7

Gambaran APBN (Persen PDB)

Uraian	Realisasi 2019[a)]	2020	
		Perpres No.72/2020	*Outlook*)*
Pendapatan Negara dan Hibah	12,4	10,4	10,1
Penerimaan Perpajakan	9,8	8,6	8,0
PNBP	2,6	1,8	2,0
Belanja Negara	14,6	16,7	16,7
Belanja Pemerintah Pusat	9,5	12,1	11,9
TKDD	5,1	4,7	4,9
Keseimbangan Primer	(0,5)	(4,3)	(4,6)
Surplus / (Defisit)	(2,2)	(6,3)	(6,6)
Rasio Utang	30,2	37,6	39,0

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020, a) Realisasi LKPP Tahun 2019 *Audited*

Keterangan: *) *Outlook* Bappenas per November 2020

Moneter

Stabilitas moneter yang relatif terjaga dan menguat pada tahun 2019 mulai terkoreksi pada awal tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Hingga Oktober 2020, inflasi terus menurun (Gambar 2.13 dan Gambar 2.14), dan nilai tukar rupiah menguat setelah mengalami depresiasi cukup dalam dan bergerak fluktuatif pada Maret 2020.

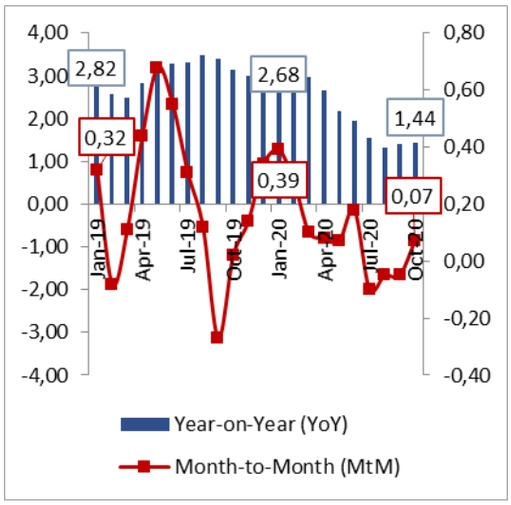
Pada triwulan I 2020, inflasi tetap terjaga rendah dan berada dalam rentang sasaran 3,0±1 persen (yoy), di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Hingga triwulan II, kebijakan PSBB untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berdampak pada turunnya konsumsi terlihat pada turunnya inflasi Juni 2020. Sepanjang triwulan III, inflasi kembali mengalami penurunan dan lebih rendah dari batas bawah sasaran inflasi 2020 yaitu 2,0 persen (yoy). Inflasi umum Juli-September 2020 secara berturut-turut tercatat 1,54; 1,32 dan 1,42 persen (yoy). Memasuki triwulan IV, inflasi umum Oktober 2020 tercatat 1,44 persen (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya, namun masih lebih rendah dari batas bawah sasaran inflasi 2020. Perkembangan ini utamanya dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur pemerintah. Inflasi inti kembali menurun mencapai 0,04 persen (mtm) atau 1,74 persen (yoy), sejalan dengan perlambatan pemintaan global dan domestik akibat pandemi. Inflasi harga bergejolak meningkat dari bulan sebelumnya menjadi 0,40 persen (mtm) atau 1,32 persen (yoy), dikontribusikan oleh kenaikan harga komoditas hortikultura, khususnya cabai merah dan bawang merah, seiring dengan berlalunya musim panen, serta komoditas minyak goreng sejalan dengan kenaikan harga *crude palm oil* (CPO) global. Inflasi harga diatur pemerintah tetap rendah

SK No 054538 A

terkendali mencapai -0,15 persen (mtm) atau 0,46 persen (yoy), terutama bersumber dari penurunan tarif angkutan udara sejalan dengan penerapan strategi penurunan harga tiket oleh maskapai, tarif angkutan antarkota dan tarif kendaraan roda empat yang dipesan secara daring (*online*), serta kebijakan penurunan tarif listrik.

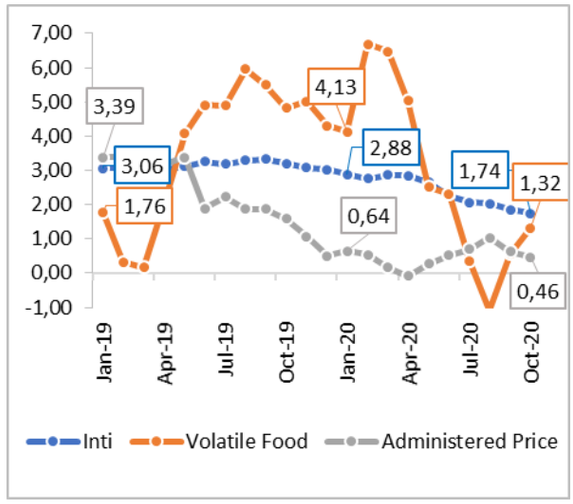
Gambar 2.13

Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan (Persen)



Gambar 2.14

Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (Persen, yoy)



Sumber: BPS,2020

Inflasi masih dihadapkan pada risiko peningkatan hingga akhir tahun 2020, di antaranya: (1) kebutuhan akan bahan dan alat kesehatan untuk mengatasi penyebaran dan tindakan kuratif atas COVID-19 yang didatangkan dari luar negeri bertransmisi melalui nilai tukar rupiah; dan (2) berlanjutnya PSBB di beberapa daerah episentrum COVID-19 turut berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok, sehingga dapat mendorong inflasi harga pangan bergejolak (*volatile food*). Namun demikian, masih lemahnya permintaan domestik diperkirakan akan menahan peningkatan laju inflasi. Sehingga pada akhir tahun 2020, inflasi diperkirakan berada pada kisaran 1,5 persen (yoy), lebih rendah dari batas bawah sasaran inflasi yang ditetapkan yaitu sebesar 2,0–4,0 persen.

Sepanjang triwulan I 2020, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS (US$) mengalami pelemahan yang cukup tajam (Gambar 2.15), menyentuh level Rp16.486,00 per US$ pada 24 Maret 2020. Pelemahan tersebut dipengaruhi oleh gejolak pasar keuangan global sebagai dampak penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. Kebijakan *The Fed* memangkas suku bunga acuan menjadi 0–0,25 persen menambah sinyal ketidakpastian global serta potensi terjadinya resesi ekonomi global. Kondisi tersebut mengakibatkan berkurangnya arus modal asing masuk ke pasar keuangan Indonesia serta bertambahnya arus modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia.

Selama triwulan II hingga pertengahan triwulan IV 2020, nilai tukar rupiah menguat seiring dengan meredanya kepanikan di pasar keuangan global akibat pandemi COVID-19, menyentuh level Rp14.187,00 per US$ pada 12 November 2020. Dari sisi eksternal, penguatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh aliran modal asing yang masuk ke

Indonesia sejalan dengan meredanya ketidakpastian ekonomi global setelah hasil pemilu AS, peningkatan stimulus moneter dan fiskal untuk pemulihan ekonomi, pembukaan kembali aktivitas ekonomi di beberapa negara, serta terjaganya optimisme investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Dari sisi domestik, penguatan rupiah dipengaruhi oleh sentimen positif atas rencana pembiayaan pemulihan ekonomi nasional salah satunya melalui skema *burden sharing* antara Pemerintah dan BI. Selanjutnya, penguatan ini ditopang oleh faktor fundamental, antara lain (1) inflasi yang terjaga rendah dan stabil; (2) defisit neraca transaksi berjalan yang diperkirakan menurun; serta (3) perbedaan suku bunga (*yield spread*) dengan AS yang relatif kompetitif.

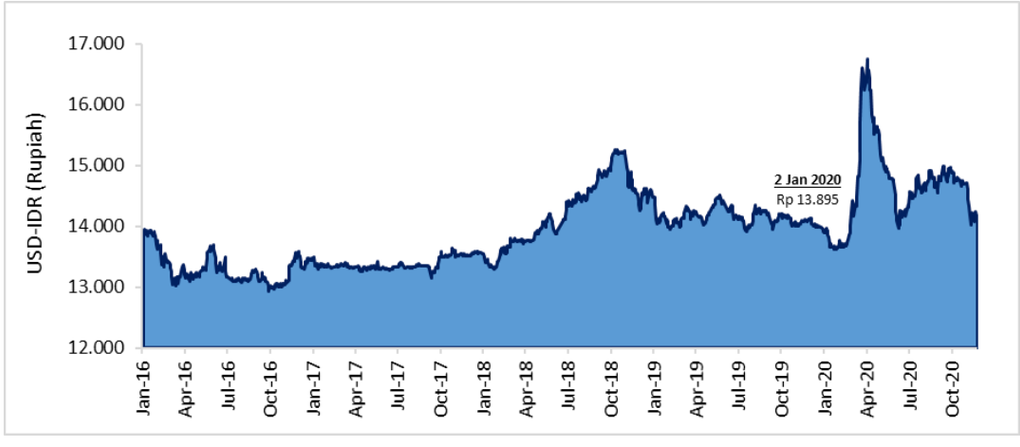
Respon kebijakan moneter untuk mengatasi depresiasi nilai tukar rupiah cukup efektif. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan BI, 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) menjadi 3,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 18-19 November 2020, sejalan dengan upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia juga memberlakukan kebijakan *triple intervention* baik secara spot, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), maupun pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder, lelang *foreign exchange swap* lebih sering yaitu setiap hari; percepatan penggunaan rekening rupiah dalam negeri (*Vostro*) bagi investor asing sebagai *underlying* transaksi dalam transaksi DNDF; serta pemberian insentif pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) harian dalam rupiah.

Sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, kecukupan likuiditas bagi perekonomian nasional pada masa darurat COVID-19 telah pula direspon dengan kebijakan nasional. Kebijakan tersebut berupa Perppu No.1/2020 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No.2/2020. Dengan peraturan tersebut BI dapat membeli Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan bagi perekonomian nasional. Selain itu, BI juga dapat membeli/repo surat berharga negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik.

Melalui kebijakan moneter yang senantiasa menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dengan tetap mengendalikan jumlah uang beredar, nilai tukar rupiah pada akhir tahun 2020 diperkirakan menguat pada kisaran Rp14.650,00 per US$.

Gambar 2.15

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US$ (Rp/US$)



Sumber: Bank Indonesia (2020)

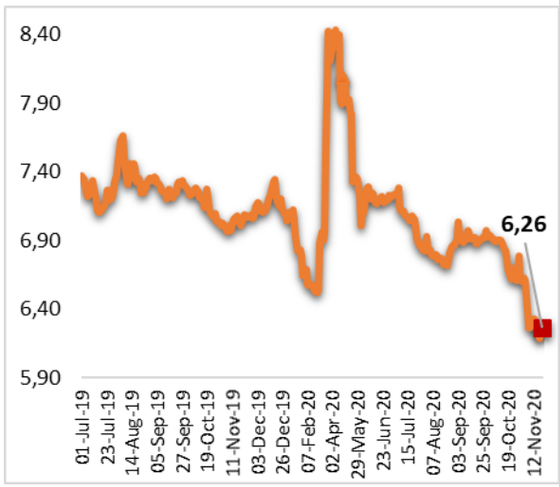
Sektor Keuangan

Memasuki tahun 2020, negara di dunia termasuk Indonesia dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap perekonomian dunia dan Indonesia. Pemerintah negara di dunia dan juga Indonesia berupaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 dengan menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas penduduk dan ekonomi. Dengan kebijakan tersebut, perekonomian dunia termasuk Indonesia diperkirakan mengalami perlambatan bahkan pada kondisi terburuk diperkirakan akan mengalami penurunan yang dalam pada tahun 2020. Perekonomian yang tertekan akibat adanya pandemi COVID-19 memberi dampak lanjutan pada sektor keuangan, baik pada pasar modal, perbankan, maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Ekspektasi perekonomian Indonesia yang menurun serta ketidakpastian akan berakhirnya pandemi COVID-19 meningkatkan kekhawatiran investor pada pasar modal. Selain itu, pandemi COVID-19 yang menurunkan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat, mendorong terjadinya penurunan kemampuan para debitur dalam pengembalian pinjaman dari perbankan dan nonbank.

Jika dibandingkan dengan akhir tahun 2019, telah terjadi pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yaitu melemah dari 6.299,5 pada akhir Desember 2019 menjadi 5.571,7 pada 20 November 2020, atau menurun sebesar 11,6 persen (ytd). Sementara itu, setelah sebelumnya meningkat signifikan pada akhir bulan Maret 2020, *yield* obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun telah mengalami perbaikan hingga menyentuh level 6,3 persen pada 20 November 2020, atau menurun 11,1 persen dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2019 (ytd), yang menunjukkan adanya penurunan premi risiko pada pasar (Gambar 2.16). Selanjutnya, tekanan pada pasar modal juga tercermin dari peningkatan aksi *sell-off* para investor asing. Per 18 November 2020, porsi kepemilikan asing sebesar 26,2 persen dari total SBN yang beredar di pasar, atau mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2019 yang mencapai sebesar 38,6 persen. Sementara itu, *Indonesia Composite Bond Index* (ICBI) justru mengalami peningkatan sebesar 11,9 persen (ytd) dari bulan Desember tahun 2019 menjadi 307,3 per 20 November 2020 (Gambar 2.17).

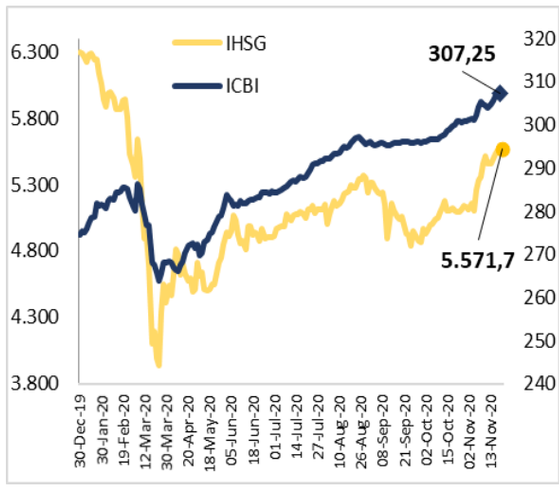
Gambar 2.16

Perkembangan *Yield Government Bonds*



Gambar 2.17

Perkembangan IHSG dan ICBI

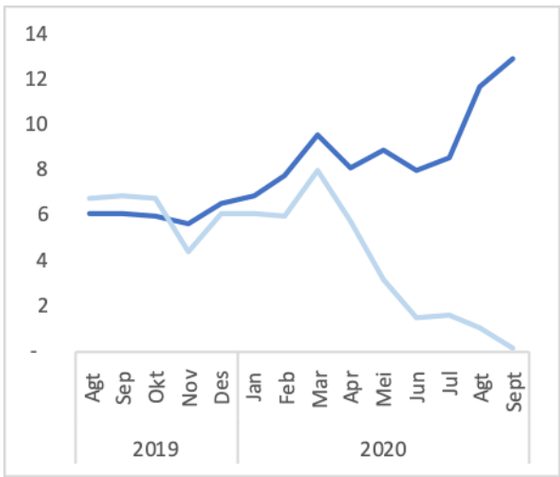


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan IBPA, November 2020

Selain pada pasar modal, dampak COVID-19 juga memberi tekanan pada industri perbankan dan IKNB. Pada industri perbankan, telah terjadi perlambatan pertumbuhan kredit dan penurunan kualitas kredit (Gambar 2.18). Pada bulan September tahun 2020, kredit perbankan tumbuh sebesar 0,1 persen (yoy), melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,9 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan kredit tersebut terjadi pada hampir seluruh sektor ekonomi, terutama pada sektor perdagangan besar dan eceran yang mendominasi penyaluran kredit perbankan. Selanjutnya, penurunan kualitas kredit yang tercermin dari peningkatan rasio kredit bermasalah meningkat menjadi 3,2 persen pada bulan September tahun 2020, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,7 persen (Gambar 2.19). Peningkatan rasio kredit bermasalah tersebut terjadi akibat pelemahan ekonomi akibat dampak COVID-19, yang terjadi pada hampir seluruh sektor ekonomi.

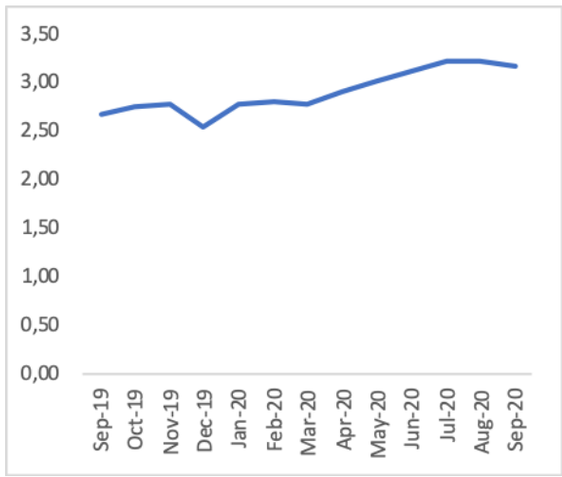
Gambar 2.18

Pertumbuhan Kredit dan DPK



Gambar 2.19

Rasio Kredit Bermasalah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, September 2020

Selanjutnya pada IKNB, tekanan COVID-19 berdampak pada menurunnya total aset IKNB. Pada bulan September tahun 2020, total aset IKNB tercatat sebesar Rp2.509,3 triliun, tumbuh sebesar 0,2 persen (yoy), atau terus mengalami penurunan sejak bulan Desember tahun 2019. Total aset IKNB pada bulan Desember tahun 2019 bahkan sempat mencapai Rp2.557,8 triliun.

Tekanan yang besar terhadap perekonomian termasuk sektor keuangan mendorong pemerintah mengeluarkan beberapa stimulus kebijakan pada sektor jasa keuangan seperti pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8

Stimulus Kebijakan Sektor Jasa Keuangan

Subsektor	Stimulus Kebijakan	Penjelasan
Perbankan	Restrukturisasi Kredit	Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit/ pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak COVID-19, termasuk debitur UMKM, sesuai peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara (1) penurunan suku bunga, (2) perpanjangan jangka waktu, (3) pengurangan tunggakan pokok (4) pengurangan tunggakan bunga, (5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan/atau (6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara. Otoritas Jasa Keuangan memutuskan untuk memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit perbankan, yang semula hingga Maret 2021, diubah menjadi Maret 2022 (OJK, November 2020).
	Penetapan Kualitas Aset	1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar; 2. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya Peraturan OJK (POJK). Restrukturisasi dapat diterapkan tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
	Stimulus pada KUR	Stimulus KUR untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: 1. Stimulus berupa penundaan angsuran pokok dan bunga semua skema selama 6 bulan untuk KUR yang terkena dampak COVID-19; 2. Beban akibat penundaan bunga dan pokok KUR selama 6 bulan menjadi tanggungan Pemerintah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,1 triliun; dan 3. Penundaan pembayaran akan diikuti dengan relaksasi ketentuan KUR sejalan ketentuan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
	Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.22/ 4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus *Corona*, berlaku pada 1 April 2020.	Insentif diberikan bagi Bank yang melakukan penyediaan dana untuk: (1) kegiatan ekspor, (2) kegiatan impor, (3) kegiatan UMKM, dan (4) kegiatan ekonomi pada sektor prioritas lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia. Bentuk insentif yang diberikan berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0,5 persen (50bps).

SK No 054766 A

Subsektor	Stimulus Kebijakan	Penjelasan
	Peluncuran penjaminan kredit modal kerja UMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	Pemerintah memberikan berbagai dukungan kepada UMKM, salah satunya dalam bentuk pemberian jaminan kredit modal kerja bagi UMKM. Kebijakan kepada UMKM ini diharapkan dapat meningkatkan minat perbankan dalam menyalurkan pinjaman.
	Subsidi Bunga	Pemerintah telah menerbitkan Program PEN dalam menangani dampak pandemi COVID-19 yang di dalamnya termasuk penyediaan subsidi bunga bagi debitur lembaga jasa keuangan yang memenuhi kriteria. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur kredit/pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur.
	Penempatan Dana	Sebagai bagian dari program PEN, pemerintah menempatkan sejumlah dana pada perbankan sebagai dukungan likuiditas bagi perbankan untuk restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja kepada UMKM dan Koperasi. Penempatan dana untuk program PEN ini bersumber dari APBN, yang berasal dari penerbitan SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana. Penempatan dana pada Bank Peserta akan dilaksanakan dalam bentuk simpanan deposito atau sertifikat deposito, dengan jangka waktu penempatan dana paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang. Tingkat bunga yang diberikan adalah paling rendah sebesar tingkat bunga penerbitan SBN yang dibeli oleh BI (setelah dikurangi *burden sharing*).
Industri Keuangan Nonbank (IKNB)	Restrukturisasi Pembiayaan	1. Penetapan kualitas pembiayaan bagi debitur/ nasabah yang terkena dampak COVID-19; dan 2. IKNB yang menyalurkan pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi terhadap debitur yang terkena dampak COVID-19.
	Relaksasi Industri Perasuransian	1. Dalam rangka perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi atau tingkat pendanaan dana pensiun dengan program manfaat pasti, aset yang berupa surat utang dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi; dan 2. Penundaan pelaksanaan ketentuan *life cycle fund* bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.
	Relaksasi pada Industri Pembiayaan	1. Stimulus berupa relaksasi *leasing* sepeda motor untuk ojek *online*, berupa pelonggaran ketentuan perhitungan kolektabilitas atau klasifikasi keadaan pembayaran kredit sepeda motor (terutama untuk ojek *online*) selama 1 tahun; dan 2. Perusahaan *leasing* nonbank juga dihimbau untuk tidak menggunakan *debt collector* dalam penagihan kredit.

Subsektor	Stimulus Kebijakan	Penjelasan
Pasar Modal	Stimulus Pasar Modal	1. Pembelian kembali (*buyback*) saham oleh emiten atau perusahaan publik dalam kondisi pasar berfluktuasi secara signifikan; dan 2. Pengaturan Mekanisme Perdagangan Saham di Pasar Modal: a. Pelaksanaan pembekuan sementara perdagangan saham (*trading halt*) selama 30 menit dalam hal IHSG mengalami penurunan hingga lebih dari 5 persen; b. Pelarangan transaksi *short selling* (penjualan saham tanpa memiliki saham perusahaan yang bersangkutan terlebih dahulu) bagi semua anggota bursa, sejak 2 Maret 2020 hingga batas waktu yang ditetapkan OJK; c. Penyesuaian atas nilai *haircut* (persentase tertentu dari suatu saham sebagai pengurang nilai pasar wajar saham) dan perhitungan risiko dalam rangka stimulus pasar; d. Perubahan batasan penolakan secara otomatis *(Auto Rejection*) dan penyesuaian mekanisme *Pra Opening* (proses pembentukan harga pada sesi awal waktu perdagangan saham)*;* dan 3. Relaksasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sumber: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, November 2020

Dampak terhadap Lingkungan

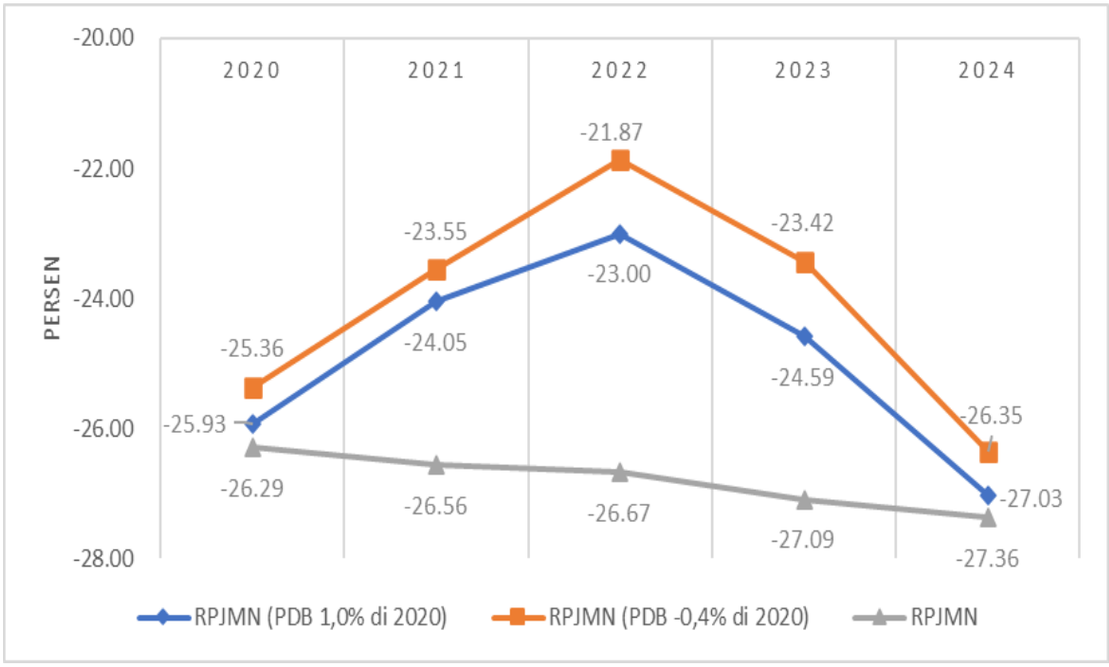
Penyebaran COVID-19 diperkirakan menyebabkan perubahan target penurunan emisi GRK dari 26,29 persen menjadi pada kisaran 25,36–25,93 persen pada tahun 2020.

Di satu sisi, penyebaran COVID-19 berdampak signifikan terhadap aktivitas sosial-ekonomi, ditandai dengan menurunnya utilisasi kapasitas pada sektor industri dan jasa, serta sektor lainnya yang terkait dengan lahan. Penurunan aktivitas ekonomi tersebut diperkirakan berdampak positif pada penurunan tingkat emisi GRK. Dengan adanya perubahan pada aktivitas ekonomi tersebut dan juga perubahan pada kebijakan pembangunan rendah karbon menyebabkan proyeksi total emisi GRK mengalami penurunan dari 1.414.435 ton CO_2 menjadi 1.355.349–1.329.393 ton CO_2 pada tahun 2020. Di samping itu, perubahan tersebut juga menyebabkan proyeksi *baseline* emisi GRK di tahun 2020 mengalami penurunan, dari 1.918.819 ton CO_2 menjadi 1.829.783 ton CO_2.

Di sisi yang lain, COVID-19 berimplikasi negatif pada besaran anggaran untuk implementasi aksi mitigasi serta program dan kegiatan pembangunan rendah karbon. Aksi pembangunan rendah karbon seperti reforestasi, pencegahan deforestasi, peningkatan kapasitas Energi Baru Terbarukan (EBT) dan efisiensi energi pada tahun 2020 diperkirakan tidak dapat berjalan optimal. Kondisi tersebut akan berdampak negatif pada upaya penurunan emisi GRK pada tahun 2020 dengan *magnitude* yang lebih sedikit lebih besar dari penurunan emisi GRK akibat penurunan aktivitas sosial-ekonomi sebagai

dampak dari penyebaran COVID-19. Hal tersebut menyebabkan perkiraan penurunan emisi GRK di tahun 2020 sedikit di bawah target awal.

Gambar 2.20
Proyeksi Penurunan Emisi GRK



Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Bappenas, Juni 2020

Dampak dari tidak terlaksananya aksi pembangunan karbon pada tahun 2020, diperkirakan akan dirasakan di tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut terjadi karena tidak semua aksi pembangunan rendah tersebut berimplikasi langsung pada penurunan emisi tahun 2020. Terdapat aksi yang baru berdampak pada penurunan emisi setelah beberapa tahun kemudian, seperti restorasi gambut dan reforestasi.

2.3.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2021

Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam pada tahun 2020, tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait.

2.3.2.1 Tantangan dan Risiko Ekonomi Global dan Domestik

Risiko terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2021 adalah ketidakpastian penyelesaian dan dampak pandemi COVID-19, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional.

Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 akan menjadi lebih berat dan berpotensi membentuk pola huruf L (tidak pulih) pada kasus terburuk. Namun jika pandemi COVID-19 dapat ditangani pada tahun 2020, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan tahun 2021 berpotensi tumbuh tinggi.

Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBP SDA Nonmigas. Selanjutnya, tantangan dari sisi belanja negara antara lain (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional. Sementara itu, dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.

Tantangan lain yang harus diantisipasi berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pascapandemi COVID-19. Adapun beberapa perubahan yang diidentifikasi antara lain (1) perubahan bentuk rantai pasok global, (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi, (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat, dan (4) percepatan tranformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pascapandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pascapandemi COVID-19.

2.3.2.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2021

Sasaran Ekonomi Makro

Upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,0 persen pada tahun 2021 (Tabel 2.9). Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, *Gross National Income* (GNI) per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi US$4.190–4.330 per kapita pada tahun 2021 tetap masuk ke dalam kategori *Upper-Middle Income Countries*.

Tabel 2.9

Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2021

Uraian	2019	2020[a] *Outlook*	2021[b]	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,0	(2,0)	5,4–5,7	5,0
Laju inflasi, IHK (% yoy): Akhir Periode	2,6	1,5	3,0	3,0
Neraca Pembayaran				
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%, yoy)[c]	(5,1)	(4,4)	6,3	(6,0)–(7,9)
Cadangan Devisa (US$ milar)	129,2	136,8	133,2	132,4–133,6
- dalam bulan impor	7,3	10,0	7,0	9,3–8,7
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(2,7)	(1,1)	(2,3)	(1,7)–(2,0)
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,8	8,0	10,1–10,7	8,2
Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,5)	(4,6)	0,1–0,0	(3,6)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,2)	(6,6)	(1,6)–(1,7)	(5,7)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	30,2	39,0	29,4–30,0	41,4
Peringkat Indonesia pada EODB				
Peringkat Indonesia pada EODB	73	Menuju 40	Menuju 40	Menuju 40
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	4,4	(4,8)	5,8 –6,2	6,4
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	809,6	817,2	991,3	858,5
Target Pembangunan				73,22
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2	9,7 –10,2	8,0 –8,5	9,2 –9,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3	7,07	4,8 – 5,0	7,7-9,1[d]
Rasio Gini (nilai)	0,380	0,379 –0,381	0,375–0,379	0,377–0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71,92	71,99	73,26	72,78–72,95
Indikator Pembangunan				
Nilai Tukar Petani (NTP)	103,21	103,0	102,0-104,0	102,0-104,0
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	113,73[e]	102,0[f]	103,0	102,0-104,0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, BPS, Kementerian Keuangan, 2020

Keterangan: a) Berdasarkan APBN 2020, RPJMN 2020-2024, *Outlook* Bappenas per November 2020;
b) RPJMN 2020-2024, Perkiraan Bappenas dan APBN 2021;
c) Realisasi 2019 berdasarkan angka BPS;
d) Berdasarkan realisasi 2020, sasaran tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan berada pada kisaran 5,9–6,5%;
e) Menggunakan *baseline* 2012 = 100
f) Menggunakan *baseline* 2018 = 100

Stabilitas makroekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat sasaran 3,0 persen dan nilai tukar rupiah pada kisaran Rp14.600,00 per US$.

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2021 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 9,2–9,7 persen dan 7,7–9,1 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,377–0,379 pada tahun 2021. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 72,78–72,95 yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga pada nilai 102-104, utamanya melalui kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Arah Kebijakan

Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi. Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2021 akan mencakup

1. Penguatan Sektor Kesehatan

   Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas *health security* terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan normal.

2. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

   Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah. Langkah ini dilakukan utamanya untuk meningkatkan akurasi data sasaran penerima program, meminimalisasi *exclusion* dan *inclusion error*, terutama kelompok miskin dan rentan baru pascapandemi COVID-19. Selain itu, integrasi program bantuan sosial juga dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan melalui peningkatan ketercukupan manfaat yang diterima penerima manfaat.

3. Pembangunan Infrastruktur

   Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan Industri (KI) dan pariwisata.

4. Pembangunan SDM

   Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

5. Akselerasi Investasi

   Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakan ekonomi melalui percepatan integrasi *Online Single Submission* (OSS), meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, melakukan *aftercare service* untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan *positive-list* investasi.

6. Pemulihan Industri dan Perdagangan

   Optimalisasi *competitive advantage* sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi *Preferential Trade Agreement* (PTA) *Free Trade Agreement* (FTA) *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.

7. Pembangunan Pariwisata

   Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata dalam negeri dan secara bertahap ke originasi yang sudah pulih; peningkatan *event* olah raga, seni budaya, dan *meeting, incentive, convention, and exhibition* (MICE); penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

8. Pendalaman Sektor Keuangan

   Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan.

Secara lebih rinci strategi pemulihan tersebut akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut.

Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi

Dari sisi PDB pengeluaran (Tabel 2.10), pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh akselerasi investasi yang diperkirakan tumbuh 6,4 persen pada tahun 2021. Kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan investasi pada tahun 2021 antara lain (1) penyelesaian Rancangan UU terkait Ketentuan dan Fasilitasi Perpajakan; (2) pemberian fasilitas kemudahan akses pinjaman perbankan; (3) pemberian fasilitasi investasi (seperti percepatan perizinan berusaha di K/L/D melalui OSS yang sudah terintegrasi dengan K/L/D, (4) pemberian kemudahan untuk investasi berorientasi ekspor, serta (5) memberikan kemudahan dalam pemenuhan bahan baku dalam negeri dan ekspor. Kebijakan investasi juga akan diperkuat dengan pengawalan realisasi proyek-proyek besar di infrastruktur industri dan pariwisata, yang didukung upaya *debottlenecking* permasalahan operasional dan *aftercare service* untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain. Selain dari pihak swasta, peningkatan investasi juga harus dilakukan pemerintah termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur.

Terkait BUMN, pengembangan BUMN akan difokuskan pada pengelolaan BUMN yang profesional yang mengutamakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik antara lain dengan standardisasi proses bisnis, perbaikan proses perencanaan, pelaporan dan aksi korporasi,

optimalisasi *value* BUMN, serta melakukan *leverage* potensi bisnis BUMN dan penguatan manajemen risiko atas setiap pengambilan keputusan kebijakan.

Tabel 2.10

Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2021 (Persen)

Uraian	RPJMN*)	Revisi Sasaran**)
Pertumbuhan PDB	**5,4–5,7**	**5,0**
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,2–5,4	4,7
Konsumsi Pemerintah	4,5–4,6	6,2
Investasi (PMTB)	5,8–6,2	6,4
Ekspor Barang dan Jasa	3,9–4,2	4,5
Impor Barang dan Jasa	4,4–4,6	5,9

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020
Keterangan: *)RPJMN 2020-2024; **) Nota Keuangan dan RAPBN TA 2021, Agustus 2020

Selain investasi, ekspor barang dan jasa diharapkan kembali meningkat, tumbuh 4,5 persen pada tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh pulihnya aktivitas ekonomi dunia yang akan meningkatkan permintaan ekspor Indonesia. Selain itu upaya pembangunan pariwisata diharapkan dapat menarik kembali wisatawan mancanegara, meski belum sepenuhnya normal karena kekhawatiran masyarakat akan kemungkinan penyebaran kembali COVID-19 dapat menyebabkan sektor ini pulih lebih lamban dibandingkan sektor yang lain.

Dalam mendorong ekspor, kebijakan perdagangan luar negeri pada tahun 2021 akan diarahkan pada berbagai upaya untuk percepatan pemulihan kinerja ekspor pascapandemi, di antaranya melalui (1) fasilitasi perluasan pasar melalui diplomasi ekonomi yang efektif; (2) perluasan akses pendanaan ekspor; (3) perbaikan kebijakan dan prosedur ekspor-impor; (4) peningkatan peran perwakilan dagang di luar negeri; serta (5) optimalisasi pemanfaatan PTA/FTA/CEPA.

Konsumsi masyarakat juga diperkirakan mengalami peningkatan 4,7 persen, didorong oleh tingkat inflasi yang rendah, perluasan bantuan sosial, dan alokasi kartu prakerja. Sementara itu, konsumsi pemerintah diharapkan tetap memberikan dorongan terhadap ekonomi, tumbuh 6,2 persen yang didorong oleh relaksasi aturan batas defisit anggaran yang masih berlaku pada tahun 2021. Sementara itu, impor barang dan jasa diperkirakan akan meningkat, tumbuh 5,9 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang menguat.

Dari sisi lapangan usaha, pencapaian pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh sektor industri, perdagangan, dan penyediaan akomodasi dan makan minum (Tabel 2.11). Sektor-sektor yang terkena dampak negatif pada tahun 2020 ini diharapkan dapat pulih cepat sejalan dengan kembali normalnya kondisi global dan domestik sehingga mampu menggerakkan roda industri dan mendatangkan wisatawan.

Tabel 2.11

Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021 (Persen)

Uraian	RPJMN*)	Revisi Sasaran**)
Pertumbuhan PDB	**5,4–5,7**	**5,0**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,7–3,8	3,6
Pertambangan dan Penggalian	1,9–1,9	1,0
Industri Pengolahan	5,2–5,5	5,0
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	5,2–5,2	5,3
Pengadaan Air	4,3–4,4	5,0
Konstruksi	5,8–6,1	5,9
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,6–6,0	4,8
Transportasi dan Pergudangan	7,1–7,4	6,3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,1–6,3	6,1
Informasi dan Komunikasi	7,7–8,8	9,2
Jasa Keuangan	6,4–6,9	6,2
Real Estate	5,0–5,0	4,0
Jasa Perusahaan	8,4–8,4	7,2
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,8–5,1	4,5
Jasa Pendidikan	5,2–5,2	4,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,6–8,0	5,2
Jasa Lainnya	9,3–9,5	8,0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Keterangan: *) RPJMN 2020-2024; **) Nota Keuangan dan RAPBN TA 2021, Agustus 2020

Beberapa faktor yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan industri pengolahan, yaitu (1) pemulihan daya beli masyarakat dan pemerintah pascapandemi COVID-19; (2) pemulihan ekonomi global yang menunjang ekspor produk industri; dan (3) realisasi investasi di beberapa subsektor yang sudah terjadwalkan seperti pada sektor kimia dan logam dasar. Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi sektor industri pengolahan di masa pemulihan COVID-19 pada tahun 2021, akan berfokus pada tiga tujuan utama, yaitu (1) membantu industri dalam memulihkan proses produksi untuk memenuhi permintaan konsumen; (2) membantu proses *re-hiring/re-training* tenaga kerja; dan (3) membuka dan mempermudah akses atas impor bahan baku dan pasar ekspor.

Di sisi sektor perdagangan pemulihan akan didorong melalui (1) peningkatan permintaan baik dalam negeri maupun luar negeri, di antaranya adalah peningkatan standar produk, penguatan daya beli masyarakat, peningkatan fasilitasi ekspor, dan akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman, dan farmasi; (2) peningkatan efisiensi logistik; serta (3) penguatan kapasitas pelaku usaha perdagangan salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pertumbuhan sektor transportasi

SK No 054552 A

didukung oleh peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan utamanya ke daerah tujuan wisata.

Percepatan pertumbuhan di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dapat dicapai melalui akselerasi sektor pariwisata utamanya pada (1) pengembangan destinasi pariwisata melalui peningkatan infrastruktur amenitas, aksesibilitas, dan atraksi di destinasi pariwisata serta pengawalan investasi pariwisata skala besar; (2) peningkatan SDM pariwisata melalui pemberian insentif rekrutmen, pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja serta kerja sama pelatihan/magang bagi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif; (3) pengaturan cuti dan libur bersama untuk mendukung peningkatan wisatawan domestik; (4) pemasaran melalui promosi di originasi yang dekat dan yang sudah lebih dahulu pulih, penyelenggaraan *event* internasional: seni, MICE, dan olahraga, termasuk peningkatan *bidding* penyelenggaraan MICE internasional di Indonesia, pemberian insentif bagi *trip* pengenalan/*famtrip* yang dilaksanakan di Indonesia, promosi melalui *influencer*; (5) peningkatan kapasitas usaha pariwisata melalui peningkatan insentif bagi pelaku usaha pariwisata, maskapai, biro dan agen perjalanan, promosi, peningkatan kerja sama dengan maskapai untuk pemulihan dan penambahan jadwal penerbangan; dan (6) peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan pelaku kreatif baik ke perbankan maupun ke nonperbankan.

Selain ketiga sektor di atas, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan akan mengalami akselerasi pertumbuhan. Peningkatan sektor ini akan didorong oleh pulihnya permintaan domestik dan global pasca pandemi COVID-19 dan upaya peningkatan produktivitas lahan serta penguatan nilai tambah produk.

Dari sisi kewilayahan, pemulihan ekonomi Wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi akan didorong oleh adanya peningkatan harga komoditas khususnya harga batu bara, CPO, dan, nikel. Sementara itu, perbaikan pasokan bahan baku dan peningkatan efisiensi logistik akan mendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Arah kebijakan pertumbuhan ekonomi wilayah pada tahun 2021 diarahkan pada peningkatan peranan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sasaran pertumbuhan ekonomi wilayah tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12

Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2021 (Persen)

Wilayah	RPJMN*	Revisi Sasaran**
Papua	6,0	2,6 – 5,8
Maluku	6,9	5,2 – 6,2
Sulawesi	7,2	5,4 – 7,0
Kalimantan	6,1	3,6 – 5,7
Nusa Tenggara	5,6	3,5 – 5,2
Jawa-Bali	5,8	4,8 – 5,5
Sumatera	5,6	3,9 – 5,1

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020
Keterangan: *) RPJMN 2020-2024; **) Perkiraan Bappenas, Juli 2020

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Sumatera tahun 2021 diperkirakan mencapai 3,9–5,1 persen, didorong oleh keberlanjutan program biodiesel melalui implementasi B30 serta perbaikan kinerja sektor industri pengolahan dan perdagangan di provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Lampung. Peningkatan investasi pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang di Provinsi Kepulauan Riau juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Sementara itu, kinerja sektor pertambangan diperkirakan akan relatif stabil karena adanya penurunan produksi tambang migas di Riau dan peningkatan produksi batu bara di provinsi Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa-Bali tahun 2021 diperkirakan mencapai 4,8–5,5 persen. Pemulihan perekonomian Wilayah Jawa-Bali dari sisi pengeluaran akan ditopang oleh konsumsi dan investasi. Sementara dari sisi lapangan usaha, pemulihan ekonomi akan ditopang oleh sektor industri pengolahan dan jasa-jasa. Terjadinya perubahan stuktur ekonomi di Wilayah Jawa-Bali menjadikan sektor jasa sebagai salah satu sumber pertumbuhan di wilayah ini. Untuk sektor jasa, pemulihan ekonomi ditopang oleh pendalaman dan penguatan struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan serta pembangunan pariwisata, khususnya di Bali, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta.

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Nusa Tenggara tahun 2021 diperkirakan mencapai 3,5–5,2 persen, di dorong oleh pemulihan daya beli masyarakat dan konsumsi seiring dengan pemulihan sektor pariwisata dan pertambangan. Peningkatan produksi tembaga tahun 2021 dan peningkatan kualitas *stockpile* diperkirakan akan mampu mendorong pertumbuhan di sektor pertambangan.

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan tahun 2021 diperkirakan mencapai 3,6–5,7 persen, ditopang oleh pemulihan daya beli masyarakat dan ekspor seiring dengan pengembangan KI Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat. Struktur perekonomian Wilayah Kalimantan yang bergantung pada pertambangan seperti batu bara, migas, serta perkebunan sawit membuat perekonomian Wilayah Kalimantan bergantung pada fluktuasi harga komoditas dan permintaan global.

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Sulawesi tahun 2021 diperkirakan mencapai 5,4–7,0 persen, didorong oleh pemulihan daya beli masyarakat, investasi, dan ekspor. Dua KI strategis, yaitu KI Konawe yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan KEK Palu di Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan mampu memberikan dorongan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemulihan kondisi global dan peningkatan harga komoditas nikel seiring dengan pemenuhan target hilirisasi produk hasil tambang diharapkan mampu meningkatkan produksi nikel di Wilayah Sulawesi. Pemulihan ekonomi Cina juga diperkirakan akan menyumbang peningkatan pada investasi.

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Maluku tahun 2021 diperkirakan mencapai 5,2–6,2 persen, ditopang oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan seiring dengan pemulihan kondisi domestik maupun global pascapandemi. Pengembangan KI Teluk Weda di Provinsi Maluku Utara yang memasuki fase konstruksi diharapkan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah Maluku tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2021 diperkirakan mencapai 2,6–5,8 persen, didorong oleh peningkatan ekspor seiring dengan membaiknya kinerja pertambangan. Perbaikan metode pertambangan seiring dengan pulihnya perekonomian global turut mendorong peningkatan kinerja sektor pertambangan.

SK No 054554 A

Stabilitas Eksternal

Pada tahun 2021, perekonomian global diproyeksikan akan membaik seiring dengan berakhirnya pandemi COVID-19. Hal ini berdampak terhadap perekonomian Indonesia terutama dari sektor perdagangan seiring dengan membaiknya perekonomian negara mitra dagang utama seperti China. Dengan demikian, industri manufaktur akan kembali berjalan dan menjadi penyumbang devisa negara melalui kegiatan peningkatan ekspor. Seiring dengan pulihnya industri manufaktur, modal asing akan kembali masuk ke Indonesia yang juga kemudian akan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, sektor pariwisata akan mengalami peningkatan cukup signifikan didorong peningkatan wisatawan mancanegara seiring dengan berakhirnya pandemi COVID-19.

Secara umum, Indonesia akan mengalami stabilitas eksternal yang baik pada tahun 2021. Defisit transaksi berjalan pada tahun 2021 diperkirakan pada sekitar 1,7–2,0 persen dari PDB. Sementara, cadangan devisa diperkirakan masih akan meningkat sekitar US$132,4–133,6 miliar. Peningkatan cadangan devisa didorong oleh surplusnya neraca pembayaran US$3,0–2,7 miliar seiring dengan peningkatan surplus neraca modal dan finansial yang meningkat pada kisaran US$23,1–26,7 miliar. Peningkatan surplus tersebut didorong oleh peningkatan arus investasi langsung pada kisaran US$18,6–19,7 miliar untuk pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 (Tabel 2.13).

Tabel 2.13

Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2021 (Miliar US$)

Uraian	RPJMN*	Sasaran**
Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan	**3,1**	**3,0–2,7**
Neraca Transaksi Berjalan **(% PDB)**	**(30,3)** **(2,3)**	**(20,1)–(24,0)** **(1,7)–(2,0)**
Barang	1,0	12,8–10,8
Jasa-jasa	(6,3)	(6,6)–(6,1)
Pendapatan Primer	(32,8)	(34,0)–(37,0)
Pendapatan Sekunder	7,8	7,8–8,4
Neraca Transaksi Modal dan Finansial **(% PDB)**	**33,4**	**23,1–26,7** **2,0–2,2**
Investasi Langsung	21,5	18,6–19,7
Investasi Portofolio	18,9	9,4–12,4
Investasi Lainnya	(7,1)	(5,0)–(5,5)
Posisi Cadangan Devisa - **Dalam bulan impor**	**133,2** **7,0**	**132,4–133,6** **9,3–8,7**

Sumber: Bank Indonesia, 2020
Keterangan: *) RPJMN 2020-2024; **) Perkiraan Bappenas, Juli 2020

Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Konsolidatif

Postur makro fiskal 2021 dilandaskan pada *baseline* proyeksi 2020 yang menurun akibat perlambatan ekonomi, penurunan harga komoditas, dan dampak COVID-19. Seiring dengan proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, kebijakan fiskal tahun 2021

SK No 054555 A

dirancang akan ekspansif, konsolidatif, dan mendukung transisi sosial ekonomi menuju kondisi normal. Selanjutnya, dirancang postur makro fiskal tahun 2021 sebagai berikut.

1. Pendapatan Negara dan Hibah

   Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 9,9 persen PDB, yang terdiri dari penerimaan perpajakan yang ditargetkan mencapai 8,2 persen PDB dan PNBP yang ditargetkan mencapai 1,7 persen PDB. Target tersebut dicapai melalui kebijakan pendapatan negara yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara yang meliputi:

   a. Reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, mencakup (1) penyempurnaan peraturan perpajakan dalam rangka meningkatkan aktivitas ekonomi, termasuk perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah dijalankan pada tahun 2020; (2) optimalisasi penerimaan perpajakan yang berdasarkan perbaikan aktivitas ekonomi terutama Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai; (3) perluasan basis pajak baru, termasuk ekstensifikasi barang kena cukai; (4) penyempurnaan teknologi dan informasi perpajakan; (5) peningkatan kepatuhan dan pengawasan perpajakan; (6) relaksasi prosedur kepabeanan dan pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional; dan (7) pemberlakuan insentif fiskal yang lebih tepat, terukur, dan berasaskan pada keadilan ekonomi.

   b. Penguatan PNBP yang mencakup (1) perbaikan tata kelola penerimaan sumber daya alam; (2) peningkatan kualitas layanan dan inovasi penerimaan nonmigas; dan (3) penyempurnaan kebijakan serta optimalisasi aset dengan penerapan *Highest and Best Use (HBU).*

2. Belanja Negara

   Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dan sosial pascapandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dan pemerataan pada tahun 2021, belanja negara diarahkan agar fokus dan efektif dalam mendorong *counter-cyclical* perekonomian dengan kebijakan fiskal ekspansif. Belanja negara ditargetkan mencapai 15,6 persen PDB. Belanja pemerintah pusat ditargetkan mencapai 11,1 persen PDB dan TKDD ditargetkan mencapai 4,5 persen PDB.

   Upaya tersebut dilaksanakan melalui (1) pelaksanaan redesain sistem perencanaan dan penganggaran, dengan belanja difokuskan pada Program Prioritas dan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) berbasis pada hasil, serta efisiensi belanja kebutuhan dasar dan antisipatif; (2) fokus belanja untuk mendukung prioritas pembangunan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi (kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan, pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM); (3) optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan *delivery* layanan kepada masyarakat; (4) peningkatan efektivitas program perlindungan sosial melalui data terpadu; (5) sinergi TKDD dan Belanja K/L dalam pembangunan *human capital* (pendidikan dan kesehatan); (6) redesain pengelolaan TKDD, terutama Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) dengan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas; dan (7) reformasi APBD melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan penyusunan Bagan Akun Standar (BAS).

SK No 054556 A

3. Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Dengan kondisi penerimaan dan belanja tersebut dan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal, defisit anggaran diupayakan menurun dari 6,6 persen PDB pada tahun 2020 menjadi 5,7 persen PDB pada tahun 2021. Keseimbangan primer juga diarahkan membaik dari -4,6 persen PDB pada tahun 2020 menjadi -3,6 persen PDB pada tahun 2021. Dengan besaran defisit anggaran dan keseimbangan primer yang lebih terjaga, pembiayaan dijaga pada pembiayaan utang yang terkendali. Rasio utang diperkirakan sebesar 41,4 persen PDB. Rincian perkiraan postur makro fiskal terdapat dalam Tabel 2.14 berikut.

Tabel 2.14

Sasaran Fiskal Tahun 2021 (Persen)

Uraian	RPJMN*	Sasaran**
Pendapatan Negara dan Hibah	12,5–13,4	9,9
Penerimaan Perpajakan	10,1–10,7	8,2
PNBP	2,3–2,6	1,7
Belanja Negara	14,2–15,1	15,6
Belanja Pemerintah Pusat	9,2–10,0	11,1
TKDD	5,0–5,2	4,5
Keseimbangan Primer	0,1–0,0	(3,6)
Surplus / (Defisit)	(1,6)–(1,7)	(5,7)
Rasio Utang	29,4–30,0	41,4

Sumber: Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, 2020
Keterangan: *) RPJMN 2020-2024; **) APBN 2021

Stabilitas Moneter

Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2021 diarahkan pada upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi yang mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Kebijakan pengendalian inflasi tersebut berfokus pada (1) menjaga ketersediaan pasokan khususnya pada sepuluh komoditas pangan strategis serta barang-barang kebutuhan utama sistem kesehatan nasional yang mencakup alat, perangkat, dan obat-obatan; (2) meningkatkan efisiensi rantai pasokan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; (3) memperkuat infrastruktur perdagangan untuk mengurangi kesenjangan harga; (4) meningkatkan sinergi komunikasi pusat-daerah untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat; dan (5) mewujudkan basis data statistik pangan yang akurat, tepat waktu, dan relevan.

Selanjutnya, kebijakan nilai tukar rupiah tahun 2021 diarahkan pada bauran kebijakan moneter yang selaras dengan kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Kebijakan moneter diarahkan pada operasi moneter yang dapat memastikan bekerjanya mekanisme pasar dan ketersediaan likuiditas yang memadai, baik di pasar uang maupun pasar valas. Strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dilakukan dengan melanjutkan penerapan kebijakan, sebagai berikut (1) meningkatkan stabilisasi pasar valuta asing melalui DNDF dan pasar spot serta pembelian SBN dari pasar sekunder, (2) menjaga tingkat inflasi sesuai

SK No 054557 A

sasaran; (3) menetapkan kebijakan suku bunga acuan BI yang akomodatif dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi; (4) memperbaiki defisit transaksi berjalan; (5) menjaga kecukupan likuiditas di pasar keuangan domestik; dan (6) mempercepat pendalaman pasar valuta asing di pasar keuangan domestik.

Kebijakan moneter bersinergi dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui percepatan pemulihan UMKM dan korporasi. Koordinasi yang sangat erat antara pemerintah, BI, dan OJK terus ditingkatkan untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan terjaga.

Stabilitas Sistem Keuangan

Sektor keuangan diperkirakan akan kembali menguat, seiring dengan pemulihan ekonomi pascaberakhirnya tekanan COVID-19, didukung oleh berbagai stimulus kebijakan moneter dan sektor keuangan yang akomodatif. Risiko ketidakpastian mereda, mendorong kembali pulihnya ekspektasi terhadap pasar keuangan. Namun demikian, pada tahun 2021 sektor keuangan masih dihadapkan pada kemungkinan pengetatan likuiditas dunia, setelah sebelumnya berbagai negara melakukan pelonggaran kebijakan.

Sebagai upaya mendorong pemulihan perekonomian Indonesia di tengah kemungkinan pengetatan likuiditas dunia, peningkatan peran sektor keuangan dilakukan melalui pendalaman sektor keuangan, penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri jasa keuangan, dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi, serta tetap menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan antara lain dari tindak pidana pencucian uang.

Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkesinambungan

Tingkat Pengangguran Terbuka

Seiring dengan pemulihan kinerja perekonomian Indonesia, TPT diperkirakan dapat menurun—meskipun belum bisa kembali ke tingkat sebelumnya—menjadi pada kisaran 7,7-9,1 persen. Penciptaan kesempatan kerja baru ditargetkan mencapai 2,3–2,8 juta orang. Berdasarkan angka realisasi tahun 2020, sasaran tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan dapat lebih rendah, yaitu berada pada kisaran 5,9–6,5 persen dengan penciptaan kesempatan kerja 2,3–2,9 juta orang. Namun, hal tersebut akan sangat bergantung pada keberhasilan upaya pemulihan ekonomi, penumbuhan investasi padat pekerja, penguatan konsumsi, serta pengembangan UMKM. Penciptaan kesempatan kerja tersebut dibarengi dengan upaya strategis untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja, terutama pekerja berpenghasilan rendah dan pekerja informal sebagai *lesson learned* pascapandemi.

Tingkat Kemiskinan

Dengan kondisi perekonomian dan inflasi yang berangsur membaik, tingkat kemiskinan diperkirakan berada di kisaran 9,2–9,7 persen. Perbaikan kondisi makro juga memberikan dampak yang luas sehingga lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan dapat kembali tercipta, iklim investasi terjaga, dan infrastruktur terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan dapat dikembangkan.

Selain didukung oleh pemulihan kondisi ekonomi, penurunan kemiskinan pada tahun 2021 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan

penduduk miskin pada tahun 2020 pascapandemi COVID-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui dua strategi, yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Strategi tersebut diterjemahkan dalam arah kebijakan tersebut mencakup (1) pengembangan integrasi dan digitalisasi bantuan sosial secara nontunai, antara lain (a) program sembako yang mengintegrasikan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), subsidi listrik, dan subsidi LPG, (b) integrasi data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), (c) penguatan desain pembayaran bantuan sosial nontunai yang mempermudah masyarakat miskin; (2) penguatan fungsi pendampingan dalam melaksanakan program bantuan sosial serta edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan, pendidikan, dan ekonomi; (3) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi; (4) penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif; (5) peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, khususnya anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia; (6) penguatan skema pendampingan, layanan terpadu, dan perbaikan penargetan program penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang secara bertahap diperluas hingga 60 persen di tahun 2021 dan menuju Registrasi Sosial 100 persen tahun 2024; serta (7) pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan, antara lain melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga, pendampingan usaha dan peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro, akses permodalan usaha dengan bunga rendah, keperantaraan usaha, kemitraan, dampak sosial, serta penataan penguasaan dan penggunaan lahan melalui pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial.

Rasio Gini

Pada tahun 2021, terdapat penyesuaian target rasio gini menjadi 0,377-0,379. Kebijakan untuk menjaga rasio gini agar dapat memenuhi target, terus diarahkan pada kelompok masyarakat pendapatan menengah bawah dan masyarakat pendapatan tinggi. Pemerintah akan melakukan serangkaian strategi, melalui penyempurnaan dan sinergitas (DTKS) dengan data kependudukan untuk intervensi kebijakan afirmasi kelompok 40 persen terbawah yang terintegrasi dan menyeluruh, pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat, penyediaan pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja untuk pengembangan kesempatan kerja yang baik dan produktivitas tinggi, serta kebijakan fiskal yang memihak pada redistribusi yang merata. Dalam pengurangan kesenjangan wilayah, pemerintah tetap memperhatikan keberlanjutan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia ditargetkan mencapai 72,78–72,95 pada tahun 2021. Upaya untuk terus meningkatkan IPM dilakukan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan angka kematian bayi dan *stunting*, serta reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan upaya promotif dan preventif, penguatan ketahanan kesehatan, dan penguatan kapasitas sistem kesehatan, peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan

SK No 054559 A

kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai media pembelajaran, afirmasi akses di semua jenjang pendidikan, dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, dengan perhatian khusus pada kelompok masyarakat berstatus ekonomi lemah; dan upaya di bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat dengan kemiskinan kronis melalui program-program bantuan sosial dan subsidi secara tepat sasaran dan tepat waktu serta pengembangan UMKM pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah agar tidak kembali hidup di bawah garis kemiskinan. Pendapatan per kapita diperkirakan akan pulih kembali pada tahun 2021 setelah pandemi COVID-19. Upaya pemerintah dengan memberikan jaring pengaman sosial melalui realokasi anggaran bagi pekerja rentan dapat meminimalisasi dampak dan mempercepat pemulihan pasar tenaga kerja pada tahun 2021.

Lingkungan: Sasaran GRK

Kegiatan ekonomi pada tahun 2021 diperkirakan sudah mulai kembali berjalan normal. Sebagai upaya mempercepat proses pemulihan kondisi ekonomi, maka program dan kegiatan pemerintah pada tahun 2021 masih difokuskan untuk menstimulasi dan menggerakan sosial-ekonomi. Dalam kondisi tersebut, kegiatan aksi pembangunan rendah karbon, seperti reforestasi, restorasi gambut, serta pengembangan EBT dan efisiensi energi, diperkirakan masih belum dapat berjalan optimal untuk memberikan kontribusi signifikan dalam mengejar target penurunan emisi GRK.

Dalam situasi yang tidak optimal tersebut, aksi pembangunan rendah karbon diarahkan pada program dan kegiatan yang dapat memberikan dampak terhadap penurunan emisi GRK secara signifikan. Berkaca pada hasil analisis dan proyeksi, sektor lahan dan energi memiliki kontribusi yang besar dalam upaya menurunkan emisi GRK. Untuk itu, program dan kegiatan pembangunan rendah karbon pada tahun 2021 difokuskan pada sektor lahan dan energi. Dengan fokus tersebut, emisi GRK ditargetkan dapat turun pada kisaran 23,55–24,05 persen terhadap *baseline* pada tahun 2021.

2.3.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan

2.3.3.1 Kebutuhan Investasi

Sektor keuangan masih dihadapkan pada upaya mendorong pemulihan perekonomian Indonesia di tengah tekanan kemungkinan pengetatan likuiditas dunia. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2021, kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar Rp5.817,3–Rp5.912,1 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, investasi pemerintah menyumbang sekitar 5,0–7,1 persen dari total kebutuhan investasi (Tabel 2.15).

Tabel 2.15

Kebutuhan Investasi Tahun 2021 (Persen)

Uraian	*Share*
a. Investasi Pemerintah	5,0–7,1
b. Investasi BUMN	4,9–8,1
c. Investasi Swasta	90,1–84,7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), Juli 2020

Selain dari pemerintah, belanja modal BUMN diharapkan juga dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan investasi tersebut. Dengan peningkatan tata kelola perusahaan dengan mendorong dilakukannya penguatan fungsi manajemen risiko dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), BUMN dapat tetap menjaga peran dan kontribusinya dalam perekonomian. Walaupun pertumbuhan dan kontribusi BUMN secara umum diperkirakan akan mengalami perlambatan seiring dengan perlambatan ekonomi, diharapkan BUMN dapat menyumbang investasi sekitar 4,9–8,1 persen dari kebutuhan investasi total.

Proporsi paling besar dari investasi dipenuhi dari investasi dunia swasta. Kebutuhan investasi selain Pemerintah dan BUMN akan dipenuhi oleh dunia swasta yaitu sekitar 90,1–84,7 persen dari total kebutuhan investasi.

2.3.3.2 Sumber Pembiayaan

Untuk memenuhi kebutuhan investasi pada tahun 2021, dibutuhkan sumber pembiayaan yang dapat diperoleh dari instrumen pembiayaan investasi seperti kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi, dana internal BUMN, serta dana internal masyarakat. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar 80,9–72,2 persen dari total pembiayaan investasi (Tabel 2.16).

Tabel 2.16

Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2021 (Persen)

Uraian	*Share*
Kredit Perbankan	3,3–5,5
Penerbitan Saham	0,8–0,9
Penerbitan Obligasi	11,8–16,0
Dana Internal BUMN	3,2–5,4
Dana Internal Masyarakat	80,9–72,2

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), Juli 2020

2.4 Strategi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali, dan meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah.

2.4.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah pada tahun 2021 bertujuan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, pengembangan wilayah akan dilakukan dengan strategi pertumbuhan atau transformasi sosial ekonomi wilayah dan

strategi pemerataan yang diperkuat dengan mitigasi bencana dan pengurangan risiko. Strategi pengembangan wilayah tersebut secara spasial ditunjukkan oleh koridor pertumbuhan, koridor pemerataan, dan sebaran lokus risiko bencana.

Transformasi sosial ekonomi wilayah dilakukan dengan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah yang didukung pengembangan sektor-sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan penataan kawasan perkotaan, penguatan konektivitas antarwilayah, serta peningkatan intensitas perdagangan antarwilayah. Fokus percepatan pertumbuhan wilayah adalah pengembangan kawasan strategis secara terpadu dan peningkatan investasi khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), dan kawasan perkotaan. Pengembangan kawasan strategis tersebut perlu didukung dengan Rencana Detail Tata Ruang yang membutuhkan ketersediaan peta dasar skala 1:5.000.

Pengembangan kawasan strategis di atas akan dilakukan dengan memberikan insentif fiskal dan nonfiskal yang disertai dengan penyediaan infrastruktur strategis di sekitar kawasan. Pengembangan kawasan perkotaan yang meliputi wilayah metropolitan (WM), kota baru, kota besar, kota sedang, kota kecil, dan kawasan perkotaan di dalam kabupaten akan diarahkan untuk mencegah *urban sprawl*, menjadi pusat pertumbuhan wilayah, dan pusat pelayanan bagi wilayah di sekitarnya, termasuk kawasan-kawasan strategis terdekat. Oleh karena itu, pembangunan perkotaan akan mengutamakan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan publik perkotaan, serta perluasan kerja sama antardaerah yang mencakup kota-kota satelit di sekeliling kota-kota utama dalam pengembangan transportasi massal, pengelolaan transportasi publik perkotaan, penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, pengolahan limbah dan persampahan yang aman, serta penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pemerataan antarwilayah dilakukan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat khususnya di kawasan dan daerah yang relatif tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Percepatan pemerataan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas kawasan 3T dan menghubungkan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah serta mengoptimalkan efektivitas kebijakan afirmatif di kawasan 3T. Fokus penanganan kawasan 3T adalah kawasan perdesaan, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan kepulauan.

Pengembangan wilayah yang didasarkan pada rencana tata ruang dan didukung oleh layanan pertanahan modern berbasis digital, dijabarkan ke dalam tujuh wilayah pembangunan berbasis pulau/kepulauan dengan memperhatikan karakter geografis, sosial, potensi keunggulan dan isu strategis wilayah, serta skala ekonomi pengembangan wilayah. Ketujuh wilayah pembangunan tersebut adalah Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Jawa-Bali, dan Wilayah Sumatera.

Perbedaan kondisi alam, sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur antarwilayah, menegaskan perbedaan strategi pertumbuhan, pemerataan, dan risiko bencana di setiap wilayah. Risiko tersebut tidak hanya berasal dari ancaman bencana alam seperti gempa atau erupsi gunung berapi, tetapi juga bencana nonalam seperti wabah atau pandemi, banjir, tanah longsor, kebakaran lahan, dan kegagalan teknologi. Pandemi COVID-19 yang

menyebar di seluruh wilayah menegaskan bahwa strategi pembangunan wilayah perlu memperhitungkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, kapasitas pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan, serta kecepatan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat.

Sasaran pengembangan wilayah tahun 2021 adalah pulihnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, meningkatnya laju pertumbuhan dan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap terjaganya prospek pertumbuhan di wilayah Wilayah Jawa-Bali, serta membaiknya pemerataan pembangunan antarwilayah. Dengan memperhitungkan penanganan bencana pandemi COVID-19 secara tuntas pada tahun 2020, maka tahun 2021 memberikan peluang bagi perekonomian wilayah untuk tumbuh lebih cepat (*rebound*) dan kembali ke jalur pertumbuhan naturalnya.

Dampak pandemi COVID-19 dirasakan daerah dalam penurunan volume produksi dan perdagangan sebagai akibat pembatasan mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi, sedangkan kapasitas produksi dan ketersediaan angkatan kerja relatif tidak berubah. Target pertumbuhan ekonomi wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka menurut wilayah dijabarkan dalam Tabel 2.17, Tabel 2.18, dan Tabel 2.19.

Tabel 2.17

Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
(Persentase Perubahan terhadap Tahun Sebelumnya)

Wilayah	Capaian			Perkiraan 2020	Sasaran 2021
	2017	2018	2019		
Papua	4,5	7,1	(10,7)	0,9	2,6–5,8
Maluku	6,7	6,8	5,8	1,7	5,2–6,2
Sulawesi	7,0	6,6	6,7	0,0	5,4–7,0
Kalimantan	4,3	3,9	5,0	(2,3)	3,6–5,7
Nusa Tenggara	2,1	(0,4)	4,5	(0,2)	3,5–5,2
Jawa-Bali	5,6	5,7	5,5	(2,7)	4,8–5,5
Sumatera	4,3	4,6	4,6	(0,8)	3,9–5,1

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas
Keterangan:Angka tahun 2017-2019 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan *assessment* sementara Bappenas mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19.

Tabel 2.18

Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Penurunan Tingkat Kemiskinan Wilayah
(Persentase Penduduk Miskin)

Wilayah	Capaian			Perkiraan 2020	Sasaran 2021
	2017	2018	2019		
Papua	26,7	26,4	25,4	25,9	25,5
Maluku	13,4	13,3	13,2	13,5	12,8
Sulawesi	10,9	10,4	10,1	10,2	9,8
Kalimantan	6,2	4,1	5,8	5,8	5,6
Nusa Tenggara	18,3	17,9	17,4	18,3	17,8
Jawa-Bali	9,2	8,7	8,2	8,3	7,9
Sumatera	10,5	10,2	9,8	10,1	9,6

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas
Keterangan: Angka tahun 2017-2019 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan *assessment* sementara Bappenas mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19.

Tabel 2.19

Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Penurunan Tingkat Pengangguran Wilayah (Persentase Angkatan Kerja yang Menganggur)

Wilayah	Capaian			Perkiraan 2020	Sasaran 2021
	2017	2018	2019		
Papua	4,2	3,8	4,2	5,8–6,9	5,4–6,8
Maluku	7,6	6,2	6,2	8,1–9,2	7,8–9,1
Sulawesi	4,9	4,7	4,5	7,1–8,2	6,8–8,1
Kalimantan	5,0	4,8	4,7	7,1–8,2	6,7–8,1
Nusa Tenggara	3,3	3,3	3,4	6,0–7,1	5,7–7,0
Jawa-Bali	5,9	5,7	5,7	8,6–9,7	8,2–9,5
Sumatera	5,2	5,1	5,0	7,8–8,9	7,5–8,8

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas

Keterangan: Angka tahun 2017-2019 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan *assessment* sementara Bappenas mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19.

2.4.2 Strategi Pengembangan Wilayah Papua

Pengembangan Wilayah Papua diarahkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus berlandaskan pendekatan budaya dan kondisi sosio-ekologis Wilayah Papua. Secara keseluruhan terdapat tujuh wilayah adat di Wilayah Papua yakni Laa Pago, Saireri, Mamta, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay.

Fokus peningkatan kinerja dan pelaksanaan perbaikan otonomi khusus adalah pemberdayaan masyarakat adat, percepatan pembangunan kawasan kampung, penguatan peran distrik atau kecamatan, penguatan kerja sama antarkabupaten, dan pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu. Percepatan pembangunan manusia dilakukan dengan peningkatan pelayanan dasar serta perluasan akses kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja bagi orang asli Papua. Selain itu, pelaksanaan otonomi khusus juga diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah, memperluas pengembangan kewirausahaan, dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi untuk memacu pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan.

Pada tahun 2021, strategi percepatan pembangunan Wilayah Papua dilakukan dengan delapan langkah. **Pertama,** melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menyambungkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produksi rakyat. **Kedua**, mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis teknologi tepat guna dan komoditas lokal pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. **Ketiga**, mempercepat pengembangan ekonomi kemaritiman melalui industri perikanan dan pariwisata bahari di DPP Raja Ampat. **Keempat**, mendorong hilirisasi industri pertambangan. **Kelima**, mempercepat penyiapan sumber daya manusia terampil disertai pengembangan kewirausahaan terutama pengembangan inovasi dan kreativitas kaum muda asli Papua (Papua *Creative Hub*) sebagai pendukung pengembangan ekonomi lokal. **Keenam**, membangun kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi wilayah, termasuk pembangunan Kota Baru Sorong sebagai pendukung kawasan industri dan pariwisata, dengan fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, drainase, serta transportasi umum perkotaan. **Ketujuh**, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama

SK No 054564 A

antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Papua. **Kedelapan**, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah.

Sementara itu strategi pemerataan dilakukan dengan enam langkah. **Pertama**, memanfaatkan kearifan lokal untuk percepatan penurunan kemiskinan dan perbaikan tingkat kesehatan masyarakat. **Kedua**, mendorong penerapan standar pelayanan minimal (SPM) pada pelayanan dasar khususnya bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, serta perluasan penyediaan listrik perdesaan. Sejalan dengan hal ini, pengembangan *flying healthcare* dan *telemedicine,* serta pengembangan sekolah terpadu berasrama akan terus dilakukan untuk menjangkau penduduk di daerah terpencil, terisolasi, dan pegunungan. **Ketiga**, menerapkan pendekatan klaster berbasis wilayah adat dan distrik untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, serta kampung. **Keempat**, mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan. **Kelima**, meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah termasuk di tingkat distrik dan kampung, pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan partisipatif, serta pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa. **Keenam**, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur, dan keuangan daerah) termasuk penataan daerah, guna mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, percepatan pembangunan, dan peningkatan daya saing di Wilayah Papua.

Pendekatan berbasis wilayah adat diarahkan untuk memperkuat kerja sama dan kemitraan antardaerah. Kemiripan sistem nilai dan norma dalam wilayah adat dioptimalkan untuk memfasilitasi pergerakan penduduk dan barang serta aktivitas sosial ekonomi lainnya. Sementara itu, pengembangan wilayah berbasis distrik diarahkan untuk memperkuat peran distrik sebagai pusat data, informasi, dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat adat; pusat inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan daerah.

Wilayah Papua mempunyai risiko bencana dan perubahan iklim yang tinggi khususnya gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Oleh sebab itu, pada tahun 2021 upaya memperkuat sistem ketahanan bencana melalui pengurangan risiko bencana yang dilakukan dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, memperkuat sistem peringatan dini, pengembangan data kebencanaan, sinergi pembiayaan penanggulangan bencana serta meningkatkan kerja sama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Selain itu, upaya mempertahankan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan terus dilakukan dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon.

Tabel 2.20

Target Pengembangan Wilayah Papua Per Provinsi Tahun 2021 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2021	
	Papua Barat	Papua
Pertumbuhan Ekonomi*	5,1–6,2	1,5–5,6
Tingkat Kemiskinan	21,8	26,6
Tingkat Pengangguran Terbuka	8,0–9,3	4,8–6,2

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020
Keterangan: *) *Assessment* sementara Bappenas dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19

Sasaran utama pengembangan Wilayah Papua pada tahun 2021 adalah (1) terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan; (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta (3) terbukanya lapangan kerja berkualitas, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.20. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

2.4.3 Strategi Pengembangan Wilayah Maluku

Pengembangan Wilayah Maluku diarahkan untuk mengoptimalkan keunggulan wilayah sebagai lumbung ikan nasional dan kawasan pariwisata berbasis gugus pulau dan mendorong transformasi perekonomian wilayah dengan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan berbasis kemaritiman seperti pengolahan hasil laut, wisata sejarah dan bahari; berbasis perkebunan seperti pengolahan kelapa, lada, pala, dan cengkeh; serta berbasis mineral seperti pengolahan nikel, tembaga, dan emas.

Pada tahun 2021, strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi ekonomi Wilayah Maluku dilakukan dengan tujuh langkah. **Pertama**, mengembangkan pusat-pusat industri pengolahan yang meliputi kawasan industri pengolahan nikel dan bahan tambang lainnya di KI Teluk Weda, kawasan industri pengolahan hasil perkebunan, kawasan industri pengolahan perikanan, serta pengembangan pasar dan pelabuhan ikan.

Kedua, meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan perkebunan termasuk pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan ikan. **Ketiga**, mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan wilayah khususnya DPP/KEK Morotai. **Keempat**, menyiapkan rencana pengembangan industri terpadu untuk mendukung pengembangan Blok Masela, yang meliputi pengembangan kawasan kegiatan turunan migas, kawasan permukiman pekerja, dan fasilitas pendukung. **Kelima**, mengembangkan kawasan perkotaan, termasuk pembangunan Kota Baru Sofifi sebagai pusat pemerintahan, dengan fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, drainase, serta transportasi umum perkotaan. **Keenam**, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Maluku. **Ketujuh**, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah.

Sedangkan strategi pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan lima langkah. **Pertama**, meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan secara merata di wilayah kepulauan. **Kedua**, mempercepat pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, pulau-pulau terluar, dan kawasan perbatasan yang dilakukan simultan dengan meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal. **Ketiga**, memperkuat konektivitas antarpulau khususnya dengan meningkatkan prasarana dan sarana penyeberangan antarpulau. **Keempat**, mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan. **Kelima**, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur, dan keuangan daerah) guna mendorong peningkatan daya saing daerah.

Dari sisi risiko, Wilayah Maluku mempunyai risiko bencana dan perubahan iklim yang termasuk tinggi seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Oleh

SK No 054566 A

sebab itu, pada tahun 2021 upaya memperkuat sistem ketahanan bencana melalui pengurangan risiko bencana dilakukan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan fungsi sistem peringatan dini, pengembangan data kebencanaan, sinergi pembiayaan penanggulangan bencana serta peningkatan kerja sama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di samping itu, sebagai wilayah kepulauan, perekonomian Maluku menghadapi risiko fluktuasi harga kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya yang bergantung dari luar wilayah khususnya pada musim gelombang tinggi yang mengganggu pelayaran antarpulau. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pengamanan stok dan distribusi kebutuhan pokok untuk mengantisipasi datangnya cuaca ekstrem.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Maluku pada tahun 2021 adalah (1) pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) meningkatnya kesempatan kerja, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.21. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Tabel 2.21

Target Pengembangan Wilayah Maluku Per Provinsi Tahun 2021 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2021	
	Maluku	Maluku Utara
Pertumbuhan Ekonomi*	5,0–5,9	5,4–6,5
Tingkat Kemiskinan	17,4	6,2
Tingkat Pengangguran Terbuka	8,7–10,0	6,5-7,9

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020
Keterangan: *) *Assessment* sementara Bappenas dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19

2.4.4 Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi

Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan yang relatif tinggi dan mendorong transformasi perekonomian wilayah menjadi basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah, memantapkan perannya sebagai hub dan pintu gerbang perdagangan internasional di kawasan timur, serta peran sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Wilayah Sulawesi merupakan penghasil utama komoditas perikanan tangkap dan budidaya; pertanian tanaman pangan padi dan jagung; perkebunan kakao, kopi, kelapa sawit, dan kelapa; peternakan sapi; hasil hutan berupa rotan; serta pertambangan aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi. Di samping itu, Wilayah Sulawesi juga memiliki keunggulan pariwisata bahari Bunaken dan Wakatobi serta pariwisata alam dan budaya Tanah Toraja.

Pada tahun 2021 strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi ekonomi Wilayah Sulawesi akan dilakukan dengan enam langkah. **Pertama**, mengoptimalkan peran kawasan-kawasan strategis baik KEK maupun KI sebagai pusat industrialisasi/hilirisasi komoditas unggulan wilayah, yaitu KEK/KI Palu dan KEK Bitung. **Kedua**, meningkatkan investasi di kawasan-kawasan pariwisata unggulan yaitu DPP Manado–Likupang/KEK Likupang dan DPP Wakatobi. **Ketiga**, meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah, baik infrastruktur darat yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis dengan kawasan penyangganya, maupun infrastruktur pelabuhan dan udara

yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di Sulawesi dengan wilayah lain. **Keempat**, meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan pendukung sektor industri dan pariwisata di Wilayah Sulawesi, termasuk di WM Makassar dan WM Manado sebagai pusat pelayanan aglomerasi wilayah, dengan fokus pada penyediaan transportasi massal, drainase perkotaan, akses pada energi, perumahan, air minum, sanitasi, dan pengelolaan persampahan yang aman, serta pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah *urban sprawl*. **Kelima**, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Sulawesi. **Keenam**, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah.

Sementara itu strategi pemerataan akan dilakukan dengan lima langkah. **Pertama**, pemerataan pelayanan dasar dengan fokus pemenuhan SPM di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan permukiman. **Kedua**, meningkatkan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar. **Ketiga**, memantapkan keterkaitan antara jaringan transportasi utama Trans Sulawesi dan jaringan pengumpan (*feeder*) ke kawasan-kawasan perdesaan dan kota-kota kecil. **Keempat**, mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan. **Kelima**, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur, dan keuangan daerah) dalam rangka peningkatan daya saing daerah.

Wilayah Sulawesi mempunyai risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi khususnya gempa bumi, likuifaksi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, pada tahun 2021 upaya memperkuat sistem ketahanan bencana melalui pengurangan risiko bencana dilakukan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan fungsi sistem peringatan dini, pengembangan data kebencanaan, sinergi pembiayaan penanggulangan bencana serta peningkatan kerja sama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Selain itu, upaya pemulihan kembali pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah dan daerah lainnya di Wilayah Sulawesi akan terus dilanjutkan dan diperkuat.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Sulawesi pada tahun 2021 adalah (1) pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) terbukanya lapangan kerja berkualitas, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.22. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Tabel 2.22

Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2021 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2021					
	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat
Pertumbuhan Ekonomi*	5,6–6,1	4,2–7,4	6,0–7,2	4,5–7,1	5,6–6,8	4,4–6,2
Tingkat Kemiskinan	7,3	12,7	8,2	11,5	14,1	10,7
Tingkat Pengangguran Terbuka	8,8–10,1	5,1–6,5	7,6–8,9	5,5–6,9	5,7–7,1	5,1–6,5

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020
Keterangan: *) *Assessment* sementara Bappenas dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19

SK No 054568 A

2.4.5 Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan

Pengembangan Wilayah Kalimantan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah, memantapkan perannya sebagai lumbung energi nasional, mempertahankan Kalimantan sebagai paru-paru dunia, serta mendorong pemerataan pembangunan terutama di Kalimantan bagian utara. Wilayah Kalimantan merupakan penghasil utama batu bara, migas, dan komoditas lainnya seperti bauksit, bijih besi, pasir zirkon, pasir kuarsa, kelapa sawit, dan karet.

Pada tahun 2021, strategi percepatan pembangunan Wilayah Kalimantan dilakukan dengan enam langkah. **Pertama**, melalui pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan baru yang dapat mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah, menambah bangkitan ekonomi di Kalimantan dan sekitarnya, serta memberikan dampak positif ke berbagai sektor. **Kedua**, meningkatkan investasi dan optimalisasi kawasan-kawasan strategis khususnya kawasan industri pengolah sumber daya alam hasil perkebunan dan pertambangan yaitu KI Ketapang dan KI Surya Borneo. **Ketiga**, pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan dan aglomerasi wilayah, pendukung sektor industri dan pariwisata, termasuk WM Banjarmasin, Kota Baru Tanjung Selor sebagai pusat pemerintahan, dengan fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan. **Keempat**, mempertahankan pelestarian lingkungan dan fungsi ekologis di kawasan hutan tropik Kalimantan sebagai pusat konservasi dan rehabilitasi plasma nutfah dan satwa yang dilindungi, sebagai pusat penelitian obat-obatan, serta untuk menjamin daya dukung lingkungan. **Kelima**, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Kalimantan. **Keenam**, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah.

Adapun strategi pemerataan pembangunan di Wilayah Kalimantan akan dilaksanakan dengan lima langkah. **Pertama**, meningkatkan konektivitas wilayah dengan mengintegrasikan infrastruktur multimoda yang meliputi transportasi darat, sungai, laut, dan udara. **Kedua**, memperkuat peran kota-kota kecil dan sedang sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan di daerah perdesaan, pedalaman, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan khususnya dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pengembangan ekonomi lokal. **Ketiga**, meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan di bagian utara untuk menjaga kedaulatan nasional dan mengurangi kesenjangan dengan penduduk di wilayah negara tetangga. **Keempat**, mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan. **Kelima**, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa guna mendorong peningkatan daya saing daerah serta penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah administratif yang relatif luas.

Dari sisi risiko, Wilayah Kalimantan relatif aman dari ancaman gempa tektonik dan tidak memiliki gunung berapi. Di sisi lain, Wilayah Kalimantan mempunyai risiko tinggi untuk kebakaran hutan dan lahan di musim kering serta risiko banjir di musim hujan. Kombinasi kandungan gambut yang tinggi, praktik pembakaran untuk membuka lahan, kondisi cuaca di musim kering, dan luasnya wilayah kendali membuat ancaman kebakaran lahan di Kalimantan relatif tinggi. Sementara itu, di musim hujan kota-kota besar di Kalimantan menghadapi ancaman banjir yang diakibatkan oleh rusaknya ekosistem gambut dan rawa, beralihnya daerah resapan, sempadan sungai, dataran

rendah yang menjadi kawasan permukiman, serta buruknya sistem drainase perkotaan. Oleh sebab itu, upaya memperkuat sistem ketahanan bencana melalui upaya pencegahan dan mitigasi terhadap kebakaran hutan dan lahan akan terus dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan penguatan kerja sama dengan perusahaan perkebunan. Adapun upaya pencegahan banjir dilakukan melalui peningkatan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dan lahan kritis, pengembangan data kebencanaan, sinergi pembiayaan penanggulangan bencana serta penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang di perkotaan.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Kalimantan pada tahun 2021 adalah (1) terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) terbukanya lapangan kerja berkualitas, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.23. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Tabel 2.23

Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2021 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2021				
	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara
Pertumbuhan Ekonomi*	5,0–5,7	5,3–6,6	3,3–5,4	2,9–5,5	4,7–6,1
Tingkat Kemiskinan	7,2	4,2	4,5	5,7	6,3
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,4–7,7	5,9–7,2	6,2–7,5	8,5–9,9	6,4–7,8

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020
Keterangan: *) *Assessment* sementara Bappenas dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19

2.4.6 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong percepatan (akselerasi) pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah, memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya, serta menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara Barat. Basis keunggulan Wilayah Nusa Tenggara berada pada sektor perikanan dan kelautan yaitu rumput laut, garam, peternakan sapi, perkebunan kopi, pertambangan tembaga, emas, serta pariwisata.

Pada tahun 2021, strategi akselerasi pertumbuhan wilayah dilakukan dengan delapan langkah. **Pertama**, memfasilitasi pengembangan industri MICE (*Meeting, Incentives, Conference, and Exhibition*) dan perhelatan olahraga internasional sebagai penggerak sekaligus sarana promosi pariwisata Nusa Tenggara melalui pengembangan DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo, sesuai rencana induk (*masterplan*) kawasan pariwisata yang telah disusun. **Kedua**, meningkatkan produktivitas usaha perikanan termasuk tambak garam, peternakan, perkebunan, serta budidaya tanaman pangan termasuk pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan ikan. **Ketiga**, mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi termasuk industri kerajinan mutiara dan kain tenun tradisional. **Keempat**, meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah kepulauan dan memperkuat koneksi transportasi

SK No 054570 A

dengan hub pariwisata internasional utama Bali. **Kelima**, mengembangkan kawasan perbatasan dengan negara tetangga Timor Leste untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara. **Keenam**, mengembangkan kawasan perkotaan untuk mendukung sektor industri dan pariwisata dengan fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan. **Ketujuh**, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Nusa Tenggara. **Kedelapan**, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah.

Sementara itu strategi pemerataan akan dilaksanakan dengan tujuh langkah. **Pertama**, meningkatkan pemerataan akses rumah tangga pada pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mempercepat pembangunan manusia, khususnya pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. **Kedua**, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pendidikan keterampilan hidup (*life-skills*) dan vokasional untuk mempersiapkan partisipasi masyarakat pada sektor-sektor strategis. **Ketiga**, percepatan pembangunan kawasan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar secara simultan dengan pembangunan kota-kota kecil dan sedang. **Keempat**, menuntaskan pembangunan infrastruktur dasar khususnya untuk meningkatkan elektrifikasi rumah tangga, akses air minum, dan sanitasi di perdesaan.

Kelima, mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan. **Keenam**, meningkatkan tata kelola dan kapasitas (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) pemerintah daerah dan desa dalam mengelola keuangan daerah dan Dana Desa yang memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan daya saing daerah. **Ketujuh**, menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak gempa di Nusa Tenggara Barat.

Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara termasuk wilayah dengan risiko bencana dan perubahan iklim yang tinggi khususnya ancaman gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, tanah longsor, kekeringan, dan banjir. Oleh sebab itu, upaya memperkuat sistem ketahan bencana melalui pengurangan risiko bencana pada tahun 2021 dilakukan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat berbasis kearifan lokal, peningkatan fungsi sistem peringatan dini, pengembangan data kebencanaan, sinergi pembiayaan penanggulangan bencana serta peningkatan kerja sama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Kearifan lokal dapat dimanfaatkan dalam melakukan revitalisasi sebagai antisipasi ancaman gempa, misalnya dalam bentuk adopsi desain rumah dan bangunan tradisional yang relatif tahan gempa. Prioritas mitigasi bencana diarahkan pada kawasan-kawasan strategis pariwisata nasional dan kota-kota utama dengan tingkat kepadatan relatif tinggi. Selain itu, upaya pemulihan kembali pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat dan daerah lainnya di Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara akan terus dilanjutkan dan diperkuat.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2021 adalah (1) terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta (3) terbukanya lapangan kerja berkualitas, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.24. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Tabel 2.24

Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2021 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2021	
	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur
Pertumbuhan Ekonomi*	2,2–4,8	5,2–5,7
Tingkat Kemiskinan	14,5	20,9
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,1–7,4	5,3–6,7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Keterangan: *) *Assessment* sementara Bappenas dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19

2.4.7 Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Pengembangan Wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk memantapkan perannya dalam perekonomian nasional sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan, dan jasa modern, sebagai gerbang pariwisata internasional, serta mempertahankan peran sebagai lumbung pangan nasional. Dengan kepadatan penduduk dan infrastruktur yang relatif baik, transformasi ekonomi Wilayah Jawa diarahkan menjadi perekonomian berbasis aneka industri dan jasa yang modern dan efisien yang didukung pariwisata massal yang berkembang dengan karakter budaya lokal yang kuat, serta berpartisipasi dan menyatu dalam mata rantai global di bidang investasi, produksi, keuangan, perdagangan, dan pariwisata.

Pada tahun 2021, strategi pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali dilakukan dengan tujuh langkah. **Pertama**, mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus yaitu KEK Kendal, serta dua kawasan industri manufaktur direktif Presiden yaitu KI Batang dan KI Subang yang terintegrasi dengan jaringan tol, kereta api, dan pelabuhan di sisi Pantai Utara Pulau Jawa. **Kedua**, meningkatkan investasi dan mengembangkan pariwisata massal kelas dunia khususnya di poros Pulau Bali-Banyuwangi-Bromo-Borobudur-Kepulauan Seribu-Tanjung Lesung, dengan beberapa kawasan yang terus dikembangkan yaitu KEK Tanjung Lesung, DPP Borobudur dan sekitarnya, serta DPP Bromo-Tengger-Semeru akan dilaksanakan sesuai rencana induk (*masterplan*) kawasan pariwisata yang telah disusun. **Ketiga**, mendorong pengembangan ekonomi kreatif khususnya ekonomi digital yang mengoptimalkan kekayaan budaya bangsa. **Keempat**, mengendalikan konversi lahan-lahan subur pertanian dan mempertahankan jaringan irigasi di kawasan-kawasan lumbung beras. **Kelima**, meningkatkan kelayakhunian kawasan perkotaan sebagai pusat layanan dan aglomerasi wilayah serta pendukung sektor industri dan pariwisata, khususnya di WM Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Denpasar serta Kota Baru Maja dengan fokus pada peningkatan transportasi massal, drainase perkotaan, pengendalian banjir, penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, pengelolaan persampahan yang aman, penataan kawasan permukiman, ruang terbuka hijau publik, dan peningkatan kerja sama lintas daerah dalam regionalisasi penyelenggaraan layanan publik. **Keenam**, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Jawa-Bali. **Ketujuh**, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah.

SK No 054572 A

Adapun strategi pemerataan pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan dilaksanakan dengan empat langkah. **Pertama**, mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas di kawasan Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara. **Kedua**, simultan dengan langkah pertama, mendorong pembangunan kota-kota kecil dan sedang menjadi pusat distribusi dan industri wilayah skala kecil-sedang, khususnya di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara. Pengendalian skala industri disesuaikan dengan daya dukung wilayah yang relatif berbukit dan banyak terdapat ekosistem karst. **Ketiga**, mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu petani dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengakses pasar yang lebih luas. **Keempat**, meningkatkan tata kelola dan kapasitas (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) pemerintah daerah dan desa dalam peningkatan daya saing daerah.

Dari sisi risiko, Wilayah Jawa-Bali memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi terutama gempa tektonik dan tsunami di sepanjang pesisir selatan dan ujung barat Pulau Jawa, erupsi gunung berapi, tanah longsor, banjir khususnya di kawasan perkotaan dan DAS, serta abrasi pantai di pesisir utara. Di samping itu, kepadatan dan mobilitas penduduk yang tinggi di Wilayah Jawa-Bali juga mengakibatkan risiko relatif tinggi ketika terjadi penyebaran wabah penyakit menular. Oleh karena itu, upaya memperkuat sistem ketahanan bencana melalui antisipasi dan mitigasi bencana dilakukan dengan memantapkan kelembagaan dan kapasitas aparat dalam mitigasi bencana di daerah hingga di tingkat desa/kelurahan. Hal ini juga perlu ditunjang prasarana dan sarana deteksi dini bencana, sistem informasi, pengembangan data kebencanaan, sinergi pembiayaan penanggulangan bencana, dan mekanisme kerja sama lintas daerah dan multipihak, serta peningkatan kesadaran risiko bencana di masyarakat.

Selain itu, upaya pemulihan kembali pascabencana gempa bumi dan tsunami di Kawasan Pesisir Selat Sunda dan daerah lainnya di Wilayah Jawa-Bali akan terus dilanjutkan dan diperkuat.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2021 adalah (1) pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta (3) meningkatnya kesempatan kerja, dengan target sebagai berikut dalam Tabel 2.25. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Tabel 2.25

Target Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2021 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2021						
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	D. I. Y	Jawa Timur	Banten	Bali
Pertumbuhan Ekonomi*	5,0–5,6	4,4–5,1	5,2–5,5	5,0–6,2	4,7–5,6	4,5–5,5	4,8–6,0
Tingkat Kemiskinan	3,4	6,6	10,1	11,4	9,8	5,2	3,3
Tingkat Pengangguran Terbuka	9,1–10,4	10,6–11,9	7,0–8,4	5,5–6,9	6,6–7,9	10,9–12,1	4,2–5,5

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Keterangan: *) *Assessment* sementara Bappenas dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19

2.4.8 Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera

Pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan untuk mengoptimalkan pengembangan hilirisasi komoditas pertanian, perikanan, dan pertambangan; sebagai basis industri pengolahan setelah Jawa, pintu gerbang nasional bagi kawasan Asia, dan lumbung pangan dan energi nasional; serta pengembangan pariwisata terutama kawasan Danau Toba dan kawasan pariwisata lainnya. Wilayah Sumatera adalah penghasil terbesar komoditas perkebunan utama seperti kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, komoditas tambang batu bara dan timah, serta salah satu penghasil utama sumber energi migas, komoditi udang budidaya, dan hasil-hasil pertanian. Industrialisasi melalui hilirisasi sumber daya alam di Wilayah Sumatera diarahkan untuk mengoptimalkan nilai tambah dan mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Pada tahun 2021, strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Sumatera dilakukan dengan tujuh langkah. **Pertama**, mendorong operasionalisasi dan peningkatan investasi di kawasan-kawasan industri dan KEK khususnya di sepanjang koridor Tol Trans Sumatera di pesisir timur, yaitu KEK Arun Lhokseumawe, KI/KEK Sei Mangkei, dan KI/KEK Galang Batang dengan mengoptimalkan paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal serta memantapkan pasokan energi; serta mengoptimalkan KPBPB antara lain KPBPB Sabang dan KPBPB Batam. **Kedua**, memacu pengembangan kawasan pariwisata unggulan khususnya di DPP Danau Toba dan DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang dengan melaksanakan rencana induk (*masterplan*) kawasan pariwisata yang telah disusun.

Ketiga, mengintegrasikan sistem transportasi wilayah multimoda (tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara) dengan pengembangan kawasan industri dan kota-kota utama. **Keempat**, meningkatkan produktivitas budidaya pertanian, perkebunan, dan perikanan khususnya usaha rakyat. **Kelima**, pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan dan aglomerasi wilayah, pendukung sektor industri dan pariwisata, termasuk WM Medan, WM Palembang, dengan fokus peningkatan transportasi massal perkotaan, penyediaan layanan dasar seperti perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi dan pengelolaan persampahan yang aman, pengembangan sistem drainase perkotaan, penataan kawasan permukiman, dan ruang terbuka hijau publik di perkotaan. **Keenam**, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Sumatera. **Ketujuh**, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah.

Sedangkan strategi pemerataan di Wilayah Sumatera akan dilakukan dengan delapan langkah. **Pertama**, meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, air minum, dan sanitasi. Simultan dengan arah kebijakan dan strategi percepatan industrialisasi Wilayah Sumatera, peningkatan akses dan mutu pendidikan difokuskan pada pendidikan menengah, kejuruan/vokasional, dan tinggi. **Kedua**, mempercepat penuntasan jaringan transportasi pengumpan (*feeder*) yang menghubungkan kawasan tengah dan barat dengan jaringan infrastruktur utama Tol Trans Sumatera di pesisir timur. **Ketiga**, meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar di daerah gugus-gugus pulau baik di bagian barat maupun timur Pulau Sumatera dengan fokus jalan lingkar dan listrik (Nias, Mentawai, dan Meranti). **Keempat**, mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan. **Kelima**, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan alternatif serta pembangunan kota-kota kecil dan sedang. **Keenam**,

SK No 054574 A

mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus Aceh bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. **Ketujuh**, meningkatkan tata kelola dan kapasitas (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) pemerintah daerah dan desa dalam rangka peningkatan daya saing daerah. **Kedelapan**, percepatan pembangunan kawasan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar secara simultan dengan pembangunan kota-kota kecil dan sedang.

Wilayah Sumatera merupakan wilayah rawan bencana terutama ancaman gempa tektonik khususnya pada jalur patahan di pesisir barat dan di sepanjang Bukit Barisan, yang berpotensi diikuti tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, dan tanah longsor, serta ancaman kebakaran lahan dan hutan. Oleh sebab itu, upaya memperkuat sistem ketahanan bencana melalui pengurangan risiko bencana akan dilakukan dengan memantapkan sistem dan peralatan deteksi dini bencana, internalisasi kerawanan bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis, meningkatkan kapasitas aparat daerah, meningkatkan kesadaran risiko bencana di masyarakat, pengembangan data kebencanaan, sinergi pembiayaan penanggulangan bencana, dan meningkatkan kerja sama lintas daerah dan multipihak mitigasi bencana. Selain itu, upaya pemulihan kembali pascabencana gempa bumi dan tsunami di kawasan pesisir Selat Sunda di Wilayah Sumatera akan terus dilanjutkan dan diperkuat.

Sasaran utama pengembangan wilayah Sumatera pada tahun 2021 adalah (1) terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) meningkatnya kesempatan kerja, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.26. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Tabel 2.26

Target Pengembangan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2021 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2021									
	Aceh	Sumut	Sumbar	Riau	Jambi	Sumsel	Bengkulu	Lampung	Kep. Bangka Belitung	Kep. Riau
Pertumbuhan Ekonomi*	3,2-4,7	4,9-5,9	4,9-5,6	2,1-3,1	3,7-4,8	4,6-6,2	4,4-5,4	4,7-5,7	3,0-4,0	3,0-5,7
Tingkat Kemiskinan	15,0	8,8	6,4	6,8	7,1	11,8	14,1	12,1	4,0	5,7
Tingkat Pengangguran Terbuka	8,5-9,8	8,0-9,3	7,9–9,2	8,6-9,9	6,0–7,4	7,1–8,4	5,1–6,5	6,6–7,9	5,3–6,6	9,0–10,3

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Keterangan: *) *Assessment* sementara Bappenas dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19

2.5. Strategi Pendanaan Pembangunan

Arah penyediaan pendanaan pembangunan tahun 2021 ditujukan untuk melanjutkan percepatan penanganan dampak COVID-19 yaitu dengan melanjutkan jaring pengaman sosial, menjaga daya beli masyarakat, revitalisasi ekonomi domestik, melakukan investasi publik yang memiliki dampak langsung dan segera terhadap pemulihan akibat dampak COVID-19, serta tetap melakukan konsolidasi penyiapan investasi publik untuk menjaga momentum pembangunan.

2.5.1 Prioritas Pendanaan

Untuk penanganan bencana tersebut diperlukan beberapa penajaman pemanfaatan pendanaan baik pendanaan pemerintah pusat maupun daerah dengan fokus pada kegiatan (1) penanganan wabah COVID-19 pada aspek medis, (2) antisipasi dampak yang ditimbulkan melalui pembiayaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan (3) stimulus pada perekonomian pascabencana.

Pemerintah pusat telah melakukan efisiensi belanja untuk mengoptimalisasi pendanaan yang tersedia sehingga terdapat celah fiskal yang dapat dimanfaatkan. Efisiensi dilakukan dengan pemotongan anggaran melalui penundaan beberapa kegiatan yang belum dimulai pelaksanaannya dan realokasi kegiatan yang tidak memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Untuk proyek yang dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang tinggi dapat dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek yang telah dimulai pelaksanaannya.

Selain melakukan efisiensi dalam belanja, pemerintah dapat memanfaatkan beberapa tambahan pendanaan, baik melalui pinjaman dan hibah dalam maupun luar negeri serta penerbitan surat berharga negara. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, bahwa pemerintah dapat melakukan relaksasi batasan defisit anggaran selama masa penanganan COVID-19; menerbitkan SBN dalam bentuk SUN dan/atau SBSN dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi COVID-19 untuk dapat dibeli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan investor korporasi, dan/atau investor ritel; dan menetapkan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri.

Untuk pendanaan pemerintah daerah, pemerintah pusat telah melakukan *refocusing* TKDD dengan penggunaan DAK penugasan pada kegiatan pascabencana COVID-19 khususnya untuk kegiatan pemulihan ekonomi dan pemanfaatan Dana Desa untuk merespon secara cepat dampak bencana COVID-19. Diharapkan pemerintah daerah dapat menerapkan strategi pengelolaan APBD yang sejalan dengan fokus pemerintah pusat yakni penanganan bencana pandemi COVID-19.

Dalam menangani dampak pandemi ini, selain tetap melaksanakan efisiensi dan *refocusing* anggaran khususnya yang terkait dengan stimulus kepada sektor perekonomian, maka perlu dilakukan percepatan penyiapan proyek-proyek dan kegiatan untuk mendukung bangkitnya perekonomian pascabencana terutama pada proyek padat karya yang dapat menciptakan lapangan kerja. Adanya *refocusing*, realokasi, dan efisiensi anggaran pemerintah juga perlu digunakan sebagai momentum untuk meningkatkan partisipasi

SK No 054576 A

swasta dalam pendanaan pembangunan melalui berbagai mekanisme kerja sama seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema *blended finance*.

2.5.2. Pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat

Pengelolaan belanja pemerintah pusat akan diarahkan pada peningkatan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan. Hal ini menjadi kebijakan dasar perencanaan dan penganggaran belanja K/L dan belanja non-K/L. Pengelolaan belanja pemerintah pusat dilakukan berdasarkan prinsip *money follows program* dengan pendekatan yang Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Untuk tahun 2021, belanja pemerintah pusat akan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan percepatan penanganan COVID-19 serta dampaknya dengan mengacu pada protokol penanganan COVID-19. Untuk itu, akan dilakukan penjadwalan kembali dan realokasi anggaran kegiatan yang tidak memiliki tingkat urgensi yang tinggi kepada proyek yang dapat memberikan efek langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat.

Implementasi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*medium term expenditure framework*) dan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dalam perencanaan dan penganggaran terus dilakukan secara bertahap sesuai kapasitas dan kondisi pelaksanaan. Hal lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah mengutamakan KPBU dengan skema pembayaran atas dasar ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagai instrumen untuk memperbesar celah fiskal dan mengurangi tekanan terhadap anggaran pemerintah dalam jangka pendek sekaligus meningkatkan peran swasta dalam pendanaan pembangunan.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas alokasi pada prioritas harus diawali dengan peningkatan kualitas program/kegiatan dan proyek prioritas yang direncanakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana pembangunan tersebut harus fokus serta jelas sasaran yang hendak dituju serta penanggung jawabnya.

Peningkatan kualitas alokasi pada prioritas juga harus disertai dengan mekanisme pengendalian yang baik untuk memastikan ketepatan pelaksanaan rencana. Untuk itu, pemerintah akan mengendalikan rencana pembangunan hingga tingkat proyek prioritas yang lokasi dan penanggung jawab kegiatannya jelas terukur. Penyempurnaan proyek prioritas juga terus ditingkatkan dengan memperbaiki kebijakan kriteria seleksi kegiatan dengan pendanaannya, dan perlu dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab.

Dalam hal penanganan bencana, terutama yang sifatnya masif seperti penanganan pandemi COVID-19, pemerintah melakukan optimalisasi pemanfaatan dana yang sudah ada melalui efisiensi belanja, sehingga diperoleh celah fiskal (*fiscal space*) yang cukup untuk membiayai kegiatan yang terkait penanganan bencana, mengantisipasi dampak yang ditimbulkan (misalnya: pembiayaan jaring pengaman sosial/*social safety net*) dan membantu dunia usaha untuk bangkit pascabencana. Pemerintah juga akan mengembangkan skema asuransi pembiayaan tanggap darurat dan pengumpulan dana (*pooling of fund*) yang dapat segera digunakan untuk pembiayaan penanganan bencana.

2.5.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah dan otonomi desa, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, pemerintah menganggarkan TKDD. Sumber pendanaan TKDD ini sepenuhnya berasal dari sumber pendanaan pemerintah yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan obligasi.

Alokasi TKDD terdiri atas empat komponen, yaitu (1) Dana Perimbangan yang terbagi menjadi (a) Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta (b) Dana Transfer Khusus yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik; (2) Dana Insentif Daerah (DID); (3) Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta; serta (4) Dana Desa. Struktur Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat dilihat pada Gambar 2.21.

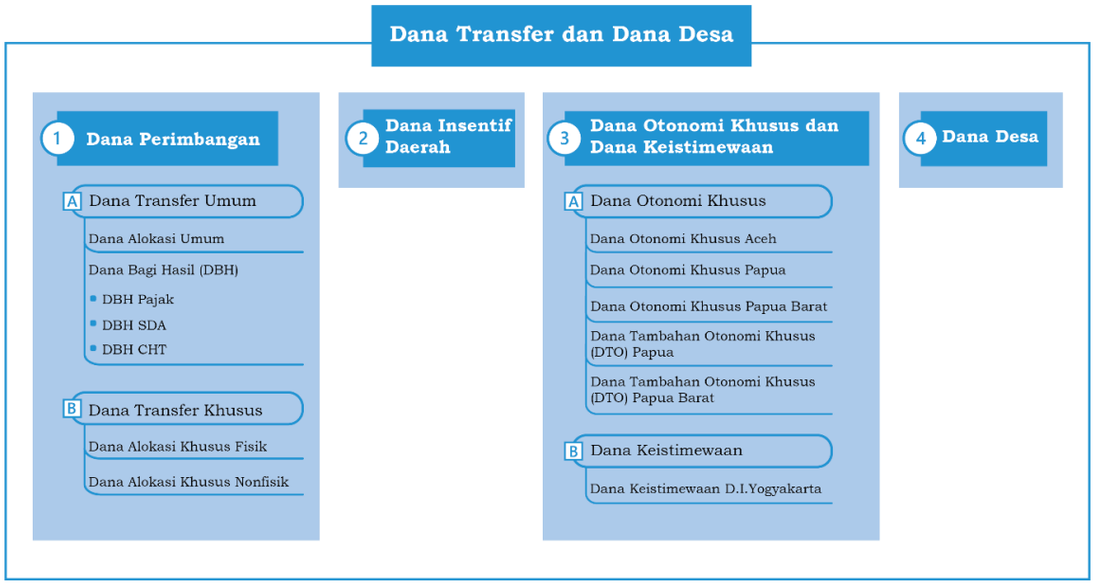
Arah Kebijakan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 sebagai berikut.

1. Mendukung pelaksanaan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.11/2011 tentang Pemerintah Aceh, UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU No.13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan UU No.6/2014 tentang Desa secara penuh, konsisten, nyata, dan bertanggung jawab.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan TKDD sebagai salah satu sumber pembiayaan penanganan dan stimulus pemulihan (*recovery*) ekonomi di daerah pascadampak pandemi COVID-19 sejalan dengan program prioritas nasional yaitu melalui (a) pembangunan aksesibilitas dan konektivitas sentra pertumbuhan; serta (b) dukungan insentif untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.
3. Mendorong pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), secara bertahap terutama pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, khususnya yang terkait dengan kesehatan publik, dengan memperhitungkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan keuangan negara, serta tindakan afirmatif kepada daerah-daerah tertinggal, terluar dan terdepan, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan daerah berciri kepulauan.
4. Mendukung pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran prioritas nasional seperti peningkatan kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan Indeks IPM, pengurangan angka kematian ibu dan *stunting*, penyediaan air bersih dan sanitasi, peningkatan mutu sumber daya manusia siap kerja, pengurangan emisi karbon, pengelolaan kawasan hutan dan daerah konservasi, dan pengurangan risiko bencana; kawasan ekonomi strategis; serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* – SDGs).
5. Meningkatkan keterpaduan pemanfaatan Dana TKDD dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya secara lebih efisien, efektif dengan prinsip nilai ekonomi (*value for money*).
6. Meningkatkan kualitas tata kelola Dana TKDD mulai dari perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan hingga mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi berbasis sistem informasi.

7. Meningkatkan kinerja Dana TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui: implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan Penyusunan Bagan Akun Standar (BAS).

Gambar 2.21

Struktur Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

2.5.3.1 Dana Perimbangan

Pertama, Dana Transfer Umum (DTU). Dana Transfer Umum merupakan transfer ke daerah yang bersifat *block grant*, yakni pemanfaatan dana tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki diskresi untuk menggunakan DTU sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah guna meningkatkan pemenuhan dan kualitas sarana dan prasarana layanan publik, mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penyaluran DTU diarahkan berbasis kinerja tertentu untuk meningkatkan kualitas layanan dasar publik, termasuk peningkatan indikator kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan di daerah. Selain itu, perlu dilakukan sinergi kebijakan DTU dengan reformasi yang dilaksanakan di K/L seperti: (1) menyesuaikan kebijakan penyaluran terkait Merdeka Belajar di bidang Pendidikan, dan (2) mendukung program pensiun dan jaminan sosial.

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, kebijakan DTU diarahkan untuk mendorong sektor produksi, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan terhadap UMKM. Dana Transfer Umum terbagi menjadi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Terdapat dua jenis DBH, yakni DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Dana Bagi Hasil dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, berdasarkan prinsip *by origin*, yaitu daerah penghasil mendapatkan bagian yang lebih besar; dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Dana Bagi Hasil disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan.

Arah kebijakan DBH Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan tata kelola DBH yang lebih transparan, akuntabel, adil, bertanggung jawab dan efektif berbasis peningkatan kinerja.
2. Menetapkan alokasi DBH secara tepat waktu dan tepat jumlah melalui komitmen percepatan penyelesaian kurang bayar/lebih bayar.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan DBH bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan di daerah.
4. Menyalurkan DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara sesuai dengan kondisi keuangan negara.
5. Menggunakan minimal 50 persen DBH cukai hasil tembakau (CHT) untuk mendukung program JKN melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan.
6. Memperluas penggunaan dana reboisasi (DR) untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, mendukung program perhutanan sosial, dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
7. Mempercepat penyelesaian kurang bayar DBH yang memperhitungkan lebih bayar DBH dalam *roadmap* tiga tahun (tahun kedua 2021) dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.
8. Mengoptimalkan pemanfaatan DBH dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial serta pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diarahkan sebagai *equalization grant* yang bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah. Kebijakan DAU di Tahun 2021 meliputi.

1. Memprioritaskan alokasi dan pemanfaatan DAU untuk penanganan wabah COVID-19 pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan stimulus pada pemulihan (*recovery)* perekonomian pascabencana dampak COVID-19 di daerah.
2. Menyempurnakan formulasi alokasi DAU dengan memperhitungkan perubahan bobot Alokasi Dasar (gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah/PNSD), bobot variabel kebutuhan fiskal, bobot variabel kapasitas fiskal daerah, serta memperbaiki indeks pemerataan kemampuan fiskal antardaerah agar setiap daerah mempunyai kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik (kebutuhan pemenuhan SPM).

3. Mempertahankan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan tetap memberikan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah menjadi 100 persen.
4. Mempertimbangkan afirmasi kepada daerah konservasi dengan memperhitungkan kemampuan daerah dalam mempertahankan luas hutan tanaman nasional.
5. Menyempurnakan formula alokasi DAU agar terjadi pemerataan antardaerah dan keseimbangan alokasi provinsi dan kabupaten/kota melalui perbaikan indeks pemerataan kemampuan fiskal antardaerah, kepadatan penduduk, *span of control* kewilayahan, dan tingkat kemahalan antardaerah.
6. Mengalokasian pagu DAU nasional dalam APBN bersifat final untuk memberikan kepastian pendanaan bagi APBD.
7. Memperhitungkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) serta formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dalam formulasi DAU.
8. Pengalokasian DAU untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik di daerah untuk pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik, konektivitas antardaerah, peningkatan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan dengan mengarahkan pengalokasian sekurang-kurangnya 25 persen dari DTU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk membiayai belanja infrastruktur, disertai pengetatan kepatuhan berupa pengenaan sanksi atas ketidakpatuhan penyampaian laporan dan pemenuhan alokasi minimal DTU untuk infrastruktur tersebut.
9. Mendukung kebijakan bantuan pendanaan bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efektif melalui penambahan peran DAU berupa (a) DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan; (b) DAU Tambahan bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan (c) DAU Tambahan bantuan pendanaan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dana Alokasi Umum tambahan telah dialokasikan untuk dukungan pendanaan kelurahan sejak tahun 2019. Dukungan pendanaan tersebut diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang telah dikategorikan menjadi tiga kategori berdasarkan kinerja pelayanan dasar publik.

Pemerintah Daerah tetap harus menunjukkan komitmen untuk mengalokasikan pendanaan bagi kelurahan dari sumber pendapatan lainnya dalam APBD sesuai amanat PP No.17/2018 tentang Kecamatan. Dukungan keuangan bagi kelurahan melalui DAU tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan, serta mempercepat penanganan permasalahan pembangunan di perkotaan pada umumnya, dan di kelurahan pada khususnya, melalui pembangunan sarana dan prasarana dasar dan penguatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Sama seperti tahun 2020, DAU Tambahan pada tahun 2021 dialokasikan untuk bantuan pendanaan kelurahan, bantuan pendanaan kecamatan untuk penanganan pandemi COVID-19, kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap anggaran Dana Desa, serta penggajian PPPK, dan kebijakan pemenuhan kekurangan penghasilan tetap perangkat desa. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik daerah dan penguatan kualitas SDM.

Kedua, Dana Transfer Khusus (DTK). Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik, yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud merupakan urusan daerah sesuai dengan pembagian urusan dalam UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan PN RKP. Dana Transfer Khusus bersifat *specific grant* dan diberikan kepada daerah tertentu. Arah kebijakan Dana Transfer Khusus di tahun 2021 antara lain sebagai berikut.

1. Memperkuat penanganan wabah COVID-19 pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan stimulus pada perekonomian pascabencana di daerah.
2. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat (skema reguler) yang mencakup pendidikan, kesehatan, konektivitas, dan aksesibilitas.
3. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran prioritas nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan global melalui skema yang bersifat lintas sektor termasuk mendukung daerah konservasi, kawasan strategis dan kewilayahan (skema penugasan) sesuai dengan lokasi prioritas nasional dan juga dengan mempertimbangkan daerah afirmasi sebagai *mainstreaming* lokasi prioritas bagi daerah-daerah tertinggal, terluar dan terdepan, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan daerah berciri kepulauan.
4. Mempertajam sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pengalokasian dan pengelolaan DTK dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya.
5. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan dalam pengalokasian dan pemanfaatan DTK dengan memperhitungkan (a) satuan biaya, standar belanja, dan indeks kemahalan daerah; (b) realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya; (c) keterkaitan alokasi dan kinerja pembangunan dengan insentif pencapaian kinerja (*reward*); serta (d) penerapan disinsentif bagi daerah yang melakukan pertukaran anggaran DTK dengan APBD.
6. Mendorong skema alokasi hibah (*output based transfer*) bagi daerah dengan kapasitas fiskal tinggi yang melakukan inisiatif pembangunan infrastruktur.
7. Memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan K/L dan pemerintah daerah dalam pengelolaan DTK dengan mengembangkan (a) data dasar dan sistem informasi terpadu berbasis *website*, (b) pendampingan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, (c) pengendalian penyaluran berbasis kinerja, dan (d) pelaporan secara rutin.
8. Memperkuat peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam peningkatan tata kelola DTK yang transparan, adil, dan akuntabel.
9. Meningkatkan investasi di daerah melalui dukungan DTK terhadap *creative financing* sebagai bentuk sumber pendanaan yang terintegrasi (*integrated funding*).
10. Memperkuat pengelolaan DTK di daerah melalui perbaikan perencanaan, penilaian kinerja pelaksanaan, dan evaluasi pencapaian target.
11. Melanjutkan secara selektif beberapa program yang dibiayai DTK di tahun 2020 yang selaras dengan upaya pemulihan ekonomi.

SK No 054582 A

Dana Transfer Khusus dibagi menjadi dua, yaitu DAK Fisik dan Nonfisik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik bertujuan untuk mendorong penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik, pemenuhan SPM, pencapaian PN RKP tahun 2021, serta percepatan pembangunan daerah dan kawasan. Pada tahun 2021, DAK Fisik dibagi menjadi dua jenis, yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan. Arah kebijakan umum DAK Fisik tahun 2021 sebagai berikut.

1. Dilakukan *refocusing* bidang dan kegiatan DAK Fisik agar alokasi per daerah signifikan dan optimal dalam rangka pemulihan dampak pandemi COVID-19.
2. DAK Fisik diutamakan bagi kegiatan yang dapat berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19.
3. DAK Fisik dialokasikan berdasarkan usulan kebutuhan daerah yang selaras dengan prioritas nasional, untuk peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik serta percepatan pembangunan aksesibilitas dan konektivitas daerah.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mendukung program merdeka belajar dan peningkatan kemampuan pelayanan rumah sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk mendukung pencegahan dan penangan krisis kesehatan melalui penambahan fasilitas layanan, dan alat kesehatan.
5. Kegiatan berbasis program yang bersifat multibidang untuk mendukung penanganan kematian ibu dan stunting, penanggulangan kemiskinan melalui perluasan akses perumahan, air minum, dan sanitasi layak, ketahanan pangan, dan penyediaan infrastruktur berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 secara nasional.
6. Memperkuat sinergi pendanaan kegiatan yang dibiayai dari K/L dan DAK Fisik, serta sumber-sumber pendanaan daerah lainnya.
7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
8. Perbaikan pengelolaan DAK Fisik berbasis *medium term planning.*
9. Mengembangkan DAK Fisik sebagai insentif terhadap pembiayaan pembangunan yang bersumber dari non-APBN (*creative financing*).
10. Kegiatan sangat terbatas, selektif, dan berdampak langsung ke masyarakat.
11. Skala dan nilai kegiatan relatif besar sehingga daerah tidak mampu membiayai melalui APBD Non-DAK, serta daya ungkit dan manfaat besar ke masyarakat.
12. Meningkatkan kepatuhan terhadap pelaporan, pemantauan dan evaluasi atas capaian *output, immediate outcome,* dan *outcome.*

DAK Fisik terdiri dari jenis DAK Reguler dan DAK Penugasan (afirmasi menjadi lokasi prioritas keberpihakan untuk 2.212 kecamatan di 181 kabupaten/kota). DAK Reguler difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar melalui lima bidang, yakni: (1) Bidang Pendidikan; (2) Bidang Kesehatan termasuk Kesehatan Reproduksi dan KB; serta (3) Bidang-bidang yang mendukung percepatan konektivitas, yang terdiri atas (a) Bidang Jalan, (b) Bidang Transportasi Perairan, dan (c) Bidang Transportasi Perdesaan. Bidang Transportasi Perairan dan Transportasi Perdesaan difokuskan untuk daerah berciri afirmasi.

DAK Penugasan terdiri atas empat tematik utama bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran MP dan Prioritas Nasional tertentu sejalan dengan tema RKP Tahun 2021, serta dalam rangka mendukung pemulihan (*recovery*) ekonomi pascadampak pandemi COVID-19. Tematik-tematik tersebut mencakup antara lain (1) Tematik Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Penurunan *Stunting*, terdiri atas bidang (a) kesehatan termasuk subbidang KB, (b) air minum, (c) sanitasi, (d) subbidang lingkungan hidup; (2) Tematik Penanggulangan Kemiskinan Melalui Perluasan Akses Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi Layak, terdiri dari bidang (a) perumahan dan permukiman, (b) air minum, (c) sanitasi; (3) Tematik Ketahanan Pangan, terdiri dari bidang (a) irigasi, (b) pertanian, (c) kelautan dan perikanan, (d) jalan, dan (e) subbidang kehutanan; (4) Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan, terdiri dari bidang (a) jalan, (b) pariwisata, (c) industri kecil dan menengah (IKM), dan (d) subbidang lingkungan hidup. Daerah penerima DAK Penugasan mencakup Kawasan Barat dan Timur Indonesia, sesuai lokasi prioritas dalam koridor target Prioritas Nasional.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang berkualitas. Untuk tahun 2021, DAK Nonfisik digunakan untuk memperkuat penanganan wabah COVID-19 pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan stimulus pada perekonomian pascabencana di daerah terdampak.

DAK Nonfisik terdiri antara lain (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); (3) Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus; (4) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; (5) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; (6) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan; (7) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan fokus pada penanganan pandemi (COVID-19, DBD, dan pandemi lainnya) di daerah; (8) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); (9) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; (10) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM); (11) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS); (12) Dana Pelayanan Kepariwisataan; (13) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya; (14) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; (15) Dana Fasilitasi Penanaman Modal; serta (16) Dana Pelayanan Ketahanan Pangan.

Arah kebijakan umum DAK Nonfisik tahun 2021 yaitu sebagai berikut.

1. Mengarahkan perencanaan dengan memperhatikan arah kebijakan nasional baik melalui belanja K/L ataupun TKDD lainnya.
2. Mendorong upaya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 melalui dukungan perbaikan dan peningkatan layanan pada sektor-sektor yang mempunyai karakteristik penciptaan lapangan kerja seperti pariwisata, UMKM, dan jasa produktif lainnya, serta mendorong peningkatan investasi di daerah melalui dukungan operasionalisasi dan perbaikan sistem pelayanan investasi di daerah.
3. Mengarahkan pemanfaatan untuk peningkatan kualitas SDM dan mendorong daya saing daerah terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan melalui pengalokasian berbasis *output* dan *outcome* termasuk penanganan pandemi COVID-19, DBD, dan pandemi lainnya.
4. Mengarahkan perbaikan pengelolaan DAK Nonfisik, termasuk kebijakan pengalokasian dan penyaluran pada peningkatan pengawalan atas capaian *output* dan *outcome*. Hal ini terutama akan dilakukan melalui pengelolaan DAK Nonfisik yang berbasis kinerja, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan dan pelaporan yang akan dilakukan integrasi aplikasi antarkementerian.
5. Penguatan sinergi antara DAK NonFisik dengan DAK Fisik maupun belanja K/L.
6. Menyempurnakan *unit cost* dan data sasaran yang mencerminkan kebutuhan riil daerah.
7. Memperkuat kebijakan afirmasi untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik.

2.5.3.2 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian dan/atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun arah kebijakan DID tahun 2021 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan DID sebagai insentif bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik, pengembangan ekonomi, dan meningkatkan daya saing sesuai dengan prioritas daerah.
2. Menyempurnakan formula penghitungan alokasi DID yang memperhitungkan dan mengaitkan langsung jumlah alokasi dana dengan kinerja keluaran, hasil dan dampak nyata yang dihasilkan dari kebijakan, inisiatif, inovasi, kreativitas, dan capaian keunggulan pemerintah daerah.
3. Mendukung kebijakan dan prioritas nasional.
4. Melakukan penyederhanaan dan *refocusing* kategori/indikator yang lebih mencerminkan kinerja pemerintah daerah.
5. Mendorong peningkatan investasi dan kegiatan ekspor.
6. Mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pembiayaan kreatif (*creative financing*).

7. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan APBD dan belanja daerah.
8. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan, terutama untuk mendukung pengurangan sampah plastik.
9. Memberikan dukungan insentif kepada daerah untuk pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 melalui kebijakan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk UMKM.

2.5.3.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan sesuai dengan UU No.21/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35/2008, tentang Otsus Papua dan Papua Barat yang terutama ditujukan untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga diberikan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung konektivitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi darat, laut, atau udara yang berkualitas. Adapun Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diberikan sesuai dengan UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang terutama ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Arah kebijakan untuk Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemanfaatan dana bagi (a) penguatan dan pemberdayaan rakyat Aceh berlandaskan budaya dan syariat Islam yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan; (b) penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan adil; (c) pelayanan publik dan pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; dan (d) peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja.
2. Memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota dan K/L dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana.
3. Meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan.
4. Memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan anggaran, terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
5. Memperbaiki tatakelola Dana Otsus dengan memperkuat peran APIP dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.

Arah kebijakan untuk Dana Otsus Papua dan Papua Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemanfaatan dana bagi (a) penguatan dan pemberdayaan Orang Asli Papua berlandaskan budaya dan adat yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan; (b) pengembangan wilayah adat dalam mendukung perekonomian wilayah; (c) penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil; (d) pelayanan publik dan pengembangan ekonomi untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; dan (e) peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja.

2. Memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan pemerintah kabupaten/kota dan K/L dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pemanfaatan dana.
3. Mempertajam sinkronisasi dan integrasi pemanfaatan Dana Otsus dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya, termasuk dunia usaha dan mitra pembangunan.
4. Meningkatkan skema pendanaan baru yang akan meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan (*output* riil) serta dapat mengendalikan nilai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).
5. Memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan anggaran, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
6. Memperbaiki tata kelola Dana Otsus dan DTI dengan memperkuat peran APIP dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.
7. Mempersiapkan strategi keberlanjutan terhadap implementasi Dana Otsus Papua dan Papua Barat.
8. Menggunakan teknologi informasi yang handal sejak proses perencanaan sampai dengan pelaporan.
9. Mendorong pemanfaatan pendanaan Otonomi Khusus untuk dapat menjawab masalah fundamental jangka menengah dan panjang terkait SDM dan daya saing masyarakat.
10. Memperkuat kelembagaan dan koordinasi antarinstansi dengan membangun SOP *link* yang terintegrasi antarinstansi.
11. Memperkuat mekanisme dan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih tajam, mendalam, dan fokus.
12. Merancang regulasi yang kuat dan lengkap untuk memayungi kekhususan tanah Papua yang menghilangkan tumpang tindih dengan regulasi sektoral.

Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai UU No.13/2012 dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UU Pemerintahan Daerah, yaitu (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.

Arah kebijakan untuk Dana Keistimewaan DIY Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemanfaatan dana untuk (a) penguatan dan pemberdayaan rakyat berlandaskan budaya dan adat; (b) penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; (c) penguatan ketahanan sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; dan (d) peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja.
2. Memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah kabupaten/kota dan K/L dalam

perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana.

3. Mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.

2.5.3.4 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan sejalan dengan PN dan prioritas daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penggunaan Dana Desa oleh desa berdasarkan pada hasil keputusan musyawarah desa yang ditetapkan melalui peraturan desa tentang RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Kewenangan Desa. Dana Desa ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (*on top*) secara bertahap sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan negara.

Arah kebijakan Dana Desa tahun 2021 mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020-2024, dengan beberapa penekanan sebagai berikut.

1. Menyempurnakan formulasi pengalokasian Dana Desa melalui (a) penyesuaian bobot alokasi dasar, (b) peningkatan bobot alokasi formula termasuk internalisasi kebijakan insentif di dalamnya, serta (c) pemberian afirmasi secara proporsional kepada desa-desa sangat tertinggal.
2. Mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan desa, yaitu berkurangnya 10.000 desa tertinggal dan meningkatnya 5.000 desa mandiri, mempercepat pengurangan kemiskinan perdesaan, berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
3. Mempercepat penyaluran Dana Desa melalui penyederhanaan regulasi dan administrasi dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas kinerja.
4. Memastikan adanya responsif gender terutama peran perempuan, remaja, penyandang disabilitas dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa khususnya terkait dengan upaya kesehatan keluarga, pencegahan dan penanganan *stunting* dan wabah.
5. Mendorong kegiatan padat karya tunai, dengan melibatkan masyarakat yang miskin, menganggur, setengah menganggur, dan keluarga yang memiliki ibu hamil dan balita.
6. Mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk mendorong transformasi ekonomi desa/kampung terpadu melalui pengembangan desa wisata, desa digital, pengembangan produk unggulan desa, dan peningkatan kapasitas dan peran BUMDes/BUMDes Bersama.
7. Mendorong berkembangnya usaha ekonomi mikro skala rumah tangga berbasis kelompok dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa yang mandiri, berkelanjutan, inklusif, dan memiliki nilai tambah sosial ekonomi.
8. Memperluas penggunaan Dana Desa untuk upaya pemerataan akses listrik yang menjangkau masyarakat di seluruh desa melalui program listrik perdesaan dengan penyediaan sarana dan prasarana energi listrik yang mengutamakan pemanfaatan

SK No 054588 A

energi baru terbarukan setempat, serta membantu penyambungan baru listrik bagi masyarakat desa yang tidak mampu.

9. Memastikan keberlanjutan akses dan peningkatan kualitas pelayanan dasar di tingkat desa.
10. Mendorong pemanfaatan Dana Desa yang responsif terhadap bencana dan situasi yang memerlukan penanganan khusus seperti *stunting*, pandemi COVID-19, wabah demam berdarah, dan kebencanaan lainnya, terutama pada saat kejadian awal bencana terjadi.
11. Memperluas penggunaan Dana Desa untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan desa yang lebih kompleks dan sejalan dengan tema dan prioritas nasional serta daerah, termasuk untuk (namun tidak terbatas pada) pembiayaan tenaga ahli/konsultan/teknisi/desainer yang dibutuhkan desa, serta mempertimbangkan efisiensi dan skala ke ekonomian pemanfaatan Dana Desa melalui kerjasama antardesa dan/atau kawasan perdesaan.
12. Mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung kegiatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah desa.
13. Mendukung desa dalam mendorong peningkatan produksi hasil pertanian.
14. Melakukan penguatan *monitoring* pemanfaatan Dana Desa.

2.5.4 Sumber Pendanaan Pembangunan

2.5.4.1 Sumber Pendanaan Pemerintah

Pendanaan pemerintah dapat bersumber dari pajak, PNBP maupun sumber keuangan lain seperti penerbitan SBN, pinjaman dan hibah dari dalam dan luar negeri yang berasal dari (1) lembaga pembiayaan multilateral dan negara bilateral; (2) lembaga keuangan (bank dan nonbank); dan (3) investor, baik perseorangan maupun badan usaha.

Pendanaan yang bersumber dari penerimaan pajak, PNBP, dan penerbitan SBN akan digunakan untuk kegiatan operasional dan investasi pemerintah di berbagai sektor prioritas pembangunan termasuk penyediaan layanan penanggulangan pandemi dan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sedangkan untuk kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan SBSN akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana pelayanan umum dan pemberdayaan industri dalam negeri yang kegiatannya memiliki aset yang dapat digunakan sebagai underlying.

Pendanaan melalui pinjaman luar negeri akan difokuskan pada kegiatan pembangunan yang dapat memberikan nilai tambah utamanya (1) pengembangan dan penguatan sumber daya manusia; (2) transformasi ekonomi dan percepatan investasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing yang meliputi reformasi struktural, penguatan inklusi keuangan dan pelayanan keuangan digital (*financial inclusion and digital financial services*), serta kegiatan pembangunan infrastruktur pembangunan; (3) peningkatan ekspor, yang meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial; (4) penguatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*), ketahanan air dan pangan (*water and food security*), ketahanan energi, dan manajemen resiko bencana; (5) mendukung kegiatan riset, inovasi

dan pengembangan teknologi; serta (6) meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan. Untuk pinjaman luar negeri tunai akan dimanfaatkan dalam mendukung pembiayaan belanja barang dan modal termasuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 pada sektor kesehatan.

Untuk pinjaman dalam negeri akan digunakan utamanya pada kegiatan yang dapat mendukung pengembangan industri dalam negeri. Sedangkan hibah akan digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional di bidang pembangunan rendah karbon, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kebijakan dan bantuan untuk memperkuat kelembagaan, dukungan inovasi untuk mempercepat pencapaian SDGs, kajian penyiapan kegiatan pinjaman, berbagi pengetahuan, penanggulangan bencana alam dan nonalam, serta bantuan kemanusiaan.

2.5.4.2 Sumber Pendanaan Non-Pemerintah

Sesuai dengan amanat dalam Perpres No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, paradigma baru pendanaan infrastruktur adalah menjadikan APBN/D sebagai sumber daya terakhir (*last resource*) dan mengutamakan skema pembiayaan kreatif serta KPBU sebagaimana diatur dalam Perpres No.38/2015.

Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur berdasarkan pembagian risiko yang optimal antara pemerintah dan badan usaha. KPBU dilakukan untuk (1) menjembatani kesenjangan pendanaan dan pembiayaan pemerintah melalui investasi swasta, termasuk prakarsa badan usaha (*unsolicited*) pada penyediaan infrastruktur; dan (2) mendapatkan efisiensi investasi dari badan usaha melalui upaya optimalisasi pembagian risiko. Dengan skema KPBU ini, pemerintah dapat menyediakan infrastruktur tepat waktu (*on schedule*), tepat anggaran (*on budget*), dan tepat layanan (*on service*).

Pemanfaatan KPBU untuk pembangunan infrastruktur ekonomi akan terus diperluas dan sudah mulai dikembangkan untuk infrastruktur sosial antara lain pendidikan, kesehatan, dan lain- lain. Saat ini, tata cara pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur telah disempurnakan melalui Permen PPN/Kepala Bappenas No.2/2020. Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesiapan KPBU dan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan rencana pembangunan nasional, maka sesuai dengan Perpres No.38/2015 dan Permen PPN/Kepala Bappenas tersebut di atas, Menteri PPN menetapkan Daftar Rencana KPBU (DRK), yang terdiri dari daftar proyek KPBU yang siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan. Pada tahun 2020 telah ditetapkan DRK dengan 28 proyek dalam kategori proses penyiapan senilai Rp84,1 triliun, dan 11 proyek dalam kategori siap ditawarkan senilai Rp170,9 triliun.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan percepatan pelaksanaan proyek-proyek KPBU, pemerintah telah membentuk suatu wadah koordinasi antar-K/L yang tergabung dalam Kantor Bersama KPBU yang berperan sebagai koordinator dan fasilitator perencanaan, penyiapan, transaksi, pelaksanaan dan pengawasan (*monitoring*) serta pengevaluasian proyek-proyek yang akan menggunakan skema KPBU. Selain itu Kantor Bersama KPBU juga berfungsi sebagai pusat informasi dan peningkatan kapasitas untuk pemangku kepentingan KPBU. Fasilitasi yang diberikan oleh anggota Kantor Bersama sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SK No 054590 A

Sebagai dampak adanya penurunan perekonomian global yang disebabkan pandemi COVID-19, maka dalam jangka menengah investasi melalui skema KPBU yang berbasis pengguna membayar (*user pay*) diperkirakan akan sulit untuk direalisasikan. Untuk itu, pemerintah akan mengedepankan proyek KPBU dengan skema pembayaran atas dasar ketersediaan layanan (*availability payment*) sambil tetap meningkatkan kesiapan proyek-proyek KPBU secara umum. Dalam upaya mendorong pemanfaatan skema KPBU dalam pelaksanaan proyek, arah kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah (1) menstandarisasi proses penyeleksian proyek KPBU (*screening*) dengan memperkuat analisis *Value for Money* dan aspek Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS) proyek; (2) meningkatkan komitmen menteri/kepala lembaga/kepala daerah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam melaksanakan proyek KPBU dengan penyediaan anggaran pada tahap perencanaan, penyiapan, transaksi dan dukungan kelayakan proyek melalui APBN dan/atau APBD; dan (3) meningkatkan kualitas perencanaan, penyiapan, transaksi dan pelaksanaan proyek dengan mengembangkan metode-metode dan prinsip-prinsip yang dipakai dalam standar internasional, antara lain *Five Case Model* (5CM), *Project Initiation Routemap* (PIR) dan *Building Information Modelling* (BIM), dll.

Sedangkan pemanfaatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR), filantropi, dan Dana Keagamaan akan berfokus pada pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana tersebut akan diselaraskan kegiatannya dengan program pemerintah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Diharapkan bahwa banyak investasi publik di masa depan akan didanai dari bauran berbagai sumber pendanaan (*blended finance*) untuk kegiatan dengan manfaat publik yang besar terutama yang terkait dengan pencapaian SDGs. Dalam pelaksanaan dan pengembangan bauran pembiayaan (*blended finance*) diperlukan beberapa langkah di antaranya (1) menyediakan dan menyempurnakan kerangka hukum dan peraturan sebagai dasar inovasi pendanaan. Sebagai negara berpendapatan menengah atas, peluang Indonesia mendapatkan pendanaan berbiaya lunak dan konvensional diperkirakan makin terbatas. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan tersebut perlu dukungan kerangka hukum yang memadai; (2) memposisikan pembiayaan pemerintah sebagai pengungkit (*leveraging*) dan katalisator untuk mengembangkan sumber pendanaan nonpemerintah; serta (3) mengutamakan penggunaan sumber-sumberpendanaan nonpemerintah sesuai dengan kelayakan finansial, ekonomi, dan sosialnya.

2.5.5 Integrasi dan Sinergi Pendanaan Pembangunan

Secara umum, pendanaan pembangunan mengedepankan paradigma bahwa pemanfaatan pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas yaitu (1) pendanaan swasta, (2) KPBU, (3) BUMN, dan (4) APBN sebagai sumber terakhir yang dapat digunakan. Namun demikian, pendanaan dalam RKP 2021 masih difokuskan pada pembiayaan stimulus perekonomian untuk meminimalkan dampak pandemi COVID-19, dengan sumber utama berasal dari APBN. Selain itu, pendanaan dalam RKP 2021 juga diarahkan untuk pembiayaan MP, khususnya yang memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemulihan ekonomi seperti pariwisata, pembangunan infrastruktur daerah, dan industri.

Pendanaan proyek secara umum harus menyinergikan berbagai potensi sumber pendanaan melalui pengambilan kebijakan yang tepat dan menyeluruh. Untuk melakukan

hal tersebut, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah, antara lain (1) koordinasi lintas K/L, lintas instansi, dan antartingkatan pemerintahan; (2) pengembangan integrasi sistem dan data pada dokumen perencanaan, penganggaran; serta (3) evaluasi melalui pemanfaatan basis data yang sama dan termutakhir. Hal ini sekaligus akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan belanja negara. Pada sisi perkuatan sinergi pusat dan daerah dilakukan dengan pengembangan dan perluasan mekanisme hibah ke daerah melalui transfer berbasis kinerja (*output based transfer*). Hal ini juga sangat terkait dengan pengendalian program untuk menjamin pencapaian prioritas nasional di daerah.

2.5.6 Penyiapan Proyek Investasi Pemerintah

Penyiapan investasi pemerintah perlu segera dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi kegiatan untuk menjaga momentum pembangunan. Dengan adanya penjadwalan dan realokasi anggaran sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19 maka diperkirakan ada kecukupan sumberdaya dan waktu untuk meningkatkan kualitas penyiapan proyek investasi pemerintah. Kesiapan usulan kegiatan pembangunan sangat diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat secara konkret berkontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan. Persiapan proyek dapat dilakukan dengan mengacu pada penilaian kebutuhan, pilihan teknis, biaya hingga skema dan sumber pembiayaan yang tepat untuk proyek tersebut. Selanjutnya dokumen proyek dapat disiapkan dalam bentuk desain dan detail kesiapan kegiatan proyek yang mudah untuk dimonitor oleh pelaksana dan para pemangku kepentingan. Persiapan proyek perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan tepat waktu dan efisien.

Pendanaan penyiapan investasi perlu dilakukan secara tepat mengingat selama ini alokasi dana penyiapan belum diperhitungkan dengan baik sehingga kualitas penyiapan belum memadai dan mempengaruhi proses pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Selain dari APBN, sumber pembiayaan penyiapan proyek dapat dilakukan dari bantuan dan hibah luar negeri, penugasan BUMN, dan kerja sama dengan lembaga keuangan internasional dalam pengembangan berbagai mekanisme dan instrumen pembiayaan proyek termasuk melalui skema *blended finance*.

SK No 054592 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 3

TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

SK No 054593 A

BAB III

TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tema dan sasaran pembangunan RKP 2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN 2020–2024, hasil evaluasi pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020 yang kemudian diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional pascapandemi COVID-19.

3.1. RPJMN 2020-2024 dan Arahan Presiden

3.1.1. RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.18/2020 tentang RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 menghadapi tantangan besar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di awal tahun 2020.

Sesuai arahan RPJPN 2005–2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020–2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Diperlukan kerja keras untuk mempertahankan pencapaian pembangunan pada periode RPJMN sebelumnya agar sasaran di atas dapat tercapai.

3.1.2. Arahan Presiden

Visi Misi Presiden terpilih tahun 2020–2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005–2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 mempunyai visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

SK No 054594 A

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 yang disusun berlandaskan RPJPN 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi: (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2. Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

3.2.1. Tema Pembangunan

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020–2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019, serta kebijakan pembangunan tahun 2020.

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP Tahun 2021 diarahkan kepada proses pembangunan untuk pemulihan yang terdampak pandemi COVID-19. Tema pembangunan RKP Tahun 2021 adalah **"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"**.

3.2.2. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi COVID-19, pembangunan manusia dan masyarakat, pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup dengan indikator pembangunan sebagaimana pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Pembangunan	Target 2021
1. Meningkatnya percepatan pemulihan ekonomi	
a. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0
b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,7-9,1
c. Rasio Gini (nilai)	0,377–0,379
d. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) **menuju target 29% di 2030*	23,55–24,05
2. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	
a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	72,78–72,95
b. Tingkat Kemiskinan (%)	9,2–9,7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

3.2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Mengacu pada tema dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan ditempuh pada tahun 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), *health security*, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1

Tema dan Strategi Pembangunan Tahun 2021



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

3.3. Prioritas Nasional

Dalam tujuh PN pada RKP Tahun 2021, arah kebijakan masing-masing PN adalah untuk mewujudkan strategi pembangunan tahun 2021 dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

   Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya di antaranya melalui peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

   Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

   Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan *health security*; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak COVID-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi COVID-19.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

   Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19 melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

   Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi COVID-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalitasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

   Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi COVID-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

   Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (*law and order*). Kebijakan ini di antaranya dilaksanakan melalui penguatan integrasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik; penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerja sama pembangunan internasional; optimalisasi proses penegakan hukum secara konvensional dalam sistem peradilan akibat kebijakan *physical distancing*; serta pemulihan kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2021, terdapat 43 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) pada PN yang akan dilaksanakan tahun 2021, yaitu 41 MP sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan 2 MP tambahan menyesuaikan perkembangan terkini arahan Presiden serta terkait dengan kondisi pandemi COVID-19. Adapun beberapa MP pada tiap PN sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Selain itu, pelaksanaan RKP Tahun 2021 telah memadukan usulan Pemerintah Daerah, baik melalui usulan Gubernur (dalam Rapat Koordinasi Gubernur), maupun berbagai hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Berbagai Proyek Prioritas Pembangunan (ProP dan MP) tahun 2021 yang mencakup kontribusi berbagai proyek-proyek K/L juga telah memperhatikan keterpaduannya dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang merupakan proyek-proyek fisik/infrastruktur strategis sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di

daerah. Adapun PSN tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Perpres No.79/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang serta Perpres No.80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Gambar 3.2

Beberapa *Major Project* (MP)
pada Prioritas Nasional yang Akan Dilaksanakan Tahun 2021



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 4

PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA

SK No 054600 A

BAB IV

PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA

4.1 Prioritas Nasional

Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, pada tahun 2021 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN), seperti pada Gambar 4.1. Penjelasan tiap PN akan mencakup pendahuluan yang memuat tantangan atau permasalahan pembangunan yang melatarbelakangi penentuan sasaran PN yang hendak dicapai, dilanjutkan dengan penjelasan Program Prioritas (PP) dan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP).

Gambar 4.1

Kerangka Prioritas Nasional RKP 2021



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Selain itu, dijelaskan pula berbagai upaya memulihkan dampak pandemi COVID-19 melalui kegiatan-kegiatan yang terkait pada setiap PN, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Seluruh pelaksanaan PN didukung dengan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta alokasi pendanaan yang diarahkan pada program-program pembangunan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran prioritas.

4.1.1 Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, pembangunan ekonomi tahun 2021 diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi. Sebagai langkah konkret, telah disusun delapan MP untuk memperkuat ketahanan ekonomi.

4.1.1.1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat dan pandemi COVID-19. Pemerintah menetapkan PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, yang dilaksanakan untuk mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa-jasa modern, yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaannya ditopang oleh daya dukung dan ketersediaan SDA sebagai modal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta kemampuan untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, menarik investasi, serta meningkatkan ekspor dan daya saing perekonomian.

Dalam mencapai sasaran tersebut, tahun 2021 memiliki tantangan yang cukup besar. Dari sisi eksternal, proyeksi pertumbuhan global yang melambat dan pemulihan pascapandemi COVID-19, berdampak pada lambatnya pemulihan perdagangan global, yang mempengaruhi aktivitas industri, rendahnya perjalanan wisata secara global yang mempengaruhi pendapatan devisa dari pariwisata, serta lambatnya arus investasi yang mempengaruhi perluasan ekonomi.

Sedangkan pada sisi internal, berkaitan dengan kapasitas pengelolaan pangan dan energi untuk memenuhi konsumsi masyarakat dan dunia usaha, kebutuhan penciptaan lapangan kerja baru yang tinggi di tengah terbatasnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memanfaatkan peluang usaha, efektivitas deregulasi kebijakan untuk mendorong perluasan investasi, industri dan perdagangan, pemulihan daya beli masyarakat untuk berwisata, dan perbaikan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu juga diperlukan pendalaman sektor keuangan dengan mempertahankan kedaulatan dan stabilitas keuangan.

Penanganan berbagai tantangan tersebut akan dilaksanakan di antaranya melalui (1) penguatan sistem pangan berkelanjutan, yaitu dengan menjalankan Program Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan; (2) upaya peningkatan ketahanan energi dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi, serta meningkatkan keandalan infrastruktur energi; (3) penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor dan pengadaan produk dalam negeri, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja yang didukung penerapan teknologi, dan integrasi sektor hulu-hilir; (4) pemulihan pariwisata Indonesia dengan meningkatkan konektivitas dan *event*, memperluas

pemasaran, serta meningkatkan daya dukung dan diversifikasi destinasi pariwisata; dan (5) penguatan ekosistem kelembagaan dan regulasi untuk mendukung kepastian usaha, perluasan investasi, efisiensi distribusi dan perdagangan, serta peningkatan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4.1.1.2. Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Sasaran, Indikator, dan Target
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
1.	**Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan**				
	1.1 Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional (%)	9,15	13,40	14,50	~23,00
	1.2 Skor Pola Pangan Harapan (nilai)	86,40	90,40	91,60	95,20
	1.3 Penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan (jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP))	11	11	11	11
2.	**Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian**				
	2.1 Rasio kewirausahaan nasional (%)	3,30	3,55	3,65	3,95
	2.2 Pertumbuhan PDB Pertanian (%)	3,64	1,65	3,62	4,00-4,10
	2.3 Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1(a)) (%)	3,80	(2,72) [d]	5,04	8,10
	2.4 Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1*) (%)	19,70	20,64 [d]	19,63-19,84	21,00
	2.5 Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)*) (US$ Miliar)	19,70 [a]	3,30-4,90 [e]	4,80-8,50	21,50-22,90
	2.6 Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (%)	4,80 [b]	4,00 [e]	4,20	4,50
	2.7 Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	2,51	(0,14)-0,35	2,30-2,90	2,70-3,00
	2.8 Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	4,45	(4,80)	6,40	8,00-8,40

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
	2.9 Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	(2,60)	2,62 [d]	8,07 [d]	10,10
	2.10 Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	(0,87)	(7,50) [d]	4,49	6,20
	2.11 Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1(a)) (%)	9,76 [c]	8,01 [d]	8,18 [f]	10,70-12,30

Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024; Rencana Strategis K/L Tahun 2020-2024; RKP 2020

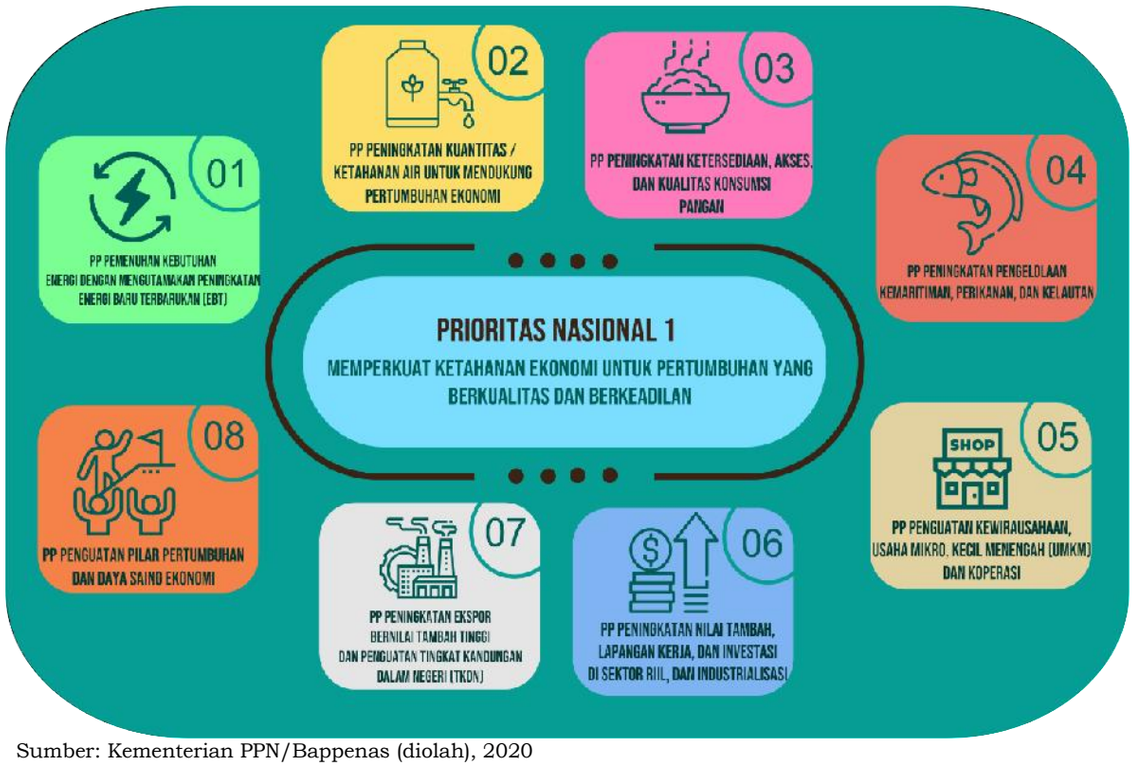
Keterangan: Angka dalam kurung pada indikator menunjukkan indikator SDGs; *) Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs); [a] Prognosa 2019; [b] Prognosa/estimasi tahun 2018; [c] LKPP Tahun 2019 *audited*; [d] *Outlook* Bappenas per November 2020; [e] Target hasil penyesuaian dampak pandemi COVID-19, [f] APBN 2021

4.1.1.3. Program Prioritas

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan akan dilakukan melalui delapan Program Prioritas (PP) seperti yang tercantum dalam Gambar 4.2. Sementara sasaran, indikator, dan target PP pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan terdapat pada Tabel 4.2.

Gambar 4.2

Kerangka PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Tabel 4.2

**Sasaran, Indikator, dan Target PP dari
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)					
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)					
1.1	Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT (Giga Watt) – kumulatif	10,29	10,98	11,98	19,34
1.2	Pemanfaatan *biofuel* untuk domestik (Juta Kilo Liter)	8,40	10,00	10,20	17,40
PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi					
Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi					
2.1	Produktivitas air (*water productivity)* (m^3/kg)	N/A [a)]	3,40	3,30	3,00
PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan					
Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan					
3.1	Nilai Tukar Petani (NTP) (nilai)	103,21	103,00	102,00-104,00	105,00
3.2	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/hari)	2.100	2.100	2.100	2.100
3.3	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	57,00	57,00	57,00	57,00
3.4	*Prevalence of Undernourishment (PoU)* (%)	6,70	6,20	5,80	5,00
3.5	*Food Insecurity Experience Scale (FIES)* (%)	5,80	5,20	4,80	4,00
PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan					
Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan					
4.1	Konservasi Kawasan Kelautan (14.5.1*) (juta ha)	23,10 [b)]	23,40	24,60	26,90
4.2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%)	53,60 [c)]	≤64	≤67	≤80
4.3	Produksi perikanan (juta ton)	23,86[b)]	21,17	27,55	32,70
4.4	Produksi garam (juta ton)	2,85[b)]	2,40	3,10	3,40
4.5	Nilai Tukar Nelayan (nilai)	N/A [h)]	102,00	102,00-104,00	107,00

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi					
Menguatnya kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi					
5.1	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (8.3.1(c)*) (%)	24,82	25,20	26,50	30,80
5.2	Pertumbuhan wirausaha (%)	1,70	2,00	2,50	4,00
5.3	Kontribusi koperasi terhadap PDB (%)	5,54	5,10	5,20	5,50
PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi					
Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi					
6.1	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas (%)	4,30	(2,50) [f]	5,10	8,40
6.2	Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas (%)	17,58	18,71 [f]	17,63-17,84	18,90
6.3	Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp Triliun)	1.165,30 [f]	1.157,00 [i]	1.277,00	1.641,00
6.4	Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	18,90 [d]	17,48 [j]	18,35	22,50
6.5	Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2*) (%)	14,96 [d]	13,61 [j]	14,00	15,70
6.6	Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (juta orang)	14,96	13,90 [i]	14,30	15,00
6.7	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)	19,24	17,25 [i]	17,90	19,90
6.8	Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia/ EODB (Peringkat)	73	Menuju 40	Menuju 40	Menuju 40
6.9	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	809,63	817,20	858,50	1.500,00
6.10	Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	215,94	227,20	268,70	782,00
PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri					
Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)					
7.1	Neraca perdagangan (US$ miliar)	3,51[b]	17,6 [i]	10,76-12,75	15,00
7.2	Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	(5,06)	(4,42)[i]	(6,0) – (7,9)	9,80

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
7.3	Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a)) (juta kunjungan)	16,11	2,80-4,00 [i]	4,00-7,00	16,00-17,00
7.4	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perjalanan)	282,93	120,00-140,00 [i]	180,00-220,00	320,00-335,00
PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi					
Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi					
8.1	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (%)	4,24 [b]	4,47 [f]	4,17 [f]	4,40 [f]
8.2	Biaya logistik terhadap PDB (%)	23,20	23,20	22,20	20,00
8.3	Rasio M2/PDB (%)	38,76	44,5 [f]	39,74 [f]	43,2
8.4	Peringkat *travel and tourism competitiveness index* (peringkat)	40	40	36-39	31-34
8.5	Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*) (%)	0	1,97 [e]	11,99 [e]	Selesai
8.6	Imbal hasil (*yield*) surat berharga negara (%)	7,30 [g]	Meningkat[e]	Menurun	Menurun
8.7	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	10,38	22,94 [e]	25,94 [e]	34,94 [e]

Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024; Rencana Strategis K/L Tahun 2020-2024; RKP 2020; BKPM; BPS

Keterangan: Angka dalam kurung pada indikator menunjukkan indikator SDGs; *) Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs); [a] Indikator baru pada tahun 2020; [b] Realisasi BPS Tahun 2019; [c] Capaian Tahun 2018; [d] Sakernas Agustus tahun 2019, [e] Target RPJMN Tahun 2020-2024 yang disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 dan tercantum dalam Renstra Kementerian Keuangan; [f] Angka/proyeksi sementara; [g] Angka *Yield* SBN Tenor 10 Tahun (data IBPA pada 31 Desember 2019); [h] Perubahan tahun dasar; [i] Target menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19, [j] Sakernas Agustus Tahun 2020

Sebagai upaya memulihkan dampak pandemi COVID-19, berbagai kegiatan penting yang dilakukan sebagai berikut.

1. Pembukaan lapangan pekerjaan yang bersifat padat karya di sektor energi, mineral dan pertambangan, melalui (a) percepatan pembangunan energi terbarukan yang didukung penetapan kebijakan *feed-in tariff* (FIT), pengurangan bea impor, relaksasi TKDN, dan pemberian insentif; (b) pembangunan *strategic reserves* dengan memanfaatkan tangki *idle* di kilang-kilang tua yang tidak berproduksi serta pemanfaatan sumur-sumur lapangan tua yang telah tidak berproduksi sebagai *storage* untuk minyak mentah (*crude oil*) yang diimpor; dan (c) percepatan pembangunan smelter untuk hilirisasi mineral di dalam negeri.
2. Penguatan Perhutanan Sosial berupa *agroforestry, silvopasture,* dan *silvofishery* terutama untuk meningkatkan manfaat lahan terlantar di kawasan hutan dalam

rangka mendukung penyediaan pangan masyarakat, penanggulangan kemiskinan kelompok tani hutan (KTH), serta perlindungan dan penyelamatan kawasan hutan.

3. Revitalisasi sistem pangan, pemenuhan kebutuhan pasar, peningkatan nilai tambah, dan pemulihan lapangan kerja pertanian-perikanan, melalui (a) rantai pasok *online* dan penguatan logistik pangan, termasuk penguatan rantai dingin perikanan dan sistem distribusi garam; (b) pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan pemenuhan permintaan ekspor untuk produk pangan/perikanan dan kelautan bernilai tinggi; (c) peningkatan kegiatan padat karya dalam bidang pertanian, perikanan dan kelautan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan; (d) perlindungan bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; (e) pendayagunaan integrasi elektronik data pangan mendukung perencanaan dan pengendalian akses dan kualitas konsumsi pangan; (f) bantuan distribusi pangan antarmoda di wilayah basis produksi dan akses pasar konsumen; (g) bantuan pangan untuk rumah tangga rawan pangan; (h) peningkatan produktivitas pertanian di *dryland* dan *upland* serta pemanfaatan lahan-lahan terlantar, seperti pada perkebunan; (i) pengembangan *food estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan); (j) pengembangan *triple helix* peternakan sapi terpadu dan riset inovatif kolaboratif, serta (k) pengembangan SNI beras biofortifikasi, jamu dan kratom.

4. Pemulihan usaha koperasi dan UMKM, melalui (a) pemberian pinjaman modal kerja, termasuk melalui *channelling* dengan lembaga keuangan (Perbankan, PNM, BPR, Pegadaian, PNM, Koperasi); (b) pemberian keringanan kredit dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran dan subsidi bunga bagi UMKM yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan; (c) pendampingan pemulihan usaha dan rencana keberlanjutan usaha dalam bidang UMKM; (d) pemberian insentif pajak berupa penurunan tarif pajak bagi pelaku UMKM; (e) peningkatan akses koperasi dan UMKM terhadap *e-commerce* atau *marketplace* melalui pelatihan dan inkubasi untuk memperluas pangsa pasar UMKM; (f) penyaluran pembiayaan serta pendampingan untuk mengakses saluran pembiayaan untuk koperasi dan UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi), Mekaar, ULaMM, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi dan UMKM, dan lainnya; (g) fasilitasi pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN; (h) pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB koperasi dan UMKM; serta (i) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah Besar (UMB) untuk menciptakan rantai pasok domestik yang terintegrasi serta mendorong produktivitas dan pemasaran.

5. Pemulihan industri pengolahan dan perdagangan, melalui (a) fasilitasi *re-hiring* dan *re-training* tenaga kerja; (b) pemulihan produktivitas melalui perbaikan rantai pasok, pemulihan akses bahan baku dan energi, serta investasi permesinan; (c) akselerasi industri substitusi impor khususnya makanan, minuman, kimia, farmasi, dan alat kesehatan; (d) peningkatan fasilitasi ekspor melalui relaksasi lartas impor, *National Logistics Ecosystem* dan perluasan akses pendanaan ekspor, (e) peningkatan jumlah pelaku ekspor melalui penguatan program pendampingan ekspor, pelatihan ekspor, dan pusat informasi ekspor; (f) peningkatan promosi ekspor melalui pemanfaatan media virtual dan elektronik untuk promosi, *business matching*, dan pengembangan *electronic marketplace*; (g) penguatan peran perwakilan dagang di luar negeri untuk *market intelligent* dan promosi ekspor; (h) optimalisasi diplomasi ekonomi serta skema perjanjian perdagangan dan ekonomi bilateral, regional dan multilateral dalam *Preferential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive*

Economic Partnership Agreement (CEPA) serta forum lainnya; (i) pemulihan pasar dalam negeri yang didukung peningkatan belanja pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk penggunaan produk dalam negeri; (j) peningkatan efisiensi logistik yang didukung antara lain melalui pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan (pasar rakyat, pasar induk dan gudang) dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); (k) percepatan operasionalisasi Kawasan Industri (KI) prioritas; (l) pemulihan produktivitas dan pemasaran produk IKM (Industri Kecil dan Menengah) melalui revitalisasi permesinan, pendampingan dan fasilitasi kemitraan; dan (m) transformasi menuju industri maju melalui penerapan industri 4.0 dan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital terutama pada sektor-sektor strategis di beberapa Kawasan.

6. Pemulihan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, melalui (a) pemulihan pasar wisatawan nusantara sebagai langkah tercepat untuk mendorong pemulihan pariwisata yang didukung insentif dan pengaturan hari libur nasional; (b) pemulihan pasar wisatawan mancanegara (wisman) melalui misi penjualan dan paket tur *quality tourism* yang didukung kerja sama dengan maskapai penerbangan/*wholesaler*; (c) dukungan penyelenggaraan *event* nasional dan internasional (*meeting-incentive-convention-exhibition*/MICE pemerintah dan bisnis, olahraga, seni, dan budaya); (d) percepatan pembangunan infrastruktur amenitas, aksesibilitas, serta atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif; (e) penerapan standar kebersihan dan keselamatan, serta diversifikasi destinasi wisata termasuk melalui pengembangan *medical tourism*; (f) pemulihan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi akses ke pembiayaan, kerjasama rantai pasok, serta pelatihan-sertifikasi-penempatan SDM; (g) perluasan diplomasi gastronomi dan kuliner, serta (h) peningkatan penumbuhan usaha kreatif/*start-up* yang didukung pendampingan, serta pengembangan jejaring produksi dan pasar. Pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif tidak hanya difokuskan pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), namun juga destinasi pariwisata pengembangan mencakup Batam-Bintan, Bukittinggi-Padang, Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran, Banyuwangi, Sambas-Singkawang, Derawan-Berau, Toraja-Makassar-Selayar, dan Biak-Teluk Cenderawasih, serta pemulihan Bali sebagai pintu masuk utama wisman.

7. Peningkatan investasi, melalui (a) percepatan integrasi sistem perizinan; (b) percepatan realisasi investasi skala besar terutama di sektor industri pengolahan, pariwisata, dan infrastruktur; (c) penyediaan layanan *debottlenecking* dan *aftercare* investasi; dan (d) perluasan *positive lists* investasi.

4.1.1.4. Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*

Dalam PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan telah disusun delapan MP sebagai langkah konkret pencapaian sasaran yang dirinci hingga target, lokasi, dan instansi pelaksana. Delapan MP tersebut sebagai berikut.

Major Project Industri 4.0 di 5 Sub-Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia, dan Farmasi

Major Project Industri 4.0 di 5 Sub-Sektor Prioritas merupakan sebuah upaya lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk mendorong percepatan industrialisasi di Indonesia melalui penerapan Industri 4.0. Target dari pelaksanaan MP ini pada tahun 2021, yaitu

(1) pertumbuhan PDB industri pengolahan sebesar 5,04 persen dan (2) kontribusi PDB industri pengolahan sebesar 19,63-19,84 persen. Pelaksanaannya akan difokuskan kepada lima subsektor industri yang berkontribusi pada sekitar 60 persen PDB, 65 persen ekspor produk, dan 60 persen penyerapan tenaga kerja industri pengolahan, yaitu (1) makanan dan minuman, (2) tekstil dan pakaian jadi, (3) otomotif, (4) elektronik, dan (5) kimia dan farmasi.

Cakupan kegiatan dari MP ini, yaitu (1) harmonisasi peraturan dan kebijakan; (2) perbaikan aliran material dan penerapan standar berkelanjutan; (3) pengembangan ekosistem inovasi, infrastruktur digital, dan investasi teknologi; (4) peningkatan investasi; dan (5) pemberdayaan UMKM. *Highlight* rencana pelaksanaan MP antara lain dituangkan dalam Gambar 4.3.

Gambar 4.3

***Major Project* Industri 4.0 di 5 Sub-Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia, dan Farmasi**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

***Major Project* 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai**

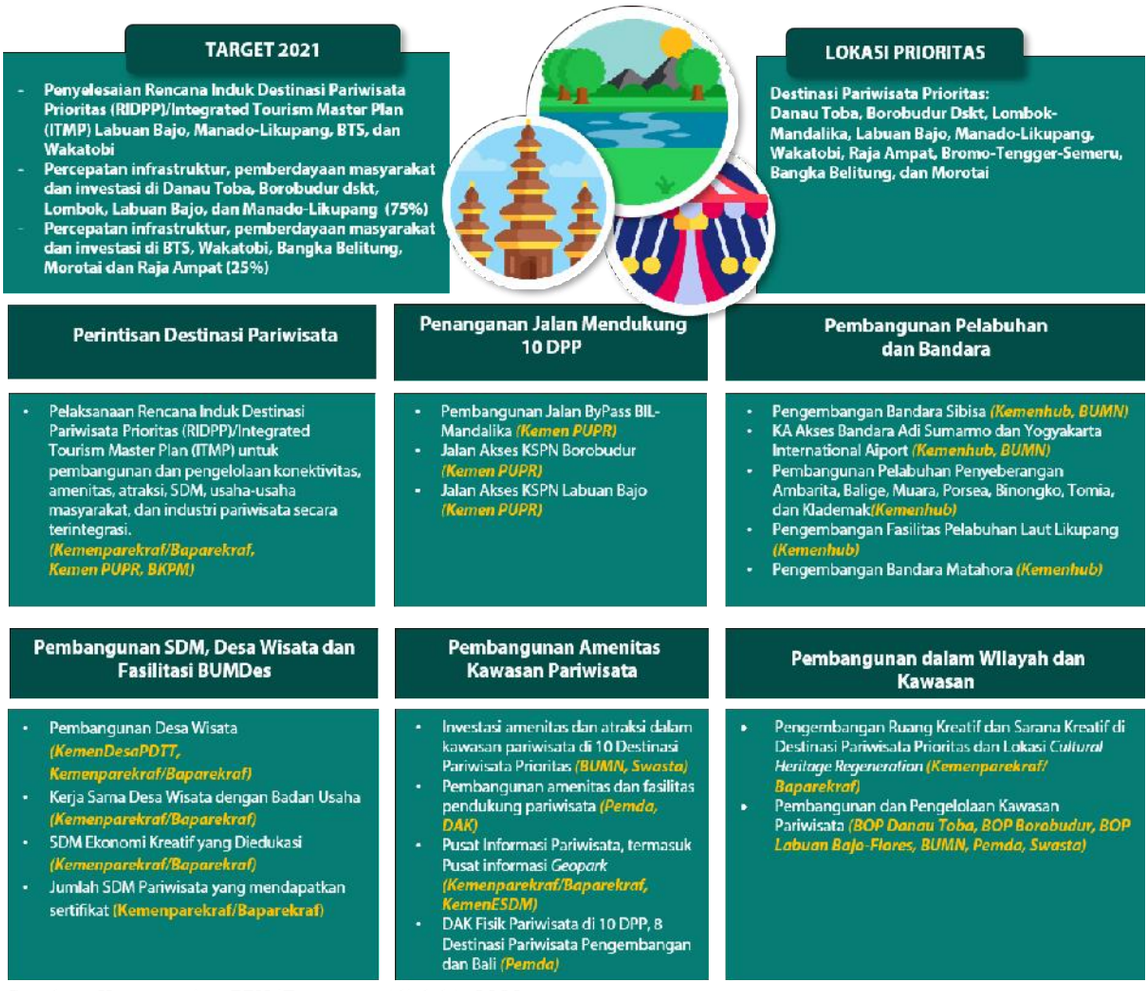
Major Project 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dilaksanakan untuk meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata dari sisi aksesibilitas, amenitas, dan atraksi di: Danau Toba, Borobudur dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai. *Highlight* rencana dan target pelaksanaan MP ini antara lain dituangkan pada Gambar 4.4.

Pelaksanaannya mencakup enam kelompok kegiatan, yaitu: (1) perintisan destinasi pariwisata, (2) penanganan jalan untuk mendukung 10 DPP, (3) pengembangan pelabuhan

dan bandara, (4) pembangunan desa wisata dan fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (5) pembangunan amenitas kawasan pariwisata, dan (6) pembangunan dalam wilayah dan kawasan. Selain itu, MP ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi pengembangan dan pertumbuhan sektor pariwisata setelah adanya dampak pandemi COVID-19. Pelaksanaannya didukung integrasi program dan kegiatan, serta pendanaan dari K/L, Pemerintah Daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, organisasi kemasyarakatan, dan mitra pembangunan internasional.

Gambar 4.4

***Major Project* 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

***Major Project* 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter**

Major Project 9 Kawasan Industri (KI) di luar Jawa dan 31 Smelter utamanya diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan hilirisasi SDA pertambangan dan pertanian. Tujuan dari pelaksanaan MP ini, yaitu (1) meningkatkan nilai tambah dari SDA melalui pengolahan komoditas menjadi bahan baku, bahan penolong, dan barang konsumsi;

(2) mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan bahan antara; dan (3) meningkatkan partisipasi dalam rantai pasok global untuk mendorong ekspor dan meningkatkan produk bernilai tambah tinggi. Cakupan kegiatan dari pelaksanaan MP ini adalah (1) harmonisasi regulasi, tata ruang, perizinan, dan fasilitasi investasi; (2) pembangunan KI dan Smelter; (3) pengembangan infrastruktur pendukung; (4) peningkatan investasi, pemasaran, dan kerja sama internasional; dan (5) fasilitasi kemitraan usaha dan penyediaan SDM. Pada tahun 2021, pelaksanaan MP ini akan difokuskan di lima KI prioritas, yaitu KEK/KI Galang Batang, KI Ketapang, KI Teluk Weda, KI Surya Borneo, dan KEK/KI Palu, serta dua KI prioritas direktif dari Presiden yaitu KI Batang dan KI Subang, serta 26 Smelter di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. *Highlight* rencana pelaksanaan MP antara lain diuraikan pada Gambar 4.5.

Gambar 4.5

***Major Project* 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

***Major Project* Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan**

Penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan merupakan MP untuk memberikan iklim yang kondusif bagi usaha pertanian dan perikanan, memperkuat lembaga petani dan nelayan, serta menciptakan jiwa *entrepreneurship* dan *business model* pertanian dan perikanan modern. Adapun rincian MP tersebut sebagaimana Gambar 4.6.

Gambar 4.6

***Major Project* Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Target dari MP Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani adalah peningkatan pendapatan petani rata-rata lima persen per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10 persen per tahun, peningkatan produktivitas komoditas lima persen per tahun, serta terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan pertanian dan perikanan dari tergantung pemerintah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan subsidi menjadi mandiri (investasi dan bisnis). Untuk mencapai target tersebut, Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan dilaksanakan melalui (1) penerapan *Good Agricultural Practices* dan *Precision Farming/Agro Maritim* 4.0; (2) penguatan kelembagaan petani dan nelayan; (3) investasi, pembiayaan, asuransi sektor pertanian dan perikanan; (4) kemitraan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) serta wirausaha pertanian dan perikanan; (5) pembentukan integrasi Satu Data Pangan dan Pertanian dan pengembangan sistem elektronik berbayar untuk distribusi dan transaksi pangan dan produk pertanian/perikanan; (6) *platform* multipihak nasional untuk

tata kelola risiko pangan dan pertanian berbasis jaminan asuransi rantai suplai dan rantai nilai; (7) pemanfaatan keuangan syariah sebagai salah satu sumber pembiayaan mengkorporasikan petani/nelayan; (8) jaminan kepastian legalitas dan spasial lokasi peruntukan 350 korporasi petani utamanya yang diperoleh dari pemanfaatan lahan BUMN, kegiatan Reforma Agraria, dan lainnya; serta (9) terbentuknya badan usaha induk korporasi petani yang menjamin akses permodalan dan pasar produk pangan dan pertanian/nelayan.

Major Project Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit

Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* berbasis Kelapa Sawit berkontribusi untuk mendorong pencapaian salah satu indikator utama dalam PN, yakni menuju porsi energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2024, dengan target tahun 2021 sebesar 14,5 persen. Selain itu, MP ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit 10 persen per tahun, meningkatkan produksi bahan bakar nabati untuk kebutuhan Indonesia, meningkatkan pemanfaatan kelapa sawit domestik, serta meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan sawit rakyat. Dalam lima tahun ke depan, ditargetkan akan terbangun *Green Refinery Standalone* kapasitas 20 ribu barel per hari di *Refinery Unit* III (RUIII) Plaju (Sumatera Selatan) untuk mendorong pemenuhan kebutuhan bahan bakar nabati. Adapun rincian MP tersebut sebagaimana Gambar 4.7.

Gambar 4.7

***Major Project* Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Pada tahun 2021 ditargetkan pembangunan kilang telah mencapai tahap penyusunan dokumen *Front End Engineering Design* (FEED) dan *Final Investment Decision* (FID). Dalam menjamin suplai bahan baku, volume produksi kelapa sawit ditetapkan pula menjadi indikator dalam MP ini. Pada tahun 2021 ditargetkan volume kelapa sawit sebesar 44,6 juta ton. Untuk menjamin keberlanjutan produksi kelapa sawit rakyat maka kebijakan tahun 2021 diarahkan kepada (1) percepatan peremajaan sawit rakyat dan penetapan legalitas spasial lahan sawit rakyat yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan bahan bakar nabati sawit; (2) terbentuknya peta jalan integrasi hulu hilir oleokemikal sawit;

(3) terbentuknya sistem jaminan kemurnian perbenihan nasional yang terintegrasi dengan perencanaan dan pengendalian peremajaan sawit rakyat; (4) aplikasi teknologi pertanian presisi dan mekanisme ketertelusuran dalam tata kelola sawit rakyat; dan (5) aplikasi yurisdiksi berkelanjutan dalam tata kelola lanskap sawit rakyat misalnya Terpercaya, Lingkar Tata Kelola Lestari, dan lainnya. Kebutuhan total pendanaan MP ini sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp32 triliun dengan integrasi pendanaan dari berbagai sumber, yakni APBN (Rp1,1 triliun), BUMN (Rp11,9 triliun), dan swasta (Rp19 triliun). Rincian indikasi pendanaan tahun 2021 sebesar Rp0,22 triliun APBN, Rp2,38 triliun BUMN, dan Rp3,8 triliun swasta.

Major Project Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng

Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng berkontribusi untuk meningkatkan produksi perikanan budi daya (ikan) menjadi 7,92 juta ton dan meningkatkan pertumbuhan ekspor udang delapan persen per tahun. Adapun rincian MP tersebut sebagaimana Gambar 4.8.

Gambar 4.8

***Major Project* Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Pada tahun 2021, MP ini difokuskan melalui (1) penyiapan lokasi dan lahan; (2) rehabilitasi saluran tambak, sarana prasarana perikanan tambak, pengadaan benih/induk berkualitas (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian

Kelautan dan Perikanan (Kemen KP), serta Pemda); (3) peningkatan inovasi, adopsi, dan teknologi untuk peningkatan produksi dan produktivitas (Kemen KP, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Swasta); (4) pengembangan infrastruktur pendukung terutama jalan dan listrik (PUPR, dan BUMN PLN); serta (5) pengendalian tata ruang pesisir dan harmonisasi perizinan (Kemen KP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (KemenATR/BPN), Pemda). Sementara itu, lokus pada tahun 2021 berada di Pantai Utara Jawa, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

***Major Project* Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional**

Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional berkontribusi dengan meningkatkan produksi perikanan tangkap menjadi 8,08 juta ton dan nilai ekspor hasil perikanan US$6,05 miliar.

Pada tahun 2021, MP ini difokuskan melalui (1) penyiapan lahan dan penyusunan DED; (2) penguatan data stok perikanan dan harmonisasi perizinan (KemenKP, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kemenristek, Pemda); serta (3) penguatan lembaga pengelola Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) (KemenKP, Pemda). Sementara itu, lokus pada tahun 2021 diprioritaskan di Sulawesi Utara (Likupang) dan Indonesia bagian Timur. Adapun rincian MP tersebut sebagaimana Gambar 4.9.

Gambar 4.9

***Major Project* Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

***Major Project Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan)**

Food Estate (FE) adalah Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) dalam kawasan lahan minimal 2.000 ha dengan melakukan budidaya polikultur serta menggunakan pendekatan agroekologi. Pengembangan FE (KSPP) sesuai dengan amanat UU Pangan Pasal 12 ayat 5 dimana disebutkan bahwa untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri dapat dilakukan melalui pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan. Target dari MP FE (KSPP) adalah peningkatan Cadangan Pangan Nasional, upaya pemenuhan kebutuhkan pangan di Ibu Kota Negara (IKN) dan Peningkatan kesejahteraan petani di FE (KSPP). Adapun rincian MP tersebut sebagaimana Gambar 4.10.

Gambar 4.10

***Major Project Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan)**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Tagline utama pengembangan FE (KSPP) yaitu: terintegrasi, modern, dan berkelanjutan, dengan strategi pengembangan diarahkan melalui (1) usaha tani terpadu hulu-hilir, peningkatan produktivitas dan keberlanjutan lahan pertanian *existing*, dan efisiensi *supply chain* (intensifikasi, optimasi lahan, diversifikasi produk, pertanian konservasi, modernisasi irigasi, pertanian digital/presisi, sistem logistik, sistem resi gudang, pengolahan primer sesuai kaidah keamanan pangan); (2) peningkatan kesejahteraan petani, perlindungan pemberdayaan petani dan regenerasi petani (*people centered development*), skema korporasi petani, terintegrasi dengan permodalan, asuransi pertanian dan mampu menarik SDM muda untuk berkiprah di sektor pertanian; (3) mampu menggerakkan investasi masyarakat dan swasta (APBN sebagai pemantik pengembangan infrastuktur dasar, pengembangan menggunakan skema investasi masyarakat/swasta/BUMN/KPBU/PINA dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor).

4.1.1.5. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan adalah (1) Rancangan UU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, (2) Rancangan PP tentang Skema Pembiayaan Berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, (3) Rancangan Perpres tentang Pengembangan dan Pembinaan Jasa Konsultansi, (4) Rancangan Perpres tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas PK), (5) Rancangan Perpres tentang Transformasi Ekonomi Indonesia Pasca COVID-19, (6) Rancangan Perpres tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan, (7) Rancangan Perpres tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas (RIDPP), (8) Rancangan Perpres tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu, serta (9) Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Peningkatan Ekspor yang Melibatkan Kolaborasi K/L.

4.1.2. Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pembangunan wilayah pada tahun 2021 diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

4.1.2.1. Pendahuluan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan nasional yang dilakukan selama ini telah menghasilkan berbagai kemajuan antara lain meningkatnya pendapatan perkapita (PDB perkapita) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pada saat bersamaan menurunnya tingkat kemiskinan. Berbagai kemajuan tersebut belum terjadi dengan kecepatan yang seimbang antarwilayah disebabkan oleh perbedaan keunggulan kompetitif dan keuntungan aglomerasi, serta perbedaan keunggulan komparatif berupa sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi.

Pada tahun 2021, lebih dari 60 persen penduduk dan kegiatan ekonomi masih akan terpusat di wilayah barat khususnya wilayah Jawa-Bali yang luasnya hanya sekitar enam persen dari luas total daratan wilayah nasional dengan penduduk lebih dari 56 persen dan kontribusi terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih dari 60 persen. Pemusatan kegiatan ekonomi ini akan mendorong migrasi SDM terdidik dan terampil ke wilayah barat dan selanjutnya mendorong investasi dan pertumbuhan wilayah. Pola pemusatan ekonomi ini akan menyebabkan kesenjangan antara wilayah barat dan wilayah timur.

Di sisi lain, potensi sumber daya alam wilayah timur masih cukup besar dan belum dikelola secara optimal baik berupa hasil tambang, hasil hutan, dan hasil laut di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dengan demikian, pembangunan wilayah timur masih memiliki peluang besar untuk percepatan (akselerasi) melalui kebijakan afirmatif dan kebijakan asimetris sesuai dengan potensi ekonomi melalui penyediaan berbagai insentif fiskal dan nonfiskal, peningkatan investasi dan mobilitas tenaga kerja produktif ke wilayah timur. Selama periode 2015-2019, kebijakan pemerintah untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa dan khususnya wilayah timur telah mulai berjalan ditandai dengan meningkatnya investasi dan pembangunan industri berbasis SDA seperti di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Kebijakan ini akan dilanjutkan dengan upaya yang lebih intensif pada periode 2020-2024.

Memperhatikan tantangan dan peluang tersebut, serta pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020, maka kebijakan pengembangan wilayah tahun 2021 juga diarahkan untuk (1) mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 melalui optimalisasi pengembangan kawasan strategis, peningkatan produksi komoditas unggulan, pengembangan kawasan perkotaan, pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi, serta penguatan kelembagaan dan keuangan daerah; (2) melanjutkan transformasi sosial ekonomi; (3) mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah; dan (4) meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah sejalan dengan kebijakan pembangunan wilayah periode 2020-2024. Pada tahun 2021 prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata di wilayah timur dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, dan pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

4.1.2.2. Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran pengembangan wilayah pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan Wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3

Sasaran, Indikator dan Target
PN 2 Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

No.	Sasaran/Indikator		*2019 (baseline)*	Target		
				2020	2021	2024
1	**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia**					
	1.1.	Laju pertumbuhan PDRB KTI (%/tahun)[1)]	3,8	(0,94)	4,2 – 6,1	7,9
	1.2.	IPM KTI (nilai min-maks)[2)]	60,8-76,6	60,6-77,0	61,1-77,7	63,9-79,3
	1.3.	Persentase penduduk miskin KTI (%) [3)]	14,4	11,9[4)]	11,5[4)]	10,7

No.	Sasaran/Indikator		*2019 (baseline)*	Target		
				2020	2021	2024
2	**Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia**					
	2.1.	Laju pertumbuhan PDRB KBI (%/tahun)[1)]	5,3	(2,17)	4,5-5,4	6,3
	2.2.	IPM KBI (nilai min-maks)[2)]	69,6-80,8	69,6-81,9	70,1-82,5	71,9-84,2
	2.3.	Persentase penduduk miskin KBI (%) [3)]	10,9	8,8[4)]	8,4[4)]	6,7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020.

Keterangan: [1)] Angka tahun 2019 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan assessment Bappenas dengan mempertimbangkan dampak Covid-19. Angka 2024 merupakan angka sasaran yang mengacu pada dokumen RPJMN 2020-2024;

[2)] Angka tahun 2019 adalah realisasi (BPS). Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan hasil proyeksi Bappenas setelah mempertimbangkan dampak Covid-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah. Angka tahun 2024 adalah indikator RPJMN 2020-2024;

[3)] Angka tahun 2019 adalah angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2020 dan 2021 berdasarkan *outlook* tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19, jumlah digit menyesuaikan dengan target nasional. Angka tahun 2024 adalah target RPJMN 2020-2024;

[4)] Jumlah digit menyesuaikan dengan target nasional;

Dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional di atas, tentunya pembangunan wilayah didukung oleh kontribusi dari percepatan pembangunan kawasan-kawasan yang diprioritaskan serta dengan pemerataan wilayah lainnya dengan memperhatikan tata ruang dan tata kelola pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan wilayah tahun 2020-2024, serta dengan memperhatikan arahan Presiden, maka pembangunan wilayah pada tahun 2021 akan tetap mempertimbangkan beberapa indikator ketercapaian pembangunan wilayah sebagaimana Tabel 4.4, sehingga dapat menjaga kesinambungan pembangunan wilayah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

Tabel 4.4

Indikator Pembangunan Kewilayahan

No	Indikator	*2019 (baseline)*	Target		
			2020	2021	2024
1	Rasio pertumbuhan investasi kawasan terhadap wilayah: >1 (nilai)	N/A*)	>1	>1	>1
2	Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan				
	- Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) (jumlah destinasi)	3 (nasional)	10	10	10
	- Destinasi Pariwisata (jumlah destinasi)	N/A*)	9	9	9 (kumulatif)
	- KEK berbasis pariwisata dan industri (kawasan)	15 (kumulatif nasional)	12 (kumulatif)	11 (kumulatif)	18 (kumulatif)

SK No 054626 A

No	Indikator	*2019 (baseline)*	Target		
			2020	2021	2024
	- KI Prioritas dan KI Pengembangan (jumlah KI)	8 (kumulatif nasional)	5 (kumulatif)	7 (kumulatif)	29 (kumulatif)
3	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun[4]:				
	- Kelapa Sawit (%)	8,6	5,8	5,9	6,0
	- Kakao (%)	0,4	2,1	2,3	2,7
	- Kopi (%)	3,4	1,4	1,5	1,5
4	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	3	3	3	3
5	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	3	3	6	6
6	Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM)	1	2	2	4
7	Luas area pembangunan Ibu Kota Negara (ha)	5.600[2]	5.600	5.600	5.600
8	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	20	11	52	52[3]
9	Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota)	11[4]	4	4	4
10	Jumlah peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang diselesaikan (dokumen Peninjauan Kembali)	0	0	1	0
11	Jumlah RPerpres Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang diselesaikan (revisi) (Materi Teknis dan RPerpres)	1	1	1	0
12	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang di IKN (jumlah materi teknis dan rancangan peraturan)	0	2	2	0
13	Jumlah dokumen harmonisasi RPerpres RTR KSN IKN yang diselesaikan (dokumen)	0	0	1	0
14	Jumlah dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan RDTR di IKN yang diselesaikan (dokumen)	0	0	2	0
15	Rata-rata nilai indeks desa untuk mengukur perkembangan status desa (nilai)	56,52 (Mandiri: 1.444; Berkembang: 54.291; Tertinggal: 19.152)	57,42	58,0	62,05 (Mandiri: 6.444; Berkembang: 59.291; Tertinggal: 9.152)

No	Indikator	2019 (baseline)	Target		
			2020	2021	2024
16	Persentase kemiskinan Desa (%)	12,60	12,60	12,25	9,9
17	Jumlah revitalisasi Bumdes berdasarkan status (Bumdes)	Maju: 600 Berkembang: 5.000	Maju: 800 Berkembang : 6.000	Maju: 1.025 Berkembang: 7.000	Maju: 1.800 Berkembang: 10.000
18	Jumlah revitalisasi Bumdes Bersama berdasarkan status (Bumdes)	Maju: 120 Berkembang: 200	Maju: 130 Berkembang: 210	Maju: 145 Berkembang: 225	Maju: 200 Berkembang: 300
19	Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) (nilai)	51,10	52,62	54,14	58,70
20	Rata-rata nilai indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi (nilai)	46,55	48,74	50,93	57,50
21	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)	187	222	56[5)]	222
22	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 PKSN (nilai)	0,42	0,44	0,45	0,52
23	Jumlah daerah tertinggal (kabupaten)	62	N/A[6)]	N/A[6)]	37 (terentaskan 25 kab)
24	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)	25,85	24,9 – 25,4	24,6 – 25,1	23,5 - 24
25	Rata-rata IPM di daerah tertinggal (nilai)	58,91	59,3 – 59,8	60 – 60,5	62,2 – 62,7
26	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (%)	N/A[7)]	50	75	N/A[8)]
27	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (kabupaten/kota)	159	34	80	76
28	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	313[9)]	157	349	542
29	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	102	51	210	542
30	Persentase capaian SPM di daerah (%)	74,24[10)]	65,71	74,28	100
31	Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi (km^2)	49.728 (nasional)	4.903	415.000	14.000

No	Indikator	*2019 (baseline)*	Target		
			2020	2021	2024
32	Jumlah luasan cakupan peta RBI skala 1:5.000 (km^2)	40.216 (nasional)	3.355 *dataset* (17.915 km^2)	13.205	14.000
33	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/ kelurahan yang dihasilkan (desa)	0	209	4.334	4.000
34	Jumlah layanan *data center* jaringan informasi geospasial nasional beroperasi (layanan)	1	1	1	1
35	Jumlah daerah yang melaksanakan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	9	1	48	86
36	Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi (%)	12	12	18	36
37	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi (daerah)	34	51	210	542
38	Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha)	17.817.153,60 (kumulatif)	1.644.900,5 (3.289.801 bidang)	4.500.647,5 (9.001.295 bidang)	10.274.866
39	Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha)	33.972.698,12 (kumulatif)	2.029.550	2.022.250	7.110.790
40	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	0	99	82	492 (kumulatif)
41	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (km)	3.179	3.195	2.422	5.000
42	Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah (lembaga)	0	1	1	1
43	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat (provinsi)	0	0	33	34 (nasional)
44	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang (materi teknis dan Raperda RTR)	34 (nasional)	45	35	45

No	Indikator	*2019 (baseline)*	Target		
			2020	2021	2024
45	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR (materi teknis dan Raperda RDTR)	15 (nasional)	5	6	5
46	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/ KEK/ KSPN/KRB/KPPN) (materi teknis dan Raperda RDTR)	13 (nasional)	5	15	0
47	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR (materi teknis dan Raperda RDTR)	36	101	145	245
48	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota (persetujuan substansi)	27	100	140	240
49	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan (materi teknis dan RPerpres)	10	2	3	4
50	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan (materi teknis dan RPerpres)	10 (nasional)	2	2	2

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020.

Keterangan: [1)] Jumlah digit menyesuaikan dengan target nasional; [2)] Tahap perencanaan (penyusunan Pra-*Masterplan*); [3)] Sesuai dengan lampiran IV Peraturan Presiden No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024; [4)] Tahap perencanaan (penyusunan Materi Teknis RDTR); [5)] Jumlah kecamatan lokasi prioritas (lokpri) yang difokuskan pembangunannya berdasarkan Renduk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) Tahun 2020-2024. Progres pembangunan berdasarkan laporan capaian PBWNKP yang dirilis BNPP; [6)] Sesuai PP No.78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap lima tahun, yaitu pada akhir pelaksanaan RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal untuk tahun 2020 - 2021 tidak dapat ditentukan; [7)] Tahun 2019 masih dalam tahap penetapan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga belum dilakukan penghitungan target; [8)] Pemulihan pelayanan publik di daerah terdampak ditargetkan selesai pada tahun 2023; [9)] Menggunakan angka *baseline* Semester I 2019, data capaian 2019 baru akan di*release* Desember 2020; [10)] Berdasarkan Data LPPD Tahun 2018 dengan IKK SPM masih mengacu pada regulasi lama; *) Indikator baru yang belum dihitung pada tahun sebelumnya.

4.1.2.3. Program Prioritas

Pencapaian sasaran PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dijabarkan ke dalam tujuh PP sebagaimana tergambar dalam Gambar 4.11. Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Gambar 4.11

Kerangka PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Tabel 4.5

Sasaran, Indikator dan Target PP pada PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

No.	Sasaran/Indikator	*2019 (baseline)*	Target		
			2020	2021	2024
PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera					
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera					
1.1.	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera (%/tahun)[1)]	4,6	(0,8)	3,9 – 5,1	5,6
1.2.	IPM Provinsi di Wilayah Sumatera (nilai min-maks) [2)]	69,6-75,5	69,6-76,0	70,1-76,5	71,9-78,2
1.3.	Persentase penduduk miskin Wilayah Sumatera (%) [3)]	9,8	10,1	9,6	5,8
PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali					
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali					
2.1.	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali (%/tahun) [1)]	5,5	(2,7)	4,8 – 5,5	6,3
2.2.	IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali (nilai min-maks)[2)]	71,5-80,8	72,1-81,9	72,7-82,5	74,6-84,2

No.	Sasaran/Indikator	*2019 (baseline)*	Target		
			2020	2021	2024
2.3.	Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali (%) 3)	8,2	8,3	7,9	5,9
PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara					
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara					
3.1.	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara (%/tahun) 1)	4,5	(0,2)	3,5 – 5,2	5,1
3.2.	IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara (nilai min-maks) 2)	65,2-68,1	65,7-68,7	66,3-69,5	68,4-71,9
3.3.	Persentase penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara (%) 3)	17,4	18,3	17,8	13,7
PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan					
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan					
4.1.	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan (%/tahun) 1)	5,0	(2,3)	3,6 – 5,7	5,4
4.2.	IPM Provinsi Wilayah Kalimantan (nilai min-maks) 2)	67,7-76,6	68,4-77,0	69,0-77,7	71,2-79,3
4.3.	Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan (%) 3)	5,8	5,8	5,6	3,3
PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi					
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi					
5.1.	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi (%/tahun) 1)	6,7	0,0	5,4 – 7,0	6,9
5.2.	IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi (nilai min-maks)2)	65,7-73,0	66,4-73,4	67,0-73,9	69,4-75,8
5.3.	Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi (%) 3)	10,1	10,2	9,8	7,9
PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku					
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku					
6.1.	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku (%/tahun) 1)	5,8	1,7	5,2 – 6,2	6,0
6.2.	IPM Provinsi di Wilayah Maluku (nilai min-maks)2)	68,7-69,5	69,3-70,0	69,9-70,5	72,3-72,3
6.3.	Persentase penduduk miskin wilayah Maluku (%) 3)	13,2	13,5	12,8	9,4
PP 7. Pengembangan Wilayah Papua					
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua					
7.1.	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua (%/tahun) 1)	(10,7)	0,9	2,6 – 5,8	6,0

No.	Sasaran/Indikator	*2019 (baseline)*	Target		
			2020	2021	2024
7.2.	IPM Provinsi di Wilayah Papua (nilai min-maks) [2]	60,8-64,7	60,6-64,8	61,1-65,4	63,9-67,2
7.3.	Persentase penduduk miskin Wilayah Papua (%) [3]	25,4	25,9	25,5	19,0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020.

Keterangan: [1] Angka tahun 2019 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan assessment Bappenas dengan mempertimbangkan dampak Covid-19. Angka 2024 merupakan angka sasaran dalam dokumen RPJMN 2020-2024;

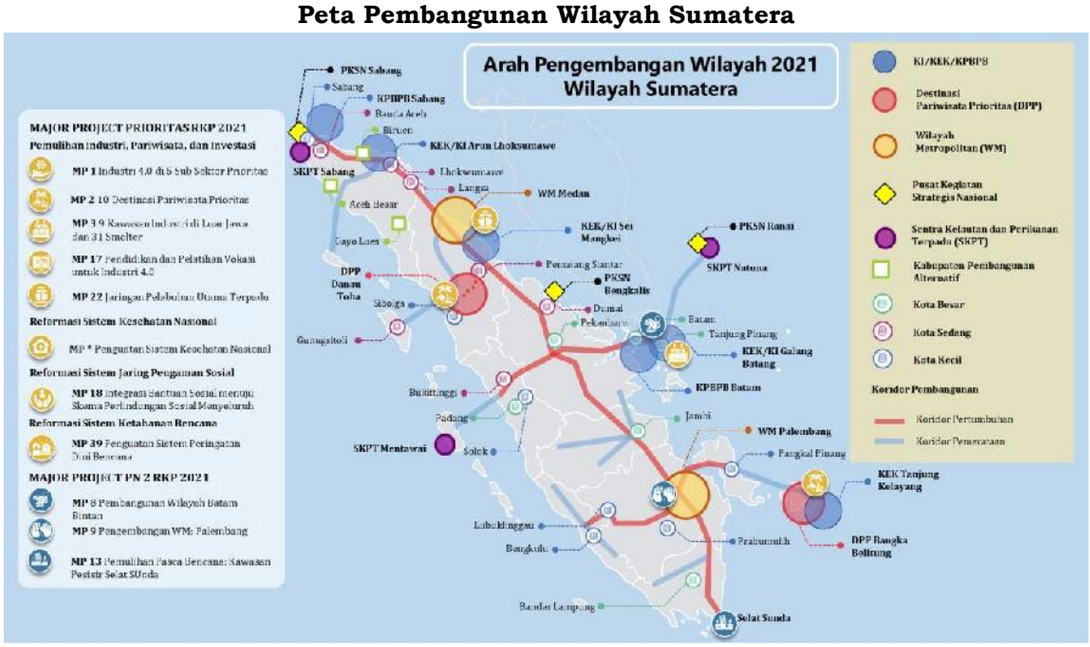
[2] Angka tahun 2019 adalah realisasi (BPS). Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan hasil proyeksi Bappenas setelah mempertimbangkan dampak Covid-19 dan assessment terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah. Angka tahun 2024 adalah indikator RPJMN 2020-2024;

[3] Angka tahun 2019 adalah angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan *outlook* tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19, jumlah digit menyesuaikan dengan target nasional. Angka tahun 2024 adalah target RPJMN 2020-2024.

Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera pada tahun 2021 adalah mendorong pertumbuhan dan transformasi ekonomi Wilayah Sumatera menjadi basis industrialisasi nasional. Dalam rangka mendukung prioritas tersebut, MP dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Wilayah Sumatera dapat dilihat pada Gambar 4.12.

Gambar 4.12

Peta Pembangunan Wilayah Sumatera



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Wilayah Sumatera direncanakan pengembangan ekonomi PKSN di kawasan perbatasan negara, pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 25 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, revitalisasi 12 kawasan transmigrasi, pengembangan 14 KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional), pembangunan alternatif

di 3 kabupaten di Aceh, percepatan pembangunan 3.097 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan pemantapan 1.156 desa mandiri, percepatan pembangunan 7 kabupaten daerah tertinggal, serta pembinaan 6 kabupaten daerah tertinggal terentaskan sebagaimana terdapat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6

Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Sumatera

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Lampung	Pesisir Barat	Lampung Barat
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Pasaman Barat, Solok Selatan
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Musi Rawas
Sumatera Utara	Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara	-
Aceh	-	Aceh Singkil
Bengkulu	-	Seluma

Sumber: Perpres No.63/2020 dan Kepmendes PDTT No.79/2019

Prioritas pembangunan Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2021 adalah menjaga pertumbuhan, penuntasan pemulihan pascabencana, memperkuat sistem ketahanan bencana, dan mempercepat transformasi ekonomi Wilayah Jawa-Bali menjadi pusat industri dan jasa modern. Dalam rangka mendorong prioritas tersebut, MP dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Wilayah Jawa-Bali dapat dilihat pada Gambar 4.13.

Gambar 4.13

Peta Pengembangan Wilayah Jawa-Bali



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Wilayah Jawa-Bali direncanakan pengembangan delapan KPPN, percepatan pembangunan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan pemantapan 2.893 desa mandiri, serta pembinaan 6 kabupaten daerah tertinggal terentaskan sebagaimana terdapat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7

Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Jawa – Bali

Provinsi	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Banten	Pandeglang, Lebak
Jawa Timur	Situbondo, Bondowoso, Bangkalan, Sampang

Sumber: Kepmendes PDTT No.79/2019

Prioritas pembangunan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2021 adalah mendorong percepatan (akselerasi) pertumbuhan, penuntasan pemulihan pascabencana, dan transformasi ekonomi Wilayah Nusa Tenggara menjadi pusat wisata alam dan budaya. Dalam rangka mendorong prioritas tersebut, MP dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 4.14.

Gambar 4.14

Peta Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara direncanakan pengembangan ekonomi PKSN di kawasan perbatasan negara, pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 4 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, revitalisasi 5 kawasan transmigrasi, pengembangan 7 KPPN, percepatan pembangunan 1.079 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan pemantapan 143 desa mandiri, percepatan pembangunan 14 kabupaten daerah tertinggal dan pembinaan 12 kabupaten daerah tertinggal terentaskan, sebagaimana terdapat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8

Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Kepulauan Nusa Tenggara

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Sumbawa Barat, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah, Sabu Raijua, Alor, Rote Ndao, Malaka, Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Manggarai Timur, Lembata, Kupang, Belu, Sumba Barat	Nagekeo, Ende, Timor Tengah Utara, Manggarai Barat, Manggarai

Sumber: Perpres No.63/2020 dan Kepmendes PDTT No.79/2019

Prioritas pembangunan Wilayah Kalimantan pada tahun 2021 adalah mendorong percepatan (akselerasi) pertumbuhan dan meningkatkan diversifikasi ekonomi Wilayah Kalimantan. Dalam rangka mendorong prioritas tersebut, MP dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Wilayah Kalimantan dapat dilihat pada Gambar 4.15.

Gambar 4.15

Peta Pembangunan Wilayah Kalimantan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Wilayah Kalimantan direncanakan pengembangan ekonomi PKSN di kawasan perbatasan negara, pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 7 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, revitalisasi 9 kawasan transmigrasi dan 2 kawasan transmigrasi yang mendukung pengembangan *food estate* sesuai direktif Presiden dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional, pengembangan 11 KPPN, percepatan pembangunan 1.460 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan pemantapan 232 desa mandiri, serta pembinaan 12 kabupaten daerah tertinggal terentaskan sebagaimana terdapat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9

Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Kalimantan

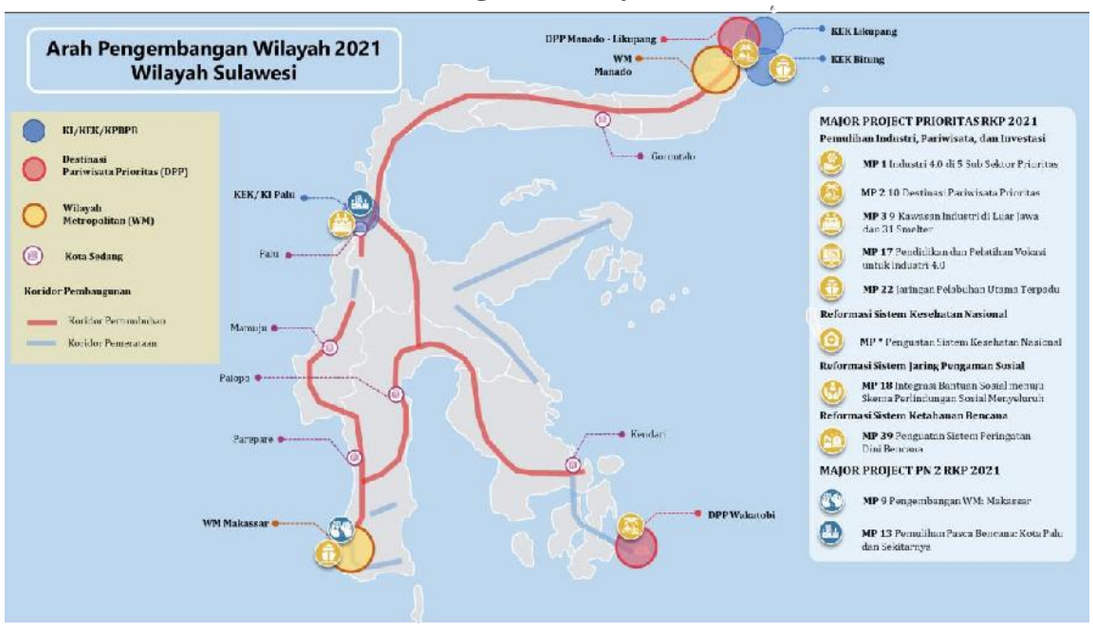
Provinsi	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Kalimantan Barat	Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Melawi, Sintang, Kayong Utara
Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara
Kalimantan Tengah	Seruyan
Kalimantan Timur	Mahakam Ulu
Kalimantan Utara	Nunukan

Sumber: Kepmendes PDTT No.79/2019

Prioritas pembangunan Wilayah Sulawesi pada tahun 2021 adalah melanjutkan pertumbuhan, penuntasan pemulihan pascabencana, memperkuat sistem ketahanan bencana, dan mendorong transformasi ekonomi Wilayah Sulawesi menjadi basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah. Dalam rangka mendorong prioritas tersebut, MP dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 4.16.

Gambar 4.16

Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Wilayah Sulawesi direncanakan pengembangan ekonomi PKSN di kawasan perbatasan negara, pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 5 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, revitalisasi 18 kawasan transmigrasi, pengembangan 16 KPPN, percepatan pembangunan 1.043 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan pemantapan 507 desa mandiri, percepatan pembangunan 3 kabupaten daerah tertinggal dan pembinaan 15 kabupaten daerah tertinggal terentaskan sebagaimana terdapat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10

Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Sulawesi

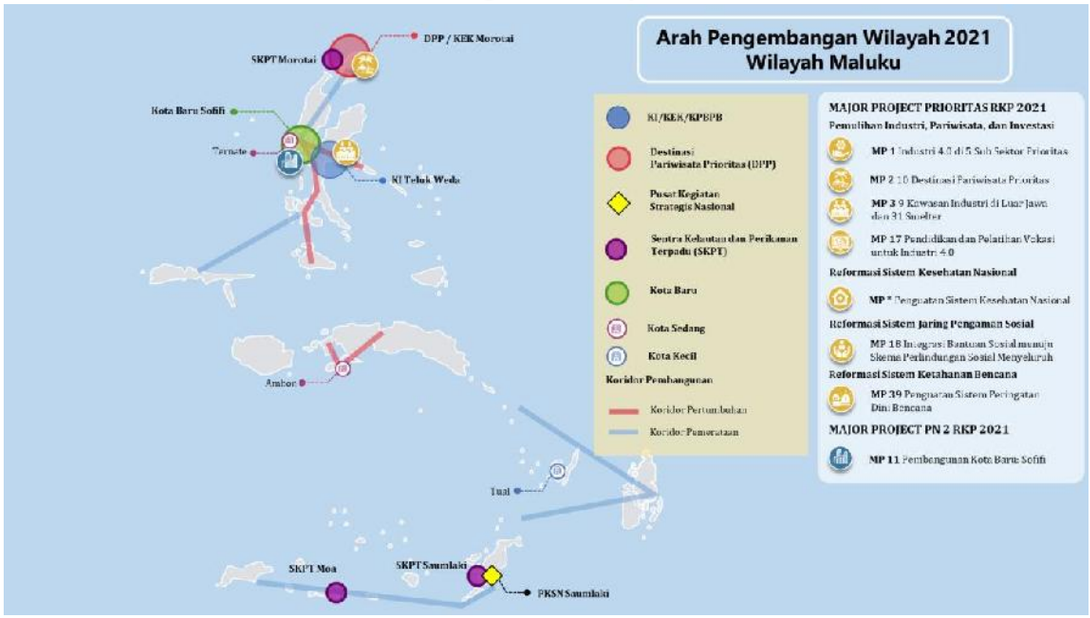
Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Sulawesi Tengah	Donggala, Sigi, Tojo Una-una	Morowali Utara, Banggai Kepulauan, Buol, Banggai Laut, Parigi Moutong, Toli-toli
Sulawesi Barat	-	Mamuju Tengah, Polewali Mandar
Sulawesi Selatan	-	Jeneponto
Sulawesi Tenggara	-	Konawe, Bombana, Konawe Kepulauan
Gorontalo	-	Boalemo, Pohuwato, Gorontalo Utara

Sumber: Perpres No.63/2020 dan Kepmendes PDTT No.79/2019

Prioritas pembangunan Wilayah Maluku pada tahun 2021 adalah meningkatkan pertumbuhan dan mendorong transformasi ekonomi Wilayah Maluku menjadi basis sektor kemaritiman. Dalam rangka mendorong prioritas tersebut, MP dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Wilayah Maluku dapat dilihat pada Gambar 4.17.

Gambar 4.17

Peta Pembangunan Wilayah Maluku



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Wilayah Maluku direncanakan pengembangan ekonomi PKSN di kawasan perbatasan negara, pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 4 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, revitalisasi 3 kawasan transmigrasi, pengembangan 2 KPPN, percepatan pembangunan 675 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan pemantapan 39 desa mandiri, percepatan pembangunan 8 kabupaten daerah tertinggal, serta pembinaan 6 kabupaten daerah tertinggal terentaskan sebagaimana terdapat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11

Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Kepulauan Maluku

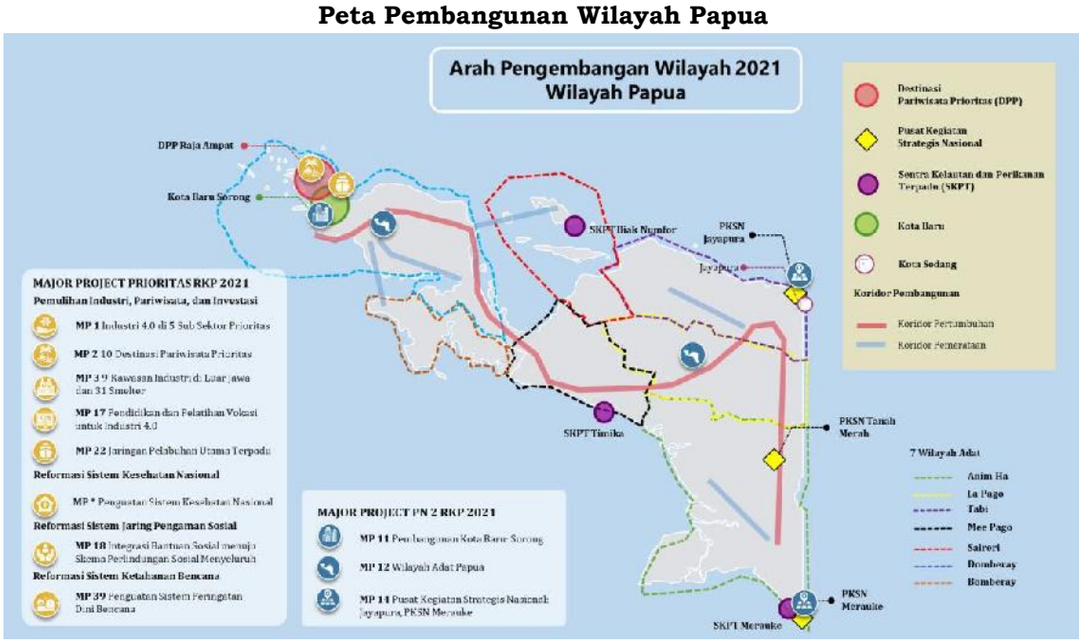
Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Maluku	Seram Bagian Timur, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Buru Selatan	Buru, Maluku Tengah
Maluku Utara	Pulau Taliabu, Kepulauan Sula	Halmahera Timur, Halmahera Barat, Pulau Morotai, Halmahera Selatan

Sumber: Perpres No.63/2020 dan Kepmendes PDTT No.79/2019

Prioritas pembangunan Wilayah Papua pada tahun 2021 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi pelaksanaan otonomi khusus di Wilayah Papua. Dalam rangka mendorong prioritas tersebut, MP dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Wilayah Papua dapat dilihat pada Gambar 4.18.

Gambar 4.18

Peta Pembangunan Wilayah Papua



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Wilayah Papua direncanakan pengembangan ekonomi PKSN di kawasan perbatasan negara, pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 11 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, revitalisasi 5 kawasan transmigrasi, pengembangan 4 KPPN, percepatan pembangunan 2.449 kampung tertinggal menjadi kampung berkembang dan pemantapan 30 kampung mandiri, percepatan pembangunan 30 kabupaten daerah tertinggal, serta pembinaan 5 kabupaten daerah tertinggal terentaskan sebagaimana terdapat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12

Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Papua

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Papua	Nduga, Yahukimo, Tolikara, Puncak Jaya, Yalimo, Puncak, Lanny Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, Paniai, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Jayawijaya, Deiyai, Mappi, Asmat, Waropen, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Nabire, Supiori, Keerom	Merauke, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Sarmi
Papua Barat	Sorong Selatan, Tambrauw, Pegunungan Arfak, Maybrat, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Sorong, Teluk Wondama	Raja Ampat

Sumber: Perpres No.63/2020 dan Kepmendes PDTT No.79/2019

Percepatan penyelesaian pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua diperlukan dalam rangka perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat. RUU tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pembangunan wilayah pada tahun 2021 juga dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi khususnya industri, pariwisata dan investasi, akibat dampak pandemi COVID-19, dengan fokus sebagai berikut.

1. Optimalisasi pengembangan Kawasan Strategis
   a. Kawasan strategis berbasis industri yaitu KI, KEK dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) diarahkan untuk: (i) mempercepat operasionalisasi kawasan yang didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai dan penerapan protokol kesehatan; (ii) mendorong pengembangan industri substitusi impor, serta memperluas pasar ekspor dengan memperhatikan penggunaan bahan baku lokal serta rantai pasok industri lokal; (iii) memperhatikan tenaga kerja yang terdampak COVID-19 pada kawasan; (iv) mempercepat realisasi investasi pada kawasan; serta (v) mengoptimalkan paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal.
   b. Kawasan strategis berbasis pariwisata yaitu KSPN/DPP dan KEK diarahkan untuk: (i) mempercepat operasionalisasi kawasan dengan memperhatikan amenitas dan keberagaman atraksi yang didukung pembangunan infrastruktur yang memadai dan penerapan protokol kesehatan; (ii) meningkatkan penyelenggaraan *event-event* pariwisata skala nasional dan internasional; (iii) memperhatikan tenaga kerja yang terdampak COVID-19 pada kawasan; (iv) meningkatkan kerja sama antara Badan Usaha, Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai upaya pelibatan masyarakat di kawasan strategis berbasis pariwisata dan peningkatan aktivitas industri kreatif; (v) mempercepat realisasi investasi pada kawasan; serta (vi) mengoptimalkan paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal.
2. Peningkatan produksi komoditas unggulan
   a. Pengembangan komoditas unggulan dengan nilai tambah tinggi yang sesuai dengan kebutuhan industri substitusi impor dan mampu meningkatkan ekspor.
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan
   a. Penerapan prinsip kota cerdas untuk mendukung pemulihan kegiatan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19.

b. Penguatan manajemen bencana khususnya di perkotaan yang berisiko lebih tinggi dibanding perdesaan, dengan jumlah penduduk besar, kepadatan tinggi dan investasi besar.

4. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
   a. Penguatan peran pendamping desa dalam rangka mendukung Desa Tangguh lawan COVID-19 dan penajaman prioritas penggunaan Dana Desa yang difokuskan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
   b. Pengembangan produksi dan pengolahan nilai tambah komoditas unggulan bernilai ekonomis dengan masa panen pendek dan menengah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan sekitarnya di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan dan daerah tertinggal.
   c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau pasar yang lebih luas pada kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal dalam kerangka pemulihan ekonomi masyarakat.
   d. Penguatan Sistem Informasi Desa termasuk monografi desa melalui digitalisasi desa sebagai sarana pelaporan dan pengawasan Dana Desa, serta media pemutakhiran dan keterpaduan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/registrasi sosial.
   e. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan kolaborasi para pihak dalam pemulihan ekonomi masyarakat perdesaan.
   f. Perluasan pembagian paket konverter kit bahan bakar minyak (BBM) bahan ke bahan bakar gas (BBG) untuk nelayan dan petani, serta pembagian paket konversi minyak tanah ke elpiji tiga kg untuk masyarakat tidak mampu.
5. Kelembagaan dan Keuangan Daerah
   a. Pendampingan dan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam penajaman program dan kegiatan dari sisi perencanaan dan penganggaran untuk penanganan dan pemulihan dampak dari pandemi COVID-19.
   b. Penguatan data kependudukan daerah terutama basis data keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 sebagai dasar validasi data penerima bantuan sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau program pemerintah lainnya agar tepat sasaran.
   c. Harmonisasi regulasi pusat dan daerah untuk percepatan pemulihan daerah dampak pandemi COVID-19.
   d. Pemanfaatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara optimal sebagai salah satu sumber pembiayaan penanganan dan stimulus pemulihan ekonomi di daerah terdampak pandemi COVID-19.
   e. Percepatan penetapan RUU tentang Perubahan atas UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam mendukung pengaturan dan harmonisasi hubungan keuangan pusat dan daerah agar lebih efektif dan efisien dalam upaya mengurangi kesenjangan antardaerah, pengentasan kemiskinan, pemenuhan pelayanan dasar, meningkatkan perekonomian daerah, serta mendorong pembangunan daerah. Rancangan UU tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh DPR.

Langkah-langkah dan kebijakan khusus pada sektor-sektor utama yang akan menjadi fokus pembangunan tahun 2021, dijelaskan lebih lanjut dalam Bab yang menyangkut PN tersebut.

4.1.2.4. Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP)

Pada tahun 2021 perencanaan dan penganggaran PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan akan difokuskan pada kesiapan pelaksanaan tujuh MP. Oleh karena itu, MP dilengkapi dengan informasi sasaran yang dirinci hingga target, lokasi, dan instansi pelaksana yang jelas. Pendanaan MP mensinergikan berbagai sumber pendanaan. Tujuh MP tersebut adalah sebagai berikut.

***Major Project* Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar**

Gambar 4.19

***Major Project* Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020.

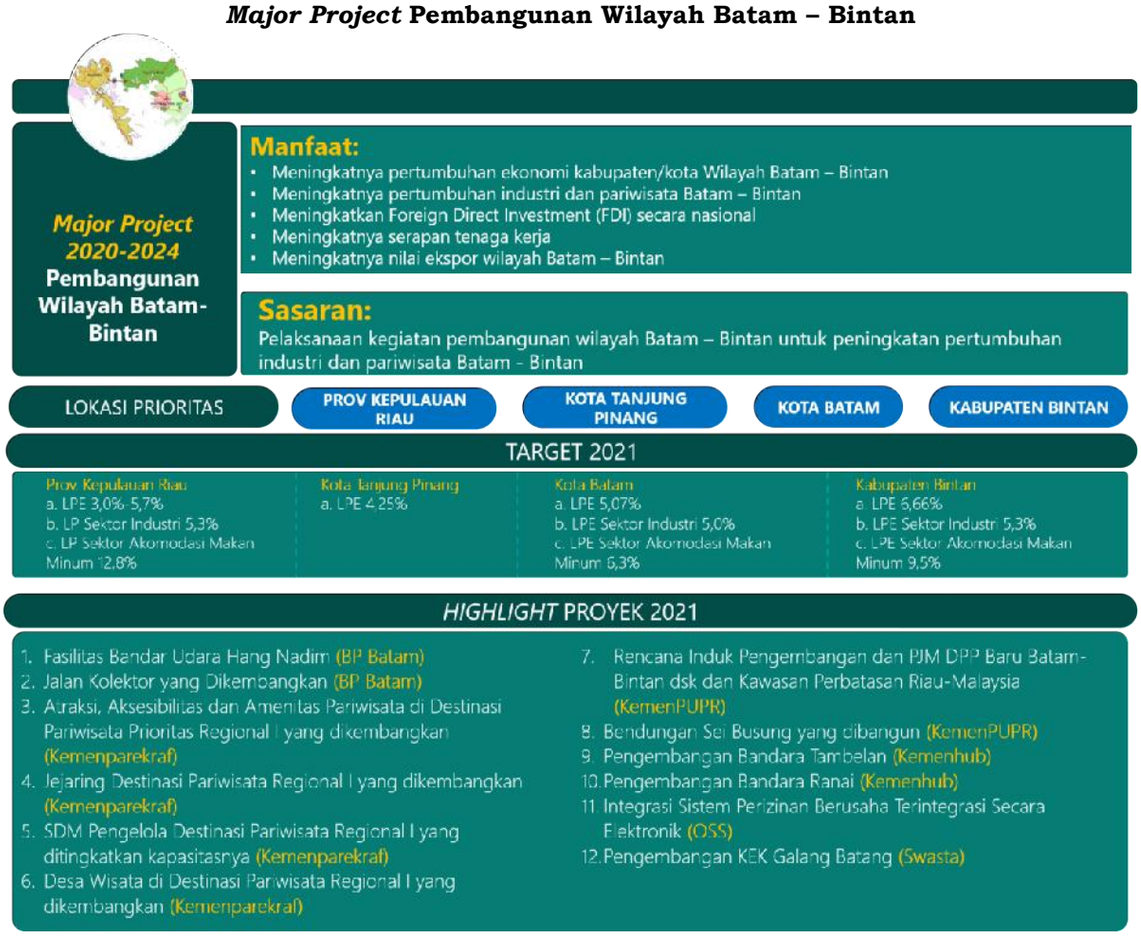
Pengembangan WM di Indonesia bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa, dan diharapkan mampu meningkatkan *share* PDRB WM luar Jawa terhadap nasional serta Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota di dalam WM. MP Pengembangan WM difokuskan pada empat lokus utama yaitu WM Palembang, WM Denpasar, WM Banjarmasin, dan WM Makassar (Gambar 4.19). Pada tahun 2021, pengembangan diarahkan untuk menyiapkan kondisi pemungkin (*enabling environment*) bagi berkembangnya pariwisata dan mendorong investasi.

Major Project Pembangunan Wilayah Batam–Bintan

Major Project Pembangunan Wilayah Batam–Bintan bertujuan untuk mengoptimalkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau dan Kawasan Batam–Bintan sebagai mitra strategis terhadap *hub* di Singapura dalam pengembangan industri berorientasi ekspor dan jasa pariwisata. Pusat pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan antara lain KEK Galang Batang, KPBPB Batam, KI Bintan *Aerospace*, KSPN Nongsa, dan KSPN Lagoi-Bintan (Gambar 4.20).

Gambar 4.20

***Major Project* Pembangunan Wilayah Batam – Bintan**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020.

SK No 054643 A

***Major Project* Pembangunan Kota Baru Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong**

Pembangunan kota baru dimaksudkan sebagai contoh untuk pengembangan kota publik inklusif yang terencana. MP Pembangunan Kota Baru difokuskan pada empat kota baru, yaitu Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong (Gambar 4.21). Pada tahun 2021, pengembangan diarahkan untuk percepatan penetapan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan mendorong sinergi pembangunan dan pembiayaan infrastruktur di kota baru.

Gambar 4.21

***Major Project* Pembangunan Kota Baru Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

***Major Project* Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda**

Major Project Pemulihan Pascabencana bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan mempercepat pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, mendorong peningkatan ekonomi lokal masyarakat pada daerah terdampak bencana, serta memperkuat sistem ketahanan bencana. Pada tahun 2021, pemulihan pascabencana difokuskan kepada pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat (Gambar 4.22).

Gambar 4.22

***Major Project* Pemulihan Pascabencana:**
(Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

***Major Project* Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, PKSN Merauke**

Pembangunan kawasan perbatasan diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi untuk mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya. Selain itu, PKSN diarahkan menjadi pusat perkotaan yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi

SK No 054645 A

yang menghubungkan wilayah sekitarnya, sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga, dan sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga (Gambar 4.23).

Gambar 4.23

***Major Project* Pusat Kegiatan Strategis Nasional:**
PKSN Paloh Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua,
PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, PKSN Merauke



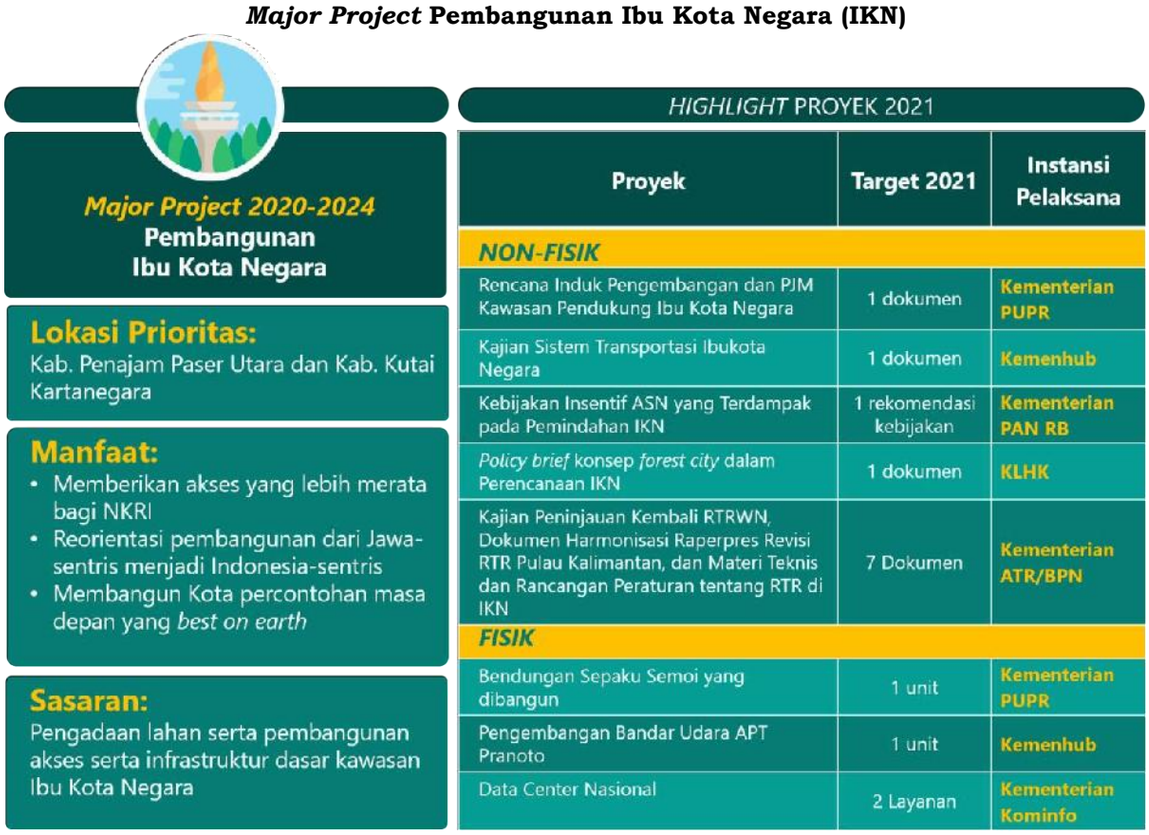
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

***Major Project* Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)**

Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diarahkan untuk mendorong pemerataan dan percepatan pengurangan kesenjangan serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama wilayah timur. MP Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2021 difokuskan untuk melengkapi rencana pembangunan infrastruktur, rehabilitasi hutan dan lahan, pembangunan akses dan infrastruktur dasar kawasan inti pusat pemerintahan, serta sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan dengan RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN yang telah disusun (Gambar 4.24).

Gambar 4.24

***Major Project* Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

***Major Project* Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay**

Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay yang merupakan wilayah adat di kawasan pegunungan dengan tingkat kesulitan akses dan keterisolasian yang tinggi akan dikembangkan sesuai dengan amanat Inpres No.9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Selain itu, kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan sebagian besar merupakan daerah tertinggal sesuai PP No.78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga sangat membutuhkan keberpihakan pembangunan. Pengembangan wilayah adat dan kabupaten tertinggal diarahkan pada pengembangan potensi pertanian berupa ternak sapi, kopi, kacang tanah, dan tanaman hortikultura; penyediaan energi listrik termasuk program listrik di 433 kampung di Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Domberay, dan lima kawasan pengembangan ekonomi (Gambar 4.25).

SK No 054647 A

Gambar 4.25

***Major Project* Wilayah Adat Papua:**
Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

4.1.2.5. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan di antaranya adalah:

1. Undang-Undang (UU), yaitu Rancangan UU Ibu Kota Negara
2. Peraturan Pemerintah (PP), yaitu Revisi PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
3. Peraturan Presiden (Perpres), meliputi (a) Revisi Perpres No.3/2012 tentang RTR Pulau Kalimantan; (b) Rancangan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara (RTR KSN IKN); (c) Rancangan Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) Tahun 2022; (d) Rancangan Perpres tentang RTR Kawasan Perkotaan Patungraya-Agung (WM Palembang); (e) Rancangan Perpres tentang RTR Kawasan Perkotaan Banjarbakula (WM Banjarmasin); (f) Rancangan Perpres tentang RTR Kawasan Perkotaan Bimindo (WM Manado); (g) Rancangan Perpres tentang Otorita dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara; dan (h) Rancangan Perpres tentang Rencana Induk Pembangunan Ibu Kota Negara.

4.1.2.6. Kerangka Kelembagaan

Untuk mendukung pencapaian PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, kebutuhan penataan kelembagaan di antaranya adalah (1) tata kelola kelembagaan dalam rangka pengelolaan KSN Perkotaan/WM; (2) tata kelola kelembagaan bank tanah untuk menjamin ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan (3) tata kelola kelembagaan penyelenggaraan penamaan rupabumi (toponimi).

4.1.3 Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial merupakan penekanan dalam percepatan pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19 dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

4.1.3.1. Pendahuluan

Pembangunan SDM merupakan prioritas utama pembangunan nasional. Seiring dengan terus bertambahnya penduduk usia produktif, kualitas SDM yang tinggi menjadi salah satu prasyarat dalam mengoptimalkan bonus demografi yang akan mencapai puncak dalam beberapa tahun ke depan. Saat ini, IPM Indonesia telah masuk pada kategori tinggi, yaitu 71,92 (BPS, Maret 2019). Upaya untuk terus meningkatkan kualitas SDM menghadapi tantangan besar di tahun 2020, yaitu dengan adanya bencana nonalam pandemi global COVID-19. Penyebaran COVID-19 di Indonesia mempengaruhi kondisi perekonomian dan sasaran pembangunan, termasuk pembangunan SDM. Jumlah orang miskin dan rentan miskin meningkat terutama dari kelompok rentan dan pekerja informal, bahkan pekerja formal.

Dalam upaya meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021, terdapat enam isu strategis. Pertama, pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan dihadapkan pada (1) peningkatan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, terutama menjangkau wilayah sulit dan kelompok khusus, termasuk pemutakhiran data penduduk pascapandemi COVID-19; (2) pengembangan dan pemutakhiran data penduduk miskin dan rentan, terutama kelompok pekerja informal yang terdampak COVID-19, serta transformasi bertahap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi registrasi sosial dengan cakupan 100 persen dengan diawali pemutakhiran data secara nasional; serta (3) peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menganalisis permasalahan dan dampak COVID-19 terhadap kemiskinan melalui perencanaan dan penganggaran yang *pro-poor* secara komprehensif.

Kedua, perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dihadapkan pada beberapa tantangan, di antaranya (1) belum semua pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data penduduk miskin dan rentan secara berkala, sehingga ketepatan sasaran bantuan sosial belum optimal; (2) bantuan sosial sebagai stimulus ekonomi untuk meredam dampak COVID-19 belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan dan terdampak seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, kelompok marjinal, dan pekerja sektor informal;

SK No 054649 A

(3) opsi mekanisme penyaluran bantuan sosial masih terbatas melalui himpunan bank milik negara (Himbara) dan belum mengakomodasi alternatif penyaluran lain yang lebih memudahkan penerima manfaat, diperlukan saat terjadi krisis, bencana dan wabah, dan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T); (4) pelaksanaan bantuan sosial secara digital masih belum optimal dan terintegrasi antarprogram, sehingga program yang menyasar target yang sama masih menggunakan data yang berbeda; (5) kepesertaan jaminan sosial terutama bagi kelompok pekerja informal masih terbatas, padahal kelompok penduduk ini memiliki tingkat kerentanan tertinggi terhadap dampak bencana seperti pandemi COVID-19; (6) perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana, termasuk pandemi COVID-19 belum dikembangkan, sehingga mitigasi dampak bencana belum responsif dan optimal; serta (7) proses pemantauan dan evaluasi belum terintegrasi dan memanfaatkan semua sumber data.

Ketiga, pemenuhan layanan dasar dituntut untuk mempercepat pemerataan pendidikan serta pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah. Layanan pendidikan (dasar-menengah) akan memberi perhatian khusus kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, pemenuhan guru dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pengajaran dan pembelajaran, inovasi pembelajaran berbasis digital, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat mewujudkan SDM berkualitas. Upaya penyediaan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dihadapkan pada tantangan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan tinggi, peningkatan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) untuk mendukung proses pembelajaran, dan penguatan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Pelayanan kesehatan berkualitas difokuskan pada penguatan upaya promotif-preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), termasuk penguatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan ketahanan kesehatan (*health security*), termasuk penguatan deteksi dini penyakit, fungsi laboratorium kesehatan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan inovasi teknologi kesehatan, dorongan kemandirian produksi farmasi dan alat kesehatan dalam negeri serta meningkatkan kembali upaya kesehatan yang tertinggal pada 2020 akibat adanya *refocusing* pada pandemi COVID-19. Penguatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi untuk menjamin ketersediaan alat, obat kontrasepsi, dan pelayanan keluarga berencana (KB) bergerak.

Keempat, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda dihadapkan pada (1) perlindungan anak dari berbagai dampak negatif COVID-19, seperti diskriminasi, perlakuan salah, stigma, kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak, dan kehilangan pengasuhan karena keterpisahan dengan orang tua/pengasuh utama; (2) perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perdagangan orang; (3) peningkatan partisipasi perempuan di ekonomi, khususnya bagi korban kekerasan dan kelompok yang terdampak COVID-19; serta (4) peningkatan partisipasi pemuda pascapandemi COVID-19, di antaranya dengan menjaga keberlanjutan jiwa kesukarelawanan dan kreativitas pemuda melalui kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan kewirausahaan pemuda yang didukung oleh akses pemodalan memadai.

Kelima, pengentasan kemiskinan dihadapkan pada sumber pendanaan usaha masih cenderung eksklusif dan sulit dijangkau masyarakat miskin dan rentan karena ketiadaan aset untuk agunan, serta redistribusi dan legalisasi tanah belum terfasilitasi optimal dengan pemberdayaan dan bantuan permodalan sehingga aset menjadi tidak produktif. Di

sisi lain, jumlah penduduk miskin dan rentan baru yang membutuhkan akses terhadap aset produktif diperkirakan meningkat akibat bencana pandemi COVID-19.

Keenam, peningkatan produktivitas dan daya saing dihadapkan pada rendahnya kualitas angkatan kerja sehingga belum mampu merespon kebutuhan pasar kerja. Terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi yang berdampak pada penurunan penciptaan kesempatan kerja dan besarnya jumlah pekerja yang dirumahkan atau diberhentikan, terutama pada pekerja yang memiliki produktivitas rendah. Persoalan diperkuat dengan ketidaksiapan sistem informasi pasar kerja sebagai basis intervensi kebijakan ketenagakerjaan dalam meredam dampak pandemi COVID-19. Selain itu, sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi masih perlu difokuskan, diintegrasikan, dan didayagunakan untuk mengatasi dua tantangan utama, yaitu penciptaan inovasi yang berdampak ekonomi dan pemecahan permasalahan bangsa, sebagaimana munculnya COVID-19 yang memerlukan riset mendalam untuk penemuan antivirus/obat/vaksin serta prototipe alat kesehatan untuk deteksi dan penanganan COVID-19. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan tidak optimalnya pembudayaan olahraga di masyarakat dan pembinaan olahraga prestasi yang mempengaruhi daya saing prestasi olahraga di tingkat dunia.

Untuk itu, pembangunan manusia perlu difokuskan pada upaya untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19. Kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021 diarahkan untuk (1) mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan; (2) memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial melalui reformasi sistem perlindungan sosial, antara lain integrasi program bantuan sosial untuk meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan sebagai upaya meredam penambahan penduduk miskin akibat dampak COVID-19; (3) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan sistem kesehatan dan *health security*, termasuk jaminan terhadap akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; (4) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (5) menyediakan infrastruktur jaringan internet dan mengembangkan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual terutama di masa krisis (belajar dari rumah); (6) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui penguatan sistem data dan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, penguatan perlindungan anak di daerah pariwisata, penguatan koordinasi pemberdayaan ekonomi perempuan, serta peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha; (7) memperluas akses penduduk miskin, rentan, dan terdampak COVID-19 terhadap aset produktif, seperti modal, pemberdayaan, dan legalitas kepemilikan tanah; serta (8) meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan berbasis digital, pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas dunia, pengembangan riset dan inovasi terkait sektor-sektor strategis dalam menghadapi dampak COVID-19 khususnya sektor kesehatan dan sektor-sektor pendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, pembudayaan dan pemanfaatan momentum keikutsertaan/ penyelenggaraan *event* olahraga untuk pengembangan pariwisata dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat dunia, diantaranya melalui penyelenggaraan *The Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) *U-20 World Cup* di Indonesia, serta penguatan pendamping pembangunan. Kebijakan pembangunan manusia dilaksanakan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif dengan memperhatikan kebutuhan penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

4.1.3.2. Sasaran Prioritas Nasional

Untuk mendukung proses pemulihan dampak COVID-19, peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing akan difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial. Reformasi sistem kesehatan di antaranya akan dilaksanakan melalui penguatan *health security* dan sumber daya kesehatan. Selain itu, reformasi sistem perlindungan sosial akan dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kualitas data, penyederhanaan sistem, dan harmonisasi regulasi terkait program-program perlindungan sosial. Berbagai program bantuan sosial juga akan diintegrasikan pelaksanaannya dengan memanfaatkan satu data yang akurat dan termutakhirkan, melalui pengembangan registrasi sosial dan digitalisasi monografi desa. Di sisi lain, pengukuran dampak COVID-19 terhadap program jaminan sosial akan dilakukan untuk menyusun strategi mitigasi risiko migrasi peserta yang berpengaruh pada pencapaian target kepesertaan. Dengan demikian, program-program bantuan sosial dan jaminan sosial dapat mencakup masyarakat miskin dan rentan baru terdampak COVID-19. Transformasi digital bantuan sosial dan penyempurnaan mekanisme penyaluran bantuan melalui berbagai kanal penyaluran akan dilanjutkan, termasuk untuk mempermudah penjangkauan penduduk terdampak bencana dan daerah 3T. Untuk meningkatkan kesiapan penduduk dalam menghadapi bencana, termasuk potensi wabah/pandemi penyakit, konsep dan peta jalan pengembangan perlindungan sosial adaptif akan dibangun. Mekanisme pembiayaan sistem perlindungan sosial akan dikembangkan agar lebih berkesinambungan dan terintegrasi, dalam kerangka efektivitas pemantauan dan evaluasi.

Dalam rangka pemulihan dampak pandemi COVID-19, sasaran yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13

Sasaran, Indikator, dan Target
PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
1.	**Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan**				
	1.1. Angka Kelahiran Total *(Total Fertility Rate/TFR)* (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)	2,28[1)]	2,26	2,24	2,10
	1.2. Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	95,17[2)]	98,00	99,00	100,00
2.	**Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk**				
	2.1. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%):				
	2.1.1. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	83,47[3)]	82,00	85,00	98,00

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
	2.1.2 Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	58,60[2)]	65,25	72,00	80,00
3.	**Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan**				
	3.1. Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	305[1)]	230	217	183
	3.2. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,67[4)]	24,10	21,10	14
	3.3. Insidensi *tuberkulosis* (per 100.000 penduduk)	319[5)]	272	252	190
	3.4. Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	21,80[6)]	21,80	21,80	21,80
	3.5. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	9,10[6)]	9,10	9,00	8,70
	3.6. Nilai rata-rata hasil PISA:				
	3.6.1. Membaca (nilai)	371[7)]	371	394	396
	3.6.2. Matematika (nilai)	379[7)]	379	385	388
	3.6.3. Sains (nilai)	396[7)]	396	399	402
	3.7. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	8,75[8)]	8,74	8,85	9,18
	3.8. Harapan lama sekolah (tahun)	12,95[8)]	13,24	13,40	13,89
4.	**Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda**				
	4.1. Indeks Perlindungan Anak (IPA) (nilai)	62,72[9)]	66,34	68,10	73,49
	4.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)	91,07[10)]	91,21	91,28	91,39
	4.3. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (nilai)	51,50[11)]	53,56	54,59	57,67
5.	**Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan**				
	5.1. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%)	30,40[12)]	32,00	35,00	40,00
6.	**Meningkatnya produktivitas dan daya saing**				
	6.1. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	43,72[13)]	43,72	45,43	49,80
	6.2. Jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* (PT)				
	6.2.1. Top 200	0[14)]	0	0	1
	6.2.2. Top 300	1[14)]	1	1	2
	6.2.3. Top 500	2[14)]	2	2	3

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
	6.3. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	40,60[13)]	41,00	41,55	43,10
	6.4. Peringkat *Global Innovation Index*	85[15)]	80-85	80-85	75-80

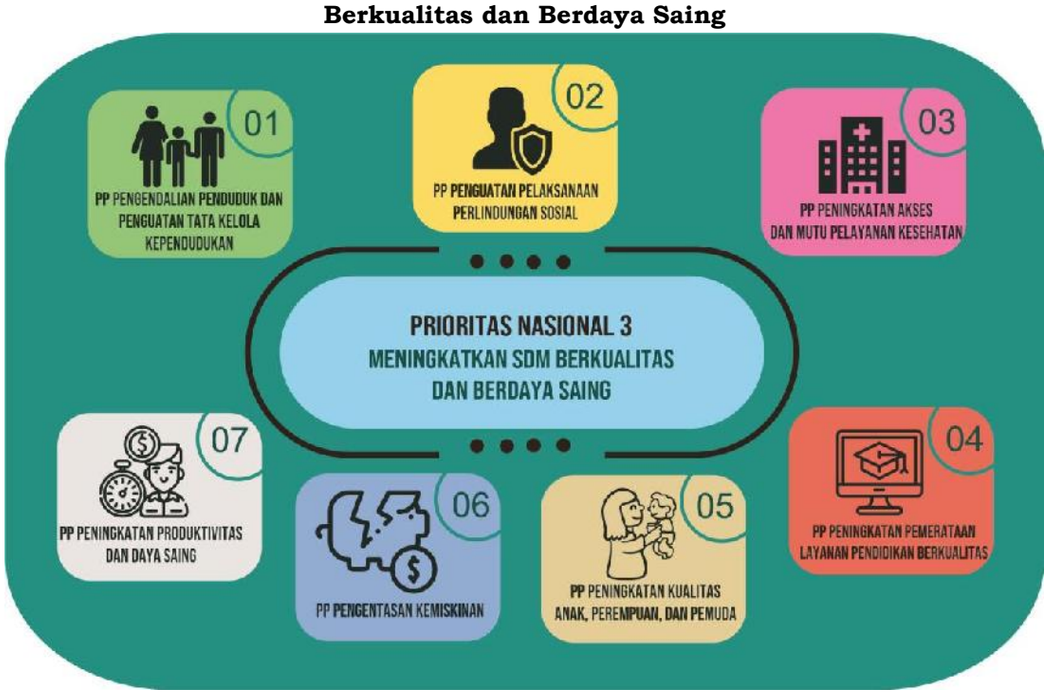
Sumber: [1)] Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), 2015; [2)] Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2019; [3)] Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2019; [4)] Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), 2019; [5)] *Global Tuberculosis Report*, 2017; [6)] Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018; [7)] *Programme for International Student Assessment (PISA)*, 2018 dilaksanakan tiga tahun sekali yaitu tahun 2018, 2021, dan 2024; [8)] BPS, 2019; [9)] KPPPA, 2018; [10)] BPS, 2019; [11)] Diolah dari Susenas dan Sakernas, 2018; [12)] Susenas (Maret, 2019); [13)] Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2019; [14)]*QS World University Rankings*, 2019.[15)]*INSEAD-WIPO Global Innovation Index Report*, 2019.

4.1.3.3. Program Prioritas

Pencapaian sasaran PN Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing untuk mendukung pemulihan dampak COVID-19 akan dilakukan melalui tujuh PP, yaitu: (1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan; (2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial; (3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan; (4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas; (5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda; (6) Pengentasan Kemiskinan; serta (7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, seperti pada Gambar 4.26. Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Gambar 4.26

Kerangka PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Tabel 4.14

Sasaran, Indikator, dan Target PP dari
PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan					
Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan					
1.1.	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	35[1)]	50	70	100
1.2.	Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan *monitoring* evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%)	16[2)]	30	40	100
1.3.	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	15[3)]	30	60	100
1.4.	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0–17 tahun (%)	86,01[4)]	92,00	95,00	100,00
PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial					
Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan					
2.1.	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	83,47[5)]	82,00	85,00	98,00
2.2.	Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (%)	14,85[4)]	15,50	14,70	11,00
2.3.	Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%)	11,12[4)]	11,60	11,00	<10,00
2.4.	Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif (%)	0,78[3)]	2,70	5,00	20,00
2.5.	Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan				
	2.5.1. Pekerja formal (%)	41,43[6)]	26,59[*)]	29,44[*)]	37,24[*)]
	2.5.2. Pekerja informal (%)	3,57[6)]	3,53[*)]	4,44[*)]	7,35[*)]
PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan					
Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan					
3.1.	Angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	24,07[7)]	20,6	19,5	16,0

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
3.2.	Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	15,0[7)]	12,9	12,2	10,0
3.3.	Angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern Contraceptive Prevelance Rate* (mCPR) (%)	57,20[7)]	61,78	62,16	63,41
3.4.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) (%)	10,60[7)]	8,60	8,30	7,40
3.5.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	36[7)]	25	24	18
3.6.	Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,19[8)]	8,08	7,80	7,00
3.7.	Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24[9)]	0,21	0,21	0,18
3.8.	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	285[10)]	325	345	405
3.9.	Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)	177[10)]	110	280	420
3.10.	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	57,90[8)]	64,00	78,00	90,00
3.11.	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	46[10)]	65	80	100
3.12.	Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	70[10)]	80	90	100
3.13.	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	23[10)]	35	59	83
3.14.	Persentase obat memenuhi syarat (%)	78,60[11)]	80,80	83,60	92,30
3.15.	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	76[11)]	78	80	86
PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas					
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas					
4.1.	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (nilai)				
	4.1.1. SMA/SMK/MA Sederajat	0,77[12)]	0,72	0,74	0,84
	4.1.2. Pendidikan Tinggi	0,18[12)]	0,19	0,20	0,23

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
4.2.	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%):				
	4.2.1. Membaca	30,10[13)]	30,10	33,00	34,10
	4.2.2. Matematika	28,10[13)]	28,10	30,00	30,90
	4.2.3. Sains	40,00[13)]	40,00	42,60	44,00
4.3.	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%)				
	4.3.1. Literasi	53,20[14)]	57,20	58,20	61,20
	4.3.2. Numerasi	22,90[14)]	26,50	27,40	30,10
4.4.	Tingkat penyelesaian pendidikan (%)				
	4.4.1. SD/MI/sederajat	93,03[15)]	92,77	93,25	94,78
	4.4.2. SMP/MTs/sederajat	83,12[15)]	85,00	86,53	89,49
	4.4.3. SMA/SMK/MA/sederajat	58,06[15)]	66,43	68,69	76,47
4.5.	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	63,30[4)]	66,49	68,06	72,77
4.6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)	30,28[4)]	33,47	34,56	37,63
PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda					
Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha					
5.1.	Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	11,21[4)]	10,19	9,80	8,74
5.2.	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,70[16)] Perempuan: 62,00[16)]	Menurun[**)]	Menurun[**)]	Menurun[**)]
5.3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)	72,10[17)]	73,24	73,50	74,18
5.4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	51,89[18)]	52,51	53,13	55,00
5.5.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	9,40[19)]	Menurun[**)]	Menurun[**)]	Menurun[**)]
5.6.	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan *white collar* (%)	0,35[18)]	0,37	0,39	0,43

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
PP 6. Pengentasan Kemiskinan					
Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan					
6.1.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%)	23[4)]	35	38	50
6.2.	Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh akses kepemilikan tanah (rumah tangga)	1.214.140[20] (kumulatif)	209.931	483.334	866.315
PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing					
Meningkatnya produktivitas dan daya saing					
7.1.	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)	46,60[18)]	46,60	48,40	52,60
7.2.	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%)	64,34[18)]	64,70	65,28	66,70
7.3.	Jumlah prototipe dari perguruan tinggi (prototipe)	94[21)]	100	184	304
7.4.	Jumlah produk inovasi dari *tenant* Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina (produk)	143[21)]	26	150	700
7.5.	Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha (inovasi)	52[21)]	22	20	210
7.6.	Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik (paten)	1.362[22)]	1.138	2.000	3.000
7.7.	Jumlah paten *granted* (domestik) (paten)	790[22)]	784	850	1.000
7.8.	Persentase sumber daya manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 (%)	14,08[23)]	14,08	16,00	20,00***)
7.9.	Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan (PUI)	81[21)]	106	120	138***)
7.10.	Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif) (lembaga/unit kerja)	48[24)]	0	60	75***)
7.11.	Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan (infrastruktur)	6[25)]	3	4	10

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
7.12.	Jumlah *Science Techno Park* yang ada yang dikembangkan (unit):				
	7.12.1. Berbasis perguruan tinggi	17[26)]	0	5	5
	7.12.2. Berbasis non perguruan tinggi	28[26)]	3	3	3
7.13.	Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan (produk)	0	0	0	40***)
7.14.	Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan (teknologi):				
	7.14.1. Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam	12[25)]	5	15	24
	7.14.2 Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	35[25)]	35	35	35
7.15.	Budaya dan Prestasi Olahraga:				
	7.16.1. Jumlah Perolehan Medali Emas *Olympic Games* (medali)	1[26)]	–***)	2	3
	7.16.2. Jumlah Perolehan Medali Emas *Paralympic Games* (medali)	0[27)]	–****)	1	3

Catatan: *) perhitungan menggunakan data pembilang jumlah peserta pekerja formal dan informal di BPJS Ketenagakerjaan dan data penyebut proyeksi total jumlah penduduk bekerja, belum terdapat proyeksi jumlah pekerja formal dan informal; **) data prevalensi kekerasan baru tersedia satu waktu sehingga belum dapat diproyeksikan targetnya secara kuantitatif; ***) angka kumulatif; ****) *event* ditunda menjadi tahun 2021.

Sumber: [1)] Kemensos, 2019; [2)] Kementerian PPN/Bappenas, 2019; [3)] Kemensos, 2019; [4)] Susenas, 2019; [5)] Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), 2019; [6)] BPJS Ketenagakerjaan, 2019; [7)] SDKI, 2017; [8)] Riskesdas, 2018; [9)] Kemenkes, 2018; [10)] Kemenkes, 2019; [11)] BPOM, 2019; [12)] BPS, 2019; [13)] *Programme for International Student Assessment (PISA)*, 2018, dilaksanakan tiga tahun sekali yaitu tahun 2018, 2021, dan 2024; [14)] Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), 2016; [15)] Susenas 2019 berdasarkan metode perhitungan UNESCO *Institute for Statistics*; [16)] Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR), 2018; [17)] Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, 2018; [18)] Sakernas, 2019; [19)] Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), 2016; [20)] Kementerian ATR/BPN, 2019; [21)] Kemenristekdikti, 2017-2018; [22)] KemenkumHAM, 2018; [23)] Kemenristekdikti, LIPI, BPPT, 2018; [24)] KNAPP, 2018; [25)] Kemenristekdikti dan LPNK Iptek, 2019; [26)] *Rio 2016 Olympic Games* (Brazil); [27)] *Rio 2016 Paralympic Games* (Brazil).

4.1.3.4. Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*

Dalam PN Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing telah disusun empat MP sebagai langkah konkret dalam pencapaian sasaran yang dirinci hingga target, lokasi, dan instansi pelaksana yang jelas. *Major Project* tersebut antara lain sebagai berikut.

Major Project Penguatan Sistem Kesehatan Nasional

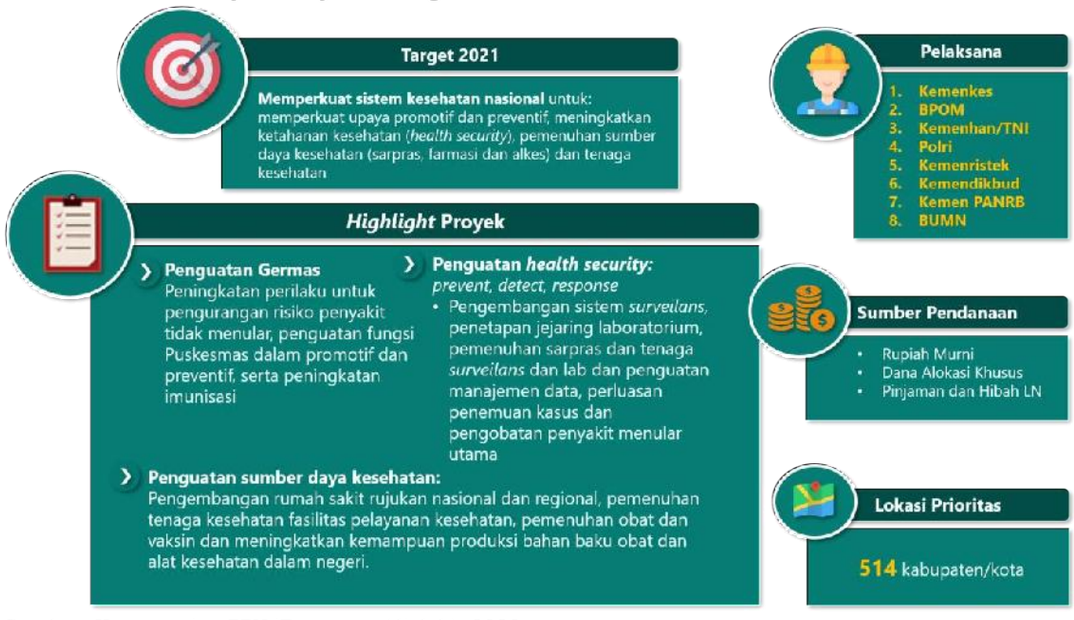
Pengalaman penanganan pandemi COVID-19 menunjukkan adanya kelemahan sistem kesehatan nasional, khususnya *health security*, baik dari kemampuan pencegahan,

maupun mendeteksi termasuk *screening test*, *tracing* dan *tracking*, dan *social distancing*. Dukungan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, dan alat kesehatan kurang siap (laboratorium, manajemen kasus, kekurangan alat pelindung diri, ruang isolasi, dan alat tes); dan kapasitas tenaga dan fasilitas kesehatan terbatas dalam tata laksana kasus, serta keterbatasan ruang rawat.

Penguatan sistem kesehatan dilakukan melalui peningkatan upaya promotif-preventif dengan pembudayaan Germas, penguatan *health security*, dan penguatan sumber daya kesehatan. Penguatan sistem kesehatan nasional difokuskan pada delapan area reformasi, yaitu: (1) pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, termasuk beasiswa wajib penempatan, perluasan pendidikan dokter spesialis, penguatan program studi kesehatan yang langka, dan redistribusi tenaga kesehatan; (2) penguatan fungsi puskesmas, termasuk penguatan fungsi promotif-preventif dan pemenuhan tenaga kesehatan dan non kesehatan; (3) peningkatan kualitas RS dan pelayanan di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan, termasuk penguatan RS Rujukan Nasional dan *Centre of Excellence* pelayanan kesehatan bergerak, pengembangan *flying health care*, dan pengembangan *sister hospital*; (4) kemandirian farmasi dan alat kesehatan, termasuk peningkatan produksi bahan baku dalam negeri, pengembangan laboratorium uji alat kesehatan dan pengembangan vaksin bersertifikat halal; (5) ketahanan kesehatan (*health security*), termasuk pengembangan surveilans penyakit terpadu, *real-time*, dan berbasis laboratorium, penguatan jejaring dan akreditasi laboratorium, serta peningkatan kapasitas tenaga laboratorium; (6) pengendalian penyakit dan imunisasi, termasuk perluasan penemuan dan pengobatan penyakit TB, Malaria dan HIV/AIDS, serta pengembangan register dan pengingat imunisasi; (7) pembiayaan kesehatan, termasuk pengembangan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) berbasis kinerja dan pengembangan kontrak pelayanan; dan (8) optimalisasi teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat, termasuk penguatan *telemedicine*, pengembangan *single entry* data di puskesmas dan rumah sakit dan digitalisasi posyandu, serta pengaktifan kader kesehatan (Gambar 4.27).

Gambar 4.27

***Major Project* Penguatan Sistem Kesehatan Nasional**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Major Project* Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting

Dalam rangka mempercepat penurunan kematian ibu menjadi 217 per 100.000 kelahiran hidup serta prevalensi *stunting* pada balita menjadi 21,10 persen, terutama perlu dilakukan penguatan sistem rujukan maternal, penguatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi. Sedangkan untuk memperkuat intervensi percepatan penurunan *stunting* yang bersifat spesifik dan sensitif dilakukan melalui pemberian makanan tambahan, penyediaan kelas pengasuhan, sampai penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak (Gambar 4.28).

Gambar 4.28

Major Project* Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

***Major Project* Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0**

Untuk menjawab tantangan pasar kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan global dan perkembangan industri 4.0, pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi difokuskan pada peningkatan keahlian tenaga kerja yang mendukung industri 4.0. Pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0 menjadi semakin penting seiring dengan perubahan pola kerja dunia usaha dan dunia industri yang bergantung pada konektivitas jaringan, sistem, dan teknologi akibat terjadinya pandemi COVID-19. Fokus pengembangan dituangkan dalam *highlight* proyek, antara lain pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel, revitalisasi lembaga pendidikan vokasi yang mendukung industri 4.0, serta pelaksanaan pelatihan vokasi, pelaksanaan Kartu Prakerja dan pemagangan di industri 4.0 (Gambar 4.29).

Gambar 4.29

***Major Project* Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

***Major Project* Pembangunan *Science Technopark* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 *Major* Universitas)**

Upaya peningkatan kapabilitas penciptaan inovasi dan peningkatan produk inovasi nasional perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas *Science Technopark* (STP) sebagai simpul *triple-helix* yang mentransformasikan hasil riset menjadi produk inovasi yang komersial. Pada tahun 2021 pengembangan STP akan dilakukan di Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada yang memiliki tingkat kesiapan tinggi. Dengan demikian, keempat STP tersebut dapat beroperasi secara penuh menghasilkan dukungan dalam penyelesaian masalah dan peningkatan produktivitas industri (*process innovation*) serta menghasilkan perusahaan pemula dengan berbagai produk inovasi (*product innovation*) yang dapat dikomersialkan (Gambar 4.30).

***Major Project* Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh**

Pandemi COVID-19 berdampak pada penambahan kelompok miskin dan rentan baru akibat banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan dan tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi. Belajar dari kejadian pandemi ini, diperlukan adanya reformasi sistem perlindungan sosial yang memperbaiki mekanisme dan memperluas cakupan bantuan sosial dan jaminan sosial. Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan melalui perbaikan data masyarakat miskin dan rentan, integrasi dan digitalisasi bantuan sosial, pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif, serta penyempurnaan mekanisme pembiayaan perlindungan sosial.

SK No 054774 A

Gambar 4.30

Major Project* Pembangunan *Science Technopark
(Optimalisasi *Triple Helix* di 4 *Major* Universitas)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Gambar 4.31

***Major Project* Integrasi Bantuan Sosial**
Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

SK No 054663 A

Reformasi sistem perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan yang diperkirakan meningkat pada akhir tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Untuk itu diperlukan adanya percepatan perbaikan DTKS menuju registrasi sosial secara bertahap hingga mencakup 100 persen penduduk yang didukung melalui pemutakhiran DTKS secara nasional, pengembangan dan digitalisasi monografi desa, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk mendukung pemutakhiran mandiri DTKS secara reguler melalui penjangkauan aktif dan *on-demand*. Hal ini untuk mendukung keakuratan data penerima manfaat pada integrasi berbagai bantuan sosial sebagai sistem jaring pengaman sosial yang handal dan komprehensif. Selain itu, pendampingan kepada penerima manfaat, dan penyempurnaan mekanisme penyaluran berbasis nontunai untuk mewujudkan pelaksanaan program perlindungan sosial yang efektif berdasarkan kriteria tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi (5T) juga menjadi agenda utama. Pada tahun 2021 tahapan integrasi akan dilaksanakan untuk penyatuan beberapa program yaitu (1) pengintegrasian data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), (2) subsidi LPG 3 kg dan listrik dengan Program Sembako, dan (3) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif yang terkoordinasi antarprogram di pusat dan daerah (Gambar 4.31).

4.1.3.5. Kerangka Regulasi

Pada PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial akan diusulkan beberapa kerangka regulasi, meliputi (1) revisi PP No.76/2015 tentang Perubahan atas PP No.101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; (2) Rancangan PP tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; (3) revisi Perpres No.63/2017 tentang Bantuan Sosial Non-Tunai; (4) Rancangan Perpres tentang Integrasi Bantuan Sosial; (5) Rancangan Perpres tentang Perlindungan Sosial yang Adaptif; (6) Rancangan Perpres tentang Reformasi Perlindungan Sosial; serta (7) penyelesaian seluruh Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana sebagaimana dimandatkan dalam UU No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan kerangka regulasi yang akan diusulkan adalah revisi UU No.4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pada PP Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, kerangka regulasi yang diusulkan adalah (1) Rancangan Perpres tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak; dan (2) Rancangan Perpres tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Pada PP Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, kerangka regulasi yang akan diusulkan adalah (1) revisi Perpres No.95/2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional; dan (2) Rancangan Perpres tentang Penguatan Pendamping Pembangunan.

Selain kebutuhan regulasi di atas, beberapa kerangka regulasi yang juga perlu untuk diusulkan antara lain (1) revisi UU No.13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; (2) revisi UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (3) Rancangan PP tentang Label dan Iklan Pangan; (4) revisi PP No.109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan; (5) Rancangan PP tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Iptek; (6) Rancangan Perpres tentang Pemanfaatan Prototipe Hasil Riset untuk Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) dan BUMN; (7) Rancangan Perpres tentang Komite Nasional Vokasi; (8) Rancangan Perpres tentang Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU)/*Holding* BLU untuk Pengelolaan *Science and Technopark* (STP)/Lembaga Penelitian, dan Pengembangan/

Litbang dan Pemasaran Produk Hasil Riset STP/Lembaga Litbang; (9) Rancangan Perpres tentang Sistem Informasi Iptek Nasional (SIIN); (10) Rancangan Perpres tentang Pengelolaan Dana Abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan.

4.1.4 Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19 menjadi momentum penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat.

4.1.4.1. Pendahuluan

Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Upaya untuk memperkuat karakter dan sikap mental dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental yang mencakup integritas, etos kerja, dan gotong royong. Internalisasi nilai-nilai tersebut dilakukan pada tataran individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, dan lembaga-lembaga negara. Selain itu, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan juga diarahkan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan melalui pemajuan kebudayaan.

Pada tahun 2020, gerakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan menghadapi tantangan pandemi global COVID-19. Untuk mengatasi COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah meliputi (a) pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya, (b) aktivitas bekerja di tempat kerja, (c) kegiatan keagamaan di rumah ibadah, (d) kegiatan di tempat atau fasilitas umum, (e) kegiatan sosial dan budaya, dan (f) pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. Pandemi COVID-19 turut berdampak pada pelambatan gerakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan karena pembatasan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan kerumunan massa dan interaksi antarmanusia. Dengan demikian, ada empat isu strategis revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021.

Pertama, dalam upaya internalisasi nilai esensial revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila dihadapkan pada permasalahan belum optimalnya gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu. Dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19, internalisasi nilai revolusi mental belum sepenuhnya mampu mengubah masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai bagian dari program gerakan Indonesia bersih. Perilaku tertib masyarakat dalam melaksanakan kebijakan PSBB juga masih kurang. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker saat di luar rumah, tidak mencuci tangan pakai sabun, dan kurang disiplin dalam menerapkan *physical distancing* atau jaga jarak fisik untuk memutus penularan COVID-19. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada upaya membangkitkan etos kerja dan semangat gotong royong masyarakat yang berkeadilan. Upaya mewujudkan Indonesia bersatu juga dihadapkan

pada masih banyaknya penyebaran berita palsu mengenai pandemi COVID-19 yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengancam persatuan bangsa. Kemudian untuk mewujudkan Indonesia melayani, pelayanan publik dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah keterbatasan dampak kebijakan PSBB.

Selain itu pembinaan ideologi Pancasila menghadapi tantangan untuk lebih membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada saat pandemi COVID-19, yakni dengan meningkatkan semangat gotong royong dalam keimanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan bangsa, musyawarah mufakat, serta keadilan sosial. Kemudian pada saat PSBB aktivitas lebih banyak dilakukan di rumah, keluarga sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter sejak usia dini juga menghadapi tantangan untuk meningkatkan ekspresi saling peduli, menjaga dan melindungi antaranggota keluarga, serta menghindari konflik dalam keluarga.

Kedua, dalam upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, pandemi COVID-19 yang mewajibkan pembatasan interaksi antarmanusia berdampak pada penutupan pusat-pusat layanan kebudayaan seperti museum, situs cagar budaya, galeri seni, taman budaya, dan sanggar. Larangan berkerumun di ruang publik juga turut membatasi ruang gerak bagi para pelaku budaya dan masyarakat untuk melakukan kegiatan kebudayaan seperti pertunjukan seni dan penyelenggaraan festival budaya. Sementara itu ekosistem kebudayaan berkelanjutan yang memungkinkan para pelaku budaya dapat terus berkarya dan memperoleh apresiasi dari masyarakat pada situasi pandemi COVID-19 belum terbangun dengan kokoh.

Ketiga, dalam upaya moderasi beragama, pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku masyarakat karena masih rendahnya literasi keagamaan dan lemahnya pemahaman ajaran agama di kalangan umat beragama.

Keempat, dalam upaya meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya kemampuan literasi masyarakat dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kemampuan literasi juga turut menentukan respon masyarakat untuk lebih sigap dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan pada upaya mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19 melalui (1) memperkuat pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui bidang pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta sistem sosial pada keluarga dan masyarakat, serta pembinaan ideologi Pancasila; (2) membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, mengembangkan media baru berbasis IT sebagai wahana ekspresi budaya, dan mengembangkan dana perwalian kebudayaan; (3) meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; dan (4) mengembangkan layanan literasi berbasis inklusi sosial dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

4.1.4.2. Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15

Sasaran, Indikator, dan Target
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

No	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
1.	**Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya**				
	1.1. Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	68,30*	69,57	70,78	74,29
2.	**Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan**				
	2.1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	55,23*	56,72	58,21	62,70
3.	**Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial**				
	3.1. Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai)	0,61 (2018)	0,62	0,63	0,65
4.	**Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat**				
	4.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	73,83	74,20	74,60	75,80
5.	**Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa**				
	5.1. Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)	53,57 (2018)	53,57	55,00	61,00
	5.2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	21,80 (2017)	21,90	22,00	22,10
6.	**Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengatahuan, inovatif, dan kreatif**				
	6.1. Nilai Budaya Literasi (nilai)	57,70*	60,37	63,03	71,04

Sumber: Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbud, Kemenag, BKKBN, BPS, 2019
Keterangan: *) Angka proyeksi berdasarkan *baseline* tahun 2018

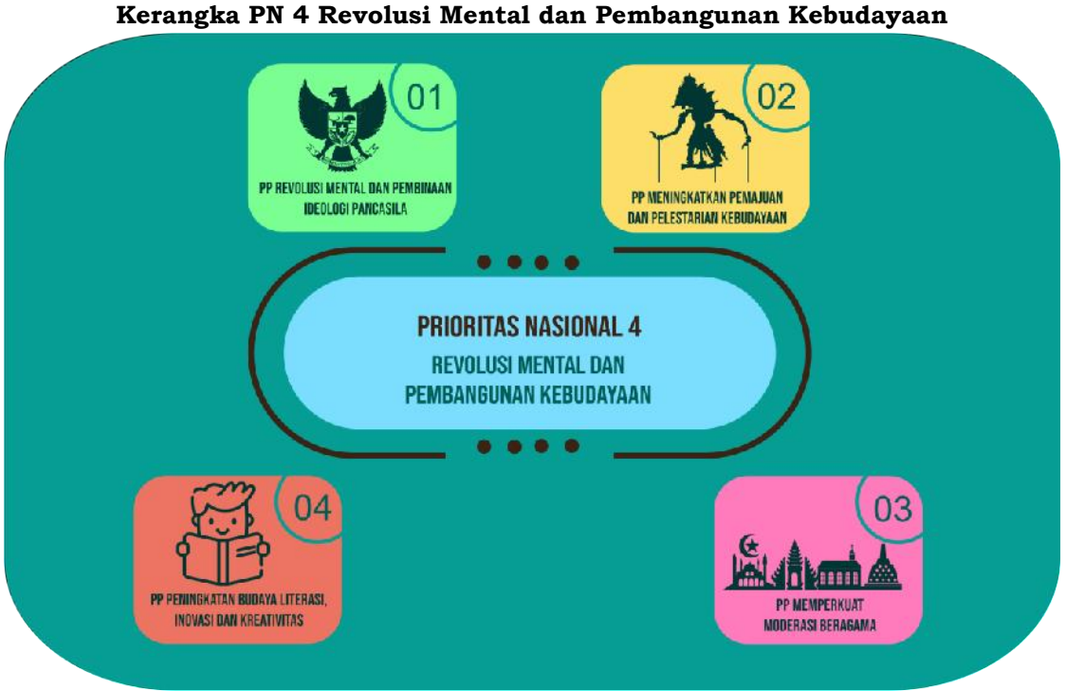
4.1.4.3. Program Prioritas

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dilakukan melalui empat PP, yaitu (1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter; (2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia; (3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial; dan (4) Peningkatan Budaya

Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.32. Adapun sasaran, indikator, dan target PP pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Gambar 4.32

Kerangka PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Tabel 4.16

Sasaran, Indikator, dan Target PP dari
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter					
Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu					
1.1.	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani (nilai)	78,98*	79,06	79,14	79,38
1.2.	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih (nilai)	68,98*	69,97	70,96	73,95
1.3.	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib (nilai)	76,42*	76,96	77,34	78,08
1.4.	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri (nilai)	50,08*	53,46	56,70	66,39
1.5.	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu (nilai)	67,03*	68,40	69,74	73,65

SK No 054668 A

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter					
1.6.	Indeks Kerentanan Keluarga (nilai)	12,29	12,00	11,5	10,00
1.7.	Indeks Karakter Remaja (nilai)	n/a	67,92	68,42	69,92
PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia					
Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan					
2.1.	Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	43,86*	46,61	49,36	57,60
2.2.	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	36,97*	37,38	37,79	39,01
2.3.	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	33,79*	37,03	40,28	50,00
PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial					
Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama					
3.1.	Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji (nilai)	85,91	85,95	85,96	86,00
3.2.	Indeks Kepuasan Layanan KUA (nilai)	77, 28	80,00	81,00	84,00
PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter					
Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif					
4.1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	10,12	11,00	12	15,00

Sumber: Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbud, Kemenag, Perpusnas, BKKBN, BPS, 2019
Keterangan: *) Angka proyeksi berdasarkan *baseline* tahun 2018

Sebagai upaya memulihkan dampak pandemi COVID-19, kegiatan-kegiatan penting yang akan dilakukan antara lain (1) bantuan sosial bagi para seniman dan pegiat budaya untuk melakukan kegiatan kebudayaan; (2) bantuan penyelenggaraan festival budaya bagi daerah; (3) bantuan pengembangan desa pemajuan kebudayaan; (4) penguatan pusat-pusat perubahan Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk kembali membangun optimisme dan semangat kebangsaan; (5) pelaksanaan dialog internal dan antarumat beragama, serta bimbingan-penyuluhan praktik peribadatan di musim wabah; (6) pengembangan dana sosial keagamaan dan pemberdayaan ekonomi umat; (7) pembangunan sarana prasarana layanan keagamaan: balai nikah, manasik haji, dan asrama haji; (8) penguatan kapasitas keluarga dalam memberikan pengasuhan dan pendampingan kepada anak dan remaja melalui penyiapan kehidupan berkeluarga, peningkatan kecakapan hidup, serta penguatan

SK No 054669 A

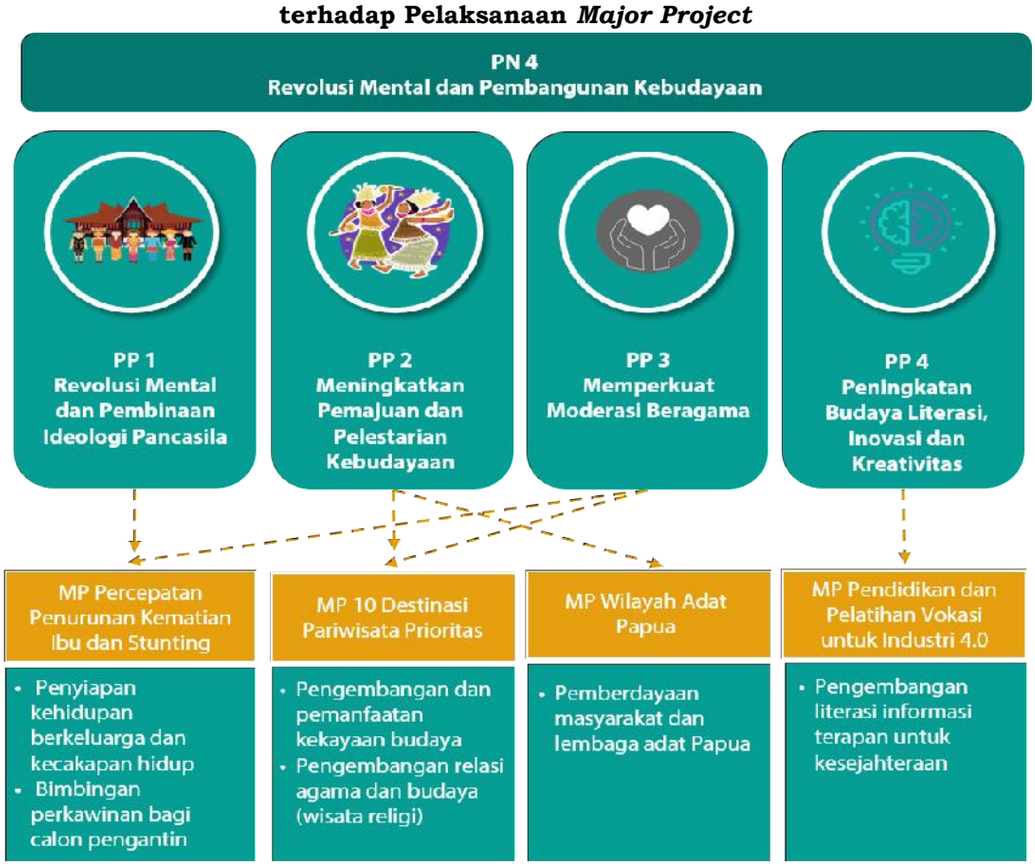
perlindungan kepada lansia, dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi yang berperspektif gender; dan (9) pengembangan layanan literasi informasi terapan untuk kesejahteraan.

4.1.4.4. Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*

Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan tidak memiliki MP. Namun demikian PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan mendukung beberapa MP yaitu (1) MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, (2) MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, (3) MP Wilayah Adat Papua, dan (4) MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.33.

Gambar 4.33

Dukungan PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan terhadap Pelaksanaan *Major Project*



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Sebagai contoh dalam rangka mendukung MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PP Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan melaksanakan beberapa proyek prioritas, antara lain (1) penyelenggaraan festival budaya daerah secara sinergi dan holistik melalui platform Indonesiana di 20 lokasi; (2) pengembangan desa pemajuan kebudayaan untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan sumber daya kebudayaan daerah di 34 lokasi; dan

(3) penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai pagelaran karya budaya bangsa yang dilahirkan dari ajang kompetisi dan edukasi secara berjenjang dan berkelanjutan. Sebagai upaya percepatan pembangunan pascapandemi COVID-19, pelaksanaan PP Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan difokuskan pada daerah destinasi pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19.

4.1.4.5. Kerangka Regulasi

Regulasi yang diperlukan untuk mendukung PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan yakni penyelesaian seluruh Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana sebagaimana dimandatkan dalam UU No.13/2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Rancangan Peraturan Pemerintah ini untuk memperkuat pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4.1.4.6. Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan yakni pembentukan lembaga pengelola dana perwalian kebudayaan. Lembaga tersebut melaksanakan tugas dan fungsi pengembangan dan pemanfaatan dana perwalian kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan.

4.1.5. Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2021 akan mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19 melalui peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor riil seperti sektor pariwisata, industri, dan yang menunjang peningkatan investasi.

4.1.5.1. Pendahuluan

Percepatan pembangunan infrastruktur tahun 2021 diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19 pada sektor riil (industri, pariwisata, dan investasi) serta mendukung penguatan kesehatan masyarakat. Fokus utamanya antara lain (1) infrastruktur pelayanan dasar, (2) infrastruktur konektivitas, (3) infrastruktur perkotaan, (4) energi dan ketenagalistrikan, (5) transformasi digital, serta (6) mengedepankan ketangguhan infrastruktur menghadapi bencana. Selain itu dilakukan pula pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi kegiatan yang menggunakan metode padat karya, antara lain pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan irigasi; pembangunan akuifer buatan simpanan air hujan (ABSAH); pemeliharaan jalan; penyediaan air minum dan sanitasi; serta peningkatan kualitas rumah swadaya masyarakat.

Beberapa isu penting infrastruktur pelayanan dasar yang menjadi tantangan di tahun 2021 yaitu akses terhadap perumahan dan infrastruktur dasar permukiman yang layak, termasuk air minum dan sanitasi yang harus dipastikan pemenuhannya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Pada sisi lainnya di perumahan dan permukiman padat penduduk/kumuh, risiko penyebaran COVID-19 lebih tinggi dan tidak memungkinkan penderita COVID-19 melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Tantangan lainnya adalah pemulihan industri perumahan. Efek pandemi telah mengancam keamanan bermukim masyarakat, terutama bagi masyarakat dengan lapangan usaha informal maupun formal yang gagal membayar sewa atau kredit rumahnya. Menurunnya kinerja industri perumahan juga memiliki dampak cukup signifikan terhadap perekonomian karena melibatkan sekitar 171 *backward and forward linkages* industri termasuk penyediaan lapangan kerja karena sektor ini menyerap tenaga cukup besar (padat karya). Tantangan dalam pemenuhan kebutuhan air pada masa pandemi COVID-19 di antaranya adalah peningkatan penggunaan air baku domestik, baik di perkotaan maupun perdesaan akibat dari perubahan perilaku pada manusia yang menjadi lebih higienis. Isu lain pada infrastruktur pelayanan dasar adalah perlu ditingkatkannya aspek keamanan dan keselamatan pada prasarana dan sarana transportasi, termasuk penguatan koordinasi dari berbagai *stakeholder*, serta kapasitas dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM), maupun ketersediaan peralatan dalam mendukung kegiatan peningkatan keselamatan, upaya pencarian, dan pertolongan terhadap musibah kecelakaan transportasi maupun kejadian bencana alam.

Tantangan potensial terkait ketahanan pangan pada masa pandemi COVID-19, antara lain (1) permintaan pasar yang berkurang menurunkan pendapatan petani; (2) penurunan daya beli masyarakat dan penurunan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian melalui peningkatan dan pengamanan ketersediaan bahan pangan nasional; (3) *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) untuk pendanaan pembangunan dan rehabilitasi khususnya pada daerah irigasi kewenangan daerah (*small scale irrigation*); (4) peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh berpengaruh pada pola konsumsi pangan masyarakat terutama untuk daging, buah, dan sayur sehingga diperlukan dukungan pemerintah untuk sektor tanaman nonpadi; serta (5) penduduk miskin dan meningkatnya rawan pangan terutama di perdesaan akibat hilangnya pekerjaan.

Tantangan dalam pengembangan konektivitas transportasi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19 di sektor pariwisata dan industri serta pemerataan pembangunan wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) antara lain belum terselenggaranya jaringan jalan trans pulau yang berkesinambungan, belum optimalnya angkutan barang kereta api, terbatasnya kapasitas bandara, fasilitas pelabuhan yang masih perlu dikembangkan sesuai dengan standar pelayanan pelabuhan, belum kuatnya peran angkutan penyeberangan dalam menghubungkan pulau-pulau, serta layanan subsidi dan angkutan perintis kereta api, udara, laut, darat, dan penyeberangan yang masih perlu ditingkatkan. Di samping itu, belum memadainya ketersediaan sistem angkutan umum massal di beberapa wilayah perkotaan berdampak pada kemacetan lalu lintas dan kerugian ekonomi yang nilainya cukup besar.

Pada sektor energi dan ketenagalistrikan, beberapa tantangan utama antara lain (1) pola konsumsi energi di masyarakat akibat pandemi COVID-19 mengalami perubahan; (2) peningkatan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengoptimalkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT); (3) tingkat pelayanan ketenagalistrikan masih rendah, salah satunya terlihat dari

SK No 054672 A

lama dan jumlah pemadaman yang masih tinggi; (4) penggunaan energi bersih untuk rumah tangga dengan sumber yang berasal dari dalam negeri (bukan impor) masih terbatas; dan (5) peningkatan ketahanan pasokan untuk kebutuhan bahan bakar domestik.

Sementara itu di sektor telekomunikasi dan informatika (TIK), pandemi COVID-19 telah mendorong masyarakat dan pemerintah menggunakan cara baru untuk menjadi produktif dengan menggunakan perangkat digital dan jaringan telekomunikasi. Hal ini menyebabkan permintaan yang meningkat terhadap kebutuhan data dan tingkat keamanannya melalui infrastruktur TIK. Tantangan yang masih akan dihadapi pada tahun 2021 terkait dengan TIK antara lain (1) akses dan keandalan infrastruktur TIK yang belum memadai untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi digital yang berkualitas pada target yang telah ditetapkan. Peningkatan keandalan dan kecepatan pelayanan informasi memerlukan perluasan jaringan tetap pitalebar (*fixed broadband*) dan jaringan bergerak pitalebar (*mobile broadband*); (2) pemanfaatan infrastruktur TIK yang telah diselenggarakan perlu dioptimalkan pada layanan sektor publik, industri, pariwisata, dan jasa untuk memulihkan produktivitas ekonomi; (3) pemanfaatan layanan infrastruktur TIK terhambat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai keahlian di bidang digital. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan SDM termasuk melalui pendidikan vokasi bidang TIK, pendidikan tinggi yang berasal dari bidang khususnya *science, technology, engineering, and mathematics* (STEM) dan juga melalui program *training* rendah biaya yang disampaikan secara digital (*online course).*

Selain pandemi COVID-19, Indonesia juga masih menghadapi risiko bencana yang tinggi, terutama bencana hidrometeorologi. Kejadian bencana banjir besar di Jakarta awal tahun 2020, beberapa infrastruktur vital seperti rumah sakit, rel kereta api, dan jalan tol terendam banjir menyebabkan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi terganggu. Secara garis besar, tantangan dalam bidang ketahanan bencana meliputi (1) kawasan *urban* dengan kondisi ekonomi dan kepadatan penduduk tinggi masih belum tangguh bencana serta belum memiliki rencana peningkatan ketangguhan secara terpadu, seperti kota-kota pesisir utara Jawa yang memiliki potensi kenaikan muka air laut, banjir rob, dan penurunan tanah; (2) kinerja pemulihan daerah aliran sungai (DAS) kritis dan danau-danau prioritas masih belum optimal; serta (3) pengelolaan kawasan rawa dan gambut yang belum berkelanjutan.

Berdasarkan beberapa tantangan yang telah diuraikan, maka arah kebijakan pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 akan difokuskan pada upaya mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, di antaranya (1) memulihkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau serta didukung dengan infrastruktur dasar permukiman termasuk air minum dan sanitasi; (2) meningkatkan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan melalui penambahan debit air baku, penataan regulasi dan kelembagaan SDA, serta pengembangan sistem informasi sumber daya air terpadu; (3) meningkatkan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; (4) meningkatkan ketahanan bencana melalui penyusunan rencana peningkatan ketangguhan secara terpadu, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sistem peringatan dini; (5) meningkatkan layanan irigasi, optimalisasi pemanfaatan waduk multiguna, dan memodernisasi irigasi; (6) meningkatkan konektivitas wilayah; (7) mengembangkan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; (8) meningkatkan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien; (9) melakukan kerja sama internasional seperti koridor Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia (KSST) di bidang energi dan ketenagalistrikan;

SK No 054673 A

(10) pengembangan subsidi energi dan listrik yang tepat sasaran termasuk pengurangan pembayaran tagihan listrik; (11) mendorong sinergi antara penyediaan energi dan ketenagalistrikan dengan berbagai program pemerintah; (12) meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta (13) mengoptimalkan strategi investasi badan usaha seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), maupun sumber-sumber pembiayaan kreatif lainnya, dan mengembangkan metode-metode atau aplikasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan proyek infrastruktur dengan mengacu pada beberapa metode yang diterapkan di negara maju dan negara-negara anggota G20 seperti *Five Case Model (5CM), Project Initiation Routemap (PIR), dan Building Information Modelling* (BIM).

4.1.5.2. Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran dan indikator utama PN Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar tahun 2021 sebagaimana pada Tabel 4.17

Tabel 4.17
Sasaran, Indikator, dan Target
PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No	Sasaran/Indikator	2019 (*Baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
1.	**Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar**				
	1.1. Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	56,75	59,50	62,32	70,67
	1.2. Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	53	54	55	65
	1.3. Persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif, %)	0	0	6,5	19,6
	1.4. Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (Kumulatif, %)	30,0	31,7	33,7	38,9
2.	**Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar**				
	2.1. Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km)	2,30	2,30	2,20	1,90
	2.2. Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*) (%)	23	24	25	27
3.	**Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan**				
	3.1. Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	1	6 (berlanjut)	6 (berlanjut)	6

No	Sasaran/Indikator	2019 (*Baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
4.	**Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan**				
	4.1. Rasio Elektrifikasi (%)	98,89	~ 100	~ 100	~ 100
	4.2. Rata-Rata Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh/Kapita)	1.084	1.142	1.203	1.400
5.	**Meningkatnya layanan infrastruktur TIK**				
	5.1. Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) (%)	97,25	97,5	98	100

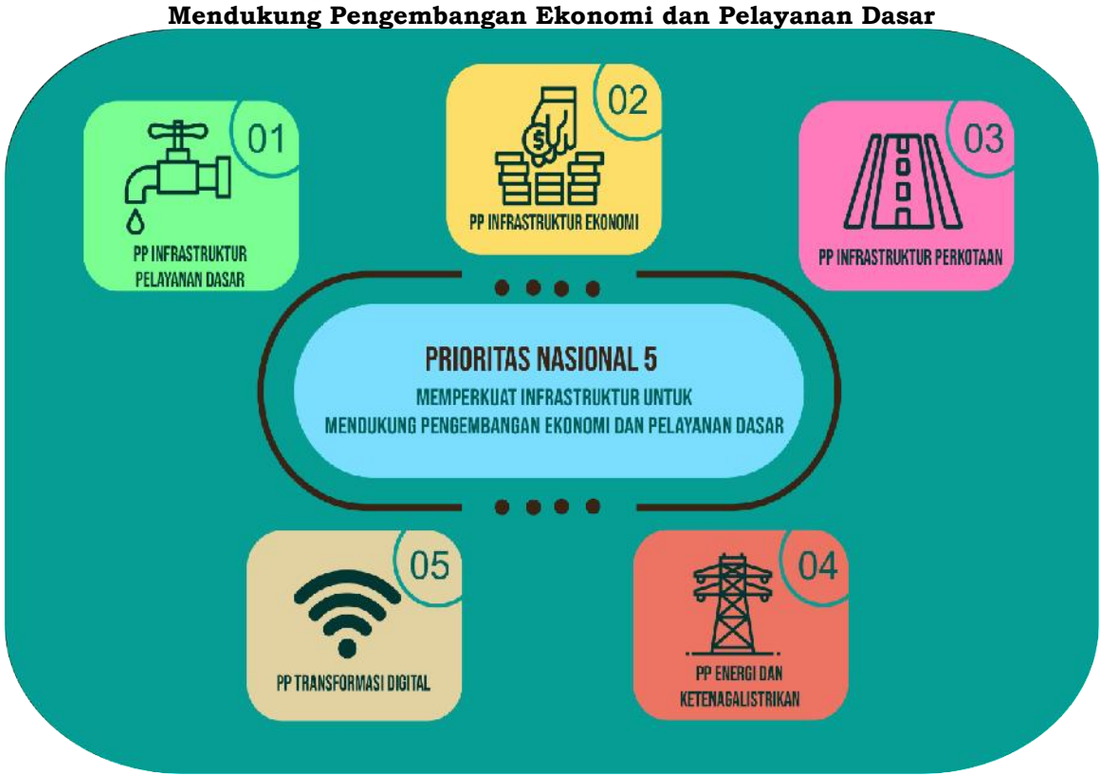
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

4.1.5.3 Program Prioritas

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar akan dilakukan melalui lima PP, yaitu (1) Infrastruktur Pelayanan Dasar; (2) Infrastruktur Ekonomi; (3) Infrastruktur Perkotaan; (4) Energi dan Ketenagalistrikan; dan (5) Transformasi Digital, sebagaimana pada Gambar 4.34. Untuk sasaran, indikator, dan target PP dapat dilihat pada Tabel 4.18.

Gambar 4.34

Kerangka PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Tabel 4.18

Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar					
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau					
1.1	Rasio KPR terhadap PDB (%)	2,90 (2018)	3,05	3,10	4,00
1.2	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,25	92,46	92,67	93,31
1.3	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	81,11	81,55	81,99	83,33
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman					
1.4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	89,27	90,41	92,81	100
1.5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	6,70 (2018)	7,30	8,40	15
1.6	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	20,18	21,23	23,54	30,45
1.7	Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	69,08	69,18	69,27	69,55
1.8	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	77,44 layak (termasuk 7,5 aman)	78,10 layak, termasuk 8,57 aman	79,43 layak, termasuk 10 aman	90 layak, termasuk 15 aman
1.9	Persentase rumah tangga yang masih mempraktik-kan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	7,61	5,95	4,46	0

SK No 054676 A

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
1.10	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (%)	59,08 penanganan dan 1,55 pengurangan (2016)	72,92 penanganan dan 3,70 pengurangan	73,70 penanganan dan 5,51 pengurangan	80 penanganan dan 20 pengurangan
Meningkatnya Layanan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan					
1.11	Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan (kabupaten/kota)	154	163	173	200
Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi					
1.12	Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	28	27,5	27	25
Meningkatnya Optimalitasi Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi					
1.13	Volume tampungan air per kapita (Kumulatif, m^3/kapita)	51,30	52,57	53,53	56,98
1.14	Persentase luas sawah beririgasi (%)	52,6	53,8	54,0	59,3
1.15	Luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (hektare)	0	0	398.123	597.226
PP 2. Infrastruktur Ekonomi					
Meningkatnya konektivitas wilayah					
2.1	Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota (%)	92/68/57	92/68/57	93/69,5/58,5	97/75/65
2.2	Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi (Km)	1.461 a)	481	339,8	2.500 b)
2.3	Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	3.387 a)	500	919,85	3.000 b)
2.4	Kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	81,50	81,50	83	94
2.5	Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (Km'sp)	6.164	6.188	6.293	7.451
2.6	Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	1	1	2	7
2.7	Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	14	21	26	25

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
2.8	Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	24 a)	29 pelabuhan (3 selesai, 26 berlanjut)	20 pelabuhan (6 selesai, 14 berlanjut)	36 b)
2.9	Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)	15 a)	7	12 (berlanjut)	21 b)
2.10	Jumlah rute jembatan udara (rute)	35	28	31 (berlanjut)	43
PP 3. Infrastruktur Perkotaan					
Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan					
3.1	Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/ *flyover*/*underpass* (kota)	3	0	5	6
PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan					
Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien					
4.1	Jumlah Produksi Tenaga Listrik (GWh)	275.900,00	339.082,70	359.946,10	431.281,20
4.2	Nilai Penurunan Emisi CO_2 Pembangkit (juta ton)	3,88	4,71	4,92	6,07
4.3	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (kumulatif, Sambungan Rumah)	537.936 a)	715.800c)	1.470.506b)	4.010.445 b)
4.4	Jumlah Kapasitas Kilang Minyak-kumulatif (*Barrel per Calendar Day*/BPCD)	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.276.000
PP 5. Transformasi Digital					
Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi					
5.1	Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%)	8,80	8,80	8,80	8,80
5.2	Persentase pengguna internet (%)	64,80	72,60	74,20	82,30
5.3	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (%)	67	70	72	75,70

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Keterangan: a) kumulatif 2015-2019; b) kumulatif 2020-2024; c) penyesuaian dampak bencana nonalam COVID-19

SK No 054678 A

Untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, program prioritas pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui (1) pemberian stimulus tarif listrik untuk perlindungan sosial dan ekonomi serta stimulus fiskal melalui subsidi perumahan; (2) relaksasi pembayaran angsuran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi untuk menjaga agar tidak terjadi gagal bayar cicilan KPR akibat banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah yang mengalami penurunan pendapatan/kehilangan pekerjaan; (3) penyediaan stimulan/bantuan pembangunan rumah baru dan perbaikan rumah swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin sebagai upaya penurunan risiko penyebaran COVID-19 dan tuberkulosis (TBC); (4) mempercepat pengembangan akses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis masyarakat; (5) mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti pembangkit, jaringan transmisi, jaringan gas, kilang minyak, penetrasi *fixed broadband*, pembangunan waduk multiguna, dan memperkuat Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan irigasi, pembangunan jaringan irigasi padi dan komoditas nonpadi, pembangunan jalan tol, jalan koridor utama, jalan akses ke kawasan-kawasan prioritas dan penghubung simpul transportasi, pembangunan dan pengembangan bandara, pelabuhan, dan infrastruktur angkutan umum massal perkotaan, serta memastikan kemanfaatan pembangunan infrastruktur melalui pengembangan wilayah/kawasan pada *hinterland,* termasuk daerah yang mendapatkan penugasan; serta (6) memastikan tersedianya layanan infrastruktur seperti layanan akses internet, layanan energi, layanan angkutan perintis darat, laut, dan udara, subsidi tol laut, angkutan laut perintis, angkutan darat, angkutan kereta api, kargo dan angkutan udara, layanan irigasi melalui peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta layanan air baku untuk pulau-pulau kecil terluar dan kawasan 3T, perkotaan, serta kawasan strategis.

Dari aspek pendanaan, perlu dikembangkan skema pendanaan kreatif seperti KPBU ataupun sumber dana lainnya untuk mendukung program pembangunan infrastruktur seperti rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan (O/P) jaringan irigasi kewenangan daerah, pembangunan bendungan, penyediaan air baku *source to tap* (STT) di kawasan metropolitan, pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, dan pembangunan infrastruktur konektivitas. Selain itu perlu mendorong penyediaan infrastruktur dengan skema padat karya di sektor penyediaan perumahan, optimalisasi lahan terlantar untuk irigasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi khususnya pada irigasi permukaan kewenangan daerah berbasis pemberdayaan masyarakat melalui P3TGAI dengan model *cash for work*, serta pemeliharaan rutin jalan.

Pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 perlu didukung dengan lingkungan yang aman. Oleh karena itu, di tahun 2021 upaya peningkatan ketangguhan infrastruktur bencana akan difokuskan pada wilayah perkotaan, daerah pascabencana dan pusat-pusat pariwisata. Strategi peningkatan ketangguhan pada wilayah tersebut akan diupayakan melalui (1) penguatan kebijakan pengelolaan bencana terpadu melalui percepatan penyelesaian rencana induk ketahanan wilayah untuk daerah-daerah dengan risiko tinggi; (2) percepatan pemulihan infrastruktur wilayah pascabencana dengan pendekatan *build-back-better*; (3) investasi terpadu dan multi pembiayaan dalam peningkatan ketangguhan untuk daerah-daerah dengan risiko tinggi yang telah memiliki rencana induk ketangguhan; dan (4) memprioritaskan intervensi yang bersifat multiguna, yang tidak hanya mampu mengelola risiko banjir, tetapi juga memiliki manfaat lain dalam peningkatan kesehatan masyarakat; dan potensi pariwisata. Upaya-upaya investasi tersebut diutamakan melalui pelibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi lokal.

SK No 054679 A

Dalam upaya meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap pandemi COVID-19 dan penyakit jenis lainnya yang penularannya disebabkan oleh kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat, serta kualitas air minum dan sanitasi yang belum layak, maka langkah yang akan dilakukan adalah (1) menyediakan akses sanitasi di daerah rawan sanitasi serta memperkuat keberlanjutan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di tingkat kabupaten dan kota, untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan lingkungan dan masyarakat seperti melalui gerakan cuci tangan pakai sabun (CTPS); (2) menyediakan akses air minum aman yang memenuhi persyaratan kesehatan dan diprioritaskan melalui pengembangan akses air minum perpipaan, pemanfaatan kapasitas SPAM yang telah terpasang, serta percepatan pembangunan SPAM Regional; (3) memastikan peran serta pemerintah daerah (Pemda) melalui fasilitasi dan pendampingan dalam penyediaan akses air minum dan sanitasi layak maupun aman untuk masyarakat; (4) penguatan perencanaan pengembangan SPAM di daerah, serta (5) melakukan konservasi tampungan alami dan daerah tangkapan air untuk menjaga kualitas sumber daya air.

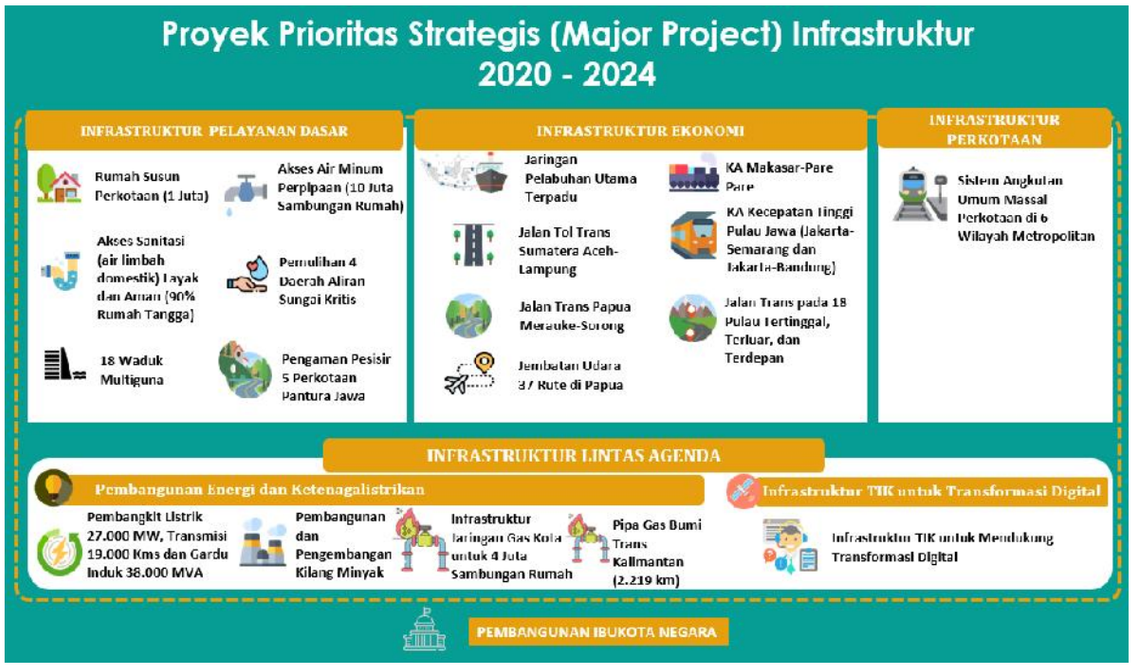
Terkait dengan sektor TIK, pandemi COVID-19 secara langsung telah mempercepat adopsi digitalisasi. Untuk itu beberapa kegiatan prioritas akan diarahkan pada mendorong peningkatan jumlah lembaga pelatihan SDM digital, menyederhanakan proses investasi di bidang TIK untuk menyerap tenaga kerja, seperti penyiapan *start-up* lokal dan industri manufaktur lokal yang memproduksi perangkat digital, izin penggelaran jaringan telekomunikasi di daerah untuk meningkatkan penetrasi, implementasi *Smart Water Management* (ICT, GIS, *modelling*, SIH3) dan digitalisasi informasi penyediaan layanan irigasi dengan prinsip modernisasi irigasi, serta mendorong percepatan terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menyelenggarakan layanan publik digital yang efisien.

4.1.5.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*

Dalam mendukung pencapaian sasaran pada PN Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar telah disusun MP (Gambar 4.35–Gambar 4.39) sebagai berikut (1) Rumah Susun Perkotaan (1 Juta); (2) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah); (3) Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga); (4) Pemulihan 4 Daerah Aliran Sungai Kritis; (5) 18 Waduk Multiguna; (6) Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa; (7) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; (8) Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung; (9) Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan; (10) Jalan Trans Papua Merauke-Sorong; (11) Kereta Api Makassar-Pare Pare; (12) KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung); (13) Jembatan Udara 37 Rute di Papua; (14) Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar; (15) Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA; (16) Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak; (17) Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah; (18) Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km); dan (19) Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital.

Gambar 4.35

Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*
PN 5 Memperkuat Infrastruktur
untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Gambar 4.36

Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* dalam
Program Prioritas Infrastruktur Perkotaan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Gambar 4.37
Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* dalam
Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Gambar 4.38

Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* dalam Program Prioritas Infrastruktur Ekonomi



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Gambar 4.39
Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* dalam
Program Prioritas Energi dan Ketenagalisrikan serta Transformasi Digital



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

4.1.5.5. Kerangka Regulasi

Untuk mendukung pencapaian PP Infrastruktur Pelayanan Dasar, diperlukan dukungan kerangka regulasi sebagai berikut (1) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); (2) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sumber Air sebagai peraturan turunan dari UU No.17/2019 tentang Sumber Daya Air; (3) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi sebagai peraturan turunan dari UU No.17/2019 tentang Sumber Daya Air; (4) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Urusan Bidang Perumahan di Daerah; dan (5) Rancangan Perpres tentang Percepatan Pengendalian Banjir di Provinsi Gorontalo.

Dalam mendukung MP dan penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, diperlukan juga beberapa kerangka regulasi yang perlu dipersiapkan, yaitu:

(1) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Air Limbah Domestik; (2) Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Kebijakan Strategis Nasional untuk Penyediaan Akses Air Minum; (3) Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi Air Minum dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat; (4) Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Strategis Daerah untuk Penyediaan Akses Air Minum; (5) Peraturan/Keputusan Kepala Daerah Provinsi tentang Penetapan Batas Atas dan Batas Bawah Tarif Air Minum; (6) Pedoman Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Air Limbah Domestik; (7) Pedoman Penyiapan Pelaksanaan KPBU Sektor Air Limbah Domestik; dan (8) Pedoman Konstruksi Fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah; serta (9) Revisi Permendagri No.90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Untuk mendukung pencapaian PP Infrastruktur Perkotaan, diperlukan dukungan kerangka regulasi yaitu Rancangan Peraturan Presiden tentang Dukungan Pemerintah dalam Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan. Regulasi ini mengatur kriteria kota yang dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat (kriteria umum, kriteria kesiapan, dan kriteria kelayakan) dan bentuk dukungan yang dapat diberikan pemerintah pusat.

Untuk mendukung pencapaian PP Energi dan Ketenagalistrikan dan PP Transformasi Digital, diperlukan dukungan kerangka regulasi yaitu (1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Harga Jual Listrik dari Pembangkit EBT; (2) Revisi UU No.36/1999 tentang Telekomunikasi; dan (3) Revisi UU No.38/2009 tentang Pos.

4.1.5.6. Kerangka Kelembagaan

Untuk mendukung pencapaian PP Infrastruktur Pelayanan Dasar, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan sebagai berikut (1) pengembangan peran lembaga keuangan seperti Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA), PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) serta perbankan dalam memperluas akses, fasilitas dan layanan pembiayaan perumahan bagi semua kalangan masyarakat; (2) pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) perumahan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perumahan serta persiapan teknis terkait pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) perumahan nasional yang akan menjalankan fungsi pengelola perumahan publik perkotaan; (3) penguatan kapasitas penyelenggara air minum serta penguatan koordinasi antarinstitusi (4) peningkatan kinerja BUMD Air Minum dan penyelenggara air minum lainnya, yang diprioritaskan untuk meningkatkan pengelolaan aset dan menurunkan tingkat kebocoran (Air Tak Berekening) dari 32,75 persen menjadi 30 persen, pengembangan layanan *potable water* atau zona air minum prima, dan implementasi *Smart Grid Water Management*; (5) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah; dan (6) pemisahan dan penguatan fungsi regulator dan operator layanan air limbah domestik dan pengelolaan sampah; (7) penyiapan peran dan kapasitas PDAM sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan air limbah domestik.

Sejalan dengan kerangka kelembagaan di atas, diperlukan juga perubahan maupun penguatan: (1) fungsi regulator untuk penyelenggaraan akses air minum kepada masyarakat; (2) pengembangan peran serta peningkatan kapasitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan penyelenggaraan penyediaan perumahan, yaitu pemerintah pusat, pemda, badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD), dunia

usaha/swasta serta masyarakat itu sendiri; (3) penguatan fungsi Komisi Irigasi di daerah, termasuk pedoman pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan gabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A), penguatan tugas dan fungsi Unit Pengelola Teknis (UPT) bendungan dalam menjalankan operasi dan pemeliharaan (OP) bendungan, serta penguatan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya peningkatan ketahanan infrastruktur kebencanaan, terutama pada daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi; (4) penguatan kelembagaan dan tata kelola DAS (terutama pada DAS lintas wilayah administratif) untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan DAS yang holistik dari hulu hingga ke hilir, serta mendorong partisipasi masyarakat secara aktif untuk ikut mengelola DAS secara berkelanjutan; dan (5) penguatan peran badan usaha BUMN/D dalam pengelolaan SDA dengan implementasi *Smart Water Management* (ICT, GIS, *modelling,* SIH3); serta (6) penguatan tata kelola di sektor ketenagalistrikan terkait fungsi pengawasan dan independensi operator transmisi.

4.1.6 Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Fokus pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti COVID-19. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana nonalam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan.

4.1.6.1. Pendahuluan

Beragam isu utama yang akan dihadapi pada tahun 2021 terkait PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim terutama dengan adanya pandemi COVID-19 adalah (1) perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung penguatan ketahanan kesehatan masyarakat, melalui penanganan limbah B3 medis, serta pengelolaan limbah B3 dan sampah lainnya; (2) memperkuat ketahanan bencana, baik bencana alam maupun nonalam; serta (3) mengelola emisi gas rumah kaca.

Tren menunjukkan bahwa bencana alam geologi maupun hidrometeorologi mendominasi jenis kejadian bencana di Indonesia. Berbagai strategi telah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam tersebut. Namun, dengan merebaknya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020, diperlukan perhatian khusus terhadap permasalahan pembangunan ketahanan bencana nonalam, terutama dalam penanganan bencana pandemi yang dinilai masih terbatas. Selain diperlukan strategi khusus dalam usaha pemulihannya, dibutuhkan pula upaya reformasi sistem ketahanan bencana secara menyeluruh, multiaspek dan terpadu di dalam pembangunan nasional dan daerah.

Kebijakan utama pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim pada tahun 2021 diprioritaskan kepada (a) penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara terintegrasi yang disertai dengan penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, termasuk penanganan limbah medis pascapandemi COVID-19;

SK No 054686 A

(b) penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi, tektonik, vulkanik, hidrometeorologi, dan lingkungan) serta bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan meluasnya penyebaran penyakit menular/pandemi) yang didukung oleh upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan dalam rangka reformasi (penguatan) sistem ketahanan bencana; serta (c) peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) pada masa pemulihan aktivitas sosial-ekonomi Indonesia, dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi.

4.1.6.2. Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdapat pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19

Sasaran, Indikator, dan Target
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
1.	**Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**				
	1.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	66,56[b]	68,71	68,96	69,74
2.	**Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim**				
	2.1. Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	N/A[b]	0,44[c]	0,69[c]	1,25[c]
3.	**Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline***				
	3.1. Persentase penurunan emisi GRK (%)	23,46[b]	25,36[c]	23,55[c]	26,35[c]
	3.2. Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	20,75[c]	24,57[c]	23,40[c]	29,91[c]

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Keterangan: a) pada tahun 2019 tidak dilakukan penghitungan; b) Data kumulatif penurunan emisi dari RAN-RAD GRK; c) Hasil Analisis dan Proyeksi Bappenas, 2020

4.1.6.3. Program Prioritas

Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim terdiri dari tiga PP, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta (3) Pembangunan Rendah Karbon, sebagaimana pada Gambar 4.40. Sementara sasaran, indikator, dan target PP dapat dilihat pada Tabel 4.20.

SK No 054775 A

Gambar 4.40

Kerangka PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Tabel 4.20

Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup					
Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut					
1.1	Indeks Kualitas Air (IKA) (nilai)	52,65	55,10	55,20	55,50
1.2	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (nilai)	N/A[a]	58,50	59,00	60,50
1.3	Indeks Kualitas Udara (IKU) (nilai)	86,57	84,10	84,20	84,50
1.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL) (nilai)	62,00	61,60	62,50	65,50
PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim					
Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat					
2.1.	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	N/A[a]	0,08[b]	0,10	0,10

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
2.2.	Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (%)	N/A[a]	0,34	0,59	1,15
2.3.	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	>5,00	5,00	4,50	3,00
PP 3. Pembangunan Rendah Karbon					
Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan (%)					
3.1.	Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi (%)	10,30[c]	14,45[c]	14,06[c]	16,87[c]
3.2.	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%)	36,40[c]	38,02[c]	35,11[c]	38,86[c]
3.3.	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%)	8,00[c]	7,70[c]	6,89[c]	9,73[c]
3.4.	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (%)	0,60[c]	1,95[c]	4,18[c]	4,55[c]
3.5.	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (%)	6,30[c]	6,50[c]	6,60[c]	7,30[c]

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Keterangan: a) pada tahun 2019 tidak dilakukan penghitungan; b) penyesuaian dampak bencana nonalam pandemi COVID-19; c) Hasil Analisis dan Proyeksi Bappenas, 2020

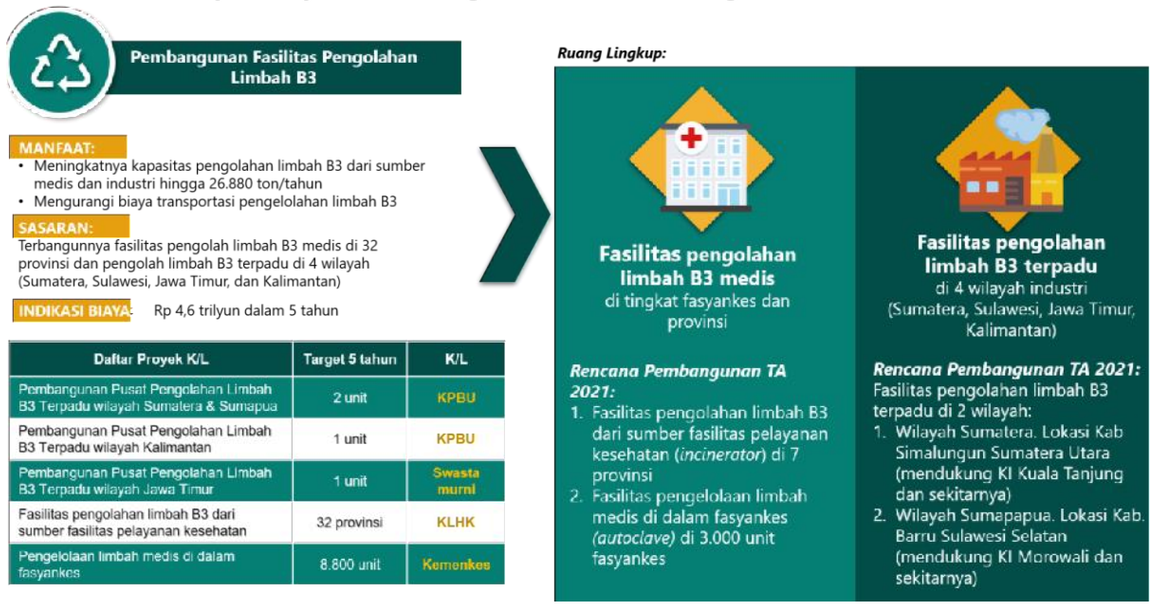
4.1.6.4. Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*

Pada PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim telah disusun dua MP sebagai langkah nyata pencapaian sasaran yang dirinci hingga target, lokasi, dan instansi pelaksana. Pendanaan MP menyinergikan berbagai sumber pendanaan. Dua MP tersebut adalah sebagai berikut.

***Major Project* Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3:** Terdiri dari Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan (limbah B3 medis) dengan fokus pada penanganan limbah medis pascapandemi COVID-19, serta Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Terpadu terutama untuk pengelolaan B3 dari industri (Gambar 4.41).

Gambar 4.41

***Major Project* Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

***Major Project* Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana:** Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana difokuskan pada lima klaster, yaitu (1) bencana geologi, tektonik, dan vulkanik, (2) bencana hidrometeorologi, (3) bencana lingkungan, (4) bencana nonalam, serta (5) dukungan penguatan sistem peringatan dini bencana secara keseluruhan (Gambar 4.42). Pada klaster bencana nonalam akan difokuskan pada penguatan sistem ketahanan bencana yang terkait bidang kesehatan, termasuk penyusunan protokol sistem peringatan dini pencegahan pandemi penyakit menular sebagai antisipasi penyebaran wabah di masa depan. Dukungan ini diperkuat melalui peningkatan deteksi dini dan kesiapsiagaan di masa prabencana sebelum wabah meluas serta penguatan sistem operasi dan logistik tanggap darurat terutama pada masa status kedaruratan kesehatan.

Dalam usaha peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana, strategi difokuskan pada beberapa upaya, yaitu (1) memperkuat manajemen bencana berbasis masyarakat dengan tetap memperkuat kolaborasi multipihak *(pentahelix);* (2) menyusun rencana kontinjensi, rencana operasi, dan strategi lainnya, termasuk protokol turunan yang diperlukan hingga level administrasi terkecil (desa/RW/RT); serta (3) meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana dengan menyusun rancang bangun sistem penanggulangan bencana yang tepat sasaran, antisipatif dan fleksibel untuk berbagai ancaman.

Penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat dilaksanakan melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), peningkatan budaya sadar bencana, serta pendidikan dan pelatihan teknis simulasi dan gladi penanggulangan bencana yang mengutamakan peningkatan pemahaman risiko bencana berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal kepada masyarakat dan aparat. Penguatan standar operasional prosedur (SOP) penanganan bersama kejadian bencana melalui penyusunan rencana kontinjensi, rencana operasi, dan strategi lainnya juga diperlukan pada wilayah rawan terdampak seperti kawasan perkotaan padat penduduk dan mobilitas tinggi, pusat-pusat investasi,

SK No 054690 A

industri, dan pariwisata maupun kawasan produksi pangan dengan melibatkan kerja sama antar pemerintah daerah dan lintas kementerian/lembaga. Penguatan didasarkan pada kajian pemetaan dan analisis risiko bencana yang komprehensif serta perlu didukung dengan peningkatan investasi pengurangan risiko bencana yang diutamakan untuk ancaman bencana pandemi seperti peningkatan kapasitas dan sumber daya kesehatan wilayah, dalam hal rasio tenaga medis, relawan, dan fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas/rumah sakit).

Gambar 4.42

***Major Project* Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana**



Highlight Proyek K/L	Target 2021	K/L
Bencana Geologi, Tektonik, dan Vulkanik		
Informasi gempabumi dan tsunami dengan pemasangan seismograf	100 unit	BMKG
Informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami yang berkualitas	100 layanan	BMKG
Data InaCORS yang dibangun	72 unit	BIG
Penguatan data pemetaan bencana geologi	12 peta	KESDM
Pengembangan pos pengamatan gunungapi	13 unit	KESDM
Bencana Hidrometeorologi		
Prediksi dan peringatan dini cuaca dengan *Scaling Up Weather Capacity II*	6 layanan	BMKG
Informasi meteorologi maritim *(Strengthening of Marine Meteorology)*	20 layanan	BMKG
Data pasang surut permanen yang dibangun	40 unit	BIG
Bencana Lingkungan		
Pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS)	25 unit	KLHK
Alat pemantauan kualitas air otomatis (ONLIMO)	200 unit	KLHK
Sistem operasional informasi kualitas udara	40 unit	BMKG
Bencana Non-Alam		
Pencegahan bencana non-alam	34 provinsi	Lintas K/L
Pengurangan risiko krisis kesehatan	123 kab/kota	Kemkes
Penanggulangan krisis kesehatan	35 kab/kota	Kemkes
Rencana penanggulangan kedaruratan bencana	2 Lokasi	BNPB
Dukungan Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana		
Prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan	10 lokasi	BNPB
Sistem peringatan dini bencana	8 Lokasi	BNPB

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Dalam usaha penguatan sistem operasi tanggap darurat, strategi difokuskan kepada beberapa upaya, yaitu (1) memperkuat manajemen krisis terpadu, multisektor, dan multipihak; (2) memperkuat sistem data bencana terpadu yang termutakhir, mudah diakses publik, transparan, dan berbasis satu referensi; (3) memperkuat sistem logistik (terutama pangan dan alat kesehatan) dan jaring pengaman sosial untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi pada masa krisis dan mempercepat pemulihan kondisi menjadi lebih baik, serta (4) meningkatkan kapasitas adaptif dan membangun masyarakat tangguh. Mendukung upaya tersebut, peran pendampingan dan pembinaan pusat diperkuat terhadap pengendalian operasi di daerah guna memperkuat manajemen kedaruratan bencana di daerah.

4.1.6.5. Kerangka Regulasi

Untuk mendukung pencapaian PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pada tahun 2021 diperlukan dukungan beberapa kerangka regulasi, meliputi (1) revisi PP No.74/2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun; serta (2) revisi PP No.21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

4.1.6.6. Kerangka Kelembagaan

Guna mendukung pencapaian PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pada tahun 2021 tidak diperlukan dukungan Kerangka Kelembagaan baru, melainkan perlu adanya penguatan kapasitas serta peningkatan koordinasi dan kerja sama antar K/L pada bidang lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim yang selama ini telah ada/terbentuk. Selain itu, diperlukan peningkatan keterlibatan mitra pembangunan, masyarakat, serta dunia usaha dalam bidang lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Dalam meningkatkan kapasitas menghadapi bencana nonalam di masa yang akan datang pendekatan kelembagaan difokuskan pada peran pencegahan, deteksi dini, dan respon cepat kebijakan. Hal tersebut dapat dicapai dengan penguatan fungsi dan koordinasi kelembagaan K/L terkait yang difokuskan pada peningkatan kapasitas pemerintah pusat, kerja sama pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana nonalam.

Penguatan fungsi dan koordinasi kelembagaan dalam pemulihan pembangunan pascabencana nonalam akan berdampak secara baik dengan memprioritaskan sektor-sektor fundamental seperti kesehatan, sosial-ekonomi, dan pangan di wilayah yang memiliki dampak paparan tinggi dan wilayah pembangunan strategis, yang didukung dengan strategi komunikasi yang tepat untuk membangun kepercayaan publik. Secara umum, peningkatan kolaborasi lintas sektor harus diutamakan dalam pemulihan sosial–ekonomi yang memperhatikan aspek penguatan sistem ketahanan bencana secara terintegrasi dan keberlanjutan agenda pembangunan.

4.1.7 Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (good governance) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi COVID-19, melalui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dilakukan dengan penerapan yang tegas sehingga stabilitas politik nasional dapat tetap terjaga.

4.1.7.1. Pendahuluan

Sesuai RPJMN 2020-2024, pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dalam RKP 2021 diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan tegaknya hak asasi manusia, birokrasi yang profesional dan netral, penguatan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kedaulatan negara.

Sebagai implikasi dari pandemi COVID-19, arah kebijakan pembangunan Polhukhankam pada tahun 2021 akan difokuskan untuk mendukung tema RKP 2021 yaitu Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial. Dalam konteks tersebut, untuk meningkatkan efektivitas dalam merespon dampak pandemi COVID-19, diperlukan situasi yang kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan *(law and order).*

SK No 054692 A

Terdapat beberapa isu strategis pada aspek polhukhankam yang akan dihadapi pada tahun 2021. Di bidang politik dan komunikasi, tingginya biaya politik masih menjadi persoalan yang menyebabkan maraknya korupsi. Terkait dengan pandemi COVID-19, pengelolaan informasi dan komunikasi publik oleh K/L/Pemda masih belum terintegrasi, serta akses dan konten informasi yang belum merata dan berkeadilan. Pada bidang politik luar negeri permasalahan yang dihadapi adalah minimnya perlindungan WNI, belum sinergisnya diplomasi, sedangkan pada kerja sama pembangunan internasional upaya meningkatkan kontribusi aktor nonpemerintah belum optimal.

Beberapa persoalan atau isu strategis di bidang hukum antara lain belum optimalnya infrastruktur hukum dalam mendorong penyelesaian masalah gagal bayar utang, serta pelaksanaan eksekusi putusan untuk mendukung iklim usaha berkelanjutan. Selain itu, masih terdapat keterbatasan proses penegakan hukum secara konvensional dalam sistem peradilan akibat kebijakan *physical distancing*.

Di bidang aparatur negara, beberapa isu strategis adalah belum meratanya penerapan pelayanan publik secara daring/elektronik *(e-service)* untuk pelayanan dasar dan perizinan, belum adanya mekanisme penilaian dan manajemen kinerja ASN yang mendukung kebijakan fleksibilitas sistem kerja ASN dalam tatanan normal baru, serta masih adanya pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah. Adapun isu strategis pada bidang pertahanan dan keamanan adalah masih tingginya ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional (persebaran virus COVID-19, jaminan rasa aman, darurat peredaran gelap narkotika, potensi serangan siber, serta pertahanan ruang udara dan keamanan wilayah laut).

4.1.7.2. Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dapat dilihat pada Tabel 4.21.

Tabel 4.21

Sasaran, Indikator, dan Target
PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
1.	**Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal**				
	1.1. Indeks Demokrasi Indonesia(1) (nilai)	74,92	77,36*	77,72*	78,37*
	1.2. Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah(2) (%)	69,43**	70**	65	70
2.	**Optimalnya Kebijakan Luar Negeri**				
	2.1. Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional(3) (nilai)	95,20	95,07	96,00	97,07
3.	**Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap**				
	3.1. Indeks Pembangunan Hukum (nilai)	0,62	0,65	0,67	0,73

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
4.	**Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**				
	4.1. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori Baik ke Atas[4] (%)				
	K/L	95,29	70,00*	75,00*	85,00*
	Provinsi	73,53	50,00*	60,00*	85,00*
	Kabupaten/Kota	25,20	30,00*	35,00*	70,00*
5.	**Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional**				
	5.1. Persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa diseluruh Wilayah NKRI yang dapat diatasi (%)	100	100	100	100

Sumber: 1) BPS, 2) Kemenkominfo, 3) Kemenlu, 4) KemenPAN RB

Keterangan: (*) Pembaruan metode penghitungan pada tahun 2020-2024; (**) Metode penghitungan hanya sampai pada tingkat kepuasan

4.1.7.3. Program Prioritas

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik akan dilakukan melalui lima PP, yaitu (1) Konsolidasi Demokrasi, (2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, (3) Penegakan Hukum Nasional, (4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta (5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, sebagaimana pada Gambar 4.43. Sementara sasaran, indikator, dan target PP pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dapat dilihat pada Tabel 4.22.

Sebagai upaya memulihkan dampak pandemi COVID-19, kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan di bidang politik dan komunikasi serta politik luar negeri antara lain (1) sosialisasi dan diseminasi informasi yang merata dan berkeadilan terkait perkembangan, penanganan, dan pemulihan COVID-19 melalui berbagai media di pusat dan daerah; (2) pengembangan teknologi pemilu, seperti teknologi pungut-hitung dalam varian rekapitulasi elektronik (*e-rekap*) atau pemberian suara secara elektronik (*e-voting*); (3) pendampingan dan pemberian bantuan terhadap WNI di luar negeri yang terdampak pandemi COVID-19; (4) peningkatan kerja sama internasional dan diplomasi pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19; (5) intensifikasi Kemitraan Multi-Pihak (KMP) sebagai instrumen dalam berkolaborasi untuk solusi permasalahan pembangunan; serta (6) peningkatan kerja sama regional dan global termasuk Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) di bidang pertanian, perikanan, kesehatan/vaksin, dan infrastruktur.

Kegiatan-kegiatan penting pada bidang hukum di antaranya (1) optimalisasi penggunaan sarana prasarana berbasis elektronik dalam proses penanganan perkara dalam sistem peradilan; (2) optimalisasi alternatif penyelesaian perkara dan penangguhan penahanan; (3) optimalisasi pelaksanaan asimilasi dan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan dalam rangka pengurangan kelebihan kapasitas; serta (4) percepatan pemulihan sektor usaha melalui optimalisasi sistem kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Gambar 4.43

Kerangka PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Adapun kegiatan-kegiatan penting di bidang aparatur negara serta pertahanan dan keamanan, antara lain (1) perluasan penyelenggaraan pelayanan publik terpadu dan berbasis elektronik *(e-service)*, terutama untuk layanan dasar dan perizinan; (2) percepatan penetapan aplikasi umum pemerintahan untuk mendukung kinerja ASN; (3) pengembangan penilaian dan manajemen kinerja ASN dalam tatanan normal baru; (4) penjatuhan hukuman disiplin dan/atau sanksi yang tegas atas pelanggaran netralias ASN dalam pemilihan kepala daerah; serta (5) peningkatan rumah sakit Kemenhan/TNI dan Polri dan peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi.

Tabel 4.22

Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
PP 1. Konsolidasi Demokrasi					
Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif					
1.1	Jumlah regulasi/ kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik (dokumen)	3	6	3	2

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri					
Meningkatnya Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Internasional					
2.1	Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (forum)	8	8	10	16
2.2	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional (nilai)	3,78	3,80	3,85	4,00
2.3	Indeks Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI (nilai)	89,91(1)	86,00	87,00	90,00
PP 3. Penegakan Hukum Nasional					
Meningkatnya penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan					
3.1	Indeks Perilaku Anti Korupsi (nilai)	3,70	4,00	4,03	4,14
PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola					
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah					
4.1	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori Baik ke Atas (%)				
	Kementerian	29,00	90,00	100,00	100,00
	LPNK	21,00	65,00	80,00	100,00
	Provinsi	15,00	37,00	49,00	85,00
	Kabupaten/ Kota	0,39	10,00	15,00	30,00
4.2	Instansi Pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik (instansi pemerintah)	99 per 277	135 per 587	142 per 587(2)	164 per 587
4.3	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik ke Atas (%)				
	Kementerian/Lembaga	61,30	70,00	- (3)	100,00
	Provinsi	50,00	50,00	- (3)	80,00
	Kabupaten/Kota	23,70	20,00	- (3)	50,00
4.4	Persentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP (%)				
	Kementerian/Lembaga	97,00	91,00	92,00	95,00
	Provinsi	100,00	91,00	92,00	95,00
	Kabupaten	88,00	77,00	80,00	85,00
	Kota	94,00	91,00	92,00	95,00

No.	Sasaran/Indikator	2019 (*baseline*)	Target		
			2020	2021	2024
4.5	Persentase Instansi Pemerintah dengan skor B ke atas Atas SAKIP (%)				
	Kementerian/Lembaga	94,12	94,00	96,00	100,00
	Provinsi	97,06	85,00	87,00	100,00
	Kabupaten/Kota	57,28	50,00	55,00	80,00
PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional					
Terjaganya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan					
5.1	Indeks Kekuatan Militer (nilai)	0,28	0,26	0,25	0,20
5.2	Indeks Terorisme Global (nilai)	5,07	4,44	4,39	4,24
5.3	Persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	53,32[4]	>55	>55	>60
5.4	Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional (nilai)	N/A[5]	3,10	3,20	3,40

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Keterangan: [1] Data *baseline* 2019 menggunakan metode perhitungan lama; [2] 142 instansi terdiri dari 17 lembaga dan 125 pemerintah daerah: [3] Penghitungan maturitas SPBE dilakukan setiap dua tahun sekali; [4] Data *baseline* tahun 2017; [5] Indikator Baru pada tahun 2020-2024.

4.1.7.4. Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*

Di dalam PP Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, terdapat dua MP yaitu (1) Penguatan *National Security Operation Center* (NSOC)-*Security Operation Center* (SOC) dan Pembentukan 121 *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) serta (2) Penguatan Keamanan Laut di Natuna.

***Major Project* Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT** (Gambar 4.44) dilatarbelakangi oleh fenomena digitalisasi pada sektor pemerintah, tingginya ancaman dan serangan siber ke sektor pemerintah, belum adanya mekanisme integrasi antar-*stakeholder* terkait, dan belum adanya kerja sama keamanan siber yang menghubungkan pemerintah pusat dan pemda.

Oleh karena itu, MP tersebut dimaksudkan sebagai *platform sharing* data dan informasi terkait pola-pola serangan siber sebagai bentuk proteksi dan *shared situational awareness* bagi *stakeholder* penyelenggara Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS), pemerintah pusat lainnya, dan pemda. Dari sisi pendanaan, pelaksanaan MP dibiayai dari APBN dengan indikasi pendanaan selama lima tahun sebesar Rp8,0 triliun.

Gambar 4.44

***Major Project* Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Gambar 4.45

***Major Project* Penguatan Keamanan Laut di Natuna**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

***Major Project* Penguatan Keamanan Laut di Natuna** (Gambar 4.45) dilatarbelakangi oleh adanya eskalasi ancaman di wilayah Natuna dan meningkatnya risiko perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, serta *transnational crimes*. Oleh karena itu, MP tersebut diarahkan untuk pembangunan sarpras pertahanan dan dukungannya serta pengadaan alat peralatan keamanan laut (alpalkamla).

Adapun manfaat dari MP penguatan keamanan laut di Natuna diharapkan dapat meningkatkan *deterrent effect* dan penegakan kedaulatan di Perairan Natuna, menurunkan aktivitas perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, *IUU Fishing*, serta *transnational crimes*. Dari sisi pendanaan, pelaksanaan MP tersebut dibiayai dari APBN dengan indikasi pendanaan selama lima tahun sebesar Rp12,2 triliun.

4.1.7.5. Kerangka Regulasi

Sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan penataan regulasi nasional, fokus kerangka regulasi PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam RPJMN 2020-2024, yang meliputi (1) Rancangan UU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); (2) Rancangan UU tentang Jaminan Benda Bergerak; (3) revisi UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; (4) Rancangan UU tentang Hukum Acara Perdata; (5) Rancangan UU tentang Hukum Perdata Internasional; (6) Rancangan UU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana; dan (7) Rancangan UU tentang perubahan atas UU No.35/2009 tentang Narkotika.

4.1.7.6. Kerangka Kelembagaan

Fokus kerangka kelembagaan PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada RKP 2021 diarahkan untuk mendukung kebutuhan penataan kelembagan dalam RPJMN 2020-2024, terutama terkait dengan tata kelola kelembagaan dalam rangka optimalisasi eksekusi putusan hukum.

4.2. Pendanaan pada Prioritas Nasional

Pendanaan tujuh PN dalam RKP 2021 mengacu pada prinsip money follow program dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dengan penekanan lebih terhadap MP yang terkait pemulihan kondisi sosial ekonomi pascapandemi COVID-19.

Prioritas Nasional RKP 2021 mengacu pada agenda pembangunan RPJMN 2020-2024. Dalam penyusunan pendanaan tujuh PN, prinsip *money follow program* tetap menjadi acuan. Hal ini berarti, pendanaan akan diarahkan pada program-program pembangunan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran prioritas dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Berikut pada Tabel 4.23 adalah alokasi pada PN tahun 2021.

Tabel 4.23
Alokasi pada PN Tahun 2021

No.	Prioritas Nasional	Alokasi (Rp Miliar)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	74.246,2
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	74.318,3
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	279.829,1
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.757,6
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	115.290,7
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	12.284,4
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	31.907,0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Keterangan: 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional; 2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta).

Agar penyelesaian isu-isu pembangunan dapat lebih konkret, maka dalam RPJMN 2020–2024 PN dilengkapi dengan MP yang merupakan proyek-proyek dengan nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran pembangunan. Pada RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan MP yang akan menjadi fokus penyusunan rencana dan pendanaan di tahun 2021.

Pelaksanaan MP tidak hanya melibatkan K/L, namun juga pemerintah daerah, badan usaha (BUMN/swasta), dan masyarakat. Selain itu, inovasi skema pembiayaan juga diupayakan baik melalui KPBU, *blended finance, green finance,* serta skema pembiayaan inovasi lainnya.

Tahun 2021 diharapkan menjadi titik balik pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19. Pandemi yang berlangsung di 2020 tersebut berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sesuai tema RKP tahun 2021, "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial", maka MP yang terkait dengan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial menjadi langkah konkret untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2021.

Total belanja K/L pada Pagu Anggaran K/L tahun 2021 ditetapkan Rp1.032,0 triliun. Sesuai dengan tema RKP tahun 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan pemulihan ekonomi serta sosial. Langkah ini tercermin dari dukungan pendanaan untuk pengembangan kawasan industri seperti Batang dan Subang, kawasan prioritas pariwisata, proyek-proyek infastruktur, serta penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). *Major project* terkait pengembangan destinasi wisata prioritas, kawasan industri, dan vokasi, serta MP lainnya terkait infrastruktur merupakan motor utama langkah pemulihan ekonomi.

SK No 054736 A

Selain itu, sebagai langkah antisipatif terjadinya krisis pangan, pemerintah juga memperkuat ketahanan pangan salah satunya melalui MP Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan. Penyediaan alokasi untuk pengembangan *food estate* di Kalimantan Tengah juga merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Langkah strategis tersebut dituangkan melalui MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), yang merupakan salah satu MP baru di tahun 2021.

Di sisi lain guna memulihkan kondisi sosial masyarakat, selain meneruskan beberapa program bantuan sosial saat penanganan COVID-19, penguatan integrasi program-program bantuan sosial juga dilakukan melalui MP Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh. Untuk mendukung hal ini, Kementerian Sosial mendapat alokasi secara khusus untuk meningkatkan ketepatan data program-program sosial.

Penguatan Sistem Kesehatan Nasional juga menjadi salah satu aspek penting dalam RKP Tahun 2021. Pandemi COVID-19 merupakan sebuah pelajaran penting perlunya memperkuat sistem kesehatan nasional. Untuk itu, dalam RKP 2021 telah disusun MP terkait Penguatan Sistem Kesehatan Nasional dan perluasan cakupan MP Sistem Peringatan Dini Bencana yang mencakup penanggulangan bencana nonalam (pandemi).

Di dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memantau secara khusus pelaksanaan PN khususnya MP tersebut untuk memastikan pemulihan ekonomi dan sosial di tahun 2021 dapat berjalan dengan baik.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 5

KAIDAH PELAKSANAAN

SK No 054699 A

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan diperlukan untuk memastikan percepatan pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascapandemi COVID-19 terukur, efektif, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

5.1 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan (KK) berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Dalam konteks mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antarorganisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Adapun fokus kebijakan KK pada RKP 2021 diselaraskan dengan kebijakan dalam RPJMN 2020–2024 yang ditujukan pada organisasi pemerintah yang mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur sebagaimana Gambar 5.1 berikut.

Gambar 5.1

Kedudukan Kerangka Kelembagaan dalam Pembangunan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Dengan menekankan nilai 'Struktur Mengikuti Strategi' (*Structure Follow Strategy*), maka pembentukan organisasi pemerintah didasarkan pada strategi untuk pencapaian tujuan pembangunan. Adapun organisasi pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan mencakup (1) Lembaga Negara; (2) Kementerian; (3) Lembaga Pemerintah Non-Kementerian; (4) Lembaga Non-Struktural; (5) Pemerintah Daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah; dan (6) Lembaga koordinasi lain seperti Badan Koordinasi, Komite Nasional, Tim Nasional dan lain-lain.

SK No 054700 A

Adapun urgensi KK dalam dokumen perencanaan dimaksudkan untuk (1) mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta merespon berbagai perubahan dan permasalahan yang ada; dan (2) mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta mengurangi duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Pembentukan organisasi/lembaga pemerintah berdampak pada beberapa aspek termasuk beban belanja negara, untuk itu inisiatif penataan organisasi harus memperhatikan prinsip-prinsip KK sebagaimana Gambar 5.2 berikut.

Gambar 5.2

Prinsip Kerangka Kelembagaan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Untuk memastikan kesesuaian dukungan KK dengan pelaksanaan RKP 2021, perlu dilakukan beberapa tahapan penilaian kelayakan. Adapun tahapan penilaian meliputi (1) aspek kesesuaian, (2) aspek urgensi, dan (3) aspek kelayakan. Adapun penjabaran ketiga aspek tersebut diturunkan dalam beberapa subkriteria sebagaimana Gambar 5.3 berikut.

Gambar 5.3

Tahapan Penilaian Kelayakan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, prioritas penataan kelembagaan pemerintah yang sejalan dengan prinsip-prinsip KK diarahkan guna mendukung pencapaian agenda prioritas nasional, sebagaimana Gambar 5.4.

Gambar 5.4

Prioritas Penataan Kelembagaan pada Prioritas Nasional RKP 2021



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

5.1.1 Kebutuhan Kerangka Kelembagaan RKP 2021

Kebutuhan KK RKP 2021 sebagai berikut.

1. Tata kelola kelembagaan Bank Tanah.
2. Tata kelola kelembagaan dalam rangka pengelolaan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan/Wilayah Metropolitan (WM).
3. Penguatan tata kelola kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan penamaan rupabumi (toponim).
4. Penguatan kapasitas penyelenggara air minum serta didukung dengan penguatan koordinasi antar institusi.
5. Tata kelola peningkatan kinerja BUMD Air Minum dan penyelenggara air minum lainnya, yang diprioritaskan untuk meningkatkan pengelolaan aset dan menurunkan tingkat kebocoran hingga 30 persen.
6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah.
7. Pemisahan dan penguatan fungsi regulator dan operator layanan air limbah domestik dan pengelolaan sampah.
8. Penyiapan peran dan kapasitas PDAM sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan air limbah domestik.
9. Tata kelola pembentukan badan layanan umum perumahan (BLU) dan badan layanan umum perumahan daerah (BLUD).

5.2 Kerangka Regulasi

Peran kerangka regulasi (KR) dalam mendukung RKP semakin signifikan. Hal ini ditandai dengan usulan KR dari berbagai sektor pembangunan yang sudah mulai sinergis dengan kebijakan yang direncanakan. Oleh karena itu, usulan KR dalam RKP 2021 diharapkan mampu menjawab kebutuhan pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Tujuan utama dari pelaksanaan KR adalah untuk memastikan terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), dan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) pembangunan pada RKP 2021. Peran KR dalam pembangunan dapat dilihat pada Gambar 5.5.

Gambar 5.5

Peran Kerangka Regulasi dalam Pembangunan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Pengusulan KR idealnya sudah melalui tahapan evaluasi dan pengkajian yang di dalamnya memuat analisis biaya serta manfaat dari regulasi yang akan dibentuk. Tahapan evaluasi dilaksanakan dalam rangka menilai efektivitas dari regulasi yang sedang berlaku. Hasil dari evaluasi dapat berupa rekomendasi untuk menentukan sebuah regulasi tetap berlaku, direvisi, atau dicabut. Tahapan pengkajian dilaksanakan dalam rangka menentukan alternatif kebijakan yang dapat berbentuk peraturan maupun nonperaturan, dapat dilihat pada Gambar 5.6.

Alur pikir ini menekankan pada pentingnya proses evaluasi yang secara tidak langsung dapat melihat efektifitas suatu regulasi, sehingga hasil evaluasi suatu kebijakan dan regulasi tidak hanya fokus pada aspek legal formal, tetapi juga dapat menyentuh aspek substansi (ekonomi, sosial, lingkungan, dan sebagainya). Urgensi pengintegrasian KR dalam RKP 2021 dapat dilihat pada Gambar 5.7.

Gambar 5.6

Alur Pikir Sinergi Kebijakan dan Regulasi



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Gambar 5.7

Urgensi Integrasi Kerangka Regulasi dalam RKP 2021



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Urgensi integrasi KR dimaksudkan untuk mendukung kebijakan yang sejalan dengan tema RKP 2021, yaitu "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial". Selain itu, untuk memastikan pengintegrasian KR dalam RKP 2021 serta kepastian penyusunan KR di tahun pelaksanaan, Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan penajaman dan pemantauan terhadap setiap KR yang dicantumkan dalam RKP 2021. Pengusulan KR perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi koridor dalam penyusunan KR seperti yang terdapat dalam Gambar 5.8 berikut.

Gambar 5.8

Prinsip-Prinsip Kerangka Regulasi

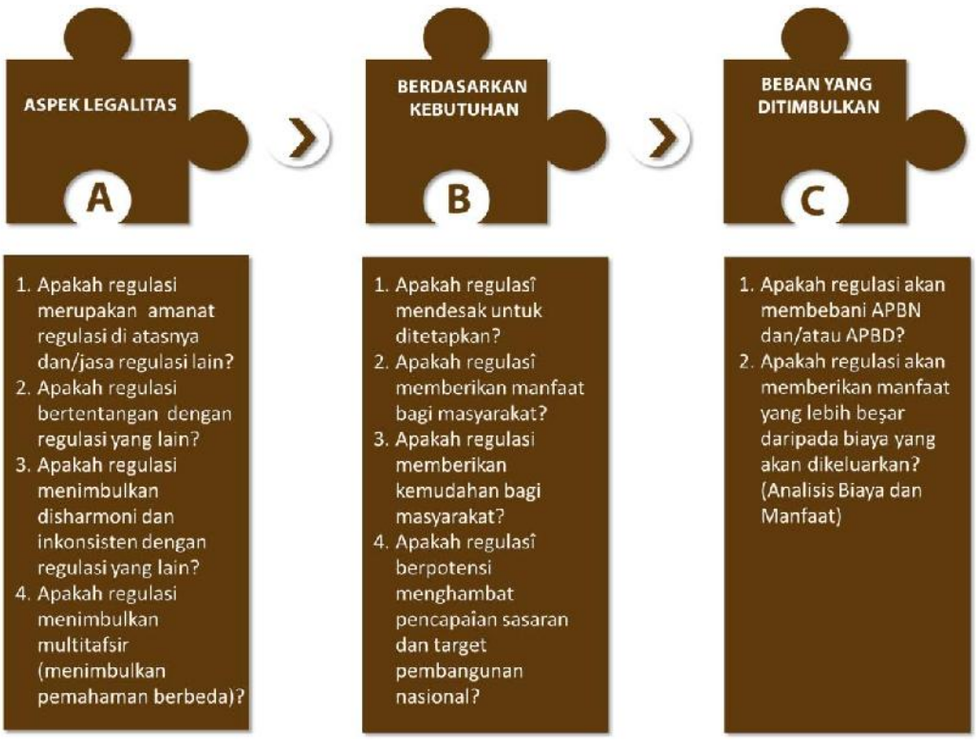


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Proses pengusulan KR dalam RKP 2021, perlu didukung dengan kajian yang didasarkan pada beberapa batu uji yang terdiri dari aspek legalitas, aspek kebutuhan, dan aspek beban yang ditimbulkan. Pelaksanaan kajian sangat penting dilakukan untuk menghasilkan regulasi yang tepat, serta tidak menimbulkan beban kepada masyarakat dan negara, seperti dapat dilihat pada Gambar 5.9.

Gambar 5.9

Batu Uji Pengusulan Kerangka Regulasi



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Peningkatan kualitas regulasi khususnya perbaikan dari sisi mekanisme pemantauan dan evaluasi, sistem, dan peningkatan kapasitas perumus kebijakan dan pembentuk regulasi perlu menjadi perhatian semua *stakeholder,* tidak hanya dari kalangan pemerintah, akan tetapi juga dari kalangan nonpemerintah. Hal ini penting untuk mengurangi kuantitas regulasi dalam rangka mendukung implementasi kebijakan yang telah direncanakan.

Upaya untuk menyinergikan kebijakan pembangunan dengan regulasi yang akan disusun terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya mulai dari hulu hingga hilir, dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis program (*money follows program*) yang efektif serta penguatan kerja sama antarlembaga khususnya dalam harmonisasi dan sinkronisasi kelembagaan pengelola regulasi. Hal ini merupakan bagian penting dari langkah-langkah percepatan pelaksanaan pencapaian sasaran RKP 2021.

5.2.1 Kebutuhan Kerangka Regulasi RKP 2021

Dalam rangka mewujudkan pencapaian PN, berikut adalah kebutuhan prioritas KR yang akan dibentuk pada tahun 2021, meliputi Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Presiden (Perpres).

A. Undang-Undang

Kerangka regulasi dalam bentuk UU meliputi

1. Rancangan UU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal;
2. Revisi UU No. 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Rancangan UU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Revisi UU No. 42/1999 tentang Jaminan Benda Bergerak;
5. Revisi UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
6. Rancangan UU tentang Hukum Acara Perdata;
7. Rancangan UU tentang Perubahan atas UU No. 35/2009 tentang Narkotika; dan
8. Rancangan UU tentang Ibu Kota Negara.

B. Peraturan Pemerintah

Kerangka regulasi dalam bentuk PP meliputi

1. Rancangan PP tentang Skema Pembiayaan Berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
2. Revisi PP No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
3. Revisi PP No. 76/2015 tentang Perubahan Atas PP No. 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
4. Rancangan PP tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
5. Rancangan PP tentang Irigasi;
6. Rancangan PP tentang Sumber Air;
7. Rancangan PP tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

8. Rancangan PP tentang Pembagian Kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Revisi PP No. 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
10. Revisi PP No. 74/2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

C. Peraturan Presiden

Kerangka regulasi dalam bentuk Perpres meliputi

1. Rancangan Perpres tentang Transformasi Ekonomi Indonesia Pasca COVID-19;
2. Rancangan Perpres tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;
3. Rancangan Perpres tentang Pengembangan dan Pembinaan Jasa Konsultansi;
4. Rancangan Perpres tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu;
5. Rancangan Perpres tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan;
6. Rancangan Perpres tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas (RIDPP);
7. Rancangan Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) Tahun 2022;
8. Revisi Perpres No. 3/2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan;
9. Rancangan Perpres tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Palembang-Betung-Indralaya-Kayuagung (Wilayah Metropolitan Palembang);
10. Rancangan Perpres tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin-Banjarbaru-Banjar-Barito Kuala-Tanah Laut (Wilayah Metropolitan Banjarmasin);
11. Rancangan Perpres tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Bitung-Minahasa-Manado (Wilayah Metropolitan Manado);
12. Rancangan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara (RTR KSN IKN);
13. Rancangan Perpres tentang Otorita dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara;
14. Rancangan Perpres tentang Rencana Induk Pembangunan Ibu Kota Negara;
15. Rancangan Perpres tentang Penguatan Pendamping Pembangunan;
16. Rancangan Perpres tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender;
17. Revisi Perpres No. 95/2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;
18. Revisi Perpres No. 63/2017 tentang Bantuan Sosial Non-Tunai;
19. Rancangan Perpres tentang Integrasi Bantuan Sosial;
20. Rancangan Perpres tentang Perlindungan Sosial yang Adaptif;
21. Rancangan Perpres Dukungan Pemerintah dalam Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan; dan
22. Rancangan Perpres tentang Percepatan Pengendalian Banjir di Provinsi Gorontalo.

5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian

Kerangka evaluasi dan pengendalian RKP disusun untuk memperkuat fungsi evaluasi dan pengendalian, sekaligus mendorong penerapan pendekatan *money follows program* dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Selain itu juga untuk memastikan bahwa evaluasi dapat berjalan dengan baik sehingga hasil evaluasi bermanfaat bagi proses pengambilan kebijakan dan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya, sekaligus diambil tindakan korektif dan penyesuaian selama pelaksanaan pembangunan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Hal ini selaras dengan amanat PP No.17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan evaluasi pembangunan dalam kerangka penyusunan RKP (Pasal 5:1-4), sekaligus pengendalian pembangunan (Pasal 33:1-3).

Terjadinya pendemi global *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berdampak besar terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, sehingga dilakukan penyesuaian dan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan tahun 2021. Perencanaan pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi COVID-19. Beberapa MP yang terkait dengan pemulihan kondisi sosial ekonomi pascapandemi COVID-19 akan mendapatkan penekanan lebih dibandingkan dengan MP lainnya. Dengan demikian, hal ini akan berpengaruh pula pada fokus dan obyek dari kerangka evaluasi dan pengendalian RKP tahun 2021, terutama dalam upaya mengidentifikasi seberapa efektif pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan untuk mempercepat pemulihan dari dampak pandemi COVID-19.

Rincian operasional dalam kerangka evaluasi dan kerangka pengendalian akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

5.3.1 Kerangka Evaluasi

Berikut ini penjelasan butir-butir penting dalam Kerangka Evaluasi RKP.

1. Tujuan Pelaksanaan Evaluasi

   Evaluasi RKP dilaksanakan dengan tujuan (a) mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan utamanya pencapaian PN sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan, dan (b) memberi *feedback* dan landasan dalam penyusunan PN dan tema pembangunan pada RKP tahun n+1. Untuk konsistensi pelaksanaan dan evaluasi, penyusunan RKP 2021–2024 berisi tujuh PN yang sesuai dengan agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024.

2. Cakupan Evaluasi

   Cakupan substansi evaluasi RKP adalah pada kinerja pencapaian PN yang ditentukan berdasarkan dua hal, yaitu (a) kinerja pencapaian sasaran (sasaran PN sebagai capaian *outcome,* sasaran PP sebagai capaian *immediate outcome,* dan sasaran Kegiatan Prioritas (KP) sebagai capaian *output);* dan (b) kinerja dukungan *output* kementerian/lembaga (K/L) terhadap pencapaian PN. Selain itu, evaluasi RKP 2021 juga mencakup evaluasi atas kinerja pelaksanaan MP yang mendukung pencapaian setiap PN.

3. Pelaksana dan Penerima Hasil Evaluasi

Evaluasi RKP dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas berdasarkan data dan informasi dari penanggung jawab (PJ) PN, PP, KP, dan MP serta K/L pelaksana. Hasil evaluasi merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dan digunakan sebagai bahan rujukan dalam penentuan PN, tema, serta masukan dalam penyusunan RKP periode selanjutnya.

4. Mekanisme Evaluasi

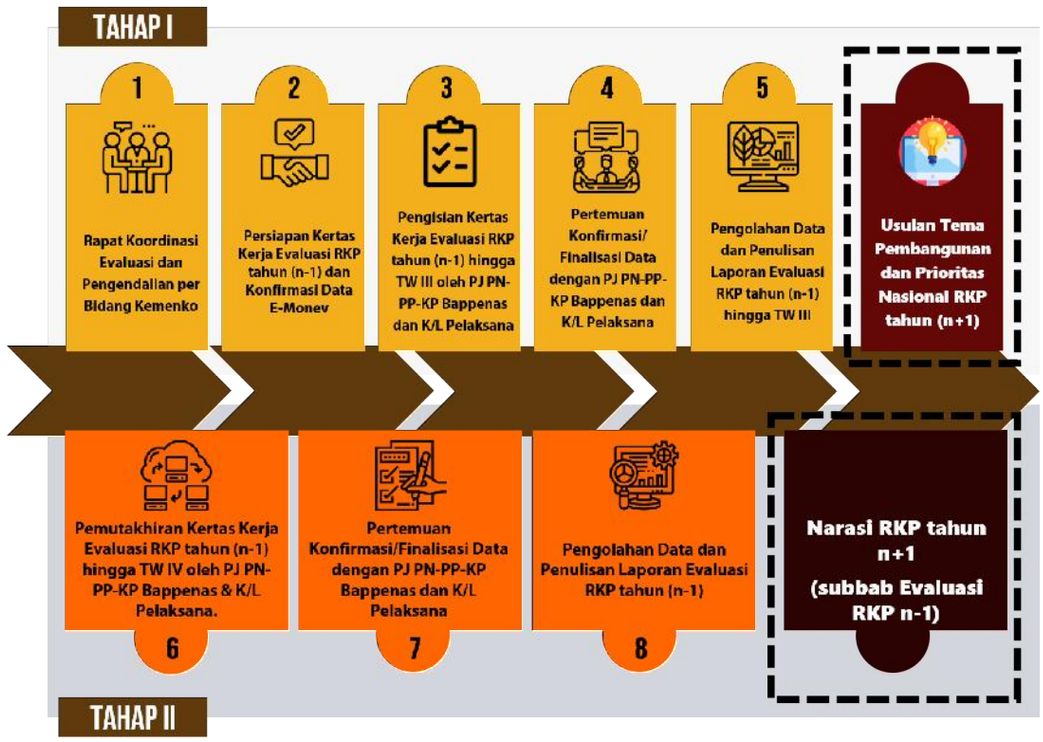
Berdasarkan tahapan pelaksanaan dalam proses penyusunan RKP, secara garis besar evaluasi RKP terbagi menjadi dua, seperti pada Gambar 5.10, yaitu

a. evaluasi dalam rangka persiapan penyusunan prioritas dan tema pembangunan RKP tahun (n+1) berdasarkan evaluasi kinerja RKP tahun sebelumnya (n-1) hingga triwulan III, dan

b. evaluasi dalam rangka penyusunan RKP tahun berikutnya berdasarkan evaluasi kinerja RKP tahun sebelumnya (n-1) hingga triwulan IV.

Gambar 5.10

Alur Evaluasi RKP



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Gambaran alur dan mekanisme evaluasi RKP seperti pada Gambar 5.10. Evaluasi tahap I (data capaian hingga triwulan III) diawali dengan proses menggali capaian pembangunan melalui rapat koordinasi per bidang koordinator (PMK, Perekonomian, Kemaritiman dan Investasi, serta Polhukam) sebagai bahan awal evaluasi, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengumpulan data dan informasi pencapaian PN, pengolahan data, serta perumusan alternatif usulan tema pembangunan dan PN RKP tahun (n+1).

Evaluasi tahap II (data capaian hingga triwulan IV) merupakan pemutakhiran data capaian yang dilakukan baik oleh Bappenas maupun K/L pelaksana, yaitu data capaian sasaran PN-PP-KP-MP oleh PJ PN-PP-KP-MP Bappenas dan dukungan *output* K/L oleh K/L pelaksana. Hasil pemutakhiran akan digunakan dalam naskah RKP tahun (n+1), yaitu pada Subbab Evaluasi RKP.

5. Metode Evaluasi

Sesuai cakupan evaluasi RKP, maka pertama menggunakan metode evaluasi yang sudah biasa dilakukan, yaitu kinerja pencapaian PN berdasarkan (1) hasil pencapaian sasaran (menggunakan metode analisis *gap*), dan (2) hasil dukungan *output* K/L (menggunakan metode rata-rata tertimbang), seperti pada Tabel 5.1. Kedua, menggunakan metode evaluasi kinerja pelaksanaan MP yang mendukung PN seperti dijelaskan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.1

Metodologi Evaluasi RKP: Kinerja Pencapaian PN

Aspek	Uraian
I. Evaluasi Pencapaian Sasaran	
1. Metode Evaluasi	Metode Analisis *Gap*
2. Sumber Data	Data capaian sasaran PN, PP, dan KP dari PJ PN-PP-KP (*self assessment* pencapaian sasaran PN-PP-KP Bappenas)
3. Mekanisme Penghitungan	Pencapaian PN ditentukan dari kinerja PN berdasarkan: (1) pencapaian sasaran PN sebagai capaian *outcome,* (2) pencapaian sasaran PP sebagai capaian *immediate outcome,* dan (3) pencapaian sasaran KP sebagai capaian *output.*
a. Pencapaian Sasaran PN	Penghitungan persentase pencapaian sasaran PN dengan membandingkan angka capaian terhadap target PN
b. Pencapaian Sasaran PP	Penghitungan persentase pencapaian sasaran PP dengan membandingkan angka capaian terhadap target PP
c. Pencapaian Sasaran KP	Penghitungan persentase pencapaian sasaran KP dengan membandingkan angka capaian terhadap target KP
d. Pencapaian sasaran ProP	Penghitungan persentase pencapaian sasaran ProP dengan membandingkan angka capaian terhadap target ProP
II. Evaluasi Dukungan *Output* K/L	
1. Metode Evaluasi	Metode Rata-Rata Tertimbang
2. Sumber Data	Data e-Monev Bappenas dan s*elf assessment* dukungan *output* K/L
3. Mekanisme Perhitungan	Pencapaian PN ditentukan dari dukungan *output* K/L berdasarkan rata-rata tertimbang terhadap pagu anggarannya.
III. Kesimpulan Kinerja	
Mekanisme Perhitungan	Kesimpulan kinerja PN diidentifikasi dengan menghitung nilai rataan hasil evaluasi pencapaian sasaran dan hasil evaluasi dukungan *output* K/L. Kesimpulan kinerja terdiri atas tiga kategori: (1) Baik, notifikasi hijau, capaian >90 persen; (2) Cukup Baik, notifikasi kuning, capaian 60-90 persen; dan (3) Kurang Baik, notifikasi merah, capaian <60 persen.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Tabel 5.2

Metodologi Evaluasi RKP: Kinerja Pelaksanaan MP

Aspek	Uraian
I. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan MP	
1. Metode Evaluasi	Metode Rata-Rata Tertimbang
2. Sumber Data	Data pelaksanaan MP (*self assessment* PJ MP dan K/L Pelaksana)
3. Mekanisme Penghitungan	Pencapaian MP ditentukan dari rata-rata tertimbang proyek K/L terhadap pagu anggarannya.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

5.3.2 Kerangka Pengendalian

Berikut ini penjelasan butir-butir penting dalam Kerangka Pengendalian RKP.

1. Tujuan Pelaksanaan Pengendalian

   Pengendalian pelaksanaan RKP dilaksanakan untuk menjamin dan memastikan agar pelaksanaan PP/KP sesuai dengan rencana dan atau berjalan *on track* dengan memperhatikan rekomendasi atau temuan atas hasil pemantauan dan evaluasi.

2. Cakupan Pengendalian

   Pengendalian pelaksanaan RKP berupa tindakan korektif dari pelaksanaan PP/KP/MP strategis tertentu (dengan besaran anggaran minimal yang ditentukan untuk pemilihan PP/KP/MP strategis), yang dilakukan pada semester kedua seperti Gambar 5.11 berikut.

Gambar 5.11

Cakupan Pengendalian Pembangunan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

3. Pelaksana dan Penerima Hasil Pengendalian

   Pengendalian RKP dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas berkoordinasi dengan K/L terkait maupun pemerintah daerah. Data dan informasi pengendalian did\ukung pula dengan data pengawasan dan pemeriksaan serta kinerja pelayanan publik, di samping data hasil pemantauan dan berbagai evaluasi yang relevan. Hasil pengendalian disampaikan kepada K/L pelaksana berupa tindakan korektif yang diperlukan untuk mendukung atau mempercepat pencapaian target PN, PP, ataupun KP yang ditentukan.

4. Mekanisme Pengendalian, antara lain sebagai berikut.

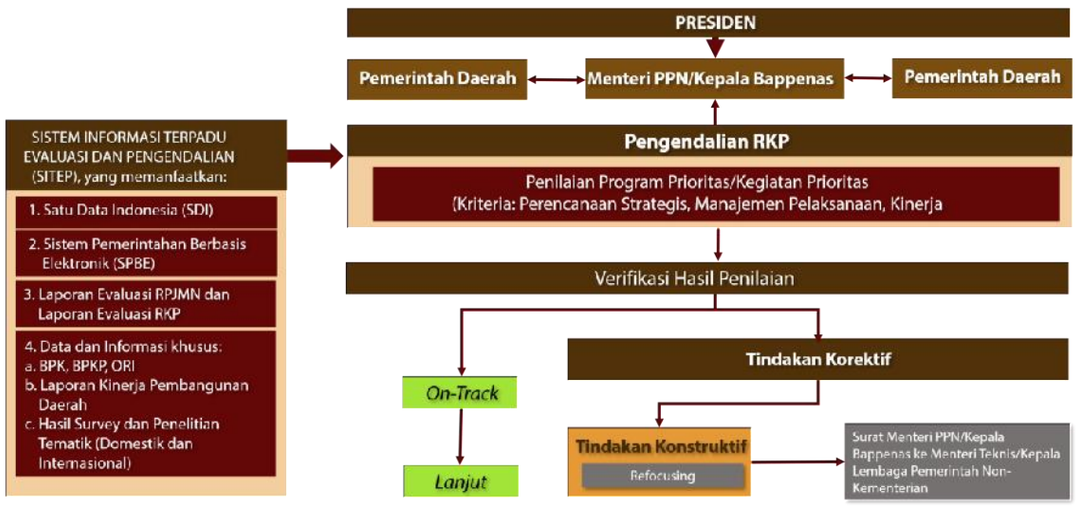
   Pengendalian merupakan langkah tindak lanjut untuk menjamin agar pelaksanaan PP/KP/MP strategis tertentu (dengan besaran anggaran minimal tertentu yang ditentukan untuk pemilihan PP/KP/MP strategis) sesuai dengan rencana. Pengendalian dilakukan melalui penilaian (*assessment*) PP/KP/MP berdasarkan tiga aspek utama yaitu perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan, dan kinerja.

   Proses verifikasi hasil penilaian (*assessment*) dilakukan melalui (a) identifikasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan PP/KP/MP, (b) konfirmasi atas pelaksanaan PP/KP/MP, dan (c) klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan PP/KP/MP.

   Keputusan untuk melakukan tindakan korektif terhadap PP/KP/MP strategis dilakukan hanya mencakup tindakan konstruktif. Tindakan konstruktif adalah tindakan membangun dan memperbaiki pelaksanaan PP/KP/MP, yang dapat dilaksanakan melalui kebijakan pemfokusan kembali (*refocusing*) atas langkah pencapaian target PP/KP/MP. Mekanisme pengendalian RKP tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.12 berikut.

Gambar 5.12

Mekanisme Pengendalian RKP



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 6
PENUTUP

SK No 054713 A

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan upaya pemerintah yang responsif dan adaptif untuk mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi pascapandemi COVID-19, agar Indonesia kembali bangkit dalam melanjutkan pencapaian Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Kunci keberhasilannya adalah sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional melalui pelaksanaan Major Project yang relevan dengan tema pembangunan serta sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dengan tema, "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" diharapkan mampu mempercepat pemulihan pembangunan nasional pascapandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) serta mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional, terutama dalam mencapai ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pelaksanaan RKP tahun 2021 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan perbaikan atas pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya.

Penyusunan tema dan Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2021 merujuk kepada kondisi Indonesia pada tahun 2020 yang mengalami pandemi COVID-19 dan mengalami dampak yang cukup besar khususnya dalam perekonomian. Selain itu, hasil evaluasi RKP tahun 2019 menunjukkan pencapaian sebagian besar PN yang baik pada beberapa target penting pembangunan. Dari lima PN yang dilaksanakan, tiga PN berada pada capaian kinerja yang baik (>90 persen). Kinerja dua terbaik berturut-turut dicapai oleh PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, dan diikuti oleh PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan dengan RPJMN 2020-2024, maka PN pada RKP tahun 2021 disesuaikan dengan tujuh Agenda Pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) dalam RPJMN 2020-2024 dijadikan fokus dalam penyusunan dan pendanaan RKP, terutama beberapa MP yang mendukung langsung tema RKP tahun 2021. Secara khusus dalam penyusunan RKP tahun 2021, dilakukan penguatan sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mencapai pembangunan yang terintegrasi khususnya dalam pelaksanaan MP, dengan melibatkan para gubernur untuk mematangkan rencana kerja awal sebelum rancangan awal RKP dan Pagu Indikatif ditetapkan.

Dalam mencapai target dan sasaran RKP tahun 2021, peran pemerintah dalam rangka meningkatkan penggunaan seluruh sumber daya difokuskan kepada peningkatan kualitas *government spending* terutama pada pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi COVID-19. Untuk itu, dokumen RKP tahun 2021 kiranya akan menjadi pedoman serta acuan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2020
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH TAHUN 2021

MATRIKS PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021

SK No 017229 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.I.1-

MATRIKS PEMBANGUNAN RKP 2021

PRIORITAS NASIONAL : MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01 **PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	01 - Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	01 - Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional		14,50 Persen	74 246 214,9	
		02 - Skor Pola Pangan Harapan		91,60 Nilai		
		03 - Penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan		11 Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)		
	02 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	01 - Rasio Kewirausahaan Nasional		3,65 Persen		
		02 - Pertumbuhan PDB Pertanian		3,32-3,88 Persen		
		03 - Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan		4,68-5,46 Persen		
		04 - Kontribusi PDB Industri Pengolahan		19,63-19,84 Persen		
		05 - Nilai Devisa Pariwisata		US$4,80-8,50 Miliar		
		06 - Kontribusi PDB Pariwisata		4,20 Persen		
		07 - Penyediaan Lapangan Kerja per Tahun		2,30-2,90 Juta Orang		
		08 - Pertumbuhan Investasi (PMTB)		6,40 Persen		
		09 - Pertumbuhan Ekspor Industri Pengolahan		8,07 Persen		
		10 - Pertumbuhan Ekspor Riil Barang dan Jasa		3,50-5,10 Persen		
		11 - Rasio Perpajakan terhadap PDB		8,18 Persen		
01.01 **PP : Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)**	01 - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)	01 - Kapasitas terpasang pembangkit EBT (Kumulatif)	2	11,98 Giga Watt	653.957,7	
		02 - Pemanfaatan biofuel untuk domestik	2	10,20 Juta Kiloliter		
01.01.01 **KP : Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan**	01 - Meningkatnya akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan	01 - Kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT	2	1.001,1 MW	631 970,3	
01 01 01.01 ProP Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan	01 - Terlaksananya percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan	01 - Kapasitas terpasang tambahan PLTA	2	440,3 MW	631 970,3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Kapasitas terpasang tambahan PLT Panas Bumi	2	80 MW		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.I.2-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Kapasitas terpasang tambahan PLT Bioenergi	2	152 MW		
		04 - Kapasitas terpasang tambahan PLTS	2	328,8 MW		
01.01.02 **KP : Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Nabati**	01 - Meningkatnya pasokan bahan bakar nabati	01 - Jumlah pemanfaatan biofuel untuk domestik	2	10,2 Juta KL	7 890,0	
01.01.02.01 ProP : Akselerasi Pengembangan BBN	01 - Terlaksananya akselerasi pengembangan BBN	02 - Persentase mandatori pencampuran BBN ke dalam bahan bakar fosil	2	B30 Persen	7 890,0	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian
01.01.04 **KP : Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik**	01 - Meningkatnya pemenuhan energi domestik	01 - Alokasi batubara untuk kepentingan dalam negeri (DMO) yang direncanakan	2	168 Juta Ton	5 219,5	
		02 - Persentase pemanfaatan gas bumi domestik	2	65 Persen		
01.01.04.01 ProP Pemenuhan Energi yang Kompetitif bagi Industri	01 - Terlaksananya pemenuhan energi yang kompetitif	01 - Jumlah laporan pemenuhan energi yang kompetitif bagi industri	2	1 Laporan	5 219,5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
01.01.05 **KP : Pengembangan Industri Pendukung EBT**	01 - Meningkatnya pengembangan industri pendukung EBT	01 - TKDN sektor pembangkit EBT	2	44 Persen	1 730,3	
01.01.05.01 ProP : Pengembangan Industri EBT	01 - Terlaksananya pengembangan Industri EB	01 - TKDN Sektor EBT dalam rangka mendukung kemandirian energi nasional	2	55,45 Indeks Skala 100	1.730,3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
01.01.03 **KP : Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi**	01 - Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi	01 - Intensitas energi primer	2	138 SBM/Rp Miliar	7 147,6	
		02 - Penurunan intensitas energi final	2	0,9 SBM/Rp Miliar		
01.01.03 01 ProP Perluasan Penerapan Efisiensi Energi	01 - Terlaksananya perluasan penerapan efisiensi energi	01 - Persentase penyelesaian penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)	2	100 Persen	7 147,6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
01.02 **PP : Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi**	01 - Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	01 - Produktivitas air (*water productivity*)	5	3,30 m^3/kg	29.285.586,8	
01.02.01 **KP : Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)**	01 - Meningkatnya pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif)	01 - Luas minimal kawasan berfungsi lindung (kumulatif)	5	65 Juta Ha	343 917,0	
01 02.01.01 ProP Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	01 - Terlaksananya inventarisasi jasa lingkungan tinggi	01 - Luas area dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	5	7 Ekoregion	52.112,2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SK No 024003 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.02.01 02 ProP Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	01 - Terlaksananya perlindungan dan pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara partisipatif	01 - Desa dalam dan sekitar kawasan konservasi	5	1.500 Desa	291.804,8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
01.02.02 **KP : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**	01 - Meningkatnya pengelolaan hutan berkelanjutan	01 - Luas kawasan hutan produksi	2	34,1 Juta Ha	194 618,2	
01.02.02.01 ProP Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	01 - Terlaksananya optimalisasi hasil hutan dan jasa lingkungan	01 - Jumlah unit usaha pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan	2	30 Juta m^3	14 846,0	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
01 02 02 02 ProP : Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	01 - Terlaksananya penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	01 - Jumlah KPH yang difasilitasi penguatannya	5	40 Unit	179 772,2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
01.02.03 **KP : Penyediaan Air untuk Pertanian**	01 - Meningkatnya penyediaan air untuk pertanian	01 - Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi	2	17.860 Ha	9.208 282,0	
01.02.03.01 ProP Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	01 - Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	2	16 860 Ha	9 155 787,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	2	51.400 Ha		
01.02.03.02 ProP : Pembangunan Sistem Penyediaan Air untuk Komoditas Pertanian Bernilai Ekonomi Tinggi	01 - Terlaksananya sistem penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi	01 - Luas lahan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi beririgasi	2	1 000 Ha	52.494,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
01.02.04 **KP : Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas**	01 - Meningkatnya penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	01 - Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan	2	87,37 m^3/detik	1.060 388,4	
01 02 04.01 ProP : Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah	01 - Terlaksananya penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	01 - Tambahan penyediaan air baku	2	3,5 m^3/detik	1.060.388,4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
01.02.05 **KP : Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau**	01 - Meningkatnya pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau	01 - Peningkatan tutupan hutan	2	385 000 Ha	1.243 689,7	
01 02 05.01 ProP : Rehabilitasi Hutan dan Lahan	01 - Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan	01 - Luas hutan dan lahan yang terehabilitasi secara nasional	2	385.000 Ha	926 309,8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.I.4-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01 02 05.02 ProP . Revitalisasi/ Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	01 - Terlaksananya revitalisasi/ penyelamatan Danau Prioritas Nasional	01 - Perbaikan kualitas Danau Prioritas Nasional	2	15 Danau Prioritas	317.379,9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
01.02.06 **KP : Pengembangan Waduk Multiguna**	01 - Berkembangnya pemanfaatan waduk multiguna	01 - Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (kumulatif)	2	15,10 Miliar m^3	17.234 691,5	
		02 - Jumlah tampungan yang ditingkatkan pemanfaatannya	2	15 Unit		
01.02.06 01 ProP Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bendungan	01 - Jumlah bendungan multiguna yang selesai	2	13 Unit	16 040.853,8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
01.02 06 02 ProP Optimalisasi dan Pemanfaatan Tampungan	01 - Terlaksananya optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	01 - Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai fungsi rencananya	2	15 Unit	1.193.837,7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
01.03 **PP : Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan**	01 - Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	01 - Nilai Tukar Petani (NTP)	5	102,00 - 104,00 Nilai	19 626 715,2	
		02 - Angka Kecukupan Energi (AKE)	5	2 100 Kkal/Hari		
		03 - Angka Kecukupan Protein (AKP)	5	57 Gram/Kapita/Hari		
		04 - *Prevalence of Undernourishment* (PoU)	5	5,80 Persen		
		05 - *Food Insecurity Experience Scale* (FIES)	5	4,80 Persen		
01.03.01 **KP : Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan**	01 - Meningkatnya kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan biofortifikasi pangan	01 - Konsumsi ikan	5	58,08 Kg/Kapita/Tahun	917.480,9	
		02 - Konsumsi daging	5	13,8 Kg/Kapita/Tahun		
		03 - Konsumsi sayur dan buah	5	273,2 Gram/Kapita/Hari		
		04 - Konsumsi protein asal ternak	5	10,7 Gram/Kapita/Hari		
		05 - Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi	5	40 Persen Penerima BPNT		
		06 - Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	5	85-95 Persen		
		07 - Luas lahan produksi beras biofortifikasi	2	50000 Hektare		
		08 - Persentase pangsa pangan organik	5	8 Persen		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.I.5-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.03 01 01 ProP · Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	01 - Terlaksananya peningkatan diversifikasi konsumsi pangan	01 - Jumlah produksi ubi kayu	5	21,23 Juta Ton	554.227,4	Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian
		02 - Jumlah produksi ubi jalar	5	2,1 Juta Ton		
01.03.01.02 ProP : Peningkatan Keamanan Pangan	01 - Terlaksananya peningkatan keamanan pangan	01 - Rasio tindak lanjut terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di tempat pemasukan atau pengeluaran yang ditetapkan	5	91 Persen	307 028,5	Kementerian Pertanian
01 03.01.03 ProP Pengembangan Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	01 - Terlaksananya pengembangan fortifikasi dan biofortifikasi pangan	01 - Penelitian dan pengembangan biofortifikasi pangan	5	1 Varietas	56 225,0	Kementerian Pertanian
01.03.02 **KP : Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian, Perikanan dan Pangan Hasil Laut secara Berkelanjutan**	01 - Meningkatnya ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan, dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	01 - Penggunaan benih bersertifikat	5	65 Persen	5.671 645,8	
		02 - Ketersediaan beras	5	42,7 Juta Ton		
		03 - Ketersediaan protein hewani	5	2,6 Juta Ton		
		04 - Produksi jagung	5	31,9 Juta Ton		
		05 - Produksi daging	5	4,2 Juta Ton		
		06 - Produksi umbi-umbian	5	24,6 Juta Ton		
		07 - Produksi sayuran	5	16,2 Juta Ton		
		08 - Produksi buah-buahan	5	23,12 Juta Ton		
01.03.02.01 ProP Peningkatan Produksi Padi	01 - Terlaksananya peningkatan produksi padi	01 - Peningkatan produksi padi	5	5,67 Persen	1 842.268,0	Kementerian Pertanian
01.03.02.02 ProP . Peningkatan Produksi Jagung	01 - Meningkatnya produksi jagung	01 - Peningkatan produksi jagung	5	3,4 Persen	1.484.860,7	Kementerian Pertanian
01.03.02.03 ProP : Peningkatan Produksi Kedelai	01 - Meningkatnya produksi kedelai	01 - Peningkatan produksi kedelai	5	7,08 Persen	185 503,3	Kementerian Pertanian
01.03.02.04 ProP : Peningkatan Produksi Daging	01 - Meningkatnya produksi daging	01 - Pengkatan produksi daging	5	5,28 Persen	1.459.175,9	Kementerian Pertanian
01.03.02.05 ProP · Peningkatan Produksi Hortikultura	01 - Meningkatnya produksi hortikultura	01 - Peningkatan produksi sayur-sayuran	5	2,70 Persen	699 837,9	Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan produksi buah-buahan	5	4,30 Persen		

SK No 024006 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.03.03 **KP : Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar**	01 - Meningkatnya produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	01 - Teknologi yang diterapkan oleh petani	5	70-80 Persen	1 108 438,9	
		02 - Nilai tambah per tenaga kerja pertanian	5	51,7 Juta Rp/Tenaga Kerja/Tahun		
01.03 03 01 ProP Asuransi Pertanian	01 - Terlaksananya asuransi pertanian	01 - Jumlah asuransi usaha tani padi	5	1 000 000 Hektare	177.680,0	Kementerian Pertanian
		02 - Jumlah asuransi usaha peternak sapi/kerbau	5	150 000 Ekor		
01 03 03.02 ProP Pendidikan Pertanian	01 - Terlaksananya pendidikan pertanian	01 - Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian	5	75 persen	260 339,2	Kementerian Pertanian
01 03 03.03 ProP Penyuluhan dan Pendampingan Sekolah Lapang	01 - Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan sekolah lapang	01 - Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	5	65 Persen	492 450,5	Kementerian Pertanian
		02 - Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	5	19 Persen		
01.03.03 04 ProP Korporasi Petani	01 - Berkembangnya korporasi petani	01 - Jumlah korporasi petani	5	33 Korporasi Petani	177.969,2	Kementerian Pertanian
01.03.04 **KP : Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian**	01 - Meningkatnya keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian	01 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	5	65 Persen	2.851 751,0	
		02 - Jumlah varietas unggul tanaman untuk pangan yang dilepas	5	30 Varietas Unggul Baru dan Galur		
		03 - Jumlah varietas unggul hewan untuk pangan yang dilepas	5	8 Varietas Unggul Baru dan Galur		
		04 - Sumber daya genetika dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	5	4250 Aksesi		
01 03 04 01 ProP Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian	01 - Terkelolanya sumber daya air pertanian	01 - Indeks pemenuhan lahan pertanian yang mendapat pengairan	5	34,35 Persen	507 457,9	Kementerian Pertanian
01.03.04.02 ProP Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pertanian	01 - Terkelolanya sumber daya lahan pertanian	01 - Indeks ketersediaan lahan pertanian	5	65,84 Nilai	2 344.293,1	Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Desa PDTT
		02 - Indeks keberlanjutan lahan pertanian	5	99,84 Nilai		
01.03.05 **KP : Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional**	01 - Terlaksananya peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	01 - *Global Food Security Index*	5	65,5 Nilai	9 077.398,6	
01 03 05.01 ProP Stabilisasi Harga Pangan	01 - Terlaksananya stabilisasi harga pangan strategis	01 - Koefisien Varian Harga Pangan	5	2,0 Persen	61 869,9	Kementerian Pertanian

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.03.05.02 ProP · Penanganan Rawan Pangan serta Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	01 - Terlaksananya penanganan rawan pangan serta cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	01 - Persentase daerah rentan rawan pangan	5	16 Persen	9.015.528,7	Kementerian Pertanian, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
		02 - Cadangan pangan nasional	5	2,0 Juta Ton		
01.04 **PP : Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan**	01 - Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	01 - Konservasi kawasan kelautan	5	24,60 Juta Ha	1.551 225,3	
		02 - Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	5	≤67 Persen		
		03 - Produksi perikanan	5	27,55 Juta Ton		
		04 - Produksi garam	5	3,10 Juta Ton		
		05 - Nilai Tukar Nelayan (NTN)	5	102-104 Nilai		
01.04.01 **KP : Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut**	01 - Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	01 - Pengelola WPP	5	11 Unit	44 546,0	
		02 - Akurasi pendataan stock dan pemanfaatan WPP	4	11 WPP		
		03 - Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	4	22 RZ		
01.04.01.01 ProP · Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	01 - Terlaksananya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	01 - Jumlah model percontohan penguatan tata kelola WPP	4	5 WPP	24 432,6	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.01.02 ProP : Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir	01 - Terlaksananya penataan ruang laut dan Rencana Zonasi Pesisir	01 - Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT dan antarwilayah laut	5	22 RZ	16.500,0	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.01 03 ProP : Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	01 - Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang laut	01 - Jumlah pengendalian pemanfaatan ruang laut dan reklamasi	5	9 Lokasi	3.613,4	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.02 **KP : Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan**	01 - Meningkatnya ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	01 - Jumlah kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	5	10 Kawasan	23.836,7	
01.04 02.01 ProP Pengembangan Wisata Bahari dan Jasa Maritim	01 - Terlaksananya pengembangan wisata bahari dan jasa maritim	01 - Jumlah kawasan wisata bahari dan BMKT yang terkelola	5	6 kawasan	20.186,7	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04 02.02 ProP : Pengembangan Marine Bioproduct dan Bioteknologi	01 - Terlaksananya pengembangan marine bioproduct dan bioteknologi	01 - Jumlah bioteknologi dan biofarmakologi yang dikembangkan	5	8 Paket	3.650,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.I.8-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.04.03 **KP : Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan**	01 - Meningkatnya produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	01 - Produksi ikan	5	16,0 Juta Ton	1.205 057,1	
		02 - Produksi rumput laut	5	11,55 Juta Ton		
01 04 03.01 ProP . Peningkatan Produksi Perikanan	01 - Meningkatnya produksi perikanan	01 - Produksi ikan tangkap	5	8,08 Juta Ton	944 145,9	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Produksi ikan budidaya	5	7,92 Juta Ton		
01 04 03 02 ProP Peningkatan Produksi Rumput Laut	01 - Meningkatnya produksi rumput laut	01 - Jumlah produksi rumput laut	5	11,55 Juta Ton	36 900,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01 04 03 03 ProP : Peningkatan Produksi Garam	01 - Meningkatnya produksi garam	01 - Jumlah produksi garam	5	3,1 Juta Ton	122.797,3	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.03 04 ProP : Karantina Ikan dan Jaminan Mutu	01 - Terlaksananya karantina ikan dan jaminan mutu	01 - Persentase pencegahan impor, ekspor, antararea jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi	5	90 Persen	101 213,9	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.04 **KP : Peningkatan Fasilitasi Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya**	01 - Meningkatnya fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	01 - Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil	5	Rp3,3 Triliun	95 665,9	
		03 - Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	5	102 Indeks		
01.04.04 01 ProP Peningkatan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	01 - Meningkatnya perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan	01 - Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan yang terlindungi	5	125.000 orang	25.100,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.04.02 ProP : Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	01 - Terlaksananya peningkatan akses pembiayaan usaha perikanan	01 - Sertifikasi tanah nelayan dan lahan budidaya	5	20.500 Bidang	51 308,1	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04 04 03 ProP : Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya penataan perizinan kelautan dan perikanan	01 - Integrasi sistem perizinan pusat-daerah	4	34 Provinsi	19.257,8	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.05 **KP : Peningkatan SDM dan Riset Kemaritiman dan Kelautan Serta *Database* Kelautan dan Perikanan**	01 - Meningkatnya SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta *database* kelautan dan perikanan	01 - Jumlah hasil riset yang diadopsi/diterapkan	5	8 Hasil Riset	182 119,6	

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01 04.05.01 ProP Peningkatan SDM Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya peningkatan SDM kelautan dan perikanan	01 - Jumlah masyarakat yang disuluh	1	410.000 Orang	141 226,6	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.05 02 ProP Penguatan Inovasi Teknologi dan Riset Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya penguatan inovasi teknologi dan riset kelautan dan perikanan	01 - Jumlah riset kemaritiman dan kelautan	5	26 Hasil Riset	40 893,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.05 **PP : Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi**	01 - Menguatnya kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dan koperasi	01 - Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	5	26,50 Persen	1 301 800,1	
		02 - Pertumbuhan wirausaha	5	2,50 Persen		
		03 - Kontribusi koperasi terhadap PDB	5	5,20 Persen		
01.05.01 **KP : Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar**	01 - Meningkatnya kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	01 - Proporsi IMK (Industri Mikro Kecil) yang menjalin kemitraan	5	9 Persen	241 294,9	
01 05 01 01 ProP Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk	01 - Terlaksananya pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk	01 - Jumlah UMKM yang dikembangkan kapasitas usahanya	5	7990 UMKM	223 449,9	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kementerian Perdagangan
01 05.01.02 ProP : Perluasan Kemitraan Usaha	01 - Terlaksananya perluasan kemitraan usaha	01 - Jumlah UMKM yang diperluas cakupan kemitraannya	5	777 UMKM	11 308,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.05.01.03 ProP Penguatan Kapasitas Kelembagaan untuk Bermitra	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan untuk bermitra	01 - Jumlah UMKM yang ditingkatkan kapasitas usahanya	5	500 UMKM	6.537,0	Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.05.02 **KP : Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha**	01 - Meningkatnya kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	01 - Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	5	20,3 Persen	199 769,1	
		02 - Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit	5	2,8 Persen		
		03 - Proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi	5	65 Persen		

PN/FP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01 05 02 01 ProP Dukungan Pemberian Modal Awal Usaha	01 - Terlaksananya dukungan pemberian modal awal usaha	01 - Jumlah wirausaha pemula yang mendapat modal usaha	5	6.900 Orang	178.942,1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.05 02.02 ProP . Pendampingan UMKM untuk Mengakses Kredit	01 - Terlaksananya pendampingan UMKM untuk mengakses kredit	01 - Jumlah UMKM yang didampingi mengakses kredit/pembiayaan	5	10000 UMKM	17.811,2	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian
01.05.02.03 ProP Pengembangan Skema Pembiayaan bagi Wirausaha dan UMKM	01 - Terlaksananya pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM	01 - Jumlah UMKM yang dikembangkan skema pembiayaannya	5	850 UMKM	3 015,8	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.05.03 **KP : Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi**	01 - Meningkatnya kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	01 - Jumlah koperasi modern yang dikembangkan	5	75 Koperasi	44 825,0	
01 05.03 01 ProP : Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Manajer Koperasi	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi koperasi	01 - Jumlah pengurus dan pengelola koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	5	2 300 Orang	16 775,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.05 03 03 ProP . Pengembangan Jangkauan dan Cakupan Usaha	01 - Terlaksananya pengembangan jangkauan dan cakupan usaha kepada koperasi	01 - Jumlah koperasi yang dikembangkan jangkauan dan cakupan usahanya	5	525 Koperasi	13.750,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01 05 03 04 ProP Pengembangan Inovasi Koperasi	01 - Terlaksananya pengembangan inovasi kepada koperasi	01 - Jumlah koperasi yang dikembangkan untuk berinovasi	5	225 Koperasi	8.800,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.05.03 02 ProP : Pendampingan Kelompok untuk Membentuk Koperasi	01 - Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat untuk membentuk koperasi	01 - Jumlah orang/masyarakat yang didampingi membentuk koperasi	5	3000 Orang	5.500,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.05.04 **KP : Peningkatan Penciptaan *Start-up* dan Peluang Usaha**	01 - Meningkatnya penciptaan *start-up* dan peluang usaha	01 - Jumlah Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	5	1.650 WUB	810.811,1	
		02 - Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri	5	18,8 Persen		
		03 - Penumbuhan *start-up*	5	700 *Start-Up*		
01.05 04 01 ProP Pelatihan Kewirausahaan	01 - Terlaksananya pelatihan kepada wirausaha atau calon wirausaha	01 - Jumlah wirausaha yang dilatih	5	82.400 Orang	559.149,3	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
						Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian
01.05.04.02 ProP Inkubasi Usaha	01 - Terlaksananya inkubasi kepada wirausaha	01 - Jumlah wirausaha yang diinkubasi	5	200 Orang	160.400,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian
01 05.04 03 ProP : Penguatan Kapasitas Layanan Usaha	01 - Terlaksananya layanan pengembangan Usaha kepada UMKM	01 - Jumlah UMKM yang mendapat layanan usaha	5	7170 UMKM	47 455,8	Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01 05.04.04 ProP Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah	01 - Terlaksananya pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah	01 - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	5	20 Sentra IKM Kumulatif	43 806,0	Kementerian Perindustrian
01.05.05 **KP : Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial**	01 - Meningkatnya nilai tambah usaha sosial	01 - Kontribusi usaha sosial	5	2,1 Persen PDB	5 100,0	
01.05.05.01 ProP Pembinaan Wirausaha Sosial	01 - Terlaksananya pembinaan wirausaha sosial	01 - Jumlah lembaga yang membina wirausaha sosial	5	44 Lembaga	5.100,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		-				
01.06 **PP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi**	01 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01 - Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	5	4,75-5,54 Persen	15 519 229,6	
		02 - Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas	5	17,63-17,84 Persen		
		03 - Nilai tambah ekonomi kreatif	5	Rp1 277,00 Triliun		
		04 - Jumlah tenaga kerja industri pengolahan	1	18,35 Juta Orang		
		05 - Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	1	14,00 Persen		
		06 - Jumlah tenaga kerja pariwisata	1	14,30 Juta Orang		
		07 - Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	1	17,90 Juta Orang		
		08 - Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia/EODB	5	Menuju Peringkat 40		
		09 - Nilai realisasi PMA dan PMDN	5	Rp858,50 Triliun		
		10 - Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan	5	Rp268,70 Triliun		
01.06.01 **KP : Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir**	01 - Meningkatnya industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir	01 - Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman	5	5,00-5,50 Persen	2.255.765,1	
		02 - Pertumbuhan PDB perkebunan	5	5 Persen		
		03 - Peningkatan produksi kakao	5	2,3 Persen		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Peningkatan produksi kopi	5	1,5 Persen		
		05 - Peningkatan produksi kelapa sawit	5	5,9 Persen		
		06 - Pertumbuhan PDB hortikultura	5	5,8 Persen		
01.06.01.01 ProP Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan	01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis perkebunan	01 - Produksi kopi	5	0,78 Juta Ton	1.191.326,9	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02 - Produksi kakao	5	0,76 Juta Ton		
		03 - Produksi karet	5	3,63 Juta Ton		
		04 - Produksi kelapa dalam	5	2,98 Juta Ton		
01.06.01.02 ProP Pengembangan Industri Berbasis Pertanian Pangan	01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis pertanian pangan	01 - Pertumbuhan volume ekspor pertanian	5	1,35 Persen	798 759,1	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan
01 06 01 03 ProP : Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis kehutanan	01 - Pertumbuhan PDB Industri Furnitur	5	4,00-5,00 Persen	18 473,1	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
01.06 01 04 ProP Pengembangan Industri Kemaritiman	01 - Terlaksananya pengembangan industri kemaritiman	01 - Pertumbuhan PDB perikanan	5	8,11 Persen	209.792,8	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.06 01 05 ProP Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Logam	01 - Terlaksananya pengembangan industri kimia, farmasi dan logam	01 - Pertumbuhan Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional	5	6,00-7,25 Persen	37 413,2	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
01.06.02 **KP : Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa**	01 - Meningkatnya industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	01 - Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi di luar Jawa	5	5 KI - KEK Industri	6.678 000,8	
01.06.02.01 ProP · Pengembangan Kawasan Industri dan Smelter secara Terintegrasi	01 - Terlaksananya pengembangan kawasan industri dan smelter secara terintegrasi	01 - Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar	5	5,00 - 6,25 Persen	6 655 936,3	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika
01.06.02.02 ProP Pemanfaatan Mineral dan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah	01 - Terlaksananya pemanfaatan mineral dan batubara untuk peningkatan nilai tambah	01 - Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	2	73,53 Persen	22.064,5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara	2	50,00 Persen		
01.06.03 **KP : Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok**	01 - Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	01 - Destinasi pariwisata prioritas yang dipercepat pengembangannya	5	10 Destinasi	4.899.299,4	
		02 - Revitalisasi destinasi Bali	5	1 Destinasi		
		03 - Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasiskan kawasan hutan prioritas	5	25 Unit		
		04 - Destinasi wisata berbasis *geopark*	5	16 Destinasi		
		05 - Destinasi wisata bahari	5	6 Destinasi		
01.06.03.01 ProP Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	01 - Terlaksananya pengembangan 25 kawasan hutan untuk mendukung destinasi pariwisata prioritas	01 - Jumlah destinasi wisata alam prioritas	5	25 Destinasi	70.618,4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
01.06.03 02 ProP Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi, serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata	01 - Terlaksananya peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi, serta daya dukung destinasi pariwisata	01 - Destinasi yang ditingkatkan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi, serta daya dukung	5	18 Destinasi	4 522.721,9	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kpbu), Kementerian Perhubungan (Kpbu)
01.06.03.03 ProP : Penguatan Rantai Pasok Industri dan Kapasitas Masyarakat, termasuk Melalui Desa Wisata	01 - Terlaksananya penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata	01 - Jumlah penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata	5	13 Destinasi/Provinsi	59 471,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01 06 03.04 ProP Pengelolaan dan Standar Layanan Destinasi Pariwisata	01 - Terlaksananya pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata	01 - Jumlah pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata	4	3 Destinasi	233.988,1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01 06.03.05 ProP . Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata *Geopark*	01 - Terlaksananya pengembangan 16 destinasi pariwisata *geopark*	01 - Jumlah koordinasi pengembangan *geopark*	5	1 Kegiatan	12.500,0	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas
01.06.04 **KP : Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital**	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	01 - Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif	5	5,3 - 5,5 Persen	587 182,0	

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Pertumbuhan PDB informasi dan komunikasi	5	8,27 - 10,11 Persen		
01.06.04 01 ProP Penyediaan Insentif Inovasi dan Pengembangan *Brand*	01 - Terlaksananya penyediaan insentif inovasi dan pengembangan *brand*	01 - Jumlah skema insentif inovasi dan pengembangan *brand*	5	3 Skema	239.204,8	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Brin), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lipi)
01 06.04 02 ProP · Penyediaan Insentif Penerapan dan Komersialisasi HKI	01 - Terlaksananya penyediaan insentif penerapan dan komersialisasi HKI	01 - Jumlah penyediaan insentif penerapan dan komersialisasi HKI	5	2 Kegiatan	10 100,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01.06 04.03 ProP Fasilitasi Rantai Pasok dan *Scale-up* Karya dan Platform Kreatif Unggulan	01 - Terlaksananya fasilitasi rantai pasok dan *scale-up* karya dan platform kreatif unggulan	01 - Jumlah fasilitasi rantai pasok dan *scale-up* karya dan platform kreatif unggulan	5	13 Kerja Sama	9 484,7	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01.06.04 04 ProP : Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Kota Kreatif	01 - Terlaksananya peningkatan kerja sama pengembangan kota kreatif	01 - Jumlah kerja sama pengembangan kota kreatif	5	19 Kawasan	94.947,8	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01.06 04 05 ProP Pengembangan *'Start-up Parks'* dan *Center of Excellence*	01 - Terlaksananya pengembangan *'start-up parks'* dan *center of excellence*	01 - Jumlah *'start-up parks'* dan *center of excellence* yang dikembangkan	5	3 Kerja Sama	7 000,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01 06 04 06 ProP Pengembangan Pendampingan dan Inkubasi di Ruang Kreatif	01 - Terlaksananya pengembangan pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif	01 - Jumlah pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif	5	5 Kegiatan	171 444,7	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
01.06.04.07 ProP · Pengembangan Kawasan *Be Creative District* (BCD)	01 - Terlaksananya pengembangan Kawasan *Be Creative District*	01 - Jumlah Kawasan *Be Creative District* (BCD) yang dikembangkan	2	1 Kegiatan	55 000,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Koordinasi Penanaman Modal
01.06.05 **KP : Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan**	01 - Terlaksananya perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	03 - Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN	5	49,7 Persen	1.087 305,2	
		05 - Kontribusi realisasi investasi luar Jawa	5	49 Persen		
		06 - Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4	Bertahap K/L/D		
01.06.05 01 ProP : Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	01 - Terlaksananya kepastian hukum berusaha dan investasi	01 - Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi	4	6 Usulan Rekomendasi	97.121,5	Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01 06 05.02 ProP Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi	01 - Terlaksananya fasilitasi kemudahan usaha dan investasi	01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah I, II, III, dan IV	5	124 Perusahaan	833 162,9	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
01.06.05.03 ProP · Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	01 - Meningkatnya jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan	01 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	5	1 634 775 Orang	157 020,8	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
01.06.06 **KP : Pengembangan Industri Halal**	01 - Meningkatnya pengembangan industri halal	01 - Jumlah sektor industri halal yang difasilitas	5	2 Sektor Industri	11 677,1	
01 06.06 01 ProP : Pengembangan Infrastruktur Industri Halal	01 - Terlaksananya peningkatan pengembangan infrastruktur industri halal	01 - Junlah kawasan dengan zona tematik industri halal yang difasilitasi	5	2 Kawasan Industri	11.677,1	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
01.07 **PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)**	01 - Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01 - Neraca perdagangan	5	US$10,76-12,75 Miliar	1 293 200,4	
		02 - Pertumbuhan ekspor nonmigas	5	5,96-7,86 Persen		
		03 - Jumlah wisatawan mancanegara	5	4,0 - 7,0 Juta Kunjungan		
		04 - Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	5	180 - 220 Juta Perjalanan		
01.07.01 **KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa**	01 - Meningkatnya diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	01 - Pertumbuhan ekspor pertanian	5	9,0 - 10,0 Persen	85 827,7	
		02 - Ekspor hasil pertanian (FOB)	5	US$4,3 Miliar		
		03 - Ekspor hasil perikanan	5	US$6,05 Miliar		
		04 - Kontribusi ekspor industri pengolahan	5	76,5 Persen		
		05 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi (komputer, instrumen ilmiah, mesin listrik, dirgantara)	5	11,4 Persen		
		06 - Pertumbuhan ekspor nonmigas	5	5,96 - 7,86 Persen		
		07 - Rasio ekspor jasa terhadap PDB	5	2,8 Persen		
		08 - Nilai ekspor produk industri kehutanan	5	US$2,6 Miliar		
		09 - Nilai ekspor industri pengolahan	5	US$122,8 - 127,5 Miliar		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.07.01.01 ProP : Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor dan Jasa	01 - Terlaksananya peningkatan diversifikasi produk ekspor dan jasa	01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi bantuan permesinan	5	30 Perusahaan	4.500,0	Kementerian Perindustrian
01 07.01.02 ProP Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	01 - Terlaksananya peningkatan nilai tambah produk ekspor dan jasa	01 - Jumlah produk ekspor yang diberikan fasilitasi pengembangan produk	5	155 Produk	81.327,7	Kementerian Perdagangan
01.07.02 **KP : Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor**	01 - Meningkatnya akses dan pendalaman pasar ekspor	01 - Jumlah negara tujuan ekspor	5	220 Negara	232.748,9	
		02 - *Share* ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur	5	1,3 Persen		
		03 - *Share* ekspor produk Indonesia di pasar tradisional	5	3,3 Persen		
01 07 02 01 ProP . Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	01 - Terlaksananya peningkatan pangsa pasar produk Indonesia	01 - Jumlah promosi dan misi dagang	5	26 Kegiatan Promosi	115.559,1	Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian
01.07 02.02 ProP : Fasilitasi Ekspor	01 - Terlaksananya fasilitasi ekspor	01 - Jumlah kegiatan fasilitasi ekspor	5	56 Fasilitasi	52.399,5	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
01 07 02 03 ProP Peningkatan Daya Saing Industri Guna Mendorong Peningkatan Ekspor	01 - Terlaksananya peningkatan daya saing industri guna mendorong peningkatan ekspor	01 - Nilai ekspor produk industri sektor ILMATE	5	US$41,08 Miliar	64.790,3	Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02 - Nilai ekspor produk industri sektor Agro	5	US$57,05 Miliar		
		03 - Nilai ekspor produk industri sektor IKFT	5	US$35,97 Miliar		
01.07.03 **KP : Pengelolaan Impor**	01 - Meningkatnya pengelolaan impor	01 - Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	5	49,9 Persen	7 772,6	
		02 - Produk industri yang mendapatkan sertifikat TKDN	5	6.630 Produk Per Tahun		
01.07.03.01 ProP Penguatan Kebijakan Perlindungan Akses Pasar Dalam Negeri	01 - Terlaksananya penguatan kebijakan perlindungan akses pasar dalam negeri	01 - Jumlah pengawasan *post border*	5	825 Berita Acara	7.772,6	Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian
01.07.04 **KP : Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif**	01 - Meningkatnya kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif	01 - Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	5	5,0 Persen	11.784,9	

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.07.04.01 ProP Pengembangan Sistem Katalog	01 - Terlaksananya pengembangan sistem katalog	01 - Jumlah katalog produk dalam negeri	5	15 Katalog	11.784,9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
01.07.05 **KP : Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global**	01 - Meningkatnya partisipasi dalam jaringan produksi global	01 - Jumlah sektor prioritas yang difasilitasi investasi dalam jaringan produksi global	5	4 Sektor	90.700,0	
01 07 05.01 ProP Peningkatan Investasi (*Inbound & Outbound*) Industri GPN Berbasis Hilirisasi SDA, Teknologi Tinggi	01 - Terlaksananya peningkatan investasi (*inbound* dan *outbond*) industri GPN berbasis hilirisasi SDA teknologi tinggi	01 - Jumlah investasi asing yang masuk di sektor industri	5	5 Investor/Perusahaan	90.700,0	Kementerian Perindustrian
01.07.06 **KP : Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi *Branding*, dan Produk Kreatif**	01 - Meningkatnya citra dan diversifikasi pemasaran, destinasi pariwisata prioritas dan destinasi *branding*, dan produk kreatif	01 - Jumlah *branding* Wonderful Indonesia	5	10 Destinasi *Branding*	524.078,2	
		02 - Nilai ekspor ekonomi kreatif	5	US$17,45 Miliar		
		03 - Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (*cultural heritage regeneration*)	5	8 (Kumulatif) Lokasi		
01.07 06 01 ProP *Branding* Wonderful Indonesia	01 - Terlaksananya *branding* Wonderful Indonesia	01 - Jumlah media *branding*	5	4 Media	300 000,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01.07.06.02 ProP : Pendalaman Pasar Tradisional dan Diversifikasi Pemasaran ke Pasar Baru	01 - Terlaksananya pendalaman pasar tradisional dan diversifikasi pemasaran ke pasar baru	01 - Jumlah pendalaman pasar tradisional dan diversifikasi pemasaran ke pasar baru	5	3 Regional Pemasaran	150.091,8	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01.07 06 03 ProP : Perluasan Pemasaran Produk Kreatif, termasuk Melalui *e-commerce*	01 - Terlaksananya perluasan pemasaran produk kreatif, termasuk melalui *e-commerce*	01 - Jumlah pemasaran produk kreatif, termasuk melalui *e-commerce*	5	89 Jenama/Orang	11 961,4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01 07 06.04 ProP : Perluasan Diklat Manajemen Usaha dan Pemasaran	01 - Terlaksananya perluasan diklat manajemen usaha dan pemasaran	01 - Jumlah diklat manajemen usaha dan pemasaran	1	13.000 Orang	62.025,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01.07.07 **KP : Peningkatan Efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/ *Free Trade Agreement* (FTA)/ *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi**	01 - Meningkatnya efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/ *Free Trade Agreement* (FTA)/ *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi	01 - Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	5	91 Negara	340 288,1	
		02 - Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	5	88 Negara		
		03 - Jumlah ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi internasional	5	4 Ratifikasi		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Jumlah promosi *Tourism, Trade, and Investment* (TTI) terintegrasi	5	8 Promosi Terintegrasi		
		05 - PTA/FTA/CEPA yang disepakati	5	25 (Kumulatif) Kesepakatan		
01 07 07 01 ProP : Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (Negosiator) dan Kelembagaan Perwakilan RI di Luar Negeri termasuk FTA *Center*	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM (negosiator) dan kelembagaan perwakilan RI di luar negeri, termasuk FTA *Center*	01 - Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas negosiator	5	1 Kegiatan	736,5	Kementerian Perdagangan
01.07 07 02 ProP Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan kesepakatan dan penyelesaian proses ratifikasi kerja sama ekonomi internasional	01 - Jumlah kesepakatan dan penyelesaian proses ratifikasi kerja sama ekonomi internasional	5	160 Dokumen	73.679,5	Kementerian Perdagangan
01.07.07.03 ProP Promosi Terintegrasi	01 - Terlaksananya promosi terintegrasi	01 - Jumlah promosi terintegrasi	5	7 Pameran	265.872,1	Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal
01.08 **PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi**	01 - Meningkatnya penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	01 - Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB	5	4,17 Persen	5.014.499,8	
		02 - Biaya logistik terhadap PDB	5	22,20 Persen		
		03 - Rasio M2/PDB	5	39,74 Persen		
		04 - Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index*	5	Peringkat 36-39		
		05 - Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*)	5	11,99 Persen		
		06 - Imbal Hasil (*yield*) Surat Berharga Negara	5	Menurun Persen		
		07 - Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	5	25,94 Persen		
01.08.01 **KP : Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan**	01 - Meningkatnya pendalaman sektor keuangan	01 - Rasio Kredit/PDB	5	32,6 Persen	11.536,2	
		02 - Jumlah ATM per 100.000 penduduk	5	56,3 Unit		
		03 - Jumlah kantor Bank per 100.000 penduduk	5	15,4 Unit		
		04 - Skema pembiayaan berbasis HKI	5	1 Skema		
01.08.01.01 ProP Peningkatan Inklusi Keuangan, Inovasi Sektor Keuangan, dengan Menjaga Stabilitas dan Integritas Sistem Keuangan	01 - Terlaksananya peningkatan inklusi keuangan, inovasi sektor keuangan, dengan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan	01 - Jumlah peraturan perundangan peningkatan skema pembiayaan untuk pariwisata dan ekonomi kreatif	3	4 Peraturan Perundangan	10.849,7	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01 08 01.02 ProP : Peningkatan Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Pemerintah	01 - Terlaksananya peningkatan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan pemerintah	01 - *Turnover* Rasio SBN	5	5,02 Persen	686,5	Kementerian Keuangan
01.08.02 **KP : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0**	01 - Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0	01 - Kontribusi ekonomi digital	5	3,5 Persen	2 373 255,3	
		02 - Nilai transaksi *e-commerce*	5	Rp345 Triliun		
		03 - Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK	1	9.000 Orang		
01.08 02 01 ProP : Penguatan Industri *Fintech, E-Commerce, On-Demand Service*, dan *Internet Of Things*	01 - Terlaksananya penguatan industri *fintech, e-commerce, on-demand service*, dan *internet of things*	01 - Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan	5	200 Fasilitator	5 242,5	Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian
01.08.02 02 ProP Modernisasi Industri Hingga 4.0 Sesuai Karakteristik Industri	01 - Terlaksananya modernisasi industri hingga 4 0 sesuai karakteristik industri	01 - Jumlah perusahaan yang didampingi	5	195 Perusahaan	2.368 012,8	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika
01.08.03 **KP : Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga**	01 - Meningkatnya sistem logistik dan stabilitas harga	01 - Skor *Logistic Performance Index*	5	3,2 Indeks	1.700 140,6	
		02 - Tingkat inflasi	5	2,0 - 4,0 Persen		
01.08.03.01 ProP Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik	01 - Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pendukung efisiensi sistem logistik	01 - Jumlah sarana prasarana pendukung efisiensi distribusi yang dibangun	5	67 Sarana dan Prasarana	1 671.390,4	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan
01 08.03.02 ProP Pengendalian Inflasi	01 - Terjaganya inflasi pangan bergejolak	01 - Tingkat inflasi pangan bergejolak	5	2,3 - 4,3 Persen	28.750,2	Kementerian Perdagangan
01.08.04 **KP : Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata**	01 - Meningkatnya penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata	01 - Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau	5	4 Persen	47 259,9	
		02 - Jumlah lokasi penerapan *sustainable tourism development*	5	10 Lokasi		
01 08.04.01 ProP Penerapan Standar Pariwisata Berkelanjutan	01 - Terlaksananya penerapan standar pariwisata berkelanjutan	01 - Jumlah destinasi dengan penerapan standar pariwisata berkelanjutan	5	10 Destinasi	29.401,6	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01 08.04.02 ProP Penerapan Industri Hijau	01 - Terlaksananya penerapan industri hijau	01 - Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	5	2 000 Perusahaan	17.858,3	Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kementerian Perindustrian
01.08.05 **KP : Reformasi Fiskal**	01 - Terlaksananya reformasi fiskal	01 - Persentase realisasi penerimaan negara	5	100 Persen	684 743,0	

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01 08.05.01 ProP Pembaruan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan yang Andal dan Terintegrasi	01 - Terlaksananya pembaruan sistem informasi administrasi perpajakan yang andal dan terintegrasi	01 - Penyelesaian modul *core tax system*	5	2 Modul	684.043,0	Kementerian Keuangan
01.08 05.02 ProP . Perumusan Kebijakan Terkait PPnBM Sektor Properti	01 - Terlaksananya kajian terkait PPnBM Sektor Properti	01 - Persentase penyelesaian rekomendasi kebijakan efektivitas dan efisiensi PPnBM di sektor properti	5	100 Persen	700,0	Kementerian Keuangan
01.08.06 **KP : Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital**	01 - Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	01 - Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif	5	3 *Database*	197 564,8	
		02 - Ketersediaan data dan informasi statistik *e-commerce*	5	1 *Database*		
		03 - Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan data pangan	5	2 *Database*		
01 08 06 01 ProP · Pengembangan Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	01 - Terlaksananya pengembangan statistik pariwisata dan ekonomi kreatif	01 - Jumlah publikasi/laporan statistik pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	5	2 *Database*	58 394,8	Badan Pusat Statistik
01 08.06.02 ProP Pengembangan Statistik *E-Commerce*	01 - Terlaksanakannya Pengembangan Statistik *e-commerce*	01 - Jumlah publikasi/laporan statistik *e-commerce* yang dikembangkan	5	1 *Database*	11.260,0	Badan Pusat Statistik
01 08.06.03 ProP Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perbaikan Statistik Pangan	01 - Terlaksanakannya Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan Statistik Pangan	01 - Jumlah publikasi/laporan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan statistik pangan	5	2 *Database*	127.910,0	Badan Pusat Statistik

Keterangan.
Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi
1) Pembangunan SDM
2) Pembangunan Infrastruktur
3) Penyederhanaan Regulasi
4) Penyederhanaan Birokrasi
5) Transformasi Ekonomi

Catatan:
1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dalam proses finalisasi detail target, alokasi, dan lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota;
3) Rincian pada masing-masing Prioritas Nasional mencakup Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta),
4) Perubahan rincian beserta pendanaannya dimungkinkan setelah mendapat persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

MATRIKS PEMBANGUNAN RKP 2021

PRIORITAS NASIONAL : MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 **PN : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia	01 - Laju pertumbuhan PDRB KTI		4,2-6,1 Persen/Tahun	74.318.287,0	
		02 - IPM KTI		61,1-77,7 Nilai Min-Maks		
		03 - Persentase penduduk miskin KTI		11,5 Persen		
	02 - Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia	01 - Laju pertumbuhan PDRB KBI		4,5-5,4 Persen/Tahun		
		02 - IPM KBI		70,1-82,5 Nilai Min-Maks		
		03 - Persentase penduduk miskin KBI		8,4 Persen		
02.01 **PP : Pembangunan Wilayah Sumatera**	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera	5	3,9 – 5,1 Persen/Tahun	10.196 826,2	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Sumatera	5	70,1-76,5 Min-Maks		
		03 - Persentase penduduk miskin wilayah Sumatera	5	9,6 Persen		
02.01.01 **KP : Pengembangan Kawasan Strategis**	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	5	>1 Nilai	1.713.614,8	
		02 - Jumlah Kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	9 Kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 Jumlah Destinasi		
		04 - Destinasi Pariwisata	5	2 Jumlah Destinasi		
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	4 Kawasan		
		06 - KI Prioritas dan KI pengembangan	5	1 Jumlah KI		
02 01.01.01 ProP . Percepatan Peningkatan Investasi KEK Arun Lhokseumawe	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Arun Lhokseumawe	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan KEK terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	5	> 1 Nilai	284 459,8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perhubungan
02 01 01.02 ProP . Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Sei Mangkei	01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Sei Mangkei	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara	5	> 1 Nilai	12.500,0	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.II.2-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 01 01 03 ProP . Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas destinasi pariwisata prioritas Danau Toba dan sekitarnya	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara	5	> 1 Nilai	848 612,2	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan
02 01.01.04 ProP · Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi	01 - Terlaksananya pembangunan destinasi pariwisata pengembangan Padang-Bukittinggi	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Barat	5	> 1 Nilai	191.972,6	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan
02.01.01.05 ProP Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas destinasi pariwisata prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5	> 1 Nilai	1 000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Koordinasi Penanaman Modal
02.01.01 06 ProP Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	> 1 Nilai	315 000,0	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BPKPB Batam)
02 01 01 07 ProP Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Galang Batang	01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Galang Batang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	> 1 Nilai	1 300,0	Badan Koordinasi Penanaman Modal
02.01.01.08 ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam Bintan	01 - Terlaksananya pembangunan destinasi pariwisata pengembangan Batam Bintan	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	> 1 Nilai	58.770,2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan
02.01.02 **KP : Pengembangan Sektor Unggulan**	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	5	1,0 – 5,0 persen	131.995,8	
02.01 02 01 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh	5	4,0 Persen	9.338,3	Kementerian Pertanian
02.01.02.02 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh	5	2,0 Persen	1.921,0	Kementerian Pertanian
02.01.02.04 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh	5	5,0 Persen	2 742,5	Kementerian Pertanian
02.01 02 05 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh	5	5,0 Persen	-	Kementerian Pertanian

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 01.02.06 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh	5	5,0 Persen	4 500,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01 02.07 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per Provinsi Aceh	5	5,0 Persen	700	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01.02.10 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara	5	2,0 Persen	3 549,7	Kementerian Pertanian
02 01.02 11 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara	5	2,0 Persen	4 563,0	Kementerian Pertanian
02.01.02 12 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara	5	4,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02 01.02.14 ProP . Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01.02.15 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara	5	1,5 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 01 02 16 ProP · Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat	5	1,0 Persen	1 917,5	Kementerian Pertanian
02.01.02.17 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat	5	1,0 Persen	1 704,0	Kementerian Pertanian
02.01.02.19 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat	5	5,0 Persen	-	Kementerian Pertanian

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 01.02.21 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat	5	2,3 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01 02.22 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 01.02.23 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau	5	5,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02 01 02 24 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau	5	1,0 Persen	2 667,0	Kementerian Pertanian
02 01 02.25 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau	5	1,0 Persen	826	Kementerian Pertanian
02.01.02.27 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01 02 31 ProP . Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi	5	1,0 Persen	3.959	Kementerian Pertanian
02.01 02 32 ProP . Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi	5	3,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02 01.02.33 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi	5	1,0 Persen	2.799	Kementerian Pertanian
02.01.02.35 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi	5	2,8 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 01 02.36 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan	5	5,0 Persen	9.854,5	Kementerian Pertanian
02 01 02.37 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan	5	5,0 Persen	8.401,0	Kementerian Pertanian

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.02 38 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan	5	5,0 Persen	13.264,7	Kementerian Pertanian
02 01 02 39 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan	5	3,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02.01.02 41 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01 02 42 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01 02 45 ProP . Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Bengkulu	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu	5	5,0 Persen	2 753,0	Kementerian Pertanian
02.01.02 46 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Bengkulu	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu	5	2,7 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01.02.48 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Bengkulu	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu	5	2,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02 01 02.49 ProP · Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung	5	1,0 Persen	10.961,2	Kementerian Pertanian
02.01 02 50 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung	5	5,0 Persen	2.603,6	Kementerian Pertanian
02 01.02.51 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Lada di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung	5	2,0 Persen	9 773,9	Kementerian Pertanian
02 01 02 52 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung	5	4,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02.01.02.53 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung	5	2,0 Persen	12.775,0	Kementerian Pertanian

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 01.02 54 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung	5	2,7 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01.02.55 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 01 02 56 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5	5,0 Persen	17 811,9	Kementerian Pertanian
02.01 02 60 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01 02.62 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Riau	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 01.02 08 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per Provinsi Aceh	5	3,0 Persen	2 610,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01.03 **KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan**	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Banda Aceh (Angka perhitungan sementara)	5	46,25 Nilai	6 416 733,3	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sabang (Angka perhitungan sementara)	5	42,56 Nilai		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Lhokseumawe (Angka perhitungan sementara)	5	38,50 Nilai		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Langsa (Angka perhitungan sementara)	5	38,56 Nilai		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Medan (Angka perhitungan sementara)	5	56,13 Nilai		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sibolga (Angka perhitungan sementara)	5	59,26 Nilai		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pematangsiantar (Angka perhitungan sementara)	5	54,34 Nilai		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Gunungsitoli (Angka perhitungan sementara)	5	36,44 Nilai		
		09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Padang (Angka perhitungan sementara)	5	46,22 Nilai		
		10 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Solok	5	40,99 Nilai		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		(Angka perhitungan sementara)				
		11 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bukittinggi (Angka perhitungan sementara)	5	47,22 Nilai		
		12 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Dumai (Angka perhitungan sementara)	5	57,47 Nilai		
		13 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pekanbaru (Angka perhitungan sementara)	5	60,76 Nilai		
		14 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Jambi (Angka perhitungan sementara)	5	42,31 Nilai		
		15 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Palembang (Angka perhitungan sementara)	5	47,47 Nilai		
		16 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Prabumulih (Angka perhitungan sementara)	5	48,01 Nilai		
		17 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Lubuklinggau (Angka perhitungan sementara)	5	54,50 Nilai		
		18 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bengkulu (Angka perhitungan sementara)	5	44,44 Nilai		
		19 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bandar Lampung (Angka perhitungan sementara)	5	44,38 Nilai		
		20 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pangkal Pinang (Angka perhitungan sementara)	5	45,28 Nilai		
		21 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tanjungpinang (Angka perhitungan sementara)	5	46,50 Nilai		
		22 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Batam (Angka perhitungan sementara)	5	50,18 Nilai		
	02 - Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	20 Kota		
	03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
	04 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	2 WM		
02 01.03.03 ProP Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Aceh	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	4 Kota	92 633,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, DAK
02.01.03.13 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sumatera Utara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	3 Kota	80.936,5	Kementerian Perhubungan, DAK
02 01.03.10 ProP Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sumatera Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	3 Kota	225 055,4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DAK

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 01.03.09 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Riau	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	299 738,8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BUMD (KPBU) DAK
02.01.03.05 ProP Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jambi	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	269.481,4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan (KPBU), DAK
02.01.03 11 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	302.948,2	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DAK
02 01 03.04 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Bengkulu	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	89 115,3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DAK
02 01 03 08 ProP . Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Lampung	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	340.857,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, DAK Kementerian Perhubungan (KPBU)
02 01 03.06 ProP Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	59,804.0	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DAK
02.01.03.07 ProP . Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	90 837,7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DAK
02 01.03 14 ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sumatera Utara	01 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	947.341,7	Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, DAK
02.01.03.12 ProP Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	3.617.983,5	Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, DAK, Kementerian Perhubungan (KPBU)
	02 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
02.01.04 **KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi**	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Peningkatan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri	5	57,85 Peningkatan Nilai Indeks Desa	1.461.305,0	
		02 - Penurunan Angka Kemiskinan Desa	5	10,1 – 10,5 Persen		

SK No 024029 C

PH/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	5	55,98 Poin IPKP		
		04 - Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Sumatera	5	56,59 Nilai IPKT		
	02 - Berkembangnya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	25 Kecamatan		
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,47 Nilai		
		03 - Jumlah daerah tertinggal	5	N/A Kabupaten		
02 01 04.29 ProP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal	5	18,3 - 18,8 Persen	3.378,2	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial
		02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal	5	65,6 - 66,1 Nilai Indeks		
02 01 04.36 ProP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Lampung	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Lampung	01 - Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal	5	14,0 - 14,5 Persen	4 232,3	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial
		02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal	5	65,2 - 65,7 Nilai Indeks		
02 01 04.15 ProP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	01 - Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal	5	20,6 - 21,1 Persen	6.859,7	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Sosial
		02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal	5	62,7 - 63,2 Nilai Indeks		
02 01 04.19 ProP . Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	01 - Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal	5	11,8 - 12,3 Persen	181.569,9	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan
		02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal	5	61,1 - 61,6 Nilai Indeks		
02.01.04 07 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	5	55,95 Poin Indeks Desa	181 531,4	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02 01.04.12 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	5	51,89 Poin Indeks Desa	147 696,6	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02 01.04 16 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	5	65,37 Poin Indeks Desa	81.121,9	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri
02 01 04 20 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	5	59,28 Poin Indeks Desa	63.307,1	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02 01 04.23 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	60,06 Poin Indeks Desa	68 207,4	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01 04 26 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	59,01 Poin Indeks Desa	151 881,1	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02 01.04.30 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Bengkulu	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	56,68 Poin Indeks Desa	49 654,6	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.01 04.33 ProP · Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	62,31 Poin Indeks Desa	103 751,0	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02 01 04 37 ProP . Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	70,26 Poin indeks Desa	27.713,8	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02 01.04.40 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	59,95 Poin Indeks Desa	26 536,6	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.01 04 08 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab Aceh Timur	5	61,95 Poin IPKP	2 809,7	Kementerian Desa PDTT
02 01 04.09 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara, Samar Kilang, dan Selaut	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara, Samar Kilang, dan Selaut	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Aceh	5	55,99 Nilai IPKT	4.848,5	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02 01.04.10 ProP · Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Aceh	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Aceh	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Aceh	5	2 Kecamatan	131 114,3	Kementerian Desa PDTT
02.01 04 11 ProP . Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Sabang	5	0,45 IPKP	1 750,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 01.04.13 ProP · Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab Toba Samosir dan Kab. Samosir	5	61,95 Poin IPKP	3 109,7	Kementerian Desa PDTT
02.01 04.14 ProP Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sumatera Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sumatera Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sumatera Utara	2	1 Kecamatan	125.599,5	Kementerian Desa PDTT
02.01 04 17 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab Agam	5	53,62 Poin IPKP	3.059,7	Kementerian Desa PDTT
02.01 04.18	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sumatera	5	64,05 Nilai IPKT	328,6	Kementerian Desa PDTT, Kementerian

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut	Transmigrasi Lunang Silaut	Barat				Agraria dan Tata Ruang/BPN
02 01 04 27 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuasin	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuasin	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Banyuasin	5	51,86 Poin IPKP	5 409,7	Kementerian Desa PDTT
02.01.04.21 ProP . Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Riau	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Riau	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Riau	2	5 Kecamatan	37.361,9	Kementerian Desa PDTT
02 01 04 22 ProP · Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Bengkalis	5	0,51 IPKP	10 039,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.01.04.24 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab Muaro Jambi	5	48,86 Poin IPKP	2 959,7	Kementerian Desa PDTT
02.01 04 25 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Jambi	5	32,00 Nilai IPKT	444,9	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02 01.04.28 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sumatera Selatan	5	57,08 Nilai IPKT	2 827,4	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.01.04.31 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Bengkulu Tengah	5	53,62 Poin IPKP	3.059,7	Kementerian Desa PDTT
02 01 04.32 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagita	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagita	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bengkulu	5	69,36 Nilai IPKT	3 904,1	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.01.04 34 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab Mesuji dan Kab Tulang Bawang	5	50,30 Poin IPKP	3.009,7	Kementerian Desa PDTT
02.01.04 35 ProP . Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Lampung	5	52,94 Nilai IPKT	332,3	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.01.04.38 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	5	50,13 Poin IPKP	2.909,7	Kementerian Desa PDTT

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.04 39 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bangka Belitung	5	68,60 Nilai IPKT	286,1	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.01 04 41 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintan dan Karimun	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintan dan Karimun	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab Bintan dan Karimun	5	71,55 Poin IPKP	3 359,7	Kementerian Desa PDTT
02.01.04 42 ProP Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kepulauan Riau	2	17 Kecamatan	9 489,5	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT
02 01.04.43 ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Ranai	5	0,45 IPKP	5.850,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan
02.01.05 **KP : Kelembagaan dan Keuangan Daerah**	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,08 Indeks	473 177,3	
		02 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	38 Persen		
		03 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	105 Daerah		
		04 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	61 Daerah		
		05 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	13286 Perizinan		
		06 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	28 Daerah		
		07 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	61 Daerah		
		08 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah	4	2 Daerah		
		09 - Persentase capaian SPM di daerah	4	75 Persen		
		10 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	2 Daerah		
	02 - Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	87.500 Hektar		
		01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	838.292,5 ha (1.676.585 bidang) Hektar		
		03 - Jumlah RPerpres RTR KSN	2	1 Materi Teknis dan Raperpres		
		04 - Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara	2	1 Materi Teknis dan Raperpres		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	10 Materi Teknis dan Raperda RTRW		
		07 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR Hasil Bimbingan Teknis	2	46 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
		08 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	15 Persetujuan Substansi		
		09 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	27 Persetujuan Substansi		
		10 - Jumlah gelar perkara kasus dengan status berkas lengkap	2	1 Kasus		
		06 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR Tematik Arahan Prioritas Nasional	2	8 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1:5.000	2	7553 Km^2		
02.01 05 04 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Aceh	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	36.202,9	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
	09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota	4	5 Regulasi		
02.01 05.05 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Aceh	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	82.284 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	107.924 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	14 747 Bidang		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 01 05.06 ProP · Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Aceh	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	18 186,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	2 Persetujuan Substansi		
02 01 05 07 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Utara	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	10 398,9	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02.01 05 08 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	83 583 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - Luas peta dasar pertanahan	5	50.000 Hektar		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	135 809 Bidang		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	73 097 Bidang		
02.01.05.09 ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Utara	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	7.700,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	7 Persetujuan Substansi		
02.01.05 10 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Barat	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	9 605,6	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 01 05.11 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	52.655 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	151.012 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	1.390 Bidang		
02.01.05.12 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Barat	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	3 Persetujuan Substansi		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	4 Persetujuan Substansi		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.05.13 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Riau	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	8 098,2	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02.01 05.14 ProP . Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Riau	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	314 267 Bidang	234,9	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - Luas peta dasar pertanahan	5	5.000 Hektar		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	188.159 Bidang		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	716 Bidang		
02.01 05 15 ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Riau	01 - Tersusunnya Rancangan Perpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara	01 - Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara	2	1 Materi Teknis dan Raperpres	5 000,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	2 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
02.01.05.16 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kepulauan Riau	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	8.094,3	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 01 05.17 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	26.289 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - Jumlah sertipikat Hak atas Tanah	5	2.500 Hektar		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	33 367 Bidang		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	2.805 Bidang		
02 01 05 18 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	3.400,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Bpn, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	2 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	4 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
02 01 05.19 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jambi	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	8.066,3	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	di daerah					
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 01.05 20 ProP · Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jambi	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	311 137 Bidang	489,3	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - Luas peta dasar pertanahan	5	25 000 Hektar		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	228 945 Bidang		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	4.400 Bidang		
02.01 05 21 ProP · Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jambi	01 - Tersusunnya Rancangan Perpres RTR KSN	01 - Jumlah RPerpres RTR KSN	2	1 Materi Teknis dan Raperpres	1.800,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	4 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
	05 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	16 Persetujuan Substansi		
02.01 05 22 ProP . Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Selatan	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	4.087,5	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya	4	359 Daerah		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	daerah	meningkat				
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 01 05 23 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	568 701 Bidang	289.513,3	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - Luas peta dasar pertanahan	5	5.000 Hektar		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	317 102 Bidang		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	15.235 Bidang		
02 01 05 24 ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
02.01 05 25 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Lampung	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	12.587,8	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
–A.II.20–

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01 05 26 ProP · Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Lampung	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	165.901 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	63.703 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	16 500 Bidang		
02 01.05.27 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Lampung	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	2 600,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	4 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
	05 - Terlaksananya gelar perkara kasus dengan berkas lengkap	01 - Jumlah gelar perkara kasus dengan status berkas lengkap	2	1 Kasus		
02 01 05 28 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Bengkulu	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	2.842,6	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02.01 05 29 ProP . Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Bengkulu	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	26 870 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	17.143 Bidang		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	6.603 Bidang		
02.01.05.30 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Bengkulu	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
	04 - Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
02 01 05 31 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	2 819,7	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 01.05.32 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	44.898 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	53.070 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	1.215 Bidang		
02.01 05 33 ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	1.450,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	4 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	4 Persetujuan Substansi		
02.01 05 34 ProP : Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Utara	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1 5 000	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1 5.000	2	2 880 Km²	40 000,0	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02.01.05.35 ProP Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Barat	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1:5.000	2	516 Km²	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02 01.05.36 ProP : Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5 000	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1 5 000	2	2 699 Km²	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02.01.05.37 ProP Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Lampung	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1:5.000	2	1.458 Km²	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02.02 **PP : Pengembangan Wilayah Jawa-Bali**	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali	5	4,8 – 5,5 Persen/Tahun	16 624 382,7	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali	5	72,7-82,5 min-Maks		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali	5	7,9 Persen		
02.02.01 **KP : Pengembangan Kawasan Strategis**	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	5	>1 Nilai	3 172 249,4	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	9 Kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 Jumlah Destinasi		
		04 - Destinasi Pariwisata	5	3 Jumlah Destinasi		
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	2 Kawasan		
		06 - KI Prioritas dan KI pengembangan	5	2 Jumlah KI		
02.02.01.01 ProP Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	01 - Terlaksananya Pembangunan Destiansi Pariwiata Pengembangan Bandung-Halimun-Cileteuh	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat	5	>1 Nilai	715.334,4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
di Provinsi Jawa Barat						Perumahan Rakyat
02.02.01.03 ProP Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	5	>1 Nilai	384.692,6	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU)
02.02.01 05 ProP Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	01 - Perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	5	>1 Nilai	353.836,2	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02 02 01 06 ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	5	>1 Nilai	39 838,5	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU)
02.02.01 07 ProP Percepatan Peningkatan Investasi KEK Tanjung Lesung	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Tanjung Lesung	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten	5	>1 Nilai	408.779,5	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
02.02.01 08 ProP Peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali	01 - Terlaksananya peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Bali	5	>1 Nilai	322.895,4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.02 01 04 ProP : Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi DI Yogyakarta	5	>1 Nilai	482 279,5	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.02 01 02 ProP Percepatan Peningkatan Investasi KEK Kendal	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Kendal	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	5	>1 Nilai	230 843,3	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Koordinasi Penanaman Modal
02.02.01.09 ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat	5	>1 Nilai	233 750,0	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
di Provinsi Banten						Perumahan Rakyat (KPBU)
02.02.02 **KP : Pengembangan Sektor Unggulan**	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	5	1,0 – 5,0 Persen	146.267,2	
02.02.02.01 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat	5	4,0 Persen	1.853,1	Kementerian Pertanian
02.02.02.02 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat	5	4,0 Persen	17.099,0	Kementerian Pertanian
02.02.02.03 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat	5	1,0 Persen	869,0	Kementerian Pertanian
02.02.02.04 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat	5	5,0 Persen	10.818,9	Kementerian Pertanian
02 02 02 07 ProP Peningkatan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah	5	1,0 Persen	25.784,9	Kementerian Pertanian
02 02 02 08 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah	5	4,0 Persen	11.633,0	Kementerian Pertanian
02.02.02 10 ProP . Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DI Yogayakarta	5	5,0 Persen	1.643,3	Kementerian Pertanian
02.02.02.11 ProP : Peningkatan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur	5	1,0 Persen	59 384,0	Kementerian Pertanian
02 02 02 12 ProP · Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur	5	5,0 Persen	6.064,8	Kementerian Pertanian
02.02.02.14 ProP · Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur	5	5,0 Persen	100,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.02.02.17 ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali	5	4,0 Persen	8.753,7	Kementerian Pertanian

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 02 02.18 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali	5	1,0 Persen	391,5	Kementerian Pertanian
02.02.02.19 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali	5	1,0 Persen	1 872,0	Kementerian Pertanian
02 02 02 21 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Provinsi di DKI Jakarta	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DKI Jakarta	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 02 02.22 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.02 02 23 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat	5	4,1 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.02.02 24 ProP . Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.02.02.25 ProP · Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 02 02.26 ProP · Pengembangan komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi di DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DI Yogayakarta	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 02.02.27 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.02.02 28 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur	5	4,4 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.02 02 29 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Banten	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.02.30 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali	5	3,1 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.02.03 **KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan**	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Jakarta (Angka perhitungan sementara)	5	59 Nilai	9 664 976,5	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Bandung (Angka perhitungan sementara	5	4 071 Nilai		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sukabumi (Angka perhitungan sementara)	5	4 208 Nilai		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Cirebon (Angka perhitungan sementara)	5	4.315 Nilai		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Semarang (Angka perhitungan sementara)	5	4 306 Nilai		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Magelang (Angka perhitungan sementara)	5	4.793 Nilai		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Surakarta (Angka perhitungan sementara)	5	489 Nilai		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pekalongan (Angka perhitungan sementara)	5	4 441 Nilai		
		09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tegal (Angka perhitungan sementara)	4	4.608 Nilai		
		10 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Yogyakarta (Angka perhitungan sementara)	5	7 508 Nilai		
		11 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Surabaya (Angka perhitungan sementara)	5	4 234 Nilai		
		12 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kediri (Angka perhitungan sementara)	5	5.019 Nilai		
		13 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Malang (Angka perhitungan sementara)	5	4 468 Nilai		
		14 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Probolinggo (Angka perhitungan sementara)	5	4 556 Nilai		
		15 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pasuruan (Angka perhitungan sementara)	5	4 365 Nilai		
		16 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Batu (Angka perhitungan sementara)	5	4.663 Nilai		
		17 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Maja (Angka perhitungan sementara)	5	299 Nilai		
		18 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Cilegon (Angka perhitungan sementara)	4	6 194 Nilai		
		19 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Serang (Angka perhitungan sementara)	5	5.415 Nilai		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		20 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Denpasar (Angka perhitungan sementara)	5	6.656 Nilai		
	02 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	4 WM		
	03 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	14 Kota		
	04 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 Kota		
	05 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		
02.02 03.05 ProP Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi DKI Jakarta	01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	1.786 724,1	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02 02 03 06 ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi Jawa Barat	01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	1 502 533,2	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Provinsi Jawa Barat (KPBU), Pemda (DAK), Kementerian Perhubungan (KPBU)
02.02.03.07 ProP · Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Barat	01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	1 063 756,1	Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemda (DAK)
02 02 03.08 ProP . Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jawa Barat	01 - Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	497.804,1	Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemda (DAK)
02.02.03.09 ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Tengah	01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	1.674.929,1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BUMD (KPBU), Pemda (DAK)
02 02 03.10 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jawa Tengah	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	4 Kota	358 344,3	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU), Pemda (DAK)
02.02.03.11 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PK	5	1 Kota	499.829,2	Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemda (DAK)
02 02.03 12 ProP Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Timur	01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	914 983,0	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
						Perumahan Rakyat, Provinsi Jawa Timur (KPBU), Pemda (DAK)
02 02 03 13 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jawa Timur	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	5 Kota	132 272,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU), Provinsi Jawa Timur (KPBU), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemda (DAK)
02 02.03 15 ProP Pembangunan Kota Baru di Provinsi Banten	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 Kota	415 038,8	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU), Pemda (DAK)
02 02.03.16 ProP Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Banten	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	235 700,6	Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemda (DAK)
02.02 03 17 ProP Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi Banten	01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	96 692,2	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02 02 03.18 ProP . Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Bali	01 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM	486 369,8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemda (DAK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.02.04 **KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi**	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Peningkatan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri	5	68,68 Peningkatan Nilai Indeks Desa	931 732,1	
		02 - Penurunan angka kemiskinan desa	5	11,45 - 11,85 Persen		
		03 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	5	61,60 Poin IPKP		
	02 - Terpulihkannya daerah terdampak bencana	01 - Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	5	75 Persen		
02 02 04.04 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	69,46 Poin Indeks Desa	149 673,3	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.02 04 05 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	68,33 Poin Indeks Desa	190 079,8	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.04.06 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	77,03 Poin Indeks Desa	34.613,0	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02 02 04.07 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	67,27 Poin Indeks Desa	204 931,7	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.02 04.08 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	63,29 Poin Indeks Desa	46 524,6	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.02.04 09 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	74,08 Poin Indeks Desa	29.159,3	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02 02.04.10 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Sukabumi	5	47,18 Poin IPKP	3 059,7	Kemendesa PDTT
02.02 04 11 ProP . Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Magelang dan Kendal	5	55,97 Poin IPKP	3.359,7	Kemendesa PDTT
02 02 04.12 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Pamekasan dan Banyuwangi	5	72,26 Poin IPKP	5 459,7	Kemendesa PDTT
02.02.04.13 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Pandeglang	5	64,41 Poin IPKP	2.809,7	Kemendesa PDTT
02.02.04.14 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Buleleng dan Klungkung	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Buleleng dan Klungkung	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Buleleng dan Klungkung	5	68,20 Poin IPKP	3.359,7	Kemendesa PDTT
02 02 04.15 ProP Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kawasan Pesisir Selat Sunda	01 - Terpulihkannya pelayanan publik	01 - Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	5	75 Persen	258 701,9	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemendesa PDTT
02.02.05 **KP : Kelembagaan dan Keuangan Daerah**	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4	3,36 Nilai	2.709 157,5	
		02 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	62 Persen		
		03 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	90 Daerah		
		04 - Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas	4	47 Daerah		

PN/PP/KP/PreP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	8586 Izin		
		06 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	16 Daerah		
		07 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	47 Daerah		
		08 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah	4	2 Daerah		
		09 - Persentase capaian SPM di daerah	4	79 Persen		
		10 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	4 Daerah		
	03 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	3	3059 Desa		
		02 - Jumlah luasan data geospasial skala 1:5.000 yang diakusisi	2	15000 Km^2		
		04 - Jumlah layanan data center jaringan informasi geospasial nasional beroperasi	2	1 Layanan		
	02 - Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	07 - Jumlah RPerpres RTR KSN	2	1 Materi Teknis dan Raperpres		
		08 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	9 Materi Teknis dan Raperda RTRW		
		13 - Jumlah gelar perkara kasus dengan status berkas lengkap di tingkat nasional	2	2 Kasus		
		01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	2 333.978 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	1.559.750 ha		
		03 - Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital	5	82 Satker		
		09 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	28 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
		11 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	13 Persetujuan Substansi		
		12 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	35 Persetujuan Substansi		
		04 - Panjang kawasan hutan yang dilakukan perapatan batas	5	2.422 Km		
		05 - Terbentuk dan operasional lembaga bank tanah	5	1 Lembaga		
		06 - Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat	5	33 Provinsi		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		10 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR Tematik Arahan Prioritas Nasional	2	2 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
02 02 05 05 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi DKI Jakarta	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen	42.476,2	Kementerian Dalam Negeri
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang		
	09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota	4	5 Regulasi		
02.02.05.06 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	51.530 bidang	351.632,4	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	02 - Luas peta dasar pertanahan	5	1 559.750 ha		
	03 - Terwujudnya percepatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan pertanahan yang modern	01 - Jumlah Layanan Data dan Informasi	5	82 satker		
	04 - Terwujudnya pemetaan dan perapatan batas kawasan hutan dan non hutan	01 - Panjang Batas Kawasan Hutan dengan APL dalam skala kadastral	5	2.422 km		
	05 - Terwujudnya operasioanal kelembagaan Bank Tanah	01 - Jumlah Lembaga Bank Tanah	5	1 lembaga		
	06 - Terwujudnya sosialisasi dan penatausahaan tanah adat/ulayat	01 - Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat	5	33 satker		
	07 - Terwujudnya percepatan pemenuhan proporsi SDM ideal (PNS Juru Ukur Bidang Pertanahan) dalam mendukung pencapaian target stelsel posirif	01 - Jumlah PNS Juru Ukur Pertanahan	5	1 500 orang		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	08 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	280 bidang		
	09 - Tersusunnya data lokasi indikatif pengadaan tanah	01 - Jumlah Data lokasi indikatif pengadaan tanah	5	495 satker		
	10 - Tersusunnya basis data pengadaan tanah	01 - Jumlah basis data pengadaan tanah	5	66 satker		
	11 - Terwujudnya percepatan peta Zona Nilai Tanah	01 - Luas Peta Zona Nilai Tanah	5	3 951 110 ha		
	12 - Terwujudnya percepatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang	01 - Luas Peta Tematik	5	2.115 396 ha		
02.02.05.07 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Barat	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3 464,3	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02.02.05 08 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Barat	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	1.527.096 Bidang	1 459 788,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	629.981 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	42 069 Bidang		
02 02.05.09 ProP · Penyelengaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Barat	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	12.342,4	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	7 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	5 Persetujuan Substansi		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	04 - Terlaksananya gelar perkara kasus dengan berkas lengkap	01 - Jumlah gelar perkara kasus dengan status berkas lengkap	2	1 Kasus		
02 02.05.10 ProP Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Barat	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	3	767 Desa	812 180,5	Badan Informasi Geospasial (BIG)
	02 - Tersusunnya Data Geospasial Dasar Skala 1:5 000	01 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1 5 000 yang diakuisisi	2	15000 Km^2		
	04 - Terlaksananya layanan data center	01 - Jumlah layanan data center jaringan informasi geospasial nasional beroperasi	2	1 Layanan		
02 02 05.11 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Tengah	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	4.788,7	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 02 05.12 ProP . Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	1 516.966 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	706.084 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	145.235 Bidang		
02.02.05.13 ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Tengah	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	5.250,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	6 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	5 Persetujuan Substansi		

PH/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 02 05 14 ProP : Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Tengah	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	3	771 Desa	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02 02.05 15 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	2 752,0	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
	09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota	4	5 Regulasi		
02 02 05.16 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi D.I. Yogyakarta	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	62.038 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	20.371 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	26 510 Bidang		
02.02 05 17 ProP : Penyelengaraan Penataan Ruang di Provinsi D.I. Yogyakarta	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	900,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	2 Persetujuan Substansi		
	04 - Terlaksananya gelar perkara kasus dengan berkas lengkap	01 - Jumlah gelar perkara kasus dengan status berkas lengkap	2	1 Kasus		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 02.05.18 ProP . Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Timur	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3 034,2	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 02 05 19 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Timur	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	1.333.558 bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	512 197 bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah Bidang Tanah K4	5	46 245 bidang		
02 02.05.20 ProP : Penyelengaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Timur	01 - Tersusunnya Rancangan Perpres RTR KSN	01 - Jumlah RPerpres RTR KSN di Provinsi Jawa Timur	2	1 Materi Teknis dan Raperpres	3.200,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	05 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	2	7 Persetujuan Substansi		
	06 - Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	15 Persetujuan Substansi		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02 05 21 ProP · Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Timur	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	3	778 Desa	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02.02.05.22 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Banten	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	2.589,0	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 02 05.23 ProP . Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Banten	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	167 010 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	100 974 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	10.450 Bidang		
02.02.05.24 ProP : Penyelengaraan Penataan Ruang di Provinsi Banten	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	3 Persetujuan Substansi		
02.02 05.25 ProP . Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Banten	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	3	743 Desa	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02 02 05 26 ProP · Peningkatan kapasitas pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Bali	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3.159,8	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah	4	100 Persen		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik				
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02.02.05.27 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Bali	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	9 758 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	2.687 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	4.425 Bidang		
	04 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW		
	05 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	06 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	07 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	10 Persetujuan Substansi		
02 02 05 28 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Bali	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	1.600,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	10 Persetujuan Substansi		
02.03 **PP : Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara**	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara	5	3,5 – 5,2 Persen/Tahun	32.401.036,9	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara	5	66,3-69,5 Min-Maks		
		03 - Persentase penduduk miskin wilayah Nusa Tenggara	5	17,8 Persen		
02.03.01 **KP : Pengembangan Kawasan Strategis**	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	5	>1 Nilai	1 394 982,3	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	3 Kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 Jumlah Destinasi		
		04 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 Kawasan		
02.03.01 01 ProP Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/KEK Mandalika	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/ KEK Mandalika	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	5	>1 Nilai	584.991,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Koordinasi Penanaman Modal
02.03.01.02 ProP : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	5	>1 Nilai	809.991,3	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan (KPBU)
02.03.02 **KP : Pengembangan Sektor Unggulan**	01 - Berkembangnya Sektor Unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	5	1,0 – 5,0 persen	45.139,2	
02.03.02.01 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB	5	1,0 Persen	1 752,0	Kementerian Pertanian
02 03 02.02 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB	5	1,0 Persen	4.836,8	Kementerian Pertanian

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 03 02.03 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB	5	1,0 Persen	12 798,5	Kementerian Pertanian
02.03.02 08 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB	5	5,0 Persen	7 156,5	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 03 02.09 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT	5	1,0 Persen	13.745,9	Kementerian Pertanian
02 03 02 10 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT	5	1,0 Persen	2.214,8	Kementerian Pertanian
02.03 02 11 ProP . Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT	5	5,0 Persen	789,4	Kementerian Pertanian
02 03.02.13 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT	5	5,0 Persen	1.845,3	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 03.02.14 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.03 02.15 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 03 02.16 ProP . Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.03.03 **KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan**	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Mataram (Angka perhitungan sementara)	5	4.434 Nilai	332.410,5	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kupang (Angka perhitungan sementara)	5	4.391 Nilai		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.03 03 02 ProP · Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	306 798,6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemda (DAK)
02 03 03 03 ProP Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	25 611,9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemda (DAK)
02.03.04 **KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi**	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Perkembangan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri	5	56, 42 Peningkatan Nilai Indeks Desa	30.612.536,4	
		02 - Penurunan angka kemiskinan desa	5	19,15 – 19,55 Persen		
		03 - Rata-rata nilai indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	5	51,18 Poin IPKP		
		04 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Nusa Tenggara	5	47,67 IPKT		
	02 - Berkembangnya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Kepulauan Nusa Tenggara	5	4 Kecamatan		
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN di Kepulauan Nusa Tenggara	5	0,45 IPKP		
		03 - Jumlah daerah tertinggal	5	N/A Kabupaten		
	03 - Terpulihkannya daerah terdampak bencana	01 - Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	5	75 Persen		
02.03 04 02 ProP Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur	2	4 Kecamatan	77.009,2	Kemendesa PDTT
02.03.04 11 ProP . Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	5	25,7 - 26,2 Persen	7.834,6	Kemendesa PDTT, Kementerian Sosial
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal	5	66,7 - 67,2 Nilai Indeks		
02 03.04.12 ProP : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	5	25,1 - 25,6 Persen	29 843 378,5	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal	5	63,2 - 63,7 Nilai Indeks		
02.03 04 14 ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua	5	0,41 IPKP	232.785,0	Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 03 04.15 ProP . Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kefamenanu	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kefamenanu	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu	5	0,49 IPKP	262.974,4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.03 04 16 ProP · Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	51,74 Poin Indeks Desa	104 922,1	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.03 04 17 ProP · Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	68,45 Poin Indeks Desa	47.216,4	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.03.04.18 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	01 - 01-Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	5	53,08 Poin IPKP	11 252,9	Kemendesa PDTT
02 03 04.19 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	5	49,27 Poin IPKP	5 359,7	Kemendesa PDTT
02.03.04.20 ProP Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Pulau Lombok dan Sekitarnya	01 - Terpulihkannya pelayanan publik	01 - Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	5	75 Persen	4 111,2	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kemendesa PDTT
02.03.04 21 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	5	56,13 Nilai IPKT	7.678,6	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02 03.04.22 ProP · Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Ponu, dan Melolo	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Ponu, dan Melolo	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	5	42,03 Nilai IPKT	8 013,8	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.03.05 **KP : Kelembagaan dan Keuangan Daerah**	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3.07 Indeks	15.968,5	
		02 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	25% Persen		
		03 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	22 Daerah		
		04 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	13 Daerah		
		05 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1206 Izin		
		06 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	8 Daerah		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		07 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	13 Daerah		
		08 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah	4	2 Daerah		
		09 - Persentase capaian SPM di daerah	4	70 Persen		
		10 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	2 Daerah		
	02 - Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggaranya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	79 005 ha (158 010 Bidang) Hektar		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	40.000 Hektar		
		03 - Persentase jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital	5	25 Persen		
		04 - Jumlah Persetujuan Substansi Teknis Ranperda RTR Daerah	2	4 Persetujuan Substansi		
		05 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW		
		06 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR Hasil Bimbingan Teknis	2	6 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
		07 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	4 Persetujuan Substansi		
		08 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	4 Persetujuan Substansi		
		09 - Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RDTR Hasil Bantuan Teknis	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
		10 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR Tematik Arahan Prioritas Nasional	2	3 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1 5 000	2	2281 Km^2		
02 03.05.11 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3 310,3	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 03 05 12 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	2 862,6	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 03.05 13 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak atas Tanah	5	102 359 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	67.645 Bidang		
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - luas peta dasar pertanahan	5	40.000 Hektar		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	11.550 Bidang		
02 03.05.14 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak atas Tanah	5	55.651 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	52.072 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	6.920 Bidang		
02.03.05.15 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi teknis dan Raperda RTRW	4.012,8	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	3 Materi teknis dan Raperda RDTR		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	2 Persetujuan Substansi		
	04 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
02 03 05 16 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	5.782,8	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	2 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	3 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	2 Persetujuan Substansi		
	05 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	4 Persetujuan Substansi		
	06 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
02 03 05.17 ProP Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1:5.000	2	2 281 Km²	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02.04 **PP : Pembangunan Wilayah Kalimantan**	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan	5	3,6 – 5,7 Persen/Tahun	5 451 089,6	
		02 - IPM Provinsi wilayah Kalimantan	5	69,0-77,7 Min-Maks		
		03 - Persentase penduduk miskin wilayah Kalimantan	5	5,6 Persen		
02.04.01 **KP : Pengembangan Kawasan Strategis**	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	5	>1 Nilai	609 806,2	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	2 Kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata	5	2 Jumlah Destinasi		
		04 - KI Prioritas dan KI Pengembangan	5	2 Jumlah KI		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.01.01 ProP Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Ketapang	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Ketapang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat	5	>1 Nilai	308 471,6	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02 04 01.02 ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat	5	>1 Nilai	125.231,1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.04 01 03 ProP Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Surya Borneo	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Surya Borneo	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Tengah	5	>1 Nilai	47 972,7	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02 04.01.04 ProP Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi	5	>1 Nilai	128.130,8	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.04.02 **KP : Pengembangan Sektor Unggulan**	01 - Berkembangnya Sektor Unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	5	1,0 – 5,0 persen	29.114,3	
02 04 02 01 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat	5	1,0 Persen	2 182,4	Kementerian Pertanian
02 04.02.02 ProP · Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat	5	4,0 Persen	8 764,2	Kementerian Pertanian
02.04 02 03 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat	5	5,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02 04 02.07 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah	5	5,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02.04.02.08 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah	5	1,0 Persen	2.952,4	Kementerian Pertanian
02.04.02.14 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan	5	5,0 Persen	-	Kementerian Pertanian

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.02.15 ProP · Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan	5	5,0 Persen	4.363,0	Kementerian Pertanian
02.04 02 17 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur	5	5,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02 04 02 19 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur	5	2,0 Persen	7 455,5	Kementerian Pertanian
02.04.02.22 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara	5	5,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02.04.02.25 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara	5	1,0 Persen	3.396,8	Kementerian Pertanian
02.04 02.26 ProP . Pengembangan komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat	5	1,7 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 04 02 27 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 04.02.28 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.04 02.29 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 04 02 30 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 04.02.31 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.04 02.32 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 04 02.33 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara	5	1,8 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.04 02.34 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.04.03 **KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan**	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pontianak (Angka perhitungan sementara)	5	4.512 Nilai	2 296.256,5	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Singkawang (Angka perhitungan sementara)	5	3.954 Nilai		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palangkaraya (Angka perhitungan sementara)	5	4.665 Nilai		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Banjarmasin (Angka perhitungan sementara)	5	3 812 Nilai		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Ibu Kota Negara (Angka perhitungan sementara)	5	3 854 Nilai		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Balikpapan (Angka perhitungan sementara)	5	5 088 Nilai		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Samarinda (Angka perhitungan sementara)	5	4.736 Nilai		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Tanjung Selor (Angka perhitungan sementara)	5	3 702 Nilai		
		09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tarakan (Angka perhitungan sementara)	5	4.760 Nilai		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	6 Kota		
	03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
	04 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		
	05 - Terbangunnya Ibu Kota Negara	01 - Luas area pembangunan Ibu Kota Negara	5	5.600 Hektar		
	06 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 Kota		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 04 03.02 ProP . Pembangunan Kota Baru di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 Kota	78 631,1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemda (DAK)
02.04.03.03 ProP · Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	275 423,0	Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemda (DAK), Kementerian Perhubungan
	02 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
02 04 03 04 ProP Pembangunan Ibu Kota Negara	01 - Terbangunnya Ibu Kota Negara	01 - Luas area pembangunan Ibu Kota Negara	5	5.600 Hektar	1 181.753,2	Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
02.04.03.05 ProP Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	87 625,2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemda (DAK)
02 04 03 06 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang,kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	314 123,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemda (DAK)
02 04 03 07 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	276 496,7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan
02.04.03 08 ProP Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	82 204,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.04.04 **KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi**	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Peningkatan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri	5	55,76 Poin Indeks Desa	1 799.703,3	
		02 - Penurunan angka kemiskinan desa	5	6,3 - 6,8 Persen		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	5	48,46 Poin IPKP		
		04 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Kalimantan	5	52,59 IPKT		
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Pulau Kalimantan	5	7 Kecamatan		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN di Pulau Kalimantan	5	0,42 IPKT		
02.04.04.09 ProP Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Barat	2	2 Kecamatan	41.485,6	Kemendesa PDTT
02 04 04 24 ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Utara	2	5 Kecamatan	11.529,7	Kemendesa PDTT
02 04 04.10 ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk	5	0,45 Poin IPKP	458 119,4	Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan
02 04 04 11 ProP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jagoi Babang	5	0,34 IPKP	185.088,8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.04.04.12 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	53,84 Poin Indeks Desa	56 080,2	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.04.04 07 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	5	40,79 Poin IPKP	7 709,7	Kemendesa PDTT
02 04 04.08 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Barat	5	57,86 IPKT	157,9	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.04 04 06 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	52,66 Poin Indeks Desa	57 802,7	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.04.04.13 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kotawaringin Barat	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kotawaringin Barat	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Kotawaringin Barat	5	54,68 Poin IPKP	2 809,7	Kemendesa PDTT
02.04.04.14 ProP . Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, serta Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup dan Pulang Pisau yang Mendukung Pengembangan Food Estate sesuai Direktif Presiden dalam Rangka Penguatan Ketahanan Pangan	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, serta Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup dan Pulang Pisau yang mendukung pengembangan food estate sesuai direktif presiden dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Tengah	5	24,60 Nilai IPKT	130 494,6	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Nasional						
02 04 04 15 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	59,25 Poin Indeks Desa	59.908,6	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.04 04 16 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab Barito Kuala dan Banjar	5	57,44 Poin IPKP	3 009,7	Kemendesa PDTT
02 04 04 17 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Kalimantan Selatan	5	64,57 Nilai IPKT	2.501,1	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02 04 04 18 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	58,66 Poin Indeks Desa	35 991,7	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.04.04.19 ProP · Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab Berau dan Kutai Timur	5	50,63 Poin IPKP	3 009,7	Kemendesa PDTT
02.04.04.20 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Maloy Kaliorang	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Maloy Kaliorang	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Timur	5	53,96 Nilai IPKT	10 085,5	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.04 04 21 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	48,86 Poin Indeks Desa	27.846,8	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02 04.04.22 ProP · Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan dan Nunukan	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan dan Nunukan	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab Bulungan dan Nunukan	5	47,73 Poin IPKP	3.359,7	Kemendesa PDTT
02.04.04 23 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Utara	5	51,30 Nilai IPKT	6.840,9	Kemendesa PDTT
02.04.04.25 ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan	5	0,38 IPKP	39 124,5	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.04.04.26 ProP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Midang	5	0,38 IPKP	93.142,1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.04.04.27 ProP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tou Lumbis	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tou Lumbis	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tou Lumbis	5	0,38 IPKP	205 787,9	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.04.28 ProP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Nawang	5	0,60 IPKP	357 816,8	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.04.05 **KP : Kelembagaan dan Keuangan Daerah**	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3 13 Indeks	716 209,3	
		02 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	0,248 Persen		
		03 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	42 Daerah		
		04 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	27 Daerah		
		05 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	3189,2 Izin		
		06 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	9 Daerah		
		07 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	27 Daerah		
		08 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah	4	4 Daerah		
		09 - Persentase capaian SPM di daerah	4	73 Persen		
		10 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	1 Daerah		
	02 - Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	06 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	6 Persetujuan Substansi		
		01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	214.819,5 Hektar		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	180 000 Hektar		
		03 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	6 MateriTeknis dan Raperda RTRW		
		05 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	4 Persetujuan Substansi		
		04 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR Hasil Bimbingan Teknis	2	25 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
		07 - Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RDTR Hasil Bantuan Teknis	2	3 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
		08 - Jumlah gelar perkara kasus dengan status berkas lengkap	2	1 Kasus		
	03 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1.5.000	2	2757 Km²		
		02 - Jumlah luasan data geospasial skala 1 5.000 yang diakusisi	2	400 000 Km²		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 04 05.04 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	2.866,5	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 04 05 05 ProP . Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	176.937 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - Luas peta dasar pertanahan	5	100 000 Hektar		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	469 538 Bidang		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	14.740 Bidang		
02.04.05 06 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	7 311,6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	3 Persetujuan Substansi		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
02.04.05.07 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3 202,4	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	digital (e-gov) dengan indikator					
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - umlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 04 05 08 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	101 647 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - Luas peta dasar pertanahan	5	5 000 Hektar		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	232 676 Bidang		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	8 800 Bidang		
02 04 05.09 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RTRW	3.500,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	2 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
02.04.05.10 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3 012,7	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02.04.05.11 ProP · Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	60.968 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	322.636 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	12 700 Bidang		
02.04.05.12 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	3 361,6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	3 Persetujuan Substansi		
	04 - Terlaksananya gelar perkara kasus dengan berkas lengkap	01 - Jumlah gelar perkara kasus dengan status berkas lengkap	2	1 Kasus		
02 04 05.13 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Timur	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3 008,0	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02.04.05.14 ProP . Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	90.087 Bidang	686 090,2	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - Luas peta dasar pertanahan	5	75 000 Hektar		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	157 108 Bidang		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	784 Bidang		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	tanah K4					
02 04 05 15 ProP . Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	1.161,6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
02.04 05 16 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Utara	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	2 694,7	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 04.05.18 ProP · Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	2 Persetujuan Substansi		
02.04.05.19 ProP Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Tersusunnya Data Geospasial Dasar Skala 1 5 000	01 - Jumlah luasan data geospasial skala 1:5 000 yang diakusisi	2	80.000 Km^2	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.05.20 ProP Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Tersusunnya Data Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan data geospasial skala 1:5 000 yang diakusisi	2	80 000 Km²	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
	02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1 5 000	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1 5 000	2	957 Km²		
02.04.05.21 ProP · Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Tersusunnya Data Geospasial Dasar Skala 1 5 000	01 - Jumlah luasan data geospasial skala 1 5 000 yang diakusisi	2	80 000 Km²	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02 04 05 22 ProP · Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Tersusunnya Data Geospasial Dasar Skala 1.5 000	01 - Jumlah luasan data geospasial skala 1:5.000 yang diakusisi	2	80 000 Km²	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
	02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1 5 000	2	1 800 Km²		
02 04.05.23 ProP Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Tersusunnya Data Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan data geospasial skala 1 5 000 yang diakusisi	2	80.000 Km²	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02.05 **PP : Pembangunan Wilayah Sulawesi**	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi	5	5,4 – 7,0 Persen/Tahun	4 555.316,6	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi	5	67,0-73,9 Min-Maks		
		03 - Persentase penduduk miskin wilayah Sulawesi	5	9,8 Persen		
02.05.01 **KP : Pengembangan Kawasan Strategis**	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	5	>1 Nilai	911 618,9	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	7 Kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 Jumlah Destinasi		
		04 - Destinasi Pariwisata	5	1 Jumlah Destinasi		
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	3 Kawasan		
		06 - KI Prioritas dan KI Pengembangan	5	1 Jumlah KI		
02.05.01.01 ProP : Percepatan Peningkatan Investasi KEK Bitung	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Bitung	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara	5	>1 Nilai	102 169,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU)
02 05.01 02 ProP Percepatan Operasionalisasi KEK Likupang/Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang	01 - Terlaksananya percepatan operasionalisasi KEK Likupang/Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara	5	>1 Nilai	207 169,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
						Kementerian Perhubungan
02 05 01 03 ProP . Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Palu	01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Palu	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tengah	5	>1 Nilai	76.611,3	Kementerian Perhubungan, Badan Koordinasi Penanaman Modal
02 05 01 04 ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwiata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Selatan	5	>1 Nilai	444.669,0	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan (KPBU)
02 05.01 05 ProP . Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi Sulawesi Tenggara	5	>1 Nilai	81 000,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
02.05.02 **KP : Pengembangan Sektor Unggulan**	01 - Berkembangnya Sektor Unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	5	1,0 – 5,0 Persen	130 378,6	
02 05 02 01 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara	5	1,0 Persen	2 451,6	Kementerian Pertanian
02.05.02 02 ProP · Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara	5	5,0 Persen	3.192,5	Kementerian Pertanian
02 05 02 03 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara	5	4,0 Persen	4.791,0	Kementerian Pertanian
02.05.02 04 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara	5	2,0 Persen	4 148,0	Kementerian Pertanian
02.05.02 05 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah	5	1,0 Persen	7.072,0	Kementerian Pertanian
02 05 02.06 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah	5	1,0 Persen	1.044,5	Kementerian Pertanian
02 05 02.07 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah	5	1,0 Persen	6 060,0	Kementerian Pertanian

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 05.02.08 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah	5	1,0 Persen	2 393,6	Kementerian Pertanian
02.05 02.09 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan	5	1,0 Persen	27.257,6	Kementerian Pertanian
02 05 02 10 ProP · Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan	5	1,0 Persen	11 644,6	Kementerian Pertanian
02.05.02 11 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan	5	5,0 Persen	6.255,1	Kementerian Pertanian
02.05.02 12 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan	5	1,0 Persen	1 166,0	Kementerian Pertanian
02 05 02 14 ProP · Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara	5	1,0 Persen	37.248,3	Kementerian Pertanian
02 05.02.15 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara	5	5,0 Persen	8.541,2	Kementerian Pertanian
02.05.02 16 ProP : Pengembangan Komoditas Kopi di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara	5	1,0 Persen	4 873,6	Kementerian Pertanian
02 05.02.17 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara	5	2,0 Persen	2 089,0	Kementerian Pertanian
02.05.02 25 ProP Pengembangan komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat	5	5,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02.05.02.26 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 05.02.27 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 05.02.28 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah	5	2,7 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 05.02.29 ProP · Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 05 02 30 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 05 02.030 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 05.02.31 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan	5	5,0 Persen	150,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 05.02.33 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 05.02 34 ProP · Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara	5	1,6 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 05 02.35 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.05.02.36 ProP · Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.05.02.37 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat	5	1,3 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Provinsi Sulawesi Barat						
02 05.02.38 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.05.03 **KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan**	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Manado (Angka perhitungan sementara)	5	4 694 Nilai	2 146 418,7	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palu (Angka perhitungan sementara)	5	4 409 Nilai		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Makassar (Angka perhitungan sementara)	5	4 139 Nilai		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Parepare (Angka perhitungan sementara)	5	4 701 Nilai		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palopo (Angka perhitungan sementara)	5	4 050 Nilai		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kendari (Angka perhitungan sementara)	5	4.461 Nilai		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Gorontalo (Angka perhitungan sementara)	5	3 910 Nilai		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Mamuju (Angka perhitungan sementara)	5	3.388 Nilai		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	6 Kota		
	03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
	04 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	2 WM		
02 05.03.03 ProP . Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	369 037,8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU), DAK
	02 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
02.05.03 04 ProP · Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	124.762,9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, DAK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02 05 03.05 ProP Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM	992 389,0	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, DAK, Kementerian Perhubungan (KPBU), Kementerian

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
						Dalam Negeri
02 05 03.06 ProP Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	65 773,1	Kementerian Perhubungan (KPBU), DAK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02 05 03 07 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	102 695,4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DAK
02.05.03.08 ProP Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Gorontalo	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	248 635,7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, DAK, Kementerian Perhubungan
02 05 03 09 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	243 124,8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DAK
02.05.04 **KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi**	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Peningkatan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri	5	60,59 Peningkatan Nilai Indeks Desa	1 199 907,5	
		02 - Penurunan angka kemiskinan desa	5	12,1 - 12,45 Persen		
		03 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	5	51,20 Poin IPKP		
		05 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Sulawesi	5	54,87 IPKT		
	02 - Berkembangnya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	5 Kecamatan		
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN di Pulau Sulawesi	5	0,44 Poin IPKP		
		03 - Jumlah daerah tertinggal	5	N/A Kabupaten		
	03 - Terpulihkannya daerah terdampak bencana	01 - Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	5	75 Persen		
02 05.04.02 ProP Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sulawesi Utara	2	5 Kecamatan	36.368,2	Kemendesa PDTT
02 05.04.08 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	60,37 Poin Indeks Desa	54.018,9	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.05.04.09 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Minahasa Utara	5	61,17 Poin IPKP	3.059,7	Kemendesa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
–A.II.62–

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.04 10 ProP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tahuna	5	0,46 IPKP	30.000,0	Kementerian Perhubungan
02.05.04 11 ProP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Melonguane	5	0,42 IPKP	1 500,1	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.05 04.12 ProP . Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	58,01 Poin Indeks Desa	56 505,5	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02 05.04 13 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Buol, dan Poso	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Buol, dan Poso	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Morowali, Buol, dan Poso	5	46,53 Poin IPKP	5 784,7	Kemendesa PDTT
02.05.04.14 ProP . Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tengah	5	52,41 Nilai IPKT	17 209,6	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.05.04.15 ProP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Persentase Penduduk Miskin di daerah tertinggal	5	15,1 - 15,6 Persen	100 314,7	Kemendesa PDTT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal	5	67,5 - 68 Nilai Indeks		
02.05.04 16 ProP : Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kota Palu dan Sekitarnya	01 - Terpulihkannya pelayanan publik	01 - Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	5	75 Persen	596 008,6	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemendesa PDTT
02.05 04 17 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	63,14 Poin Indeks Desa	86 483,8	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.05.04.18 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	5	51,23 Poin IPKP	3 509,7	Kemendesa PDTT
02.05.04.19 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Gilireng, Masamba, dan Mahalona	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Gilireng, Masamba, dan Mahalona	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan	5	51,56 IPKT	30.843,4	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02 05 04 20 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	57,62 Poin Indeks Desa	65 020,5	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 05 04 21 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	5	45,85 Poin IPKP	3 309,7	Kemendesa PDTT
02 05 04.22 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Mutiara, dan Asinua/Routa	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Mutiara, dan Asinua/Routa	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tenggara	5	51,40 IPKT	17 924,2	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.05 04.23 ProP · Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	63,48 Poin Indeks	34 131,5	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.05.04.24 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	5	53,89 Poin IPKP	3.309,7	Kemendesa PDTT
02 05 04 25 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubala	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubala	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Gorontalo	5	59,02 IPKT	3.687,4	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.05 04 26 ProP . Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	57,00 Poin Indeks Desa	31.509,7	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02 05 04 27 ProP · Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Mamuju dan Mamuju Tengah	5	45,61 Poin IPKP	3.359,7	Kemendesa PDTT
02.05.04.28 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Sarudu Baras	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Sarudu Baras	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Barat	5	64,09 IPKT	16 048,2	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.05.05 **KP : Kelembagaan dan Keuangan Daerah**	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,10 Nilai EPPD	166.992,9	
		02 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	0,255 Persen		
		03 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	59 Daerah		
		04 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	36 Daerah		
		05 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	4867 Izin		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		06 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	9 Daerah		
		07 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	36 Daerah		
		08 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah	4	5 Daerah		
		09 - Persentase capaian SPM di daerah	4	0,742116667 Persen		
		10 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	2 Daerah		
	02 - Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	04 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR hasil bimbingan teknis	2	28,00 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
		01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	204 548,5 Hektar		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	150.000 Hektar		
		03 - Jumlah RPerpres RTR KSN	2	1,00 Materi Teknis dan Raperpres		
		10 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	9,00 Persetujuan Substansi		
		09 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	6,00 Persetujuan Substansi		
		05 - Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RDTR Hasil Bantuan Teknis	2	2 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
		06 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR Tematik Arahan Prioritas Nasional	2	2 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
		07 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	7 Materi Teknis dan Raperda RTRW		
	03 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	3	1275 Desa		
		02 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1 5.000	2	614 Km²		
02.05.05 05 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Utara	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3.128,8	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 05.05.06 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	48.734 Bidang	132 462,6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	46.500 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	5.500 Bidang		
02.05 05 07 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	10 255,2	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	2 Persetujuan Substansi		
	05 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	2 Persetujuan Substansi		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
02 05.05.08 ProP Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	3	443 Desa	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
	02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1 5 000	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1 5 000	2	614 Km^2		
02.05.05.09 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3.312,6	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		

PN/FP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 05 05.10 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	87 317 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - Luas peta dasar pertanahan	5	100 000 Hektar		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	126.999 Bidang		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	11 911 Bidang		
02.05 05 11 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
02 05 05.12 ProP · Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3.619,0	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 05.05.13 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	127.721 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - Luas peta dasar pertanahan	5	50 000 Hektar		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	129 075 Bidang		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	53.295 Bidang		
02.05.05 14 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Selatan	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	5 300,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	06 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	4 Persetujuan Substansi		
	07 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	3 Persetujuan Substansi		
	04 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	2 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	05 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR Tematik Arahan Prioritas Nasional	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	01 - Tersusunnya Rancangan Perpres RTR KSN	01 - Jumlah RPerpres RTR KSN	2	1 Materi Teknis dan Raperpres		
02.05.05.15 ProP Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	3	504 Desa	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02.05.05.16 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3.009,6	Kementerian Dalam Negeri

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02.05.05 17 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	69 244 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	102.143 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	15.620 Bidang		
02.05.05.18 ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
02.05.05.20 ProP · Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Gorontalo	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	2 985,3	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 05 05 21 ProP · Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Gorontalo	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	37 981 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	27 723 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	3 410 Bidang		
02 05 05.22 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Gorontalo	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	4 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
02 05.05.23 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Barat	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	2.919,8	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 05 05.24 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	38.100 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	23 759 Bidang		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	22 240 Bidang		
02 05 05.25 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	4 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
02.05.05 26 ProP Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Tercapainya Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	3	328 Desa	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02.06 **PP : Pembangunan Wilayah Maluku**	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Maluku	01 - Laju pertumbuhan PDRB wilayah Maluku	5	5,2 – 6,2 Persen/Tahun	1.062.671,1	
		02 - IPM Provinsi di wilayah Maluku	5	69,9-70,5 Min-Maks		
		03 - Persentase penduduk miskin wilayah Maluku	5	12,8 Persen		
02.06.01 **KP : Pengembangan Kawasan Strategis**	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	5	>1 Nilai	249.529,7	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	3 Kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	1 Jumlah Destinasi		
		04 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 Kawasan		
		05 - KI Prioritas dan KI Pengembangan	5	1 Jumlah KI		
02.06 01 01 ProP : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Maluku Utara	5	>1 Nilai	224.529,7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Koordinasi Penanaman Modal
02.06 01.02 ProP : Fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI Teluk Weda	01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI Teluk Weda	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi Maluku Utara	5	>1 nilai	25.000,0	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.06.02 **KP : Pengembangan Sektor Unggulan**	01 - Berkembangnya Sektor Unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	5	1,0 – 5,0 persen	20.756,7	
02 06 02.01 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku	5	5,0 Persen	5.483,3	Kementerian Pertanian

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 06.02.02 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku	5	5,0 Persen	1 381,8	Kementerian Pertanian
02 06 02 03 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara	5	1,0 Persen	2 286,0	Kementerian Pertanian
02.06.02.04 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara	5	1,0 Persen	11 605,6	Kementerian Pertanian
02.06 02.05 ProP · Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 06.02 06 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.06.02.07 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 06.02.08 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.06.03 **KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan**	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Ambon (Angka perhitungan sementara)	5	6.227 Nilai	288 154,6	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tual (Angka perhitungan sementara)	5	443 Nilai		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Ternate (Angka perhitungan sementara)	5	447 Nilai		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Sofifi (Angka perhitungan sementara)	5	3.791 Nilai		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	3 Kota		
	03 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 Kota		
02 06 03 11 ProP · Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	169 356,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DAK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.06.03.12 ProP Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku Utara	01 - Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	32.646,9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, DAK
02.06.03.13 ProP : Pembangunan Kota Baru di Provinsi Maluku Utara	01 - Terbangunnya Kota Baru	01 - Jumlah Kota Baru yang dibangun	5	1 Kota	86.151,7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DAK
02.06.04 **KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi**	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Peningkatan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri	5	51,74 Poin Indeks Desa	485.807,9	
		02 - Penurunan Angka Kemiskinan Desa	5	15 75 - 16.00 Persen		
		03 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	5	54,35 Poin IPKP		
		04 - Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Maluku	5	32,42 IPKT		
	02 - Berkembangnya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Kepulauan Maluku	5	4 Kecamatan		
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN di Kepulauan Maluku	5	0,47 IPKP		
		03 - Jumlah daerah tertinggal	5	N/A Kabupaten		
02.06.04.02 ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Maluku	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Maluku	2	4 Kecamatan	29 611,3	Kemendesa PDTT
02.06.04 11 ProP . Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Maluku	01 - Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal	5	22,2 - 22,7 Persen	263 771,6	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan
		02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal	5	64,6 - 65,1 Nilai Indeks		
02.06.04.12 ProP : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	5	6,9 - 7,4 Persen	2.773,6	Kemendesa PDTT, Kementerian Sosial
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal	5	62,9 - 63,4 Nilai Indeks		
02.06.04.14 ProP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Saumlaki	5	0,45 IPKP	70 750,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan
02 06 04 15 ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Daruba	5	0,48 IPKP	4.181,4	Kementerian Perdagangan

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.06.04.16 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	50,00 Poin Indeks Desa	52.272,0	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02 06 04 17 ProP . Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	52,00 Poin Indeks Desa	49 424,8	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.06 04 18 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Maluku Tengah	5	50,00 Poin IPKP	6 069,7	Kemendesa PDTT
02 06 04 19 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morotai	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pulau Morotai	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Pulau Morotai	5	58,70 Poin IPKP	4 959,6	Kemendesa PDTT, Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 06 04.20 ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku	5	40,51 Nilai IPKT	95,5	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02 06.04 21 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku Utara	5	28,38 IPKT	1.898,4	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.06.05 **KP : Kelembagaan dan Keuangan Daerah**	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	2,89 Indeks	18.422,2	
		02 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
		03 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	16 Daerah		
		04 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	10 Daerah		
		05 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus Berbasis Elektronik	4	1283,9 Izin		
		06 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	2 Daerah		
		07 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah	4	72 Daerah		
		08 - Persentase capaian SPM di daerah	4	10 Persen		
		09 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	2 Daerah		
		10 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	1 Daerah		
	02 - Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	04 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	2 Persetujuan Substansi		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		01 - Persentase cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	34.215,5 (68.431 bidang) Hektar		
		02 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	4 Materi Teknis dan Raperda RTRW		
		03 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR Hasil Bimbingan Teknis	2	6 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
		05 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	7 Persetujuan Substansi		
02 06 05.11 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Maluku	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3 479,5	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02.06 05 12 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Maluku Utara	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3 160,5	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 06 05 13 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Maluku	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	26.336 Bidang	7.657,8	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	44.809 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	5 642 Bidang		
02.06 05 14 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Maluku Utara	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	42 095 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	26 092 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	1.487 Bidang		
02.06.05 15 ProP . Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Maluku	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	2.724,4	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	3 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	7 Persetujuan Substansi		
02.06.05.16 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Maluku Utara	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	1.400,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	3 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	2 Persetujuan Substansi		
	04 - Terlaksananya gelar perkara kasus dengan berkas lengkap	01 - Jumlah gelar perkara kasus dengan status berkas lengkap	2	1 Kasus		
02.07 **PP : Pengembangan Wilayah Papua**	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua	01 - Laju pertumbuhan PDRB wilayah Papua	5	2,6 – 5,8 Persen/Tahun	4.026.963,9	
		02 - IPM Provinsi di wilayah Papua	5	61,1-65,4 Min-Maks		
		03 - Persentase penduduk miskin wilayah Papua	5	25,5 Persen		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.07.01 **KP : Pengembangan Kawasan Strategis**	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	5	>1 Nilai	459 703,4	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	2 Kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	1 Jumlah Destinasi		
		04 - Destinasi Pariwisata	5	1 Jumlah Destinasi		
02 07.01.01 ProP Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua	5	>1 Nilai	376 842,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan
02.07 01.02 ProP . Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi Papua Barat	5	>1 Nilai	82.860,9	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan
02.07.02 **KP : Pengembangan Sektor Unggulan**	01 - Berkembangnya Sektor Unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	5	1,0 – 5,0 Persen	21.577,8	
02 07 02.01 ProP . Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua	5	1,0 Persen	4.592,0	Kementerian Pertanian
02 07.02.02 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua	5	5,0 Persen	7.243,5	Kementerian Pertanian
02 07 02 06 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat	5	1,0 Persen	5.893,3	Kementerian Pertanian
02.07.02.07 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat	5	1,0 Persen	3.849,0	Kementerian Pertanian
02.07 02 10 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.07.02.11 ProP · Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.07.03 **KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan**	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Jayapura (Angka perhitungan sementara)	5	4 425 Nilai	437.430,6	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Sorong (Angka perhitungan sementara)	5	3.783 Nilai		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota		
	03 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 Kota		
02 07.03.01 ProP Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Papua	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	135 439,4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, DAK
02 07 03.02 ProP Pembangunan kota baru di Provinsi Papua Barat	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 Kota	301 991,2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, DAK
02.07.04 **KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi**	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Peningkatan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri (Peningkatan Nilai Indeks Desa)	5	33,14 Poin Indeks Desa	3 005.347,3	
		02 - Penurunan angka kemiskinan desa	5	34.45 - 34.75 Persen		
		03 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	5	39,62 Poin IPKP		
		04 - Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Papua	5	34,59 IPKT		
	02 - Berkembangnya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Pulau Papua	5	11 Kecamatan		
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN di Pulau Papua	5	0,49 Poin Indeks		
		03 - Jumlah daerah tertinggal	5	N/A Kabupaten		
02.07.04.02 ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Papua	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Papua	2	11 Kecamatan	134.393,4	Kemendesa PDTT
02.07 04 04 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	31,00 Poin Indeks Desa	182 054,4	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02 07.04.21 ProP Wilayah Adat Papua : Laa Pago	01 - Meningkatnya IPM di 10 Kabupaten: Kab Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Jayawijaya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak	01 - Rata-rata IPM di 10 Kabupaten Kab. Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Jayawijaya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak	5	48,40 Nilai Indeks	809 158,4	Kemendesa PDTT, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 07 04 22 ProP : Wilayah Adat Papua : Mee Pago	01 - Meningkatnya IPM di 6 Kabupaten: Kab Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab Intan Jaya	01 - Rata-rata IPM di 6 Kabupaten: Kab Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab Intan Jaya	5	59,30 Nilai Indeks	575 912,2	Kemendesa PDTT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02 07 04 23 ProP Wilayah Adat Papua . Saireri	01 - Meningkatnya IPM di 4 Kabupaten Kab. Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Supiori	01 - Rata-rata IPM di 4 Kabupaten: Kab. Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Supiori	5	68,10 Nilai Indeks	8 818,7	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemendesa PDTT, Kementerian Kesehatan
02.07.04.24 ProP : Wilayah Adat Papua Tabi	01 - Meningkatnya IPM di 5 Kabupaten/Kota Kab Mamberamo Raya, Sarmi, Jayapura, Keerom, Kota Jayapura	01 - Rata-rata IPM di 5 Kabupaten/Kota Kab. Mamberamo Raya, Sarmi, Jayapura, Keerom, Kota Jayapura	5	67,60 Nilai Indeks	88.029,5	Kemendesa PDTT, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
02.07.04.25 ProP Wilayah Adat Papua . Anim Ha	01 - Meningkatnya IPM di 4 Kabupaten: Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat	01 - Rata-rata IPM di 4 Kabupaten: Kab Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat	5	61,00 Nilai Indeks	269 942,6	Kemendesa PDTT, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, ,
02 07.04 32 ProP : Wilayah Adat Papua : Domberay	01 - Meningkatnya IPM di 11 Kabupaten/Kota Kab. Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Kota Sorong	01 - Rata-rata IPM di 11 Kabupaten/Kota Kab. Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Kota Sorong	5	63,30 Nilai Indeks	253 244,5	Kemendesa PDTT, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian
02.07.04 29 ProP . Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura	5	0,39 IPKP	54 036,0	Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan
02.07.04.30 ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke	5	0,58 IPKP	5 860,4	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian
02 07 04 31 ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tanah Merah	5	0,51 IPKP	51 795,4	Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan
02.07.04.26 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura dan Merauke	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura dan Merauke	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Jayapura dan Merauke	5	41,91 Poin IPKP	3.109,7	Kemendesa PDTT
02.07 04 33 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat dan Manokwari	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat dan Manokwari	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Raja Ampat dan Manokwari	5	37,33 Poin IPKP	3.109,7	Kemendesa PDTT
02 07 04.27 ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Senggi, Salor, dan Muting	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Senggi, Salor, dan Muting	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua	5	37,08 IPKT	4.061,2	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.07.04 34 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur dan Bomberay - Tomage	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur dan Bomberay - Tomage	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua Barat	5	30,86 IPKT	10.286,7	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02 07 04 35 ProP : Wilayah Adat Papua : Bomberay	01 - Meningkatnya IPM di 2 Kabupaten/Kota: Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak	01 - Rata-rata IPM di 2 Kabupaten/Kota Kab Kaimana, Kab Fak-Fak	5	67,00 Nilai Indeks	482.925,7	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan
02 07 04 36 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	37,1 Poin Indeks Desa	68 608,8	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.07.05 **KP : Kelembagaan dan Keuangan Daerah**	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	2,42 Indeks	102 904,8	
		02 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	0,18 Persen		
		03 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	25 Daerah		
		04 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	16 Daerah		
		05 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima Berbasis Elektronik	4	979 Izin		
		06 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	5	2 Daerah		
		08 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah	5	0,66675 Daerah		
		09 - Persentase capaian SPM di daerah	4	16 Persen		
		07 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	2 Daerah		
		10 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	2 Daerah		
	02 - Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	38 971 Hektar		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	5.000 Hektar		
		03 - Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara	2	1 Materi Teknis dan Raperpres		
		04 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	3 Materi Teknis dan Raperda RTRW		
		05 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR Hasil Bimbingan Teknis	2	6 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
		06 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		07 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	7 Persetujuan Substansi		
02 07 05 06 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Papua Barat	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	3.054,8	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	3 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	05 - Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
	06 - Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
02 07 05 05 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Papua Barat	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	30 792 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	37 772 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	1 797 Bidang		
02 07 05 04 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Papua Barat	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3.255,2	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Target		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
	09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota	4	5 Regulasi		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 07 05.07 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Papua	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	6.552,0	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
	09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota	4	5 Regulasi		
02 07.05.08 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Papua	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	8.179 Bidang	88 242,8	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - Luas peta dasar pertanahan	5	5 000 Hektar		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	22.179 Bidang		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	4.950 Bidang		
02 07.05.09 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Papua	01 - Tersusunnya Rancangan Perpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara	01 - Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara	2	1 Materi Teknis dan Raperpres	1,800.0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	3 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	07 - Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	6 Persetujuan Substansi		

Keterangan:
Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi
1) Pembangunan SDM
2) Pembangunan Infrastruktur
3) Penyederhanaan Regulasi
4) Penyederhanaan Birokrasi
5) Transformasi Ekonomi

Catatan:
1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dalam proses finalisasi detail target, alokasi, dan lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota,
3) Rincian pada masing-masing Prioritas Nasional mencakup Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
4) Perubahan rincian beserta pendanaannya dimungkinkan setelah mendapat persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS PEMBANGUNAN RKP 2021

PRIORITAS NASIONAL : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA ASING

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03 **PN : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	01 - Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	01 - Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)		2,24 Nilai	279 829 105,2	
		02 - Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)		99,00 Persen		
	02 - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	01 - Proporsi penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial		85,00 Persen		
		02 - Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah		72,00 Persen		
	03 - Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	01 - Angka Kematian Ibu (AKI)		217 Per 100 000 Kelahiran Hidup		
		02 - Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita		21,10 Persen		
		03 - Insidensi tuberkulosis		252 Per 100 000 Penduduk		
		04 - Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun		21,80 Persen		
		05 - Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun		9,00 Persen		
		06 - Nilai rata-rata hasil PISA Membaca		394 Nilai		
		07 - Nilai rata-rata hasil PISA Matematika		385 Nilai		
		08 - Nilai rata-rata hasil PISA Sains		399 Nilai		
		09 - Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas		8,85 Tahun		
		10 - Harapan lama sekolah		13,40 Tahun		
	04 - Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	01 - Indeks Perlindungan Anak (IPA)		68,10 Nilai		
		02 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,28 Nilai		
		03 - Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		54,59 Nilai		
	05 - Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	01 - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif		35,00 Persen		
	06 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing	01 - Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas		45,43 Persen		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah PT yang masuk ke dalam *World Class University* (PT) Top 200		0 PT		
		03 - Jumlah PT yang masuk ke dalam *World Class University* (PT) Top 300		1 PT		
		04 - Jumlah PT yang masuk ke dalam *World Class University* (PT) Top 500		2 PT		
		05 - Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi		41,55 Persen		
		06 - Peringkat *Global Innovation Index*		Peringkat 80-85		
03.01 **PP : Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan**	01 - Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan	01 - Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	4	70 Persen	2.972 791,8	
		02 - Persentase Provinsi/Kabupaten/ Kota yang Memanfaatkan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring Evaluasi Unit Terpadu dalam Proses Penyusunan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	4	40 Persen		
		03 - Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	4	60 Persen		
		04 - Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	1	95,00 Persen		
03.01.01 **KP : Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan**	01 - Meningkatnya percepatan cakupan administrasi kependudukan	01 - Jumlah pedoman teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus yang disusun untuk mempercepat cakupan administrasi kependudukan	4	1 Dokumen Pedoman Teknis	4 988,4	
03 01.01 01 ProP Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan	01 - Terlaksananya perluasan jangkauan layanan administrasi kependudukan	01 - Jumlah inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan Reformasi Birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	4	1 028 Inovasi	2 988,4	Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung
03 01 01.02 ProP Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendataran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Kelompok Khusus	01 - Terlaksananya percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus	01 - Jumlah daerah yang tertangani dalam kegiatan afirmatif	4	50 Daerah	2.000,0	Kementerian Dalam Negeri
03.01.02 **KP : Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan**	01 - Menguatnya integrasi sistem administrasi kependudukan	01 - Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikembangkan dan diintegrasikan	4	1 Sistem	1.094 134,0	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03 01 02.01 ProP Penguatan Integrasi Data Administrasi Kependudukan	01 - Menguatnya integrasi data administrasi kependudukan	01 - Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	4	2.500 Lembaga Pengguna	2 500,0	Kementerian Dalam Negeri
03.01.02.02 ProP : Pengembangan Data dan Informasi Kependudukan (Statistik Hayati) yang Akurat, Lengkap dan Tepat Waktu	01 - Terlaksananya pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap dan tepat waktu	01 - Jumlah *data base* kependudukan yang update	4	1 *Database*	1 091 634,0	Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
03.01.03 **KP : Pendampingan dan Layanan Terpadu**	01 - Terlaksananya pendampingan dan layanan terpadu	01 - Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	4	70 Persen	1 866 751,4	
		02 - Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	4	60 Persen		
		03 - Persentase provinsi/ kab/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monev unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	4	40 Persen		
03.01 03 01 ProP Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	01 - Terlaksananya sistem layanan dan rujukan terpadu	01 - Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan SLRT	4	300 Kabupaten/Kota	1 510.849,8	Kementerian Sosial
03 01 03.02 ProP Penguatan Pendampingan Masyarakat	01 - Terwujudnya penguatan pendampingan masyarakat	01 - Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasistas dan kemampuannya	1	40 201 Orang	355 901,6	Kementerian Sosial
03.01.04 **KP : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk**	01 - Meningkatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	01 - Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan	4	52 Nilai	6 918,0	
03 01.04.01 ProP : Sinergitas Kebijakan Pengendalian Penduduk dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang	01 - Meningkatnya sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	01 - Persentase pemerintah daerah yang mempergunakan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah	4	45 Persen	270,5	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
03.01 04 02 ProP . Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Kelembagaan Kependudukan	01 - Menguatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan kependudukan	01 - Persentase pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengetahuan pengelolaan kependudukan	4	90 Persen	4 086,0	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
03 01 04.03 ProP Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan	01 - Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan	01 - Persentase pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota yang melaksanakan dan memanfaatkan analisis kependudukan dan informasi kependudukan	4	25 Persen	2 561,5	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.III.4-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.02 **PP : Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial**	01 - Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan	01 - Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	4	85 Persen	149 247.430,4	
		02 - Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas	1	14,7 Persen		
		03 - Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia	1	11 Persen		
		04 - Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif	4	5 Persen		
		05 - Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Formal	1	29,44 Persen		
		06 - Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Informal	1	4,44 Persen		
03.02.01 **KP : Sistem Jaminan Sosial Nasional**	01 - Terwujudnya sistem jaminan sosial nasional	01 - Jumlah dokumen rancangan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu Sistem Jaminan Sosial Nasional	1	1 Dokumen	48 796.700,0	
03 02 01 01 ProP Pengembangan Program Jaminan Sosial	01 - Terlaksananya pengembangan program jaminan sosial	01 - Jumlah dokumen kajian Kebutuhan Dasar Kesehatan dan Kelas Perawatan Standar	3	1 Dokumen	48 788 700,0	Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan
03 02.01 02 ProP : Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional	01 - Terwujudnya penguatan kelembagaan penyelenggara sistem jaminan sosial nasional	01 - Jumlah kajian atau naskah akademik harmonisasi peraturan perundangan terkait hubungan antar kelembagaan Sistem Jaminan Sosial Nasional, pengelolaan aset dana jaminan sosial, dan tata kelola BPJS	1	1 Dokumen Kajian/Naskah Akademis	8.000,0	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
03.02.02 **KP : Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran**	01 - Tersalurkannya bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	01 - Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima penyaluran bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan	1	10.000.000 Keluarga Penerima Manfaat	99.343.288,9	
		02 - Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima penyaluran bantuan pangan melalui Kartu Sembako Murah	5	15 600 000 Keluarga Penerima Manfaat		
		03 - Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima penyaluran bantuan LPG 3 KG	5	31.400.000 Keluarga Penerima Manfaat		
		04 - Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima penyaluran bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA	2	31 400.000 Keluarga Penerima Manfaat		
03.02.02 01 ProP : Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran	01 - Terselenggaranya bantuan dan subsidi tepat sasaran	01 - Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	4	15.600.000 Keluarga Penerima Manfaat	99.343.288,9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
03.02.03 **KP : Perlindungan Sosial Adaptif**	01 - Tersusunnya sistem perlindungan sosial adaptif	01 - Jumlah penduduk yang memperoleh bantuan sosial bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1	578.500 Jiwa	117.244,0	

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03 02 03 01 ProP · Pelaksanaan Perlindungan Sosial yang Adaptif	01 - Terlaksananya bantuan sosial untuk perlindungan korban bencana	01 - Jumlah penduduk terdampak bencana yang memperoleh bantuan sosial	1	284.500 Jiwa	117.244,0	Kementerian Sosial
03.02.04 **KP : Kesejahteraan Sosial**	01 - Terwujudnya kesejahteraan sosial	01 - Presentase lanjut usia yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial	1	21,70 Persen	990.197,5	
		02 - Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial	1	16,62 Persen		
03 02 04 01 ProP Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	01 - Penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan pemerintah	01 - Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh Asistensi Rehabilitasi Sosial	1	48 000 Jiwa	391 774,0	Kementerian Sosial
	02 - Penyediaan literasi khusus bagi penyandang disabilitas	01 - Jumlah literasi khusus bagi penyandang disabilitas	1	47.000 Eksemplar		
	03 - Pendampingan masyarakat bagi penyandang disabilitas	01 - Jumlah pendamping sosial bagi penyandang disabilitas yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	50 Orang		
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang mendapatkan pengembangan kapasitas	1	20 Lembaga		
03.02 04 02 ProP · Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Kelanjutusiaan (Lansia Aktif dan Produktif)	01 - Terwujudnya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan (lansia aktif dan produktif)	01 - Jumlah lanjut usia yang memperoleh pelayanan sosial tingkat lanjut	1	140 Jiwa	111 067,6	Kementerian Sosial, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
03.02.04 03 ProP : Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang Berbasis Komunitas yang Terintegrasi (*Long-Term Care*)	01 - Terlaksananya Perawatan Jangka Panjang berbasis komunitas yang terintegrasi (*Long-term Care*)	01 - Indeks Lansia Tangguh	1	59,5 Angka	5 097,0	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
03.02 04 04 ProP Penguatan Pelayanan Sosial Kelompok Rentan Lainnya	01 - Kelompok rentan yang memperoleh bantuan pemerintah	01 - Jumlah anak yang memperoleh asistensi rehabilitasi sosial	1	30.000 Jiwa	482.258,9	Kementerian Sosial
		02 - Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	1	20 000 Jiwa		
		03 - Jumlah warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan pemberdayaan	1	2 500 Keluarga		
	02 - Pendampingan masyarakat bagi kelompok rentan	01 - Jumlah pendamping sosial bagi anak yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	80 Orang		
		02 - Jumlah pendamping sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	100 Orang		
		03 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pengembangan kapasitas	1	30 Orang		
		04 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial bagi anak yang mendapatkan pengembangan kapasitas	1	10 Lembaga		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.03 **PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan**	01 - Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan	01 - Angka Kematian Bayi (AKB)	1	19,5 Per 1.000 Kelahiran Hidup	17 706 123,9	
		02 - Angka Kematian Neonatal	1	12,2 Per 1 000 Kelahiran Hidup		
		03 - Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevelance Rate* (mCPR)	1	62,16 Nilai		
		04 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	1	8,30 Persen		
		05 - Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19)	1	24 Kelahiran Hidup Per 1000 Perempuan		
		06 - Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita	1	7,80 Persen		
		07 - Insidensi HIV	1	0,21 Per 1 000 Penduduk yang Tidak Terinfeksi HIV		
		08 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	1	345 Kabupaten/Kota		
		09 - Jumlah kabupaten/kota sehat	1	280 Kabupaten/Kota		
		10 - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	1	78,00 Persen		
		11 - Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	1	80 Persen		
		12 - Persentase rumah sakit terakreditasi	1	90 Persen		
		13 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	1	59 Persen		
		14 - Persentase obat memenuhi syarat	1	83,60 Persen		
		15 - Persentase makanan memenuhi syarat	1	80 Persen		
03.03.01 **KP : Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi**	01 - Meningkatnya kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	01 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	1	431 Kabupaten/Kota	2.269.332,1	
		02 - Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1	25,93 Persen		
03.03.01.01 ProP : Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	01 - Terwujudnya penurunan kematian ibu dan bayi	01 - Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	1	89 Persen	2.006.346,7	Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
		02 - Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap	1	100 Persen		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03 03 01 02 ProP Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi	01 - Meningkatnya KB dan kesehatan reproduksi	01 - Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (*Drop Out*/DO)	1	24,5 Persen	262.985,4	Kementerian Dalam Negeri, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
03.03.02 **KP : Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat**	01 - Terlaksananya percepatan perbaikan gizi masyarakat	01 - Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	1	45 Persen	7.923 281,0	
		02 - Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	1	14,5 Persen		
03 03.02.01 ProP Penurunan *Stunting*	01 - Terwujudnya penurunan *stunting*	01 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi	1	70 Persen	7 923 281,0	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), DAK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
03.03.03 **KP : Peningkatan Pengendalian Penyakit**	01 - Meningkatnya pengendalian penyakit	01 - Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA *on* ART)	1	45 Persen	4 459.318,2	
		02 - Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC *Success Rate*)	1	90 Persen		
		03 - Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat program malaria yang disediakan	2	100 Persen		
		04 - Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (kabupaten/kota)	1	416 Kabupaten/Kota		
		05 - Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	1	80 Kabupaten/Kota		
		06 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	1	52 Kabupaten/Kota		
		07 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1	324 Kabupaten/Kota		
03.03.03.01 ProP . Pengendalian Penyakit Menular	01 - Terkendalinya penyakit menular	01 - Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	1	80 Persen	4.324.926,4	Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC *Treatment Coverage*)	1	85 Persen		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API <1/1 000 penduduk	1	475 Kabupaten/Kota		
		04 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	1	90 Persen		
		05 - Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat	1	88 Persen		
		06 - Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1%	1	190 Kabupaten/Kota		
		07 - Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	1	15 Desa		
03.03 03 02 ProP Pengendalian Penyakit Tidak Menular	01 - Terkendalinya penyakit tidak menular	01 - Jumlah kabupaten/kota yg melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% puskesmas	1	205 Kabupaten/Kota	134 391,8	Kementerian Kesehatan
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM ≥ 80%	1	129 Kabupaten/Kota		
03.03.04 **KP : Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)**	01 - Terlaksananya penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	01 - Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas	4	35 Kabupaten/Kota	655 419,4	
03.03 04 01 ProP Pengembangan Lingkungan Sehat	01 - Terlaksananya pengembangan lingkungan sehat	01 - Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	1	50 Persen	329 384,8	Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
03 03.04 02 ProP Penguatan Promosi Germas	01 - Terlaksananya penguatan promosi Germas	01 - Persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif	4	35 Persen	326 034,6	Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan
03.03.05 **KP : Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan**	01 - Menguatnya sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan	01 - Persentase puskesmas tanpa dokter	2	0 Persen	2.398.773,2	
		02 - Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	2	75 Persen		
		04 - Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	1	90 Persen		
		03 - Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan	4	35 Persen		
		05 - Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	2	85 Persen		
		06 - Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	2	83 Persen		
		07 - Persentase alat kesehatan memenuhi syarat	2	92 Persen		
03.03 05.01 ProP : Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	01 - Terlaksananya penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	01 - Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi (FKTP)	2	4 009 FKTP	807 265,6	Kementerian Kesehatan

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi (FKRTL)	2	851 Persen		
		03 - Jumlah rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan	1	1 dokumen		
03.03 05.02 ProP Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	01 - Terlaksananya pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	01 - Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim	1	1 493 Orang	381 648,9	Kementerian Kesehatan
		02 - Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara individu	1	4.324 Orang		
		03 - Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang didayagunakan	1	660 Orang		
		04 - Jumlah dokter penerima bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)	1	2 100 Orang		
03.03.05 03 ProP Pemenuhan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	01 - Terlaksananya pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan	01 - Jumlah instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	2	264 Instalasi Farmasi	606 079,1	Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase produk alat kesehatan (alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diuji dan memenuhi syarat	2	90 Persen		
03 03 05.04 ProP : Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	01 - Terlaksananya penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan	01 - Jumlah sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dalam Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK)	4	25 Sistem Informasi	282.439,4	Kementerian Kesehatan
03 03 05 05 ProP Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan	01 - Terlaksananya peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan	01 - Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai standar	2	83,6 SDM Pengawas	321.340,2	Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
03.04 **PP : Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas**	01 - Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas	01 - Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya SMA/SMK/MA Sederajat	1	0,74 Rasio	87 192 481,5	
		02 - Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya: Pendidikan Tinggi	1	0,20 Rasio		
		03 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam Tes PISA: Membaca	1	33,00 Persen		
		04 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam Tes PISA. Matematika	1	30,00 Persen		
		05 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam Tes PISA: Sains	1	42,60 Persen		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		06 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi: Literasi	1	58,20 Persen		
		07 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi: Numerasi	1	27,40 Persen		
		08 - Tingkat penyelesaian pendidikan: SD/MI/Sederajat	1	93,25 Persen		
		09 - Tingkat penyelesaian pendidikan: SMP/MTs/Sederajat	1	86,53 Persen		
		10 - Tingkat penyelesaian pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat	1	68,69 Persen		
		11 - Persentase anak kelas 1 SD/MI/ SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini	1	68,06 Persen		
		12 - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT)	1	34,56 Persen		
03.04.01 **KP : Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**	01 - Meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran	01 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam Test AKSI Membaca	1	58,2 Persen	8.604 562,5	
		02 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam Test AKSI Matematika	1	27,4 Persen		
		03 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam Test AKSI: Sains	1	31,4 Persen		
		04 - Persentase guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang bersertifikat pendidik	1	91,05 Persen		
03 04 01 01 ProP : Penerapan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif	01 - Terlaksananya penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	01 - Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan	1	214 Model Kurikulum	634 991,4	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
		02 - Jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen	1	213 Model Pembelajaran		
03.04.01 02 ProP Peningkatan Kompetensi Pendidik	01 - Meningkatnya kompetensi pendidik	01 - Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	1	48,33 Persen	7 348.300,0	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
03.04 01 03 ProP Penguatan Kualitas Penilaian Pendidikan	01 - Menguatnya kualitas penilaian pendidikan	01 - Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran	1	50 Persen	257.123,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
03.04 01 04 ProP Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	01 - Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satuan pendidikan	01 - Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK	2	4,87 Persen	262.041,5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Televisi Republik Indonesia, Kementerian Agama
03 04.01.05 ProP : Integrasi Softskill dalam Pembelajaran	01 - Terwujudnya integrasi softskill dalam pembelajaran	01 - Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran	1	100 Persen	102 105,9	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.III.11-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.04.02 **KP : Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun**	01 - Terwujudnya pemerataan akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	01 - Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	1	105,5 Rasio	47 666 880,0	
		02 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	1	104,48 Persen		
		03 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	1	94,34 Persen		
		04 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA / SMK / MA / SMLB / Sederajat	1	88,39 Persen		
03.04.02 01 ProP Sarana dan Prasarana Pendidikan	01 - Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan	01 - Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana prasarananya	2	35 603 Lembaga	11.187 993,2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agama
03 04.02 02 ProP · Bantuan Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi, dan Berbakat	01 - Terlaksananya bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	01 - Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	1	100 Persen	26.017.833,4	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
03.04.02 03 ProP : Penanganan Anak Tidak Sekolah	01 - Terlaksananya penanganan anak tidak sekolah	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SD/MI/SDI-B sekurang-kurangnya 100%	1	391 Kabupaten/Kota	9.616 805,2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
		02 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100%	1	317 Kabupaten/Kota		
		03 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	1	219 Kabupaten/Kota		
03.04.02.04 ProP Penguatan Pelayanan 1 Tahun Prasekolah	01 - Terlaksananya penguatan pelayanan 1 tahun prasekolah	01 - Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan	1	64,7 Persen	844 248,2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
		02 - Jumtah kab/kota dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	1	154 Kabupaten/Kota		
03.04.03 **KP : Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	01 - Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan	01 - Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	13,53 Persen	14.840 995,9	
03.04.03 02 ProP : Pendidikan Profesi Guru dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik	01 - Terlaksananya pendidikan profesi guru dan peningkatan kualifikasi pendidik	01 - Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik	1	91,05 Persen	1 222.307,8	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
		02 - Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	1	89,20 Persen		
03.04 03 03 ProP : Pemenuhan dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan	01 - Terlaksananya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	01 - Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	2 266 Satuan Pendidikan	454.925,2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.III.12-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	6 797 Satuan Pendidikan		
		03 - Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	6 117 Satuan Pendidikan		
03 04 03.04 ProP Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Berbasis Kinerja	01 - Terlaksananya peningkatan kesejahteraan pendidik berbasis kinerja	01 - Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	1	363,573 Orang	13.163.762,9	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
03.04.04 **KP : Penjaminan Mutu Pendidikan**	01 - Terwujudnya mutu pendidikan	01 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SD/MI)	1	81,19 Persen	1.481 277,4	
		02 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMP/MTS)	1	76,01 Persen		
		03 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMA/MA)	1	74,53 Persen		
		04 - Perguruan Tinggi Terakreditasi A (PT)	1	160 PT		
03.04.04 01 ProP : Penguatan Kapasitas dan Akselerasi Akreditasi	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi	01 - Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP	1	57 490 Sekolah/Madrasah	270.346,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
03 04 04 02 ProP Perluasan Budaya Mutu Pendidikan	01 - Terwujudnya perluasan budaya mutu pendidikan	01 - Jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan	1	8 Dokumen	1 210.930,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
03.04.05 **KP : Peningkatan Tata Kelola Pendidikan**	01 - Meningkatnya tata kelola pendidikan	01 - Persentase kab/kota memenuhi SPM pendidikan	1	100 Persen	14.598 765,7	
03.04.05 01 ProP : Penguatan Tata Kelola Pemenuhan SPM Pendidikan	01 - Terlaksananya penguatan tata kelola pemenuhan SPM pendidikan	01 - Jumlah provinsi memenuhi SPM Pendidikan	4	34 Provinsi	19 194,4	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama
03.04 05 02 ProP : Penguatan Strategi Pembiayaan dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pendidikan	01 - Menguatnya strategi pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	01 - Jumlah PTN yang mendapatkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi	4	243 Lembaga	14.533.832,1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
03.04 05 03 ProP Peningkatan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan	01 - Meningkatnya sinkronisasi data pokok pendidikan	01 - Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan	4	68,8 Persen	17.781,2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
03 04 05 04 ProP Sinkronisasi Pelaksanaan PAUD-HI	01 - Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan PAUD-HI	01 - Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	4	35 Persen	27.958,0	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.05 **PP : Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda**	01 - Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi dan berwirausaha	01 - Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	1	9,80 Persen	106 727,9	
		02 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	1	Menurun		
		03 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1	73,50 Nilai		
		04 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	1	53,13 Persen		
		05 - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	1	Menurun		
		06 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan *white collar*	1	0,39 Persen		
03.05.01 **KP : Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**	01 - Terpenuhinya hak dan perlindungan anak	01 - Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	1	76,13 Nilai	50 069,7	
		02 - Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	1	65,79 Nilai		
03.05 01 01 ProP Penjaminan Pemenuhan Hak Anak secara Universal	01 - Terjaminnya pemenuhan hak anak secara universal	01 - Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	1	3,59 Persen	11.700,0	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh peringkat KLA	1	270 Provinsi/Kabupaten/Kota		
		03 - Jumlah daerah dengan penurunan angka perkawinan anak	1	5 Provinsi		
03.05.01.02 ProP : Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya	01 - Terlaksananya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	01 - Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja	1	5,53 Persen	38.369,7	Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	1	100 Persen		
03.05.02 **KP : Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**	01 - Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan	01 - Indeks PUG Nasional	1	67,95 Nilai	31.592,6	
03.05.02.01 ProP : Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan PUG	01 - Persentase K/L yang memperoleh Indeks PUG dengan kategori minimal BAIK	1	38,1 Persen	7.192,6	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Persentase provinsi yang memperoleh Indeks PUG dengan kategori minimal BAIK	1	61,76 Persen		
03 05 02 02 ProP Perlindungan Perempuan, termasuk Pekerja Migran dari Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan orang	01 - Terwujudnya perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang	01 - Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	1	40 Persen	24 400,0	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.05.03 **KP : Kualitas Pemuda**	01 - Terwujudnya pemuda yang berkarakter dan berdaya saing	01 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	1	81,97 Persen	25 065,6	
03.05.03.01 ProP Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan	01 - Terwujudnya penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan	01 - Persentase provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan	1	25 Persen	6.585,6	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Persentase tim koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan di tingkat pusat dan provinsi yang terbentuk	1	25 Persen		
03.05 03 02 ProP : Pencegahan Perilaku Beresiko	01 - Terlindungnya pemuda dari perilaku berisiko	01 - Angka kesakitan pemuda	1	7,43 Nilai	7 050,0	Kementerian Pemuda dan Olahraga
03.05.03 03 ProP Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda	01 - Meningkatnya partisipasi sosial dan politik pemuda	01 - Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir	1	6,86 Persen	11.430,0	Kementerian Pemuda dan Olahraga
03.06 **PP : Pengentasan Kemiskinan**	01 - Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	01 - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	1	38 Persen	934.860,5	
		02 - Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh akses kepemilikan tanah	1	483 334 Rumah Tangga		
03.06.01 **KP : Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga**	01 - Terakselerasinya penguatan ekonomi keluarga miskin	01 - Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro	1	0,11 Persen	50.061,2	
		02 - Keluarga Miskin dan Rentan yang mendapatkan bantuan sosial insentif modal usaha	1	7 000 Keluarga		
03 06.01.01 ProP Fasilitasi Modal Usaha	01 - Terfasilitasinya modal usaha bagi keluarga miskin dan rentan	01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro	1	3.328.071 KK	50.061,2	Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial
		02 - Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan modal usaha	1	7.000 Keluarga		
03.06.02 **KP : Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial**	01 - Terlaksananya pengembangan keperantaraan usaha dan pemberdayaan sosial	01 - Jumlah lembaga yang mengembangkan keperantaraan usaha	1	3.900 lembaga	86 645,5	
		02 - Jumlah pendamping kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	1	2.000 orang		
03.06.02.01 ProP : Fasilitasi Keperantaraan Usaha Produktif	01 - Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha masyarakat miskin dan rentan	01 - Jumlah fasiltasi pengembangan usaha masyarakat miskin dan rentan	1	100 Kelompok	74.703,2	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		02 - Jumlah BUMDes yang dikembangkan	1	500 Lembaga		
		03 - Jumlah Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan	1	3.250 UMKM		
		04 - Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT)	1	10.000 UMKM		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.06.02 02 ProP Penguatan Pemberdayaan Berdampak Sosial	01 - Menguatnya pemberdayaan berdampak sosial	01 - Jumlah badan usaha yang menyelenggarakan tanggung jawab sosial dan lingkungan	1	150 Badan Usaha	4 422,8	Kementerian Sosial
03.06.02.03 ProP Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01 - Terlaksananya penyuluhan dan/atau pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan	01 - Jumlah KTH Mandiri	1	100 Unit	7.519,5	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS (pembentukan wanawiyata widyakarya)	1	160 Unit		
		03 - Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal (Perhutanan Sosial, RHL, KPH, Gambut, dan Kemitraan Konservasi)	1	2.000 Orang		
03.06.03 **KP : Reforma Agraria**	01 - Terlaksananya Reforma Agraria	01 - Luas bidang tanah yang diredistribusi dan dilegalisasi dalam kerangka reforma agraria	1	1.766 315 Hektare	617 621,6	
		02 - Jumlah kepala keluarga penerima Akses RA	1	120 427 KK		
03 06 03 01 ProP Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	01 - Terlaksananya penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)	01 - Jumlah penataan penguasan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan) dalam kerangka reforma agraria	1	615 Hektare	144.621,7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
03.06.03.02 ProP Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Legalisasi atas Tora	01 - Meningkatnya kualitas data pertanahan dan legalisasi atas TORA	01 - Jumlah bidang tanah yang diredistribusi dan dilegalisasi	1	409.936 Bidang	224 629,4	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
03 06.03.03 ProP Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas TORA	01 - Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA	01 - Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA	1	120 427 KK	248 370,5	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
03.06.04 **KP : Perhutanan Sosial**	01 - Terwujudnya kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	01 - Luas distribusi akses kelola dan manfaat kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat	1	1.000 000 ha	180.532,2	
03 06 04.01 ProP Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	01 - Terkelolanya kawasan hutan oleh masyarakat	01 - Luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	1	1 000 000 Hektare	180 532,2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
03.07 **PP : Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing**	01 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing	01 - Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	1	48,40 Persen	21 668 689,2	
		02 - Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	1	65,28 Persen		
		04 - Jumlah produk inovasi dari tenant perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) yang dibina	1	150 Produk		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah prototipe dari Perguruan Tinggi	1	184 Prototipe		
		05 - Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha	1	20 Inovasi		
		06 - Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI Domestik	1	2.000 Paten		
		07 - Jumlah paten *granted* (domestik)	1	850 Paten		
		08 - Persentase sumber daya manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3	1	16,00 Persen		
		09 - Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI) yang ditetapkan	1	120 PUI		
		10 - Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif)	1	60 Lembaga/Unit Kerja		
		11 - Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan	1	4 Infrastruktur		
		12 - Jumlah *Science Techno Park* yang ada yang dikembangkan berbasis Perguruan Tinggi	1	5 Unit		
		13 - Jumlah *Science Techno Park* yang ada yang dikembangkan: berbasis non-Perguruan Tinggi	1	3 Unit		
		14 - Jumlah produk inovasi dan produk Riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan	1	0 Produk		
		15 - Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam	1	15 Teknologi		
		16 - umlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	1	35 Teknologi		
		17 - Budaya dan prestasi olahraga jumlah perolehan medali emas pada *Olympic Games*	1	2 Medali		
		18 - Budaya dan prestasi olahraga: jumlah perolehan medali emas pada *Paralympic Games*	1	1 Medali		
03.07.01 **KP : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri**	01 - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri	01 - Lulusan pendidikan vokasi bersertifikat kompetensi	1	1.890.345 Orang	13.621 493,8	
		02 - PT Vokasi berakreditasi A	1	10 PT		
		03 - Jumlah lulusan pendidikan menengah vokasi	1	1.913.804 Orang		
		04 - Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi	1	64.224 Orang		
		05 - Jumlah lulusan pelatihan vokasi (pelaksanaan Kartu Pra-Kerja)	1	2.200 000 Orang		
		06 - Jumlah pemagangan dalam negeri (SMK)	1	1 908 367 Orang		
		07 - Jumlah pemagangan luar negeri (SMK)	1	5 437 Orang		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.07 01 01 ProP Peningkatan Peran dan Kerjasama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01 - Meningkatnya peran dan kerjasama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi	01 - Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran	1	560 Sekolah	198.141,3	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		02 - Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	1	200 Orang		
03 07.01 02 ProP Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01 - Terlaksananya reformasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi	01 - Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sarana prasarana	1	292 SMK	9 490 364,3	Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri	1	100 Lembaga		
		04 - Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	1	2.200 000 Orang		
		03 - Persentase SMK yang menyelenggarakan *Teaching Factory*	1	8 Persen		
03 07 01 03 ProP : Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi	01 - Meningkatnya kualitas pendidik vokasi	01 - Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri	1	5.200 Orang	935 355,6	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian
		02 - Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan upskilling dan reskilling berstandar industri	1	2.160 Orang		
		03 - Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri	1	440 Orang		
		04 - Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri	1	400 Orang		
		05 - Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi	1	300 Orang		
03 07 01 04 ProP Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01 - Menguatnya tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi	01 - Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD	1	65 sekolah	2.641.310,6	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan
		02 - Penguatan mutu pendidikan tinggi vokasi berstandar industri	1	120 PT		
03.07.01.05 ProP : Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi	01 - Menguatnya sistem sertifikasi kompetensi	01 - Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	1	1 890.345 Orang	356.322,0	Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
						Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika
03.07.02 **KP : Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas**	01 - Menguatnya pendidikan tinggi berkualitas	01 - Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional	1	23.077 Publikasi	2.828.284,4	
		02 - Jumlah sitasi di jurnal internasional	1	49.178 Sitasi		
03 07 02 01 ProP Perguruan Tinggi sebagai Produsen Iptek Inovasi dan Pusat Keunggulan	01 - Terwujudnya Perguruan Tinggi sebagai produsen Iptek inovasi dan pusat keunggulan	01 - Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi	1	182 KI	1 517.424,0	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
03 07 02.02 ProP Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Penelitian	01 - Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian	01 - Jumlah paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat	1	10 Paten	1 287 276,4	Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
03.07.02 03 ProP Peningkatan Kualitas Lulusan PT	01 - Meningkatnya kualitas lulusan PT	01 - Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun	1	220 000 Orang	23.584,0	Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
03.07.03 **KP : Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi**	01 - Meningkatnya kapabilitas IPTEK dan penciptaan inovasi	01 - Jumlah KI yang dimanfaatkan menjadi lisensi	5	100 Lisensi	2 970.099,5	
03 07 03 01 ProP Pemanfaatan Iptek dan Penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	01 - Terlaksananya pemanfaatan Iptek dan penciptaan inovasi di bidang-bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	01 - Jumlah hasil inovasi *Flagship* PRN	5	0 Inovasi	1 862 593,9	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
03.07.03.02 ProP · Pengembangan *Research Power-House*	01 - Terlaksananya pengembangan *Research Power-House*	01 - Jumlah SDM Iptek yang ditingkatkan kualifikasinya	1	970 Orang	890.585,0	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.07.03.03 ProP Penciptaan Ekosistem Inovasi	01 - Terciptanya ekosistem inovasi	01 - Jumlah STP yang ditingkatkan kualitasnya	2	8 STP	216 920,6	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
03.07.04 **KP : Prestasi Olahraga**	01 - Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat internasional	01 - Jumlah olahragawan andalan nasional yang lolos kualifikasi Olimpiade Tokyo 2021	1	35 Orang	2 248 811,5	
		02 - Jumlah atlet elite nasional yang lolos kualifikasi Paralimpiade Tokyo 2021	1	25 Orang		
03 07 04 01 ProP Penguatan dan Penataan Regulasi Keolahragaan	01 - Terlaksananya penguatan dan penataan regulasi keolahragaan	01 - Jumlah kebijakan yang disusun dan dimanfaatkan dalam rangka penguatan sinergitas dan tata kelola olahraga pendidikan dan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan potensi daerah	1	3 NSPK	2 051,5	Kementerian Pemuda dan Olahraga
03 07.04 02 ProP Pengembangan Budaya Olahraga	01 - Terlaksananya pengembangan budaya olahraga di masyarakat	01 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	1	35,4 Persen	44 392,0	Kementerian Pemuda dan Olahraga
03 07 04 03 ProP Penataan Sistem Pembinaan Olahraga Berbasis Cabang Olahraga Olimpiade/Paralimpiade dan Potensi Daerah	01 - Terlaksananya penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade, Paralimpiade dan potensi daerah	01 - Persentase olahragawan Olimpik di PPLP dan PPLM yang menjadi olahragawan andalan nasional	1	10 Persen	1 430 975,5	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Persentase olahragawan Olimpik dan Paralimpik di SKO yang menjadi olahragawan andalan nasional	1	30 Persen		
		03 - Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat nasional berbasis cabang olahraga Olimpiade dan potensi daerah	1	40 *Event*		
03 07 04.04 ProP · Penataan Kelembagaan Olahraga	01 - Terlaksananya penataan kelembagaan olahraga	01 - Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi keolahragaan berbasis Olimpik dalam memenuhi standar minimal organisasi keolahragaan	1	22 Lembaga	12.333,0	Kementerian Pemuda dan Olahraga
03.07.04.05 ProP Peningkatan Ketersediaan Tenaga Keolahragaan Berstandar Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional	01 - Jumlah tenaga keolahragaan olimpik/paralimpik yang bersertifikat keolahragaan	1	150 Orang	15.059,5	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Jumlah tenaga keolahragaan olimpik/paralimpik yang terbina dan berkembang	1	1 170 Orang		
03.07 04 06 ProP : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional	01 - Jumlah prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi	2	32 Unit	738.700,0	Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		03 - Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga olimpik	2	66 Lembaga		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.07.04 07 ProP · Pengembangan Peran Dunia Usaha dalam Pendampingan dan Pembiayaan Keolahragaan	01 - Terlaksananya pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan	02 - Jumlah koordinasi Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Provinsi/ Swasta dalam Kemitraan Keolahragaan	1	10 Kegiatan	5 300,0	Kementerian Pemuda dan Olahraga

Keterangan:
Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi
1) Pembangunan SDM
2) Pembangunan Infrastruktur
3) Penyederhanaan Regulasi
4) Penyederhanaan Birokrasi
5) Transformasi Ekonomi

Catatan:
1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dalam proses finalisasi detail target, alokasi, dan lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota,
3) Rincian pada masing-masing prioritas nasional mencakup Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta),
4) Perubahan rincian beserta pendanaannya dimungkinkan setelah mendapat persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.IV.1-

MATRIKS PEMBANGUNAN RKP 2021

PRIORITAS NASIONAL : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04 **PN: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	01 - Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	01 - Indeks Capaian Revolusi Mental		70,78 Nilai	5 757.609,5	
	02 - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	01 - Indeks Pembangunan Kebudayaan		58,21 Nilai		
	03 - Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	01 - Indeks Pembangunan Masyarakat		0,63 Nilai		
	04 - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	01 - Indeks Kerukunan Umat Beragama		74,60 Nilai		
	05 - Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa	01 - Indeks Pembangunan Keluarga		55,00 Nilai		
		02 - Median Usia Kawin Pertama Perempuan		22,00 Tahun		
	06 - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	01 - Nilai Budaya Literasi		63,03 Nilai		
04.01 **PP: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter**	01 - Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	01 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani	1	79,14 Nilai	599.350,1	
		02 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih	1	70,96 Nilai		
		03 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib	1	77,34 Nilai		
		04 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri	1	56,70 Nilai		
		05 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu	1	69,74 Nilai		
	02 - Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter	01 - Indeks Kerentanan Keluarga	1	11,5 Nilai		
		02 - Indeks Karakter Remaja	1	68,42 Nilai		
04.01.01 **KP: Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti**	01 - Menguatnya nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	01 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter (berdasarkan hasil survei karakter pelajar)	1	35 Persen	277 608,6	

SK No 024124 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04 01 01 01 ProP: Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang Menyenangkan dan Bebas dari Kekerasan (Bullying Free School Environment)	01 - Berkembangnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	01 - Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan pendidikan karakter	1	4.550 Satuan Pendidikan	190 170,2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.01.01 02 ProP: Penguatan Pendidikan Agama, Nilai Toleransi Beragama, dan Budi Pekerti dalam Sistem Pendidikan	01 - Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti dalam sistem pendidikan	01 - Persentase guru pendidikan agama di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dan ditingkatkan kualitasnya	1	100,0 Persen	18.448,4	Kementerian Agama
04 01 01.03 ProP: Peningkatan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda, serta Pengembangan Pendidikan Kepramukaan	01 - Meningkatnya kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan berkembangnya pendidikan kepramukaan	01 - Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan dan kepramukaan	1	3 232 Orang	68 990,0	Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.01.02 **KP: Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif**	01 - Menguatnya budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif	01 - Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan secara cepat dan tidak bertele-tele	4	Meningkat (*Baseline* 76,75 tahun 2019) Persen	16.376,7	
		02 - Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan dengan biaya yang jelas	4	Meningkat (*Baseline* 80,32 tahun 2019) Persen		
		03 - Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan secara tanggap melayani keluhan atau permintaan masyarakat	1	Meningkat (*Baseline* 79,63 tahun 2019) Persen		
04 01 02 01 ProP Peningkatan Budaya Kerja Pelayanan Publik yang Ramah, Cepat, Efektif, Efisien, dan Terpercaya	01 - Terlaksananya peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya	01 - Jumlah instansi yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik (IP) dalam rangka peningkatan kualitas kerja pelayanan publik	4	150 Instansi	13 176,7	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Agama
04.01.02.02 ProP: Penerapan Disiplin, *Reward* dan *Punishment* dalam Birokrasi	01 - Terlaksananya penerapan disiplin, *reward* dan *punishment* dalam birokrasi	01 - Jumlah laporan penyelesaian dan penyelidikan pengaduan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku	4	120 Laporan	3.200,0	Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
04.01.03 **KP: Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter**	01 - Menguatnya sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	01 - Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	1	76,22 Indeks	138 989,2	
		02 - Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga	1	33 Indeks		
04 01 03.01 ProP Penyiapan Kehidupan Berkeluarga dan Kecakapan Hidup	01 - Terlaksananya kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup	01 - Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)	1	31,46 Persen	120.437,6	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Agama

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.01.03 02 ProP Peningkatan Ketahanan Keluarga Berdasarkan Siklus Hidup dengan Memperhatikan Kesinambungan Antargenerasi, Sebagai Upaya Penguatan Fungsi dan Nilai Keluarga	01 - Terlaksananya peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antargenerasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga	01 - Persentase keluarga balita dan anak yang ikut BKB	1	50 Persen	10.601,6	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
04 01.03.03 ProP Pewujudan Lingkungan yang Kondusif melalui Penguatan Masyarakat, Kelembagaan, Regulasi, Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta Partisipasi Dunia Usaha	01 - Terwujudnya lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi dunia usaha	01 - Persentase daerah yang Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakatnya (IPPM) (berkategori) Baik	1	8 Persen	7.950,0	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.01.04 **KP: Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental**	01 - Terwujudnya penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental	01 - Jumlah pusat perubahan gerakan revolusi mental yang memperoleh penguatan (kapasitas)	1	20 Lembaga	41.179,7	
04.01 04 01 ProP Pemantapan Pelaksanaan Lima Program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	01 - Terwujudnya pemantapan pelaksanaan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	01 - Jumlah Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental yang memperoleh penguatan (kapasitas)	1	49 Lembaga	29.919,9	Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Polhukam, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
04.01.04.02 ProP: Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental di Daerah	01 - Terlaksananya penguatan pusat-pusat perubahan di tingkat daerah	01 - Jumlah pusat perubahan di tingkat daerah yang memperoleh penguatan (kapasitas)	1	20 Lembaga	11 259,8	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
04.01.05 **KP: Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila**	01 - Terwujudnya pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila	01 - Persentase rumah tangga yang menyatakan adanya peningkatan jumlah usaha baru di wilayah tempat tinggal rumah tangga dalam 6 bulan terakhir	5	Meningkat (*Baseline* 77,94 tahun 2019) Persen	27 368,8	
04 01 05 02 ProP: Peningkatan Etos Kerja dan Kewirausahaan Berlandaskan Semangat Gotong Royong	01 - Menguatnya etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong	01 - Jumlah masyarakat yang terjaring untuk memulai berwirausaha	5	1 000 Orang	3 000,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
04.01 05.03 ProP Penumbuhan Budaya Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri	01 - Terwujudnya budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri	01 - Jumlah peserta kampanye penggunaan produk DN	5	1 000 Orang	15.068,8	Kementerian Perdagangan
04 01.05.01 ProP Membangun Budaya Ekonomi Nasional dengan Platform Koperasi dalam Kegiatan Usaha Produktif	01 - Terwujudnya budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif	01 - Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	5	100 Koperasi	9.300,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.IV.4-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.01.06 **KP: Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme**	01 - Terwujudnya jiwa nasionalisme dan patriotisme pada setiap warga negara	01 - Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara	1	100 Persen	97 827,1	
04.01 06 01 ProP· Pembinaan Ideologi Pancasila, Penguatan Pendidikan Kewargaan, Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara	01 - Menguatnya pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara	01 - Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara	1	100 Persen	66.914,0	Kementerian Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kementerian Agama
04.01 06 02 ProP Peningkatkan Peran dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	01 - Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	01 - Persentase capaian pelaksanaan kegiatan peningkatan peran dan fungsi BPIP	1	100 Persen	26 092,8	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
04.01.06.03 ProP Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang Bertentangan dengan Ideologi Pancasila.	01 - Terwujudnya harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila	01 - Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila	3	3 Dokumen	4 000,0	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
04 01.06.04 ProP Membersihkan Unsur-Unsur yang Mengancam Ideologi Negara	01 - Terwujudnya pembersihan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara	01 - Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara	1	2 Dokumen	820,3	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
04.02 **PP: Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia**	01 - Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan	01 - Nilai Dimensi Warisan Budaya	1	49,36 Nilai	958.608,2	
		02 - Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	1	37,79 Nilai		
		03 - Nilai Dimensi Ekonomi Budaya	1	40,28 Nilai		
04.02.01 **KP: Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal**	01 - Terwujudnya revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	01 - Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	1	3,55 Persen	185.681,0	
		02 - Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	1	12,01 Persen		
04.02.01.01 ProP: Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Nilai Budaya, Tradisi, Sejarah dan Kearifan Lokal	01 - Terwujudnya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal	01 - Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan muatan lokal nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan	1	944 Satuan Pendidikan	77 078,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
–A.IV.5–

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04 02 01 02 ProP: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Museum dan Arsip	01 - Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip	01 - Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	1	50 Persen	92 986,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Arsip Nasional Republik Indonesia
04.02.01.03 ProP Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Manuskrip dan Arsip Sebagai Sumber Nilai Budaya, Sejarah, dan Memori Kolektif Bangsa	01 - Terwujudnya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa)	01 - Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno	1	20 Persen	15 615,6	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia
04.02.02 **KP: Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat**	01 - Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	01 - Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	1	0,39 Persen	462.823,9	
		02 - Persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional	1	59,81 Persen		
04 02 02.01 ProP. Pengembangan Produk Seni, Budaya, dan Film	01 - Terwujudnya pengembangan produk seni, budaya, dan film	01 - Jumlah karya perfilman dan musik Indonesia	1	35 Judul	210 842,8	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04 02.02 02 ProP Penyelenggaraan Festival Budaya dan Membangun Opera Berkelas Internasional	01 - Terwujudnya penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional	01 - Jumlah festival skala internasional (*Mega Events*) dengan pengunjung minimal 50 000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan	1	9 Festival	83 124,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.02 02 03 ProP Pengelolaan Cagar Budaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	01 - Terwujudnya pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	01 - Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda	1	30 Persen	166.056,4	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.02 02.04 ProP: Pengembangan Budaya Bahari dan Sumber Daya Maritim	01 - Terwujudnya pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim	01 - Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif)	1	5 Komunitas	2.800,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
04.02.03 **KP: Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif**	01 - Terwujudnya pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	01 - Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat	1	22,33 Persen	32.273,9	
04.02 03.01 ProP. Pengembangan Wilayah Adat sebagai Pusat Pelestarian Budaya dan Lingkungan Hidup	01 - Terwujudnya pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup	01 - Wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	1	5 Wilayah Adat	18 073,9	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
04 02 03 02 ProP: Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya	01 - Terwujudnya pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya	01 - Jumlah penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat	1	30 Lembaga	13.200,0	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04 02.03.03 ProP Pelindungan Kekayaan Budaya Komunal dan Hak Cipta	01 - Terwujudnya pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta	01 - Persentase *database* KI Komunal yang terintegrasi pada aplikasi	1	75 Persen	1 000,0	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

PN/PP/KP/PreP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.02.04 **KP: Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban Dunia**	01 - Terlaksananya pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia	01 - Jumlah *event* diplomasi cagar budaya dan warisan budaya tak benda	1	4 Kegiatan	96.744,1	
04 02 04.01 ProP: Pengembangan Diplomasi Budaya melalui Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional, Muhibah Seni Budaya, dan Kuliner Nusantara	01 - Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara	01 - Jumlah *event* diplomasi cagar budaya dan warisan budaya tak benda	1	4 Kegiatan	62.905,0	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04 02 04 02 ProP: Penguatan Pusat Studi dan Rumah Budaya Indonesia di Luar Negeri	01 - Meningkatnya partisipasi Indonesia dalam Forum Internasional Bidang Kebudayaan	01 - Jumlah SDM dan lembaga kebudayaan yang diapresiasi (Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia)	1	500 Orang	33 839,1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.02.05 **KP: Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan**	01 - Terwujudnya pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	01 - Persentase SDM kebudayaan yang ditingkatkan kapasitasnya	1	35 Persen	181 085,3	
04.02 05 01 ProP Pengelolaan Dana Perwalian Kebudayaan	01 - Terlaksananya pengelolaan dana perwalian kebudayaan	01 - Jumlah layanan pengelolaan dana perwalian kebudayaan	1	1 Layanan	79 360,2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.02.05 02 ProP: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan	01 - Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan	01 - Jumlah SDM kebudayaan yang ditingkatkan kompetensinya	1	6.056 Orang	48 473,1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.02 05 03 ProP Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	01 - Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan	01 - Jumlah fasilitasi pemerintah bidang kebudayaan	1	80 Kegiatan	41 000,0	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.02.05.04 ProP Pengembangan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu	01 - Terlaksananya pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu	01 - Jumlah layanan data dan statistik kebudayaan	1	1 Layanan	8.139,3	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.02.05.05 ProP Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan dalam Pemajuan Kebudayaan	01 - Terlaksananya pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan	01 - Jumlah layanan umum, kerja sama dan kehumasan bidang kebudayaan	1	1 Layanan	4.112,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.03 **PP: Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial**	01 - Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama	01 - Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji	1	85,96 Nilai	3.636.968,3	
		02 - Indeks Kepuasan Layanan KUA	1	81,00 Nilai		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.03.01 **KP: Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama**	01 - Menguatnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama	01 - Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	1	86,42 Persen	1.075 473,8	
04.03 01 01 ProP Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat	01 - Terwujudnya pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat	01 - Jumlah penyuluh agama yang mendapatkan kompetensi	1	79 482 Orang	787 336,7	Televisi Republik Indonesia, Kementerian Agama
04 03.01.02 ProP Penguatan Sistem Pendidikan yang Berperspektif Moderat Mencakup Pengembangan Kurikulum, Materi dan Proses Pengajaran, Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Rekrutmen Guru	01 - Menguatnya penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru	01 - Jumlah model kurikulum dan pembelajaran pendidikan agama yang berperspektif moderat dan toleran yang dikembangkan	1	5 Model	132 754,2	Kementerian Agama
04.03 01 03 ProP Penguatan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Moderasi Beragama melalui Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama untuk Kemaslahatan	01 - Menguatnya penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan	01 - Jumlah lembaga pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam mendapat penguatan pemahaman moderasi beragama	1	1 000 Lembaga	2.000,0	Kementerian Agama
04.03.01.04 ProP Pengelolaan Rumah Ibadah sebagai Pusat Syiar Agama yang Toleran	01 - Terwujudnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	01 - Persentase pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran yang difasilitasi	1	100 Persen	147.382,9	Kementerian Agama
04.03.01.05 ProP: Pemanfaatan Ruang Publik untuk Pertukaran Ide dan Gagasan di Kalangan Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda Lintas Budaya, Lintas Agama, dan Lintas Suku Bangsa	01 - Terlaksananya pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku	01 - Jumlah siswa madrasah yang mendapatkan penguatan pemahaman moderasi beragama	1	500 Orang	6 000,0	Kementerian Agama
04.03.02 **KP: Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama**	01 - Terwujudnya penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama	01 - Persentase kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	1	80 Persen	453.676,6	
04.03.02.01 ProP: Pelindungan Umat Beragama untuk Menjamin Hak-Hak Sipil dan Beragama	01 - Terwujudnya pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama	01 - Jumlah layanan harmonisasi kerukunan umat beragama	1	6.741 Orang	39.906,4	Kementerian Agama
04.03.02.02 ProP Penguatan Peran Lembaga Agama, Organisasi Sosial Keagamaan,	01 - Terwujudnya penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN,	01 - Jumlah dialog kerukunan dengan melibatkan lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat	1	2.675 Kegiatan	342 629,1	Kementerian Agama

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai Perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa	TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa					
04 03 02.03 ProP Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk Membangun Solidaritas Sosial, Toleransi, dan Gotong Royong	01 - Terwujudnya penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong	01 - Persentase FKUB yang aktif dalam membina kerukunan umat beragama	1	100 Persen	71.141,1	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama
04.03.03 **KP: Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya**	01 - Terwujudnya penyelarasan relasi agama dan budaya	01 - Jumlah *event* keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran yang difasilitasi	1	1 837 Kegiatan	109 269,4	
04 03 03 01 ProP: Penghargaan atas Ekspresi Budaya Berbasis Nilai-Nilai Agama	01 - Terwujudnya penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama	01 - Lembaga budaya bernafaskan agama yang dibina	1	34 Lokasi	5 690,7	Kementerian Agama
04 03 03 02 ProP Pengembangan Literasi Khazanah Budaya Bernafas Agama	01 - Terwujudnya pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama	01 - Jumlah hasil penelitian Lektur dan Khazanah Pendidikan dan Keagamaan	1	20 Laporan	33 071,9	Kementerian Agama
04 03.03 03 ProP: Pelestarian Situs Keagamaan dan Pemanfaatan Perayaan Keagamaan dan Budaya untuk Memperkuat Toleransi	01 - Terwujudnya pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	01 - Jumlah *event* keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran yang difasilitasi	1	2 191 Kegiatan	70.506,8	Kementerian Agama
04.03.04 **KP: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama**	01 - Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama	01 - Persentase layanan keagamaan yang memenuhi standar pelayanan	1	50 Persen	1.894 565,2	
04.03.04 01 ProP. Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	01 - Terwujudnya peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan	01 - Jumlah kitab suci dan sarana peribadatan yang difasilitasi	1	816 957 Unit	793.615,7	Kementerian Agama
04 03 04.02 ProP: Peningkatan Pelayanan Bimbingan Perkawinan dan Keluarga	01 - Terwujudnya pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga	01 - Jumlah keluarga yang menerima layanan dan bimbingan perkawinan	1	127.449 Keluarga	132.912,3	Kementerian Agama
04.03.04.03 ProP: Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	01 - Terwujudnya penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal	01 - Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	1	60 Persen	40.762,5	Kementerian Agama
04 03.04.04 ProP Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Haji dan Umrah	01 - Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaran Haji dan Umrah	01 - Persentase jemaah haji yang mendapatkan pelayanan haji sesuai standar	1	85,25 Persen	927.274,7	Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan
04.03.05 **KP: Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan**	01 - Terwujudnya pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan	01 - Persentase penggunaan dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	1	51 Persen	103.983,3	

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04 03 05.01 ProP. Pemberdayaan Dana Sosial Keagamaan	01 - Terwujudnya pemberdayaan dana sosial keagamaan	01 - Jumlah program pengelolaan dana sosial keagamaan yang dibina dan dikembangkan	1	98 Lokasi	20.013,3	Kementerian Agama
04.03.05 02 ProP: Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat	01 - Terwujudnya pengembangan kelembagaan ekonomi umat	01 - Jumlah lembaga dana sosial keagamaan yang dibina	1	768 Lembaga	78.402,7	Kementerian Agama
04 03.05.03 ProP Pengelolaan Dana Haji secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel	01 - Terwujudnya pengelolaan Dana Haji secara profesional, transparan, dan akuntabel	01 - Persentase laporan keuangan haji yang akuntabel	1	100 Persen	5 567,3	Kementerian Agama
04.04 **PP: Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter**	01 - Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	01 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1	12 Nilai	562 682,9	
04.04.01 **KP: Peningkatan Budaya Literasi**	01 - Terwujudnya peningkatan budaya literasi	01 - Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1	1:15 Rasio	418 680,7	
		02 - Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1	1:19 000 Rasio		
		03 - Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar	1	20,45 Persen		
04 04 01.01 ProP Pengembangan Budaya Kegemaran Membaca	01 - Terwujudnya pengembangan budaya kegemaran membaca	01 - Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pengembangan budaya literasi	1	20 161 Orang	78.022,8	Kementerian Dalam Negeri, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.04.01 02 ProP: Pengembangan Sistem Perbukuan dan Penguatan Konten Literasi	01 - Terwujudnya pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi	01 - Jumlah SDM Perbukuan yang tersertifikasi	1	320 Orang	176 545,0	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04 04 01.03 ProP Peningkatan Akses dan Kualitas Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	01 - Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial	01 - Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial	1	1 048 Perpustakaan	164.112,9	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Sosial
04.04.02 **KP: Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra**	01 - Terwujudnya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	01 - Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia	1	515 Nilai	94.143,2	
04 04.02 01 ProP: Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional	01 - Terwujudnya peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional	01 - Jumlah negara yang mengajarkan Bahasa Indonesia	1	30 Negara	27 405,0	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.04.02.02 ProP Pengembangan Pendidikan Sastra di Satuan Pendidikan dan Komunitas	01 - Terwujudnya pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas	01 - Jumlah kosakata Bahasa Indonesia	1	130 030 Kosakata	23.106,3	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		02 - Jumlah tenaga profesional yang mahir berbahasa Indonesia	1	73 050 Orang		
04 04 02 03 ProP: Revitalisasi Bahasa dan Aksara Daerah sebagai Khazanah Budaya Bangsa	01 - Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	01 - Jumlah penutur yang terlibat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah kritis dan terancam punah	1	21.132 Orang	43.631,9	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.04.03 **KP: Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas, dan Daya Cipta**	01 - Terwujudnya pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta	01 - Jumlah produk riset dan inovasi yang dihasilkan siswa pendidikan menengah yang mendapat pendampingan peneliti	1	20 Produk	5 200,0	
04.04 03 01 ProP Peningkatan Budaya Riset dan Eksperimentasi Ilmiah Sejak Usia Dini	01 - Terwujudnya peningkatan budaya riset dan eksperimentasi ilmiah sejak usia dini	01 - Jumlah partisipan dalam kompetisi Karya Ilmiah Remaja (LKIR) dan *National Young Inventor Award* (NYIA)	1	4 000 Proposal	3 000,0	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
04 04 03 02 ProP Pengembangan Budaya Produksi dan Kreativitas Berbasis Inovasi	01 - Terwujudnya budaya produksi dan kreativitas berbasis inovasi	01 - Jumlah layanan literasi iptek berbasis terbitan dan multimedia	1	4 Layanan	2.200,0	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
04.04.04 **KP: Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi**	01 - Terwujudnya penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	01 - Persentase institusi perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	1	0,35 Persen	44 659,0	
04 04 04 01 ProP: Pengembangan Mitra Perpustakaan (Library Supporter)	01 - Terwujudnya pengembangan mitra perpustakaan (*library supporter*)	01 - Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	1	500 Perpustakaan	14.714,9	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
04 04 04 02 ProP: Pengembangan Inovasi Sosial yang Didukung dari Pendanaan Filantropi	01 - Terwujudnya pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi	01 - Jumlah pojok baca digital di daerah	1	160 Lokasi	29.944,1	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Keterangan
Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi
1) Pembangunan SDM
2) Pembangunan Infrastruktur
3) Penyederhanaan Regulasi
4) Penyederhanaan Birokrasi
5) Transformasi Ekonomi

Catatan:
1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional,
2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dalam proses finalisasi detail target, alokasi, dan lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota,
3) Rincian pada masing-masing Prioritas Nasional mencakup Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta),
4) Perubahan rincian beserta pendanaannya dimungkinkan setelah mendapat persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas

SK No 024133 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
–A.V.1–

MATRIKS PEMBANGUNAN RKP 2021

PRIORITAS NASIONAL : MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05 **PN : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	01 - Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	01 - Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau		62,32 Persen	115.290 727,8	
		05 - Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10 000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010		55 Persen		
		07 - Persentase luas daerah irigasi premium yang dimoderenisasi		6,5 Persen, Kumulatif		
		10 - Persentase pemenuhan kebutuhan air baku		33,7 Persen, Kumulatif		
	02 - Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	01 - Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau		2,20 Jam/100 Km		
		04 - Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*)		25 Persen		
	03 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	01 - Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan		6 (berlanjut) Kota		
	04 - Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	01 - Rasio elektrifikasi		~ 100 Persen		
		02 - Rata-Rata Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik		1 203 kWh/Kapita		
	05 - Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	01 - Persentase populasi yang dijangkau oleh Jaringan Bergerak Pitalebar (4G)		98 Persen		
05.01 **PP : Infrastruktur Pelayanan Dasar**	01 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	01 - Rasio KPR terhadap PDB	2	3,10 Persen	57.507.188,2	
		02 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita	2	92,67 Persen		
		03 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	2	81,99 Persen		
	02 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman	01 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	2	92,81 Persen		
		02 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	2	8,40 Persen		
		03 - Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	2	23,54 Persen		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan	2	69,27 Persen		
		05 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	2	79,43 Persen Layak, Termasuk 10 Persen Aman		
		06 - Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	2	4,46 Persen		
		07 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	2	73,70 Persen Penanganan dan 5,51 Persen Pengurangan		
	03 - Meningkatnya layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan	01 - Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan	2	173 Kabupaten/Kota		
	04 - Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi	01 - Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan	2	27 Menit		
	05 - Meningkatnya optimalitasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi	01 - Volume tampungan air per kapita	2	53,53 m^3/kapita, Kumulatif		
		02 - Persentase luas sawah beririgasi	2	54 Persen		
		03 - Luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi	2	398 123 Hektar		
05.01.01 **KP : Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau**	01 - Tersedianya akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	01 - Jumlah hunian baru layak huni yang terbangun	2	223 180 Unit	6,952,223 3	
		02 - Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan	2	85 000 Rumah Tangga		
		03 - Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan	2	197 496 Rumah Tangga		
		04 - Jumlah peningkatan kualitas hunian	2	152.510 unit		
		05 - Jumlah pengurangan luas kawasan permukiman kumuh	2	5 779 Hektar		
05.01 01 01 ProP : Peningkatan Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru	01 - Terlaksananya peningkatan fasilitasi penyediaan hunian baru	01 - Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui fasilitasi pemerintah	2	18.417 Unit	3 136.009,4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05.01.01.02 ProP : Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	01 - Terlaksananya peningkatan fasilitasi pembiayaan perumahan	01 - Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	2	197.496 Rumah Tangga	25.600,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan	2	85 000 Rumah Tangga		
05.01.01.03 ProP Pengembangan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah	01 - Terlaksananya pengembangan fasilitasi peningkatan kualitas rumah	01 - Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas	2	150 300 Rumah Tangga	2.461.547,9	Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.V.3-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.01.01.04 ProP : Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	01 - Terlaksananya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman	01 - Jumlah rumah yang dilayani bantuan PSU pada perumahan, termasuk PSU kawasan skala besar	2	40.000 Unit	288.812,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05 01.01 05 ProP Fasilitasi Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF)	01 - Terlaksananya fasilitasi peningkatan standar keandalan bangunan dan keamanan bermukim (IMB dan SLF)	01 - Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	2	49 Kabupaten/Kota	116.970,2	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05.01 01 06 ProP . Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh	01 - Terlaksananya fasilitasi penanganan permukiman kumuh	01 - Jumlah luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	2	5 779 Hektar	923 283,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05.01.02 **KP : Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman**	01 - Tersedianya akses air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional	2	62 352 Sambungan Rumah (SR)	12 854 892,1	
		02 - Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman	2	284.145 Sambungan Rumah (SR)		
		03 - Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT	2	1.730 314 Rumah Tangga (RT)		
		04 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan *standar sanitary landfill*	2	3 383.023 Rumah Tangga (RT)		
		05 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R	2	255 938 Rumah Tangga (RT)		
		06 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST	2	164 717 Rumah Tangga (RT)		
		07 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja	2	87 Kab/Kota		
		08 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik	2	83 Kab/Kota		
		09 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	2	16 402.000 Sambungan Rumah (SR)		
		10 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum Bukan Jaringan Perpipaan	2	48.273.000 Rumah Tangga (RT)		
		11 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman	2	5.854 000 Rumah Tangga (RT)		
		12 - Persentase PDAM dengan kinerja sehat	2	75 Persen		
		13 - Persentase angka BABS di tempat terbuka	2	4,46 Persen		

SK No 024136 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05 01 02 01 ProP Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Terlaksananya pengembangan sistem penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Jumlah pengembangan kapasitas SPAM regional	2	500 Liter/detik	12 120.419,9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BUMD (KPBU), Provinsi Jawa Timur (KPBU), Provinsi Jawa Barat (KPBU)
		02 - Jumlah pembangunan dan peningkatan kapasitas SPAM	2	2.334 Liter/detik		
		03 - Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan perluasan SPAM	2	451 725 Sambungan Rumah (SR)		
		04 - Persentase *Non-Revenue Water* (NRW) PDAM	2	30 Persen		
		05 - Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala kota/regional	2	28 Kab/Kota		
		06 - Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman	2	168 Kab/Kota		
		07 - Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	2	50 Kab/Kota		
		08 - Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan TPA baru	2	56 Kab/Kota		
		09 - Jumlah kab/kota yang memiliki TPS3R	2	108 Kab/Kota		
		10 - Jumlah kab/kota yang memiliki TPST	2	13 Kab/Kota		
05 01 02.02 ProP Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Persentase PDAM yang memiliki business plan menuju akses 100% aman yang berlaku hingga tahun 2024	2	25 Persen	725.663,4	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase PDAM dengan Tarif *Full Cost Recovery*	2	63 Persen		
		03 - Persentase pengelola/operator air minum berkinerja sehat (PDAM,UPTD, KPSPAMS dll)	2	40 Persen		
		04 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi pendampingan implementasi dokumen strategi sanitasi kabupaten/kota	2	33 Provinsi		
		05 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah dan air limbah domestik	2	33 Provinsi		
		06 - Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	2	55 Persen		
05.01 02 03 ProP Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Terlaksananya pengaturan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi penyiapan pengaturan bidang sanitasi	2	34 Provinsi	2 500,0	Kementerian Dalam Negeri
		02 - Jumlah NSPK terkait sanitasi yang tersusun	2	0 NSPK		
		03 - Jumlah NSPK terkait air minum yang tersusun	2	5 NSPK		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Jumlah Kab/Kota yang memiliki Jakstrada air minum	2	102 Kab/Kota		
		05 - Jumlah Kab/Kota yang memiliki RISPAM	2	514 Kab/Kota		
05.01 02 04 ProP Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi	01 - Terlaksananya pengawasan kualitas air minum dan sanitasi	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	2	102 Kab/Kota	6 308,8	Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Jumlah kab/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum	2	514 Kab/Kota		
		03 - Jumlah kab/kota yang memiliki effluent IPAL, IPLT, dan *leachate* TPA yang memenuhi syarat (kab/kota)	2	33 Kab/Kota		
05.01.03 **KP : Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan**	01 - Terkelolanya air tanah dan air baku berkelanjutan	01 - Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan	2	87,37 m^3/Detik	1.199.775,9	
		02 - Persentase kesiapan implementasi pengelolaan SDA terpadu (aspek regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi)	2	50,4 Persen		
05 01.03 01 ProP Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah	01 - Terlaksananya penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	01 - Tambahan debit air baku	2	3,5 m3/Detik	1 060 833,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05 01 03 02 ProP Penataan Regulasi serta Perkuatan Kelembagaan SDA	01 - Terlaksananya penataan regulasi serta perkuatan kelembagaan SDA	01 - Jumlah peraturan perundangan turunan UU SDA yang ditetapkan (PP)	2	4 Dokumen	17 232,6	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Jumlah dokumen kebijakan PSDA terpadu pada wilayah sungai kewenangan pusat yang disusun dan/atau diperbaharui	2	19 Dokumen		
05.01.03.03 ProP Pengembangan SISDA Terpadu Berbasis Teknologi Cerdas (*Smart Water Management*)	01 - Terlaksananya pengembangan SISDA terpadu berbasis teknologi cerdas (*smart water management*)	01 - Persentase kesiapan pengembangan SISDA terpadu berbasis *smart water management*	2	20 Persen	121 709,8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05.01.04 **KP : Keselamatan dan Keamanan Transportasi**	01 - Terciptanya keselamatan dan keamanan transportasi	01 - Rasio kejadian kecelakaan pelayaran per 10 000 pelayaran	2	1,25 Nilai	2.053 253,5	
		02 - Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan	2	2,1 Nilai		
		03 - Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA	2	0,25 Nilai		
05 01 04.01 ProP : Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi & SAR	01 - Terlaksananya pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi & SAR	01 - Jumlah peralatan SAR yang disediakan	2	79 Paket	1 915.222,1	Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan (KPBU), Badan SAR Nasional
		03 - Lokasi yang disediakan fasilitas keselamatan jalan	2	33 Provinsi		
		04 - Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang dibangun	2	33 Provinsi		
		05 - Jumlah pengadaan dan pemasangan ATCS dan ITS	2	23 Lokasi		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.01.04.02 ProP Pembinaan dan Pendidikan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Pencarian dan Pertolongan	01 - Terlaksananya pembinaan dan pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi, pencarian dan pertolongan	01 - Jumlah SDM pencarian dan pertolongan yang berkompeten	1	5 000 Orang	138.031,4	Kementerian Perhubungan, Badan SAR Nasional
		02 - Jumlah lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi	1	45 641 Orang		
	02 - Jumlah pelaksanaan Promosi Keselamatan Jalan Nasional	01 - Promosi Keselamatan Jalan Nasional	1	33 Provinsi		
05.01.05 **KP : Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur**	01 - Terwujudnya ketahanan kebencanaan infrastruktur	01 - Persentase pertambahan jumlah korban bencana banjir (*baseline*: 2019:12,6%)	2	0 persen	8 169 878,1	
		02 - Persentase pertambahan jumlah korban bencana abrasi/pasang laut (*baseline*: -96,7%)	2	0 persen		
		03 - Persentase pertambahan jumlah korban bencana lahar gunung api (*baseline* 2019.-88,8%)	2	0 persen		
05.01 05 01 ProP . Pengembangan Kebijakan Wilayah untuk Ketahanan Bencana dan Penguatan Infrastruktur Vital Tahan Bencana	01 - Terlaksananya pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana	01 - Jumlah wilayah sungai yang menetapkan peta risiko dan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi dan hidrogeologi	2	6 Wilayah Sungai	81.560,9	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Jumlah provinsi yang memiliki peta risiko dan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana tsunami	2	1 Provinsi		
05 01 05 02 ProP : Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Ketahanan Bencana	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana	01 - Jumlah wilayah sungai dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pencegahan banjir	2	20 Wilayah Sungai	7 757 672,1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Jumlah provinsi dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali bencana lumpur dan sedimen	2	5 Provinsi		
		03 - Jumlah kawasan pesisir dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur ketahanan bencana wilayah pesisir	2	15 Kawasan Pesisir		
05 01.05.03 ProP : Penyediaan Sistem Terpadu Peringatan Dini dan Tanggap Darurat Bencana	01 - Terlaksananya penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah dan kegiatan pemantauan penurunan tanah	2	6 Kab/Kota	35.765,2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Jumlah cekungan air tanah dengan pemantauan penggunaan air tanah	2	10 CAT		
		03 - Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan peringatan dini bencana banjir	2	2 Wilayah Sungai		
		04 - Jumlah lokasi dengan pengembangan sistem peringatan dini bencana longsor	2	4 Lokasi		

FN/FP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Jumlah kegiatan tanggap darurat akibat bencana	2	58 Kegiatan		
05.01 05 04 ProP : Restorasi dan Konservasi Infrastruktur Alami	01 - Terlaksananya restorasi dan konservasi infrastruktur alami	01 - Jumlah danau/situ yang direstorasi dan dikonservasi	2	8 Unit	294.879,9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05.01.06 **KP : Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi**	01 - Terbangunnya waduk *multipurpose* dan modernisasi irigasi	01 - Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air	2	15,1 Miliar m^3, Kumulatif	26.277.165,3	
		02 - Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya	2	15 Unit, Kumulatif		
		03 - Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko	2	2 Unit		
		04 - Jumlah daerah irigasi yang melakukan modernisasi	2	9 Daerah Irigasi		
		05 - Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi	2	26 000 Hektar		
05 01 06 01 ProP Perencanaan Pengembangan Bendungan Multiguna dan Pemanfaatan Tampungan Alami	01 - Terlaksananya perencanaan pengembangan bendungan multiguna dan pemanfaatan tampungan alami	01 - Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bendungan baru multiguna dan pemanfaatan tampungan alami	2	6 Dokumen	31.540,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05.01 06 02 ProP Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bendungan	01 - Jumlah bendungan multiguna yang selesai dibangun	2	14 Unit	16.693 508,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05 01 06 03 ProP . Optimalisasi dan Pemanfaatan Tampungan	01 - Terlaksananya optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	01 - Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai fungsi rencananya	2	15 Unit	1 193 837,7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		03 - Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA	2	26 MW		
05.01.06.04 ProP Peningkatan OP dan Keamanan Bendungan	01 - Terlaksananya peningkatan OP dan keamanan bendungan	01 - Jumlah bendungan yang indeks risikonya turun	2	2 Unit	142.916,8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05 01 06.05 ProP Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	01 - Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	2	25.000 Hektar	5 388 494,7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	2	250.000 Hektar		
05.01 06.06 ProP : Peningkatan Pengelolaan Alokasi Air dan Kapasitas Kelembagaan Irigasi	01 - Terlaksananya peningkatan pengelolaan alokasi air dan kapasitas kelembagaan irigasi	01 - Jumlah dokumen peningkatan pengelolaan alokasi air	2	42 Dokumen	2.295.950,9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Jumlah kelembagaan irigasi yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	2	18 Unit		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05 01 06 07 ProP : Pembangunan Sistem Penyediaan Air untuk Komoditas Pertanian Bernilai Ekonomi Tinggi	01 - Terlaksananya sistem penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi	01 - Luas lahan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi beririgasi	2	1 000 Hektar	530 916,2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05.02 **PP : Infrastruktur Ekonomi**	01 - Meningkatnya konektivitas wilayah	01 - Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi	2	339,8 Km	33 560 454,2	
		02 - Panjang jalan baru yang terbangun	2	919,85 Km		
		03 - Panjang jaringan KA yang terbangun (Kumulatif)	2	6.293 Km		
		04 - Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar	2	2 Lokasi		
		05 - Jumlah rute subsidi tol laut	2	26 Rute		
		06 - Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun	2	20 Pelabuhan (6 Selesai, 14 Berlanjut) Lokasi		
		07 - Jumlah bandara baru yang dibangun	2	12 (Berlanjut) Lokasi		
		08 - Jumlah rute jembatan udara	2	31 (Berlanjut) Rute		
		09 - Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota	2	93/69,5/58,5 Persen		
		10 - Kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2	2	83 Persen		
05.02.01 **KP : Konektivitas Jalan**	01 - Terwujudnya konektivitas jalan	01 - Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi	2	3 Lokasi (Dukungan APBN)	20 358 372,1	
		02 - Panjang jalan pada kawasan prioritas yang dibangun	2	679 Km		
05.02 01 01 ProP . Pembangunan Jalan Strategis	01 - Terlaksananya pembangunan jalan strategis	01 - Panjang jalan lintas utama pulau ditangani	2	633,6 Km	10 159.881,1	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (KPBU), Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
		02 - Panjang jembatan lintas utama pulau ditangani	2	6 125,8 Meter		
05 02 01 02 ProP Pembangunan Jalan Tol	01 - Terlaksananya pembangunan jalan tol	01 - Panjang jalan tol yang dibangun (dukungan APBN)	2	3 Km	-	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (KPBU)
05.02.01.03 ProP Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, dan KSPN)	01 - Terlaksananya pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, dan KSPN)	01 - Panjang jalan mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, dan KSPN) yang ditangani	2	147,8 Km	4.197.963,5	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
05 02.01.04 ProP : Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (Pelabuhan, Bandara, Terminal)	01 - Terlaksananya pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) yang dibangun	01 - Panjang jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) yang dibangun	2	33,6 Km	199.922,2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05 02 01.05 ProP Preservasi Jalan Nasional (termasuk Peningkatan/Pelebaran)	01 - Terlaksananya preservasi jalan nasional (termasuk peningkatan/pelebaran)	01 - Panjang jalan nasional yang di preservasi (termasuk peningkatan/pelebaran)	2	509 Km	5.159 817,4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05 02.01 06 ProP : Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Daerah	01 - Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah	01 - Panjang jalan daerah yang dibangun	2	38,28 Km	524 836,5	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
		02 - Panjang jembatan daerah yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	2	952,4 Meter		
05 02 01 07 ProP . Pengembangan Wilayah Suramadu	01 - Terlaksananya pengembangan wilayah Suramadu	01 - Luas lahan wilayah Suramadu yang dikembangkan	2	0,06 Km²	115.951,4	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)
		02 - Panjang jalan wilayah Suramadu yang dibangun/dipelihara/ditingkatkan	2	8,7 Km		
		04 - Jumlah kawasan yang di pelihara	2	0,09 Km²		
05.02.02 **KP : Konektivitas Kereta Api**	01 - Terwujudnya konektivitas kereta api	01 - Jumlah jalur kereta api yang dibangun	2	6 Lokasi	4 208 975,1	
05.02 02.01 ProP Pembangunan Jalur Kereta Api Antarkota	01 - Terlaksananya pembangunan jalur kereta api antarkota	01 - Jumlah jalur kereta api antarkota yang dibangun	2	4 Lokasi	1.169 926,9	Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan (KPBU)
05 02 02 02 ProP Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api	01 - Terlaksananya peningkatan, pemeliharaan, perawatan dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api	01 - Jumlah jalur kereta api yang ditingkatkan dan dipelihara	2	8 Lokasi	2 408 135,5	Kementerian Perhubungan
		02 - Jumlah kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api	2	1 Paket		
05.02 02.03 ProP Pembangunan KA Akses Pelabuhan dan Bandara	01 - Terlaksananya pembangunan KA akses pelabuhan dan bandara	01 - Jumlah KA akses pelabuhan dan bandara yang dibangun	2	2 Lokasi	400.877,8	Kementerian Perhubungan
05 02 02.04 ProP Penyediaan PSO dan Subsidi	01 - Terlaksananya penyediaan PSO dan Subsidi	01 - Jumlah layanan subsidi perkeretaapian yang tersedia	2	9 Lintas	230 034,9	Kementerian Perhubungan
05.02.03 **KP : Konektivitas Laut**	01 - Terwujudnya konektivitas laut	01 - Jumlah lokasi pengembangan/pembangunan pelabuhan pendukung konektivitas laut	2	19 Lokasi	3 659.326,5	
		02 - Jumlah layanan angkutan tol laut tetap dan teratur	2	26 Rute		
		03 - Jumlah layanan angkutan laut perintis	2	113 Rute		
		04 - Jumlah layanan angkutan ternak	2	6 Rute		
		05 - Jumlah sarana transportasi laut yang dibangun	2	39 Unit		
05.02 03 02 ProP · Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut	01 - Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan laut	01 - Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan	2	17 Lokasi	1 152.895,3	Kementerian Perhubungan
05 02 03 03 ProP Pelabuhan Mendukung Kawasan Pariwisata Prioritas	01 - Terbangunnya Pelabuhan Pendukung Kawasan Pariwisata Prioritas	01 - Jumlah pelabuhan pendukung kawasan pariwisata prioritas	2	2 Lokasi	342 320,8	Kementerian Perhubungan

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05 02 03.04 ProP Penyelenggaraan Layanan Subsidi Tol Laut dan Perintis Angkutan Laut	01 - Terlaksananya Penyelenggaraan layanan subsidi Tol Laut dan perintis angkutan laut	01 - Jumlah layanan subsidi Tol Laut, perintis angkutan laut, dan angkutan ternak yang tetap dan teratur	2	184 Rute	1.777.587,7	Kementerian Perhubungan
05.02.03 05 ProP Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	01 - Terlaksananya pengadaan sarana dan prasana transportasi laut	01 - Jumlah kapal negara yang dibangun	2	39 Unit	382.332,4	Kementerian Perhubungan
05.02 03 06 ProP : Pengembangan Teknologi Informasi Pelayaran	01 - Terlaksananya pengembangan teknologi informasi pelayaran	01 - Jumlah teknologi informasi pelayaran yang dikembangkan	2	22 Unit	4 190,3	Kementerian Perhubungan
05.02.04 **KP : Konektivitas Udara**	01 - Terwujudnya konektivitas udara	01 - Penyediaan layanan jembatan udara	2	1 Paket	3 451 200,6	
		02 - Jumlah bandara pendukung konektivitas udara yang dikembangkan	2	12 Lokasi		
		03 - Jumlah bandara hub primer yang ditingkatkan kapasitasnya	2	64 Lokasi		
		04 - Penyiapan bandara perairan (*waterbased airport*) yang dibangun	2	1 Lokasi		
05 02 04.01 ProP Jembatan Udara	01 - Terlaksananya penyediaan subsidi perintis penumpang, Kargo dan BBM	01 - Jumlah subsidi perintis penumpang, kargo dan BBM pendukung jembatan udara	2	31 Rute	544 792,4	Kementerian Perhubungan
	02 - Terlaksananya pengembangan bandar udara pendukung jembatan udara	01 - Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan	2	10 Lokasi		
05.02 04 02 ProP : Pembangunan Bandara Baru	01 - Terlaksananya pembangunan bandara baru	01 - Jumlah bandara yang dikembangkan	2	12 Lokasi	1 236 567,3	Kementerian Perhubungan
05.02 04.03 ProP · Pengembangan Bandara Hub Primer	01 - Terlaksananya pengembangan bandara hub primer	01 - Jumlah bandara hub primer yang direhabilitasi/dikembangkan	2	64 Lokasi	1 667.840,9	Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan (KPBU)
05 02.04.04 ProP : Pembangunan Bandara Perairan (*Waterbased Airport*) untuk Mendukung Destinasi Pariwisata	01 - Terlaksananya penyusunan kajian penyiapan pembangunan perairan (*waterbased airport*) untuk mendukung destinasi pariwisata	01 - Jumlah kajian penyiapan bandara perairan	2	1 Dokumen	2.000,0	Kementerian Perhubungan
05.02.05 **KP : Konektivitas Darat**	01 - Terwujudnya konektivitas darat	01 - Jumlah pelabuhan penyeberangan, danau dan sungai yang dibangun dan dikembangkan	2	41 Lokasi	1.882.579,9	
		02 - Jumlah terminal penumpang dan barang antarnegara dibangun	2	7 Lokasi		
		03 - Jumlah layanan perintis angkutan penyeberangan	2	234 Lintas		
		04 - Jumlah layanan perintis angkutan jalan	2	307 Lintas		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.V.11-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05 02 05 01 ProP : Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	01 - Terlaksananya pembangunan pelabuhan penyeberangan baru	01 - Jumlah pelabuhan penyeberangan, danau dan sungai pada jalur logistik yang dibangun	2	30 Lokasi	886 369,5	Kementerian Perhubungan
05 02.05.02 ProP . Pembangunan Terminal Penumpang dan Barang Antarnegara	01 - Terlaksananya pembangunan terminal penumpang dan barang antarnegara	01 - Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan	2	7 Lokasi	179 216,0	Kementerian Perhubungan
05.02.05 03 ProP Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru	01 - Terlaksananya pembangunan kapal penyeberangan perintis baru	01 - Jumlah kapal penyeberangan yang dibangun	2	6 Unit	174.330,5	Kementerian Perhubungan
05 02 05 04 ProP : Penyediaan Layanan Perintis Angkutan Darat untuk Penumpang dan Barang	01 - Terlaksananya Penyediaan layanan perintis angkutan darat untuk penumpang dan barang	01 - Jumlah trayek perintis angkutan penyeberangan yang dilayani	2	234 Lintas	642.663,9	Kementerian Perhubungan
		02 - Jumlah trayek perintis angkutan jalan yang dilayani	2	307 Lintas		
05.03 **PP : Infrastruktur Perkotaan**	01 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	01 - Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/*flyover*/*underpass*	2	5 Kota	6 489 802,4	
05.03.01 **KP : Transportasi Perkotaan**	01 - Terwujudnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	01 - Jumlah kota yang dikembangkan sistem angkutan umum massal perkotaan di 6 wilayah metropolitan	2	2 Perkotaan	6.192 574,8	
05.03 01 01 ProP Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang)	01 - Terlaksananya pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di 6 wilayah metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang)	01 - Jumlah kota yang dibangun angkutan massal berbasis rel	2	2 Perkotaan	1.791 382,5	Kementerian Perhubungan
05.03.01.02 ProP Pembangunan Fasilitas Alih Moda yang Terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Perekonomian, Permukiman dan Fasilitas Umum pada Simpul-simpul Transportasi	01 - Terlaksananya pembangunan fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi	01 - Jumlah fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi yang terbangun	2	7 Lokasi	259 000,0	Kementerian Perhubungan
05.03 01 03 ProP : Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Perkotaan Besar Lainnya	01 - Terlaksananya pengembangan sistem angkutan umum massal di perkotaan besar Lainnya	01 - Jumlah perkotaaan yang dikembangkan sistem angkutan umum massal berbasis rel yang dibangun	2	1 Perkotaan	2.702.077,3	Kementerian Perhubungan
05.03 01.04 ProP : Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang antara Jalan dan KA di Perkotaan	01 - Terlaksananya pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan	01 - Panjang perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan yang dibangun	2	2 Lokasi	495.421,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05 03 01 05 ProP Pembangunan Jalan Perkotaan	01 - Terlaksananya pembangunan jalan perkotaan	01 - Panjang jalan perkotaan yang ditangani	2	39 Km	444 693,8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Panjang jembatan perkotaan yang ditangani	2	10 Meter		

SK No 024144 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Panjang *fly over* dan *underpass* di perkotaan yang dibangun	2	1.241 Meter		
05 03 01 06 ProP Penyediaan Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan	01 - Terlaksananya penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan	01 - Jumlah subsidi angkutan umum massal perkotaan	2	10 Paket	500 000,0	Kementerian Perhubungan
05.03.02 **KP : Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan**	01 - Terbangunnya infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan	01 - Persentase rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga	2	16,25 Persen (Kumulatif)	45.181,8	
05 03.02 01 ProP Pengembangan TIK Perkotaan	01 - Terlaksananya pengembangan TIK Perkotaan	01 - Jumlah rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar	2	11 000.000 Rumah Tangga (Kumulatif)	45.181,8	Kementerian Komunikasi dan Informatika
		02 - Jumlah kota/kabupaten pada kawasan pariwisata superprioritas dan kota/kabupaten yang berada di sekitar kawasan IKN yang difasilitasi menyusun masterplan *smartcity*	2	51 Kab/Kota (Kumulatif)		
05.03.03 **KP : Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan**	01 - Terlaksananya penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan	01 - Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum dan air limbah yang aman dan handal	2	7 Kab/Kota	252 045,8	
05 03.03.01 ProP Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	01 - Terlaksananya penyediaan dan penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang handal dan terintegrasi	01 - Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP)	2	4 BUMD Air Minum/PDAM	252 045,8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Jumlah PDAM yang menerapkan *Smart Grid Water Management*	2	3 BUMD Air Minum/PDAM		
05.03.04 **KP : Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan**	01 - Terlaksananya penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan	01 - Jumlah pengurangan kawasan kumuh di perkotaan	2	0 Kawasan	-	
05.03.04 01 ProP . Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	01 - Terlaksananya fasilitasi penanganan permukiman kumuh perkotaan	01 - Jumlah peremajaan permukiman kumuh di perkotaan	2	0 Kawasan	-	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05.04 **PP : Energi dan Ketenagalistrikan**	01 - Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	01 - Jumlah Produksi Tenaga Listrik	2	359.946,10 GWh	2 972.608,8	
		02 - Nilai penurunan emisi CO_2 pembangkit	2	4,92 Juta Ton		
		03 - Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota-Kumulatif	2	1.470.506 SR		
		04 - Jumlah Kapasitas Kilang Minyak-kumulatif	2	1.151.000 *Barrel per Calendar Day*/BPCD		
05.04.01 **KP : Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan**	01 - Terlaksananya keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan	01 - Penurunan Intensitas Energi Final	2	0,9 SBM/Miliar Rupiah	272.118,2	

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Porsi kapasitas terpasang pembangkit EBT terhadap total pembangkit	2	15 Persen		
05.04.01 01 ProP Perbaikan Efisiensi dan Emisi Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya perbaikan efisiensi dan emisi energi dan ketenagalistrikan	01 - Kapasitas Terpasang EBT Tambahan	2	1001,1 MW	272.118,2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Susut jaringan	2	9,01 Persen		
05.04.02 **KP : Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan**	01 - Meningkatnya akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	01 - *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI)	2	10 Jam/Pelanggan	2 137 002,3	
		02 - Jumlah penyediaan gas	2	185 530 Setara Barel Minyak (SBM)		
05 04.02.01 ProP Perluasan Jaringan Gas Kota	01 - Terlaksananya Perluasan Jaringan Gas Kota	01 - Pembangunan Jaringan Gas Kota-APBN(SR)	2	120 776 SR	1 237.495,0	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
05 04 02.02 ProP Perluasan Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	01 - Jumlah pelanggan listrik	2	79 187 Ribu Pelanggan	899 507,3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Jumlah penambahan penyalur BBM Satu Harga	5	76 Penyalur		
05.04.03 **KP : Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik**	01 - Tersedianya pasokan energi dan tenaga listrik yang cukup	01 - Jumlah cadangan operasional BBM	2	23 Hari	563 488,3	
	02 - Terlaksananya pembangunan pipa gas bumi	01 - Panjang ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasi-kumulatif	2	15 800 Km		
05 04 03.01 ProP : Peningkatan Kehandalan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya peningkatan kehandalan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	01 - Jumlah penambahan kapasitas pembangkit	2	6 446 MW	558 141,3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Jumlah kebijakan peningkatan tata kelola ketenagalistrikan	2	3 Regulasi/Rekomendasi		
05.04.03.02 ProP Pembangunan Kilang Minyak Bumi	01 - Terlaksananya Pembangunan Kilang Minyak Bumi	01 - Jumlah peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (kumulatif)	2	1.151 Ribu BOPD	537,1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
05 04 03 03 ProP · Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan	01 - Terlaksananya Pembangunan Pipa gas Bumi Trans Kalimantan	01 - Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalimantan	2	2.219 Km	4 809,9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
05.05 **PP : Transformasi Digital**	01 - Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	01 - Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK	2	8,80 Persen	14 760.674,2	
		02 - Persentase pengguna internet	2	74,20 Persen		
		03 - Proporsi Individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	1	72 Persen		
05.05.01 **KP : Penuntasan Infrastruktur TIK**	01 - Terlaksananya penuntasan infrastruktur TIK	01 - Persentase wilayah berpemukiman yang mendapatkan akses seluler (4G)	2	98,5 Persen, Kumulatif	12 295 478,0	
		03 - Persentase rasio harga layanan *fixed broadband* terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan up to 30 Mbps)	2	10 Persen		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase rasio harga layanan mobile broadband terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)	2	0,4 Persen		
		05 - Persentase populasi yang terlayani penyiaran radio publik	2	91 Persen		
		06 - Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital	2	60 Persen		
		02 - Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik	2	37,15 Persen, Kumulatif		
05 05 01 01 ProP Pengembangan Infrastruktur Pitalebar	01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur pitalebar	01 - Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler 4G	2	2417 Desa, Kumulatif	10.874.212,1	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika KPBU
05 05 01 02 ProP Pengembangan Infrastruktur Penyiaran	01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur penyiaran	01 - Jumlah dukungan infrastruktur penyiaran digital	2	10 Unit	729 471,1	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Televisi Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika
05 05 01 03 ProP . Pengembangan Infrastruktur TIK Pemerintahan	01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan	01 - Persentase K/L/D yang menggunakan/terhubung jaringan intra pemerintah (JIP/*Government Network*)	2	15 Persen	691 794,8	Kementerian Komunikasi dan Informatika
05.05.02 **KP : Pemanfaatan Infrastruktur TIK**	01 - Terwujudnya pemanfaatan infrastruktur TIK	01 - Persentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB	5	4,5-5,7 Persen	360 954,5	
		02 - Persentase K/L/D yang memiliki layanan publik terintegrasi	4	60 Persen		
05 05 02.01 ProP . Pemanfaatan TIK Layanan Pemerintah	01 - Terlaksananya pemanfaatan TIK layanan pemerintah	01 - Jumlah aplikasi generik yang dikembangkan secara multiplatform	4	15 Aplikasi	36.954,5	Kementerian Komunikasi dan Informatika
05.05 02.02 ProP . Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat dan Dunia Usaha	01 - Terlaksananya pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha	01 - Jumlah penambahan *unicorn* baru	5	0 *Unicorn* Baru	324.000,0	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Desa PDTT
05.05.03 **KP : Fasilitas Pendukung Transformasi Digital**	01 - Tersedianya fasilitas pendukung transformasi digital	01 - Jumlah peserta pelatihan digital skill (termasuk kawasan prioritas) untuk menuju ekonomi digital	1	12.000.000 Peserta	2.104.241,7	
05.05.03.01 ProP : Pengelolaan Informasi secara Aman dan Terintegrasi	01 - Terlaksananya pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi	01 - Jumlah konten negatif yang diblokir	1	150.000 Konten Negatif	843 889,8	Kementerian Komunikasi dan Informatika
05.05.03.02 ProP · Pengembangan Literasi dan Keahlian TIK	01 - Terlaksananya pengembangan literasi dan keahlian TIK	01 - Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	5	12 000.000 Orang	1 174 000,0	Kementerian Komunikasi dan Informatika

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05 05 03.03 ProP Pengembangan dan Fasilitasi Industri TIK	01 - Terlaksananya pengembangan dan fasilitasi industri TIK	01 - Layanan Penggunaan Frekuensi Radio	5	1 Layanan	86.351,9	Kementerian Komunikasi dan Informatika

Keterangan
Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi
1) Pembangunan SDM
2) Pembangunan Infrastruktur
3) Penyederhanaan Regulasi
4) Penyederhanaan Birokrasi
5) Transformasi Ekonomi

Catatan:
1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional,
2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dalam proses finalisasi detail target, alokasi, dan lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota,
3) Rincian pada masing-masing Prioritas Nasional mencakup Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta),
4) Perubahan rincian beserta pendanaannya dimungkinkan setelah mendapat persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

MATRIKS PEMBANGUNAN RKP 2021

PRIORITAS NASIONAL : MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06 **PN: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	01 - Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	01 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		68,96 Nilai	12 284 432,0	
	02 - Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	01 - Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB		0,69 Persen		
	03 - Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) terhadap *baseline*	01 - Persentase penurunan emisi GRK		23,55 Persen		
		02 - Persentase penurunan intensitas emisi GRK		23,40 Persen		
06.01 **PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**	01 - Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut	01 - Indeks Kualitas Air (IKA)	5	55,20 Nilai	3 276 219,0	
		02 - Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	5	59,00 Nilai		
		03 - Indeks Kualitas Udara (IKU)	5	84,20 Nilai		
		04 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	5	62,50 Nilai		
06.01.01 **KP: Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3**	01 - Menurunnya potensi kejadian pencemaran dan kerusakan SDA dan LH	01 - Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan	5	1 141 Lokasi	1 967 279,4	
		02 - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku mutu lingkungan hidup	5	2 625 Perusahaan		
		03 - Luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahankan secara nasional	5	70 Juta Ha		
		04 - Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari *baseline*	5	2,0 Persen		
		05 - Luas kawasan konservasi	5	27 Juta Ha		
		06 - Luas kawasan konservasi perairan	5	24,6 Juta Ha		
		07 - Akurasi informasi meteorologi	5	77 Persen		
		08 - Akurasi informasi klimatologi	5	76 Persen		
06 01 01 01 ProP Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	01 - Tersedianya data kualitas air, air laut, dan udara	01 - Jumlah penambahan alat pemantauan kualitas udara ambien secara otomatis	5	25 Unit	395 571,2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BMKG, DAK
		02 - Jumlah penambahan alat pemantauan kualitas air sungai dan danau secara otomatis	5	200 Unit		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah lokasi pemantauan kualitas air laut secara manual	5	34 Provinsi		
06 01.01 02 ProP Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	01 - Terlaksananya pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan	01 - Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu emisi	5	2 625 Badan Usaha	13.852,5	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu air limbah	5	2 625 Badan Usaha		
		03 - Jumlah pelabuhan yang terpantau melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	5	25 Pelabuhan		
		04 - Jumlah badan usaha tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	5	85 Badan Usaha		
		05 - Jumlah badan usaha yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	5	350 Badan Usaha		
		06 - Jumlah lokasi pengawasan terhadap *effluent* IPAL, IPLT, dan *leachate* TPA	5	33 Kab/Kota		
06 01 01 03 ProP Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim	01 - Tersedianya informasi cuaca dan iklim	01 - Persentase informasi meteorologi yang berkualitas	5	87 Persen	419 760,5	BMKG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
		02 - Persentase informasi klimatologi yang berkualitas	5	79 Persen		
06.01.01.04 ProP Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	01 - Menurunnya angka kejadian kebakaran lahan dan hutan	01 - Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan	5	1 200 Desa	247 861,6	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
		02 - Jumlah kawasan hidrologi gambut yang memiliki infrastruktur tata air adaptif kekeringan/neraca air yang semakin membaik dalam suatu KHG	5	100 KHG		
06 01 01 05 ProP: Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup	01 - Jumlah lembaga/komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	1	730 Unit	21.083,0	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	5	5 Produk		
06.01.01 06 ProP: Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	01 - Terlaksananya pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem	01 - Luas kawasan konservasi	5	27 Juta Ha	260 616,2	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
		02 - Luas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	5	12.500.000 Hektar (Kumulatif)		
		03 - Jumlah unit perlindungan kehati di luar kawasan konservasi yang dibentuk dalam rangka pencegahan kehilangan kehati dan kerusakan ekosistem	5	22 Unit		
		04 - Luas hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	5	65 Juta Ha		
06.01.01.07 ProP Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	01 - Tersedianya data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem	01 - Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	5	18.000.000 Hektar	608 534,4	Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.01.02 **KP: Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	01 - Meningkatnya respons cepat dalam mengurangi intensitas kerusakan SDA dan LH	01 - Jumlah sampah yang terkelola secara nasional	5	67,1 Juta Ton	257 750,1	
		02 - Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari *baseline*	5	30 Persen		
		03 - Jumlah limbah B3 yang terkelola	5	98,68 Juta Ton		
		04 - Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari *baseline* 4.546.946,30 kg BOD/hari	5	0,032 Persen		
06 01 02 01 ProP: Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	01 - Tertanganinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	01 - Jumlah fasilitas pengolahan air limbah terbangun	2	30 Unit	55.000,0	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
		02 - Jumlah lokasi pengendalian pencemaran pesisir dan laut dari tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya	5	11 Lokasi		
06 01.02.02 ProP: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	01 - Terkelolanya timbulan sampah rumah tangga dan sampah plastik melalui pengurangan dan penanganan timbulan sampah	01 - Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional	5	16,4 Juta Ton	30 750,0	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional	5	50,7 Juta Ton		
06 01 02 03 ProP: Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	01 - Meningkatnya kualitas lingkungan melalui pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri	01 - Persentase penghapusan merkuri dari *baseline* tahun 2019 sebanyak 50 ton di 180 kab/kota di 30 provinsi	5	10 Persen	21.600,0	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin	5	10 Unit		
06.01 02 04 ProP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu	01 - Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis	01 - Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 secara terpadu yang terbangun	2	2 Unit	150 400,1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan
		02 - Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan	2	7 Unit		
06.01.03 **KP: Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	01 - Meningkatnya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	5	310 000 Hektar	825.031,9	
		02 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan secara nasional	5	305.000 Ton		
		03 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan	5	6 Lokasi		
		04 - Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya	5	25 Jenis		
06.01.03.01 ProP: Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	01 - Terlaksananya restorasi dan pemulihan lahan gambut	01 - Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	5	300 000 Hektar	257.150,4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	5	10.000 Hektar		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.01.03.02 ProP: Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	01 - Terlaksananya pemulihan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3	01 - Luas lahan bekas tambang yang dipulihkan dan direklamasi secara nasional	5	7.060 Hektar	187.429,5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan institusi yang terpulihkan	5	270.000 Ton		
		03 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan noninstitusi yang terpulihkan	5	35 000 Ton		
06.01.03 03 ProP. Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	01 - Terlaksananya pemulihan kerusakan lingkungan pesisir dan laut	01 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang dipulihkan	5	6 Lokasi	6 000,0	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
06 01 03 04 ProP Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	01 - Terlaksananya pemulihan habitat spesies terancam punah	01 - Jumlah luas kawasan konservasi yang ditangani permasalahannya	5	1,8 Juta Ha	127.908,8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
06.01.03.05 ProP: Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	01 - Terlaksananya peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah	01 - Jumlah luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	5	29,5 Juta Ha	246 543,2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
06.01.04 **KP: Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	01 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	5	60 Persen	226.157,6	
		02 - Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	5	387 Kasus		
		03 - Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	5	1 900.000 Hektar		
		04 - Jumlah daerah yang memiliki Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5	7 Daerah		
06 01 04 01 ProP: Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	01 - Terlaksananya penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah	01 - Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tervalidasi kelayakannya dan terjamin kualitasnya berbasis dokumen daya dukung daya tampung	5	30 KLHS	18 749,3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
06.01.04 02 ProP: Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Terlaksananya penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK	5	1 500 Badan Usaha	105 109,7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
		02 - Jumlah provinsi dan kab/kota yang mampu menerapkan sistem izin lingkungan yang berfokus pada penurunan beban pencemar lingkungan hidup dengan berbasis sistem informasi dalam rangka mendukung Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/OSS	3	50 Provinsi/Kab/Kota		
		03 - Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	5	105 Operasi		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06 01 04 03 ProP Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Terlaksananya penguatan mekanisme pidana, perdata, dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Jumlah kasus pidana LHK yang terselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	5	200 Perkara	102 298,6	Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	5	102 Perkara		
06.02 **PP:Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim**	01 - Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	01 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana	5	0,10 Persen	4 591.279,8	
		02 - Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	5	0,59 Persen		
		03 - Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	5	4,50 Menit		
06.02.01 **KP: Penanggulangan Bencana**	01 - Meningkatnya sistem dan respon peringatan dini yang didukung oleh upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana	01 - Rasio investasi PRB terhadap APBN	5	0,47 Rasio	1 991 650,0	
		02 - Persentase kelengkapan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologis dan tektonis	2	92 Persen		
06.02.01.01 ProP: Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana	01 - Terlaksananya penguatan data, informasi, dan literasi bencana	01 - Jumlah layanan data dan informasi bencana yang akurat	4	5 Layanan	326 408,7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan, BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Kemendesa PDTT
		02 - Jumlah forum konsolidasi data, informasi, dan pengetahuan	4	15 Kegiatan		
		03 - Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana	1	100 Kegiatan		
06 02 01 02 ProP: Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana	01 - Meningkatnya kualitas Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana yang saling bersinergi	01 - Jumlah penyusunan kajian untuk regulasi dan tata kelola bencana	4	14 Kajian	5.165,2	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Keuangan
		02 - Jumlah sistem kebencanaan yang dikembangkan	2	3 Sistem		
06.02.01 03 ProP Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	01 - Meningkatnya kualitas sarana prasarana kebencanaan	01 - Jumlah kab/kota yang memiliki standar minimal peralatan dan logistik kebencanaan	3	225 Kab/Kota	106 511,8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
		02 - Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	2	70 Persen		
06.02 01.04 ProP. Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana	01 - Terlaksananya integrasi kerjasama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana	01 - Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana	2	50 Kajian	11.609,1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
		02 - Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pasca bencana	5	55 Dokumen		
06.02.01.05 ProP: Penguatan Penanganan Darurat Bencana	01 - Terlaksananya penguatan penanganan darurat bencana	01 - Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana per 100.000 jiwa	1	0,2 Jiwa	432.524,6	Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
		02 - Persentase waktu respon penanganan darurat kurang dari 24 Jam	1	100 Persen		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06 02 01 06 ProP Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Terdampak Bencana	01 - Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana	01 - Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	2	75 Persen	19 659,2	Kemendesa PDTT, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
		02 - Kenaikan ketahanan di daerah pascabencana	1	5 Persen		
06 02 01 07 ProP Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu	01 - Menguatnya sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu	01 - Jumlah Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana (MHEWS) Terpadu	2	1 Sistem	1 089 771,4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BMKG, Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
		02 - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana	1	200 Kelompok		
		03 - Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multi ancaman bencana	1	514 Kab/Kota		
		04 - Kenaikan Indeks Kesiapsiagaan Bencana	1	0,0044 Indeks		
06.02.02 **KP: Peningkatan Ketahanan Iklim**	01 - Menurunnya potensi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas	01 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir	5	0,412 Persen	2.599 629,8	
		02 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air	5	0,028 Persen		
		03 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian	5	0,107 Persen		
		04 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan	5	0,044 Persen		
06 02 02 01 ProP Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	01 - Meningkatnya ketahanan sektor kelautan dan pesisir terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	5	8 Kawasan	1 278 502,2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BMKG, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan
		02 - Panjang tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan	2	31 Km		
06 02 02 02 ProP Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	01 - Meningkatnya ketahanan sektor air terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	5	56 000 Hektar	1 197 320,4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
06 02 02 03 ProP Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim	01 - Meningkatnya ketahanan sektor pertanian terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Jumlah penyuluh pertanian dan petani yang meningkat pemahaman iklim melalui sekolah lapang iklim	5	1 275 Orang	84 613,0	BMKG, Kementerian Pertanian
		02 - Jumlah teknologi adaptasi perubahan iklim	5	1 Teknologi		
06.02.02.04 ProP: Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim	01 - Meningkatnya ketahanan sektor kesehatan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan Kabupaten/kota sehat (KKS)	3	220 Kab/Kota	39 194,2	Kementerian Kesehatan
06.03 **PP: Pembangunan Rendah Karbon**	01 - Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan	01 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi	5	14,06 Persen	4 416 933,2	

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor lahan	5	35,11 Persen		
		03 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor limbah	5	6,89 Persen		
		04 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor IPPU	5	4,18 Persen		
		05 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor pesisir dan kelautan	5	6,60 Persen		
06.03.01 **KP: Pembangunan Energi Berkelanjutan**	01 - Meningkatnya keberlanjutan pengelolaan energi	01 - Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional	5	14,5 Persen	643 866,9	
		02 - Intensitas energi primer	5	138 SBM/Rp Miliar		
		03 - Penurunan intensitas energi final	5	0,9 SBM/Rp Miliar		
06.03 01 01 ProP Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	01 - Meningkatnya pembangunan pembangkit dan penggunaan energi baru terbarukan	01 - Kapasitas tambahan terpasang pembangkit EBT	2	1001,1 MW	635 760,3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Pemanfaatan biofuel untuk Domestik	5	10,2 Juta Kiloliter		
06 03 01.02 ProP Efisiensi dan Konservasi Energi	01 - Meningkatnya efisiensi dan konservasi energi	01 - Jumlah peralatan yang disusun SKEM-nya	5	2 Peralatan	8 106,6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
06.03.02 **KP: Pemulihan Lahan Berkelanjutan**	01 - Meningkatnya keberlanjutan pemulihan lahan	01 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	5	310 000 Hektar	2 663 456,5	
		02 - Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional	5	434 000 Hektar		
		03 - Persentase lahan baku baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	5	70 Persen		
06 03 02 01 ProP Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut	01 - Meningkatnya upaya restorasi dan pemulihan lahan gambut	01 - Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	5	300 000 Hektar	240 150,4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	5	10 000 Hektar		
06 03 02.02 ProP Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi	01 - Meningkatnya upaya rehabilitasi hutan lahan dan reforestasi	01 - Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional	5	434.000 Hektar	808 056,0	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
06 03 02 03 ProP Pengurangan Laju Deforestasi	01 - Berkurangnya laju deforestasi	01 - Laju deforestasi	5	430 000 Hektar/Tahun	346 450,7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
06 03 02 04 ProP Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	01 - Terlaksananya optimasi lahan pertanian	01 - Jumlah optimasi lahan pertanian	5	100 000 Hektar	1 268 799,4	Kementerian Pertanian

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.03.03 **KP: Pengelolaan Limbah**	01 - Meningkatnya pengelolaan limbah	01 - Jumlah sampah yang terkelola secara nasional	5	67 Juta Ton	1 059.948,3	
06.03.03.01 ProP Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	01 - Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga	01 - Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional	5	16,4 Juta Ton	1.059.948,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional	5	50,7 Juta Ton		
06.03.04 **KP: Pengembangan Industri Hijau**	01 - Meningkatnya keberlanjutan industri	01 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	5	9 Persen	4 250,0	
06.03 04 01 ProP: Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi	01 - Meningkatnya penerapan proses dan teknologi yang lebih hijau	01 - Laporan penanganan masalah limbah B3 melalui standardisasi, *circular economy* dan pedoman	5	2 Laporan	4 250,0	Kementerian Perindustrian
06.03.05 **KP: Rendah Karbon Pesisir dan Laut**	01 - Meningkatnya pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan	01 - Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove	5	1 650 Hektar	45 411,5	
06.03.05.01 ProP: Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan	01 - Meningkatnya upaya inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan	01 - Jumlah lokasi pemulihan kerusakan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil	5	6 Lokasi	45 411,5	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Keterangan
Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi
1) Pembangunan SDM
2) Pembangunan Infrastruktur
3) Penyederhanaan Regulasi
4) Penyederhanaan Birokrasi
5) Transformasi Ekonomi

Catatan:
1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional,
2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dalam proses finalisasi detail target, alokasi, dan lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota;
3) Rincian pada masing-masing prioritas nasional mencakup Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
4) Perubahan rincian beserta pendanaannya dimungkinkan setelah mendapat persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS PEMBANGUNAN RKP 2021

PRIORITAS NASIONAL : MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07 **PN : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	01 - Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	01 - Indeks Demokrasi Indonesia		77,72 Nilai	31.906 974,1	
		02 - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah		65 Persen		
	02 - Optimalnya kebijakan luar negeri	01 - Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional		96 Nilai		
	03 - Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap	01 - Indeks Pembangunan Hukum		0,67 Nilai		
	04 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola	01 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas K/L		75 Persen		
		02 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas Provinsi		60 Persen		
		03 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas Kabupaten/Kota		35 Persen		
	05 - Terjaganya stabilitas keamanan nasional	01 - Persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa diseluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi		100 Persen		
07.01 **PP : Konsolidasi Demokrasi**	01 - Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif	01 - Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik	3	3 Dokumen	680 474,8	
07.01.01 **KP : Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi**	01 - Terwujudnya penguatan kapasitas lembaga demokrasi	01 - Skor IDI variabel kapasitas lembaga demokrasi	4	75,35 Nilai	130.376,4	
07.01.01.02 ProP : Penguatan Peraturan Perundangan Bidang Politik	01 - Terwujudnya penguatan peraturan perundangan bidang politik	01 - Jumlah penyusunan UU bidang politik yang lebih komprehensif	3	2 UU	1.100,0	Kementerian Dalam Negeri
07.01.01.03 ProP Peningkatan Bantuan Keuangan Partai Politik	01 - Terlaksananya peningkatan bantuan keuangan partai politik	01 - Jumlah peningkatan bantuan keuangan partai politik	3	126.376.418 Suara Sah	126.376,4	Kementerian Dalam Negeri

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07 01 01.04 ProP Penguatan Demokrasi Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas Partai Politik	01 - Terlaksananya penguatan demokrasi internal, transparansi, dan akuntabilitas partai politik	01 - Jumlah peningkatan kualitas demokrasi internal partai politik	1	50 Orang	700,0	Kementerian Dalam Negeri
07 01 01 05 ProP Penguatan Demokrasi di Daerah	01 - Terlaksananya penguatan demokrasi di daerah	01 - Jumlah provinsi yang mendapatkan penguatan demokrasi	3	15 Provinsi	2 200,0	Kementerian Dalam Negeri
07.01.02 **KP : Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan**	01 - Terlaksananya penguatan kesetaraan dan kebebasan	01 - Skor IDI variabel kebebasan	3	82,50 Nilai	72.994,0	
		02 - Skor IDI variabel kesetaraan	3	77,90 Nilai		
		03 - Indeks Kerawanan Pemilu	3	45 Nilai		
07 01 02 01 ProP : Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih	01 - Terlaksananya pendidikan politik dan pendidikan pemilih	01 - Terbentuknya Rumah Pintar Pemilu dan Pusat Pengawasan Partisipatif di 549 Satker (Nasional, 34 Provinsi, dan 514 Kabupaten/Kota)	1	549 Satker	58 266,3	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
07.01.02 02 ProP : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kepemiluan	01 - Terlaksananya pemilu yang akuntabel dan sinergis	01 - Jumlah pelaksanaan pemilu yang akuntabel dan sinergis di daerah	1	2.100 Daerah	13 427,7	Komisi Pemilihan Umum
07 01 02.03 ProP Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan	01 - Jumlah pengurus ormas yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik	1	200 Orang	1 300,0	Kementerian Dalam Negeri
07.01.03 **KP : Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik**	01 - Meningkatnya kualitas komunikasi publik	01 - Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan program prioritas pemerintah	1	71 Persen	477.104,4	
		02 - Persentase konten informasi publik yang berkualitas	1	83 Persen		
		03 - Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional	1	62.264 Orang		
07.01 03.01 ProP : Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah	01 - Terlaksananya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah	01 - Tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik	3	3 Dokumen	25 629,7	Kementerian Komunikasi dan Informatika
07 01 03.02 ProP Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik secara Merata dan Berkeadilan terutama di Wilayah 3T	01 - Tersedianya konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan terutama di wilayah 3T	01 - Persentase tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik	1	63 Persen	119.380,2	Kementerian Komunikasi dan Informatika
07 01 03 03 ProP : Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	01 - Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	01 - Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional	1	62.264 Orang	290.185,3	Kementerian Komunikasi dan Informatika

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07 01.03.04 ProP : Peningkatan Literasi TIK Masyarakat	01 - Terlaksananya peningkatan literasi TIK masyarakat	01 - Jumlah masyarakat yang mendapat pengenalan TIK	1	4 400 Orang	2.433,1	Kementerian Komunikasi dan Informatika
07 01 03 05 ProP : Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	01 - Terlaksananya penelitian strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	01 - Jumlah penelitian strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	4	1 Kajian	1 500,0	Kementerian Komunikasi dan Informatika
07 01 03 06 ProP Penguatan Peran Lembaga Pers dan Jurnalis	01 - Terlaksananya penguatan peran lembaga pers dan jurnalis	01 - Indeks Kemerdekaan Pers	1	74,3 Nilai	18 303,4	Kementerian Komunikasi dan Informatika
07.01.03.07 ProP Peningkatan Kualitas Lembaga Penyiaran	01 - Terlaksananya peningkatan kualitas lembaga penyiaran	01 - Jumlah lembaga penyiaran yang berkualitas	1	57 Lembaga Penyiaran	19 672,7	Kementerian Komunikasi dan Informatika
07.02 **PP : Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri**	01 - Meningkatnya efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama internasional	01 - Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	5	10 Forum	368 402,8	
		03 - Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	5	3,85 Nilai		
		04 - Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI	1	87,00 Nilai		
07.02.01 **KP : Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri**	01 - Terwujudnya penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri	01 - Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim	2	49.64 Nilai	284.097,8	
		02 - Persentase Kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan	1	74 Persen		
07 02.01 01 ProP : Peningkatan dan Intensifikasi Efektivitas Penyelesaian Perbatasan dan Percepatan Pemetaan Batas Negara	01 - Terlaksananya peningkatan dan intensifikasi efektivitas penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara	01 - Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang perundingan penegasan batas darat, peningkatan kerja sama perbatasan dan kerja sama kelautan yang diselesaikan	2	100 Persen	16.583,8	Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial (BIG)
07.02 01 02 ProP : Penguatan Perlindungan WNI dan BHI di Tingkat Bilateral, Regional, Multilateral	01 - Terlaksananya penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, multilateral	01 - Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	1	96 42 Nilai	267.514,0	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
		02 - Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	1	95 38 Nilai		
		03 - Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	1	95 48 Nilai		
07.02.02 **KP : Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional**	01 - Terlaksananya penguatan kerja sama pembangunan internasional	01 - Jumlah Program/Kegiatan Kerja sama Selatan-Selatan Triangular	5	85 Program/Kegiatan	76.305,0	

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.02.02.01 ProP Peningkatan Penggunaan Sumber-Sumber dan Mekanisme Pendanaan Baru Kerja Sama Pembangunan Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru kerja sama pembangunan internasional	01 - Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST	5	Rp110,48 Miliar	73 705,0	Sekretariat Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
07 02.02 02 ProP : Penciptaan Lingkungan yang Mendukung (*Enabling environment*) Peningkatan Keterlibatan Swasta dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional	01 - Terciptanya lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) peningkatan keterlibatan swasta dalam kerja sama pembangunan internasional	01 - Tingkat partisipasi aktor nonpemerintah dalam kegiatan kerja sama pembangunan internasional	5	2,48-2,55 Persen	2.600,0	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas
07.02.03 **KP : Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional**	01 - Meningkatnya citra positif di dunia internasional	01 - Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	5	85 Persen	1 500,0	
07 02.03.01 ProP . Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik dan Turunannya	01 - Tersusunnya kebijakan diplomasi publik dan turunannya	01 - Persentase dukungan konstituen internasional terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia	5	98 Persen	1 500,0	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
07.02.04 **KP : Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global**	01 - Meningkatnya peran Indonesia di tingkat regional dan global	01 - Presentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri multilateral	5	96 Persen	6.500,0	
		02 - Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri ASEAN	5	96 Persen		
		03 - Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindak lanjuti oleh stakeholder dalam negeri	5	85 Persen		
		04 - Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dalam negeri	5	99 Persen		
07.02.04.01 ProP . Peningkatan Inisiatif/Posisi Indonesia yang Diterima	01 - Meningkatnya inisiatif/posisi Indonesia yang diterima	01 - Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam forum kerja sama multilateral	5	250 Rekomendasi/Prakarsa	4 000,0	Kementerian Luar Negeri
		02 - Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam pertemuan ASEAN	5	153 Rekomendasi/Prakarsa		
07.02.04 02 ProP : Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	01 - Terlaksananya optimalisasi kontribusi Indonesia dalam jajaran 10 besar negara kontributor MPP PBB	01 - Peningkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia	5	10 Peningkat	2 500,0	Kementerian Luar Negeri

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.03 **PP : Penegakan Hukum Nasional**	01 - Meningkatnya penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan	01 - Indeks Persepsi Anti Korupsi	5	4,03 Nilai	382 936,0	
07.03.01 **KP : Penataan Regulasi**	01 - Terlaksananya penataan regulasi	01 - Persentase *judicial review* yang dikabulkan MK dan MA	3	11,15 dan 10,05 Persen	6.293,0	
07.03 01 01 ProP Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi	01 - Terbentuknya lembaga pengelola regulasi	01 - Persentase peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi	3	0,1 Persen	1 600,0	Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi RI
07 03 01 02 ProP Pembaruan Substansi Hukum	01 - Terlaksananya pembaruan substansi hukum	01 - Jumlah pengundangan rancangan undang-undang jangka menengah	3	1 UU	4 693,0	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
07.03.02 **KP : Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata**	01 - Terlaksananya perbaikan sistem hukum pidana dan perdata	01 - Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek *enforcing contracts*	5	Peringkat 110	148.942,4	
		02 - Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek *resolving insolvency*	5	Peringkat 28		
		03 - Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek *getting credits*	5	Peringkat 28		
		04 - Persentase pelaku residivis	5	8,06 Persen		
07.03.02.01 ProP · Penyempurnaan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Kemudahan Berusaha	01 - Terlaksananya penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha	01 - Persentase eksekusi putusan perdata	5	15 Persen	5.500,0	Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
07 03.02.02 ProP · Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif	01 - Terlaksananya penerapan pendekatan keadilan restoratif	01 - Persentase pengenaan alternatif pemidanaan	1	15 Persen	8 581,0	Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Mahkamah Agung
07 03 02.03 ProP Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan	01 - Terwujudnya dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan	01 - Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPT TI	5	212 Wilayah Kerja	129.361,4	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
07.03.02.04 ProP Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim	01 - Terlaksananya peningkatan integritas dan pengawasan hakim	01 - Indeks Integritas Hakim	1	7,04 Nilai	5.500,0	Komisi Yudisial Republik Indonesia
07.03.03 **KP : Penguatan Sistem Anti Korupsi**	01 - Terwujudnya penguatan sistem antikorupsi	01 - Survey Penilaian Integritas	5	70 Nilai	82 411,3	

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.03.03 01 ProP Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	01 - Terlaksananya penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi	01 - Persentase capaian aksi Stranas PK	5	35 Persen	62.016,3	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Mahkamah Konstitusi RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia
07 03.03 02 ProP · Optimalisasi Mekanisme Pemulihan dan Pengelolaan Aset	01 - Terlaksananya optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset	01 - Jumlah aparat penegak hukum yang mengikuti diklat pemulihan aset	1	160 Orang	20 395,0	Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
07.03.04 **KP : Peningkatan Akses terhadap Keadilan**	01 - Terlaksananya peningkatan akses terhadap keadilan	01 - Indeks Akses terhadap Keadilan	5	Persen	145 289,3	
07 03 04 01 ProP Penguatan Layanan Keadilan	01 - Terlaksananya penguatan layanan keadilan	01 - Aspek bantuan hukum pada Indeks Akses Terhadap Keadilan	5	-	125.933,3	Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
07 03.04.02 ProP Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat	01 - Terlaksananya pemberdayaan hukum bagi masyarakat	01 - Aspek kemampuan masyarakat pada Indeks Akses terhadap Keadilan	5	Persen	19 356,0	Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi RI
07.04 **PP : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**	01 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah	01 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori baik ke atas Kementerian	1	100,00 Persen	258.325,9	
		02 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori baik ke atas LPNK	1	80,00 Persen		
		03 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori baik ke atas: Provinsi	1	49,00 Persen		
		04 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori baik ke atas. Kabupaten/ Kota	1	15,00 Persen		
		05 - Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	4	142 per 587 Instansi Pemerintah		
		06 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik ke atas Kementerian/ Lembaga	4	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan		
		07 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik ke atas Provinsi	4	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan		
		08 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik ke atas Kabupaten/ Kota	4	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan		
		09 - Persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Opini WTP Kementerian/ Lembaga	4	92,00 Persen		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		10 - Persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Opini WTP: Provinsi	4	92,00 Persen		
		11 - Persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Opini WTP: Kabupaten	4	80 Persen		
		12 - Persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Opini WTP Kota	4	92,00 Persen		
		13 - Persentase instansi pemerintah dengan Skor B ke atas Atas SAKIP: Kementerian/Lembaga	4	96,00 Persen		
		14 - Persentase instansi pemerintah dengan Skor B ke atas Atas SAKIP: Provinsi	4	87,00 Persen		
		15 - Persentase instansi pemerintah dengan Skor B ke atas Atas SAKIP: Kabupaten/Kota	4	55,00 Persen		
07.04.01 **KP : Penguatan Implementasi Manajemen ASN**	01 - Terwujudnya penguatan implementasi manajemen ASN	01 - Persentase kementerian dengan Indeks Sistem Merit kategori baik ke atas	1	100 Persen	47.946,3	
		02 - Persentase LPNK dengan Indeks Sistem Merit Kategori baik ke atas	1	80 Persen		
		03 - Persentase provinsi dengan Indeks Sistem Merit kategori baik ke atas	1	49 Persen		
		04 - Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Sistem Merit kategori baik ke atas	1	15 Persen		
07.04.01.01 ProP : Manajemen Talenta Nasional ASN	01 - Terbangunnya manajemen talenta nasional ASN	01 - Jumlah instansi yang menerapkan manajemen talenta ASN	1	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan	15.400,0	Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07 04 01.02 ProP Peningkatan Penerapan Sistem Merit ASN	01 - Terlaksananya peningkatan penerapan sistem merit ASN	02 - Jumlah instansi pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori baik ke atas	1	108 Instansi Pemerintah	32 546,3	Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.04.02 **KP : Transformasi Pelayanan Publik**	01 - Terwujudnya transformasi pelayanan publik	01 - Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	4	142 per 587 Instansi	44.255,0	
07.04.02 01 ProP : Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (*E-Services*) yang Terintegrasi	01 - Terlaksananya pelayanan publik berbasis elektronik (*e-services*) yang terintegrasi	01 - Tersedianya portal pelayanan publik pemerintah pusat	4	1 (tahun 2024)	4.500,0	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Tersedianya portal pelayanan publik pemerintah daerah	4	1 (tahun 2024)		
07.04.02.02 ProP : Penguatan Pengawasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Publik	01 - Terlaksananya penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik	01 - Jumlah laporan/pengaduan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik yang diselesaikan	4	6.300 Laporan	34.600,0	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman Republik Indonesia

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.04.02.03 ProP Penguatan Ekosistem Inovasi	01 - Terlaksananya penguatan ekosistem inovasi	01 - Jumlah unit pelayanan publik (UPP) yang mereplikasi inovasi	4	500 UPP	2 155,0	Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07 04 02 04 ProP Penguatan Pelayanan Terpadu	01 - Terlaksananya penguatan pelayanan terpadu	01 - Jumlah Mal Pelayanan Publik di kota besar/sedang/KEK	4	9 Mal Pelayanan Publik	3.000,0	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.04.03 **KP : Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis**	01 - Tertatanya kelembagaan dan proses bisnis	01 - Persentase instansi pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dengan Indeks Maturitas SPBE baik ke atas	4	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan Persen	64 133,2	
		02 - Persentase instansi pemerintah daerah (provinsi) dengan Indeks Maturitas SPBE baik ke atas	4	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan Persen		
		03 - Persentase instansi pemerintah daerah (kabupaten/kota) dengan Indeks Maturitas SPBE baik ke atas	4	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan Persen		
07.04 03 01 ProP Penataan Kelembagaan	01 - Terlaksananya penataan kelembagaan	01 - Jumlah instansi yang ditata kelembagaannya	4	21 Instansi	10 320,7	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07 04 03 02 ProP Penerapan SPBE Terintegrasi	01 - Terlaksananya penerapan SPBE terintegrasi	01 - Integrasi portal pelayanan publik dan integrasi portal administrasi pemerintahan	4	2 Portal (Tahun 2024)	53.812,5	Arsip Nasional Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
07.04.04 **KP : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja**	01 - Terwujudnya reformasi sistem akuntabilitas kinerja	01 - Persentase instansi pemerintah pusat (kementerian/lembaga) yang mendapatkan Opini WTP	4	92 Persen	101 991,4	
		02 - Persentase instansi pemerintah provinsi yang mendapatkan Opini WTP	4	92 Persen		
		03 - Persentase instansi pemerintah kabupaten yang mendapatkan Opini WTP	4	80 Persen		
		04 - Persentase instansi pemerintah kota yang mendapatkan Opini WTP	4	92 Persen		
		05 - Persentase instansi pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	4	96 Persen		
		06 - Persentase instansi pemerintah daerah (provinsi) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	4	87 Persen		
		07 - Persentase instansi pemerintah daerah (kabupaten/kota) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	4	55 Persen		
07.04.04.01 ProP : Perluasan Implementasi Sistem Integritas	01 - Terlaksananya perluasan implementasi sistem integritas	01 - Jumlah unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis	4	100 WBK/WBBM	7 000,0	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07 04.04 02 ProP : Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi	01 - Terlaksananya penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja organisasi	01 - Persentase intansi pemerintah (K/L/D) dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Level 3	4	42.53 Persen	87 391,4	Arsip Nasional Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
		02 - Persentase intansi pemerintah provinsi dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Level 3	4	15 Persen		
		03 - Persentase Intansi Pemerintah Kab/Kota dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Level 3	4	10 persen		
		04 - Persentase K/L/D yang melakukan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	4	40 Persen		
		05 - Persentase instansi pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dengan Skor SAKIP B Ke atas	4	96 Persen		
		06 - Persentase instansi pemerintah daerah (provinsi) dengan Skor SAKIP B Ke atas	4	87 Persen		
		07 - Persentase instansi pemerintah daerah (kabupaten/kota) dengan Skor SAKIP B Ke atas	4	55 Persen		
07 04 04 03 ProP Penguatan Perencanaan dan Penganggaran	01 - Terlaksananya penguatan perencanaan dan penganggaran	01 - Persentase integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pamantauan, evaluasi, dan audit	4	40 Persen	7.600,0	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas
07.05 **PP : Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional**	01 - Terjaganya stabilitas keamanan nasional	01 - Indeks Kekuatan Militer	5	0,25 Nilai	30.216.834,6	
		02 - Indeks Global Terorisme	5	4,39 Nilai		
		03 - Persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	5	>55 Persen		
		04 - Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	5	3,20 Nilai		
07.05.01 **KP : Penguatan Keamanan Dalam Negeri**	01 - Terwujudnya Penguatan Keamanan Dalam Negeri	01 - Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	5	38,14 Nilai	1 325.750,0	
		02 - Indeks Risiko Terorisme (Target)	5	54,36 Nilai		
		03 - Angka Pelanggaran Lintas Batas Negara	5	<300 Pelanggaran		
		04 - Angka Kejadian Konflik	5	50 Kejadian		
		05 - Angka Korban Pengungsi Internal	5	≤15.500 orang		
07 05 01 01 ProP : Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme	01 - Terlaksananya peningkatan deradikalisasi dan penanganan terorisme	01 - *Clearance Rate* Terorisme	5	75 Persen	272.954,0	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Kementerian Sosial

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah deradikalisasi terhadap masyarakat terpapar dalam radikal terorisme	5	125 Orang		
		03 - Jumlah kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme	5	134 Kegiatan		
		04 - Jumlah Instansi yang berpartisipasi aktif dalam Sinergisitas penanggulangan terorisme	5	40 Institusi		
07 05 01 02 ProP Pengamanan Obyek Vital dan Target Rentan	01 - Terlaksananya pengamanan obyek vital dan target rentan	01 - Jumlah Obyek Vital dan Target Rentan yang Mendapat Pengamanan	2	1.023 Obvitnas dan Target Rentan	85.928,1	Kepolisian Negara Republik Indonesia
07.05.01 03 ProP Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar	01 - Terlaksananya penguatan pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar	01 - Jumlah jenis sarpras perbatasan yang dibangun	2	5 Jenis	945.819,7	Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Jumlah penduduk perbatasan yang diberdayakan dalam sistem hankam	1	180 Orang		
		03 - Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ditingkatkan sarana prasarana pertahanan dan keamanannya	2	41 PPKT		
07 05 01 04 ProP : Penanganan Konflik secara Humanis	01 - Tertanganinya konflik secara humanis	01 - Tertanggulanginya potensi konflik sosial di tingkat kabupaten	1	25 Kasus	19 886,8	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial
		02 - Jumlah anggota satuan yang mendapatkan pelatihan penanganan konflik secara humanis	1	15.338 Orang		
07.05.01.05 ProP Keselamatan dan Reintegrasi di Wilayah Rawan dan Bencana	01 - Terwujudnya keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan dan bencana	01 - Jumlah kegiatan penyelamatan di wilayah rawan dan bencana	1	1 Kegiatan	1.161,4	Kepolisian Negara Republik Indonesia
07.05.02 **KP : Penguatan Kemampuan Pertahanan Dibarengi *Confidence Building Measures* (CBM)**	01 - Terwujudnya penguatan kemampuan pertahanan dibarengi *Confidence Building Measures* (CBM)	01 - Angka pemenuhan MEF	2	79 Persen	26.004.246,4	
		02 - Persentase kontribusi industri pertahanan	5	≥50 Persen		
07.05 02.01 ProP : Pengadaan Alutsista	01 - Terpenuhinya pengadaan Alutsista	01 - Jenis Alutsista yang diadakan	2	60 Jenis	17.702.850,8	Kementerian Pertahanan
07.05.02 02 ProP : Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista	01 - Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Alutsista	01 - Jenis Alutsista dengan persentase pemenuhan Norma Harwat 100%	2	49 Jenis	6.189.594,0	Kementerian Pertahanan
07.05.02.03 ProP : Pembangunan Sarana-Prasarana Pertahanan	01 - Terlaksananya pembangunan sarana-prasarana pertahanan	01 - Luas Pembangunan Sarana Prasarana Pertahanan	2	118.000 m^2	1 014.702,6	Kementerian Pertahanan
07.05.02.04 ProP : Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	01 - Terlaksananya peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit	01 - Jumlah unit rumah dinas yang terbangun	2	2.410 Unit	989.599,0	Kementerian Pertahanan

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah rumah sakit meningkat akreditasinya	1	9 Unit		
07 05.02.0 ProP : Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	01 - Terlaksananya pembangunan dan pengembangan industri pertahanan	01 - Jumlah Jenis Alpalhankam yang Dikembangkan	5	3 Jenis	107.500,0	Kementerian Pertahanan
07.05.03 **KP : Penguatan Keamanan Laut**	01 - Terwujudnya penguatan keamanan laut	01 - Angka pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut	5	265 Kasus	1 138.369,8	
07 05.03 02 ProP : Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas operasi keamanan laut	01 - Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan *ilegal fishing*	5	60 Persen	1.137.449,2	Badan Keamanan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan
07.05.03 03 ProP Peningkatan Penyelesaian Kasus Keamanan Laut	01 - Terlaksananya peningkatan penyelesaian kasus keamanan laut	01 - *Clearance rate* tindak pidana laut	5	75 Persen	920,6	Kepolisian Negara Republik Indonesia
07.05.04 **KP : Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**	01 - Terwujudnya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat	01 - Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1	1,86 Persen	860.769,0	
		02 - *Crime Rate*	5	112 Orang/100.000 Penduduk		
		03 - Pelayanan Publik Polri yang Prima	4	63 Persen		
07.05.04.01 ProP · Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	01 - Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	01 - *Clearance rate* tindak pidana narkotika	4	86 Persen	85.735,6	Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Negara Republik Indonesia
		02 - Jumlah kawasan yang pulih dari tanaman terlarang	5	4 Kawasan		
07 05 04.02 ProP Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	01 - Terlaksananya peningkatan pencegahan penyalahgunaan dan rehabilitasi penyalahguna narkotika	01 - Indeks Ketahanan Diri Remaja	1	51 Nilai	188.847,0	Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sosial
		02 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika: aspek fisik	1	6,5 Persen		
		03 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika: aspek psikologis	1	6,5 Persen		
		04 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika: aspek hubungan sosial	1	5,5 Persen		
		05 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek sumber daya lingkungan	1	4,5 Persen		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		06 - Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi	1	3,1 Nilai		
07 05 04.03 ProP . Penanganan Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya	01 - Tertanganinya kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya	01 - Clearance rate tindak pidana TPPO serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan	4	83 Persen	9 000,0	Kepolisian Negara Republik Indonesia
07 05 04.04 ProP : Peningkatan Layanan Kepolisian yang Profesional, Modern, dan Terpercaya	01 - Terlaksananya peningkatan layanan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya	01 - Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian	4	8,2 Nilai	4.500,0	Kepolisian Negara Republik Indonesia
		02 - *Clearance Rate*	4	64 Persen		
		03 - *Clearance rate* tindak pidana kejahatan perbankan dan TPPU	4	58 Persen		
07.05.04 05 ProP Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Dukungan Layanan Kepolisian	01 - Terlaksananya pengadaan Almatsus dan Alpalkam dukungan layanan kepolisian	01 - Jumlah Almatsus dan Alpalkam Kepolisian	2	3 Paket	173 720,2	Kepolisian Negara Republik Indonesia
		02 - Persentase Almatsus dan Alpalkam kontribusi industri pertahanan	2	25 Persen		
07 05 04 06 ProP Peningkatan Profesionalisme, dan Kesejahteraan Anggota POLRI	01 - Terlaksananya peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan anggota POLRI	01 - Jumlah unit pemenuhan rumah negara	2	445 Unit	398.966,2	Kepolisian Negara Republik Indonesia
		02 - Jumlah rumah sakit yang dibangun/meningkat akreditasinya	2	1 Unit		
		03 - Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	4	77 Persen		
07.05.05 **KP : Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber**	01 - Terwujudnya ketahanan dan keamanan siber yang kuat	01 - Skor Global *Cyber Securnty Index*	1	0,792 Nilai	887.699,4	
07 05 05 01 ProP Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber	01 - Terlaksananya pembangunan tim cepat tanggap keamanan siber yang kuat	01 - Skor Pilar *Technical* pada *Global Cybersecurity Index* (GCI)	1	0,159 Nilai	13 200,0	Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara
07 05.05.02 ProP Penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber	01 - Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber yang Kuat	01 - Skor Pilar *Organizational pada Global Cybersecurnty Index* (GCI)	4	0,13 Nilai	833 068,4	Badan Siber dan Sandi Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Republik Indonesia
		03 - Skor Pilar Capacity Building pada Global *Cybersecurnty Index* (GCI)	1	0,189 Nilai		
		02 - Skor Pilar Technical pada *Global Cyber Securnty Index* (GCI)	2	0,159 Nilai		
07 05.05.03 ProP : Penyelesaian Kejahatan Siber	01 - Terlaksananya penyelesaian kejahatan bidang siber	01 - *Clearance rate* tindak pidana siber	5	0,62 Persen	26 931,0	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07 05 05 04 ProP Pencegahan Kejahatan Siber dan Peningkatan Kerja Sama Internasional Bidang Siber	01 - Terwujudnya pencegahan kejahatan siber melalui peningkatan kerja sama internasional Bidang Siber	01 - Skor Pilar Cooperation pada *Global Cybersecurity Index* (GCI)	5	0,12 Nilai	14 500,0	Badan Intelijen Negara

Keterangan
Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi
1) Pembangunan SDM
2) Pembangunan Infrastruktur
3) Penyederhanaan Regulasi
4) Penyederhanaan Birokrasi
5) Transformasi Ekonomi

Catatan:
1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional,
2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dalam proses finalisasi detail target, alokasi, dan lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota;
3) Rincian pada masing-masing prioritas nasional mencakup Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta),
4) Perubahan rincian beserta pendanaannya dimungkinkan setelah mendapat persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 017230 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2020
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH TAHUN 2021

MATRIKS PROYEK PRIORITAS STRATEGIS/*MAJOR PROJECT*
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021

SK No 061733 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS PROYEK PRIORITAS STRATEGIS/*MAJOR PROJECT* PADA PRIORITAS NASIONAL RKP 2021

Prioritas Nasional/*Major Project*/Proyek	**Alokasi (Rp Juta)**	**Instansi Pelaksana**
PN 1. MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN	**33.948.987,5**	
1) 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai, dengan proyek antara lain:	**4.986.772,0**	
• Penataan Kawasan Destinasi Wisata Borobudur	80 944,9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalur KA Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA)	318.279,5	Kementerian Perhubungan
• Pembangunan Jalur Kereta Api Solo Balapan - Bandara Adi Soemarmo	65 598,3	Kementerian Perhubungan
• Pembangunan Fasilitas Pendukung Jalur Kereta Api Bandara Adi Sumarmo, Solo	17 000,0	Kementerian Perhubungan
• Jalan Strategis (ProPN) - Keprekan - Borobudur	28.687,2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Jalan Strategis (ProPN) - Jalan KSPN Borobudur	35.337,2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Jalan Tol Jogja-Solo-NYIA (Prov Jawa Tengah)	-	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU)
• Amenitas dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Borobudur	66.188,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• SDM dan Industri Pariwisata yang memperoleh fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita Borobudur	4.000,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Borobudur	2 000,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional - Kab Bantul	88.899,1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Peningkatan SPAM Regional - Kab Bantul	138.997,8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota - Kab Bantul	12 900,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota - Kab Bantul	14.201,7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan SPAM Regional - Kab. Wonogiri	1 250,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota - Kab. Kulon Progo	28 283,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendalian banjir Muara Sungai Bogowonto yang dibangun	332.863,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendalian banjir Sungai Bogowonto dan anak Sungainya yang dibangun	159 326,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Penataan Kawasan Destinasi Wisata Lombok Mandalika	47 532,6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Peyediaan Air Baku Bendungan Pengga untuk KEK Mandalika di Kab. Lombok Tengah yang dibangun	35.250,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendalian banjir KEK Mandalika yang dibangun	40 000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalan - Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)-Mandalika 1	168.823,9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalan - Sp Penunjak - Tanah Awu (Bandara Internasional Lombok)	125 611,8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan - Kab. Lombok Barat	8 320,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota - Kab Lombok Utara	5.500,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota - Kab Lombok Tengah	84.900,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota - Kab Lombok Tengah	13.454,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota - Kab Manggarai Barat	145.883,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Prioritas Nasional/*Major Project*/Proyek	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
• Sistem Pengelolaan Persampahan Menjadi Sumber Energi Terbarukan - Kab. Manggarai Barat	51.400,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendalian banjir Sungai Waemese yang dibangun	40.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Amenitas dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Danau Toba	77.349,7	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Penataan Kawasan Destinasi Wisata Danau Toba	262.041,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• SDM dan Industri Pariwisata yang memperoleh fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita Danau Toba	4 994,3	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Danau Toba	3 000,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota - Kab. Dairi	12.555,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota - Kab. Samosir	15.600,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Regional - Kab Samosir	53.350,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota - Kab Samosir	5 250,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota - Kab Tapanuli Utara	24 750,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalan - BTS. Kota Medan - BTS Kab. Karo	67.981,9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalan - Jalan Aek Natolu - Ajibata	30 831,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota - Kab Simalungun	25 100,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendalian banjir Sungai Aek Siguluan, Aek Silubung, Aek Sitete, Aek Tomok yang dibangun	50.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Amenitas, dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Labuan Bajo Flores	26 000,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Penataan Kawasan Destinasi Wisata Labuan Bajo	312 020,7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• SDM dan Industri Pariwisata yang memperoleh Fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita Labuan Bajo Flores	10 658,8	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Labuan Bajo Flores	7 105,9	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Pengamanan Pantai Loh Buaya di Pulau Rinca yang dibangun	25.860,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Bandara Labuan Bajo	-	Kementerian Perhubungan (KPBU)
• Pembangunan Terminal Kargo Pelabuhan Laut Labuan Bajo	77 320,8	Kementerian Perhubungan
• Jalan Kawasan Prioritas (ProPN) - Trotoar Dan Drainase Jalan Alo Tanis, Labuan Bajo	5 449,2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Jalan Kawasan Prioritas (ProPN) - Jalan Ruas Labuan Bajo - Terang - Pelabuhan Bari	16 504,7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalan Kawasan Prioritas (ProPN) - Jalan Ruas Labuan Bajo - Terang - Pelabuhan Bari	5.207,4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Penataan Kawasan Destinasi Wisata Manado Likupang	102.169,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Likupang	30 000,0	Kementerian Perhubungan
• Pengendalian Sungai Maen KEK Likupang yang dibangun	15 000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Drainase KEK Likupang yang dibangun	19 000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan - Kab Minahasa Utara	5.250,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman - Kab Minahasa Utara	8 944,1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional - Kota Manado	103 092,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ *Major Project*/Proyek	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
• Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota - Kab Minahasa Utara	6 350,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota - Kab Minahasa Utara	12 700,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Penataan Kawasan Destinasi Wisata Wakatobi	51 000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota - Kab. Wakatobi	5.600,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengamanan Pantai Waha yang dibangun	30.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Penataan Kawasan Destinasi Wisata Raja Ampat	-	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Penataan Kawasan Destinasi Wisata Morotai	58.169,6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota - Kab. Pulau Morotai	14 995,6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengamanan Pantai Weda yang dibangun	20 000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota - Kab. Pasuruan	8.900,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Penataan Kawasan Destinasi Wisata Bangka Belitung	-	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota - Kab Belitung	72.617,6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Museum yang Dibangun	41.000,0	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Warisan Budaya yang Dilindungi	19 756,0	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	30 000,0	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• Sarana prasarana Wisata Bahari	12 991,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Sarana Ruang Kreatif yang Difasilitasi	20 657,9	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Publikasi Media Digital	94 034,4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Publikasi Media Sosial dan Owned Media	75.965,6	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Publikasi Media Elektronik	90 000,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Usaha kreatif subsektor Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Interior, Desain Produk, Fesyen, Kriya, dan Kuliner yang mendapat pendampingan dan inkubasi	28 860,8	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Usaha kreatif sub sektor musik, seni pertunjukan, seni rupa, dan penerbitan yang mendapat pendampingan dan inkubasi	11 109,4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Sektor Pariwisata	20 500,0	Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Sarana dan prasarana wisata desa yang dibangun untuk mendukung destinasi wisata super prioritas	44.500,0	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
• Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Regional I yang dikembangkan	6.310,4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Regional II yang Dikembangkan	5.000,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Fasilitasi Peningkatan Kewirausahaan	8 381,0	Kementerian Perdagangan
• Fasilitasi Kemitraan Pemasaran	7.846,0	Kementerian Perdagangan
• Fasilitasi Bantuan Sarana Usaha Perdagangan	9 645,0	Kementerian Perdagangan
• Dukungan Penumbuhan Wirausaha Baru dan Pengembangan IKM di Lingkungan Pondok Pesantren	708,2	Kementerian Perindustrian
• Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan	7 000,0	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Prioritas Nasional/*Major Project*/Proyek	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
• Destinasi Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan	1.500,0	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• Pusat Jajanan Kuliner Pada 10 Kawasan Wisata	49.760,0	Kementerian Perdagangan
• Pengendalian banjir DAS Serang yang dibangun	134.251,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2) *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), dengan proyek antara lain:	**9.705.964,0**	
• Kawasan Food Estate	2 053.026,0	Kementerian Pertanian
• Kawasan Padi - Provinsi Kalimantan Tengah	27.520,0	Kementerian Pertanian
• Food estate di kawasan eks PLG Kalimantan Tengah - Provinsi Kalimantan Tengah	5.232 413,6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Food estate di luar kawasan eks PLG Kalimantan Tengah - Provinsi Kalimantan Tengah	446 421,7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Food Estate Humbanghasundutan yang dikembangkan	125.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	577 471,6	Kementerian Pertanian
• Area penyaluran benih padi - Provinsi Kalimantan Tengah	7 087,5	Kementerian Pertanian
• Industri Antara Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang Dikembangkan	5.000,0	Kementerian Perindustrian
• Wirausaha Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi serta Bantuan Start Up Capital	12.050,0	Kementerian Perindustrian
• IKM Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	12 825,0	Kementerian Perindustrian
• RTJK yang Dibangun di Satuan Permukiman pada Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional - Kab. Kapuas	30 873,7	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
• Drainase yang Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional - Kab Kapuas	10.611,4	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
• Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional - Provinsi Kalimantan Tengah	565,6	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
• Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional - Kab. Kapuas	17 978,8	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
• Bantuan Peralatan Pasca Panen di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional - Kab. Kapuas	4 733,8	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
• Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat - Kab. Labuhanbatu	6.300,0	Kementerian Perdagangan
• Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat - Kab. Tapanuli Utara	4 181,4	Kementerian Perdagangan
• Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat - Kab. Nias Selatan	4.181,4	Kementerian Perdagangan
• Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat - Kab Labuhanbatu Selatan	4.181,4	Kementerian Perdagangan
• Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat - Kota Sibolga	4.181,4	Kementerian Perdagangan
• Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat - Kab. Barito Selatan	6 300,0	Kementerian Perdagangan
• Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat - Kab Kotawaringin Timur	4 181,4	Kementerian Perdagangan
• Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat - Kab Barito Timur	4 181,4	Kementerian Perdagangan
• Jembatan Strategis (ProPN) - Jalan Kawasan Food Estate Dadahup Kab Kapuas	21.419,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Jembatan Strategis (ProPN) - Jalan Kawasan Food Estate Belanti Kab Pulang Pisau	65 668,7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Jalan Strategis (ProPN) - Jalan Kawasan Food Estate Dadahup Kab Kapuas	328.309,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Jalan Strategis (ProPN) - Jalan Kawasan Food Estate Belanti Kab. Pulang Pisau	347 536,1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalan - Jalan Akses 1000 ha (Food Estate)	85 900,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi, dengan proyek antara lain:	**3.438.241,9**	
• Palapa Ring	1.980.242,7	Kementerian Komunikasi dan Informatika
• Perbaikan Rantai Pasok di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Melalui Transformasi Industri 4.0	3.000,0	Kementerian Perindustrian
• Perusahaan di Sektor Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan yg dilakukan pendampingan penerapan industry 4 0	2.500,0	Kementerian Perindustrian

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/*Major Project*/Proyek	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
• Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	2.500,0	Kementerian Perindustrian
• Restrukturisasi mesin dan peralatan industri tekstil kulit dan alas kaki	7 500,0	Kementerian Perindustrian
• Pendampingan Implementasi Industri 4 0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi	10 000,0	Kementerian Perindustrian
• Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Semen Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	1.250,0	Kementerian Perindustrian
• Memfasilitasi Implementasi Industri 4.0 Sektor Tekstil dan Apparel	7 500,0	Kementerian Perindustrian
• Industri Komponen yang terfasilitasi dalam rangka penguatan struktur	5 000,0	Kementerian Perindustrian
• Industri permesinan dan alat kesehatan yang terfasilitasi melalui hilirisasi inovasi riset	3 000,0	Kementerian Perindustrian
• Industri yang terfasilitasi melalui Export Coaching Dalam Rangka Peningkatan Ekspor	5.000,0	Kementerian Perindustrian
• Investor yang terfasilitasi dalam rangka pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	3 000,0	Kementerian Perindustrian
• Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	2 500,0	Kementerian Perindustrian
• Industri Sektor Otomotif yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan dan Center of Excellence	5.000,0	Kementerian Perindustrian
• Industri Sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi menuju Industri 4 0 melalui Pendampingan	2 500,0	Kementerian Perindustrian
• Sentra IKM dan UPT Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur Yang Mendapat Fasilitasi	8.675,0	Kementerian Perindustrian
• Sentra IKM dan UPT Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka yang mendapat Fasilitasi	3 507,7	Kementerian Perindustrian
• Sentra IKM dan UPT Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitasi	7.633,0	Kementerian Perindustrian
• Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Rangka Penerapan Making Indonesia 4.0	1.500,0	Kementerian Perindustrian
• Fasilitasi dan Pendampingan Peningkatan Daya Tahan Industri	3.000,0	Kementerian Perindustrian
• Rancangan SNI, ST dan/atau PTC	1 764,4	Kementerian Perindustrian
• Data dan Informasi Industri 4.0	2 500,0	Kementerian Perindustrian
• Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	11 100,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Gudang Beku	22 450,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Teknologi Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	2.300,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendapatkan Akses Pembiayaan dari Perbankan	12 257,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendapatkan Akses Pembiayaan dari Teknologi Finansial dan Modal Ventura	11.248,6	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Lembaga/Komunitas/Asosiasi yang mendapat fasilitasi dalam rangka pengembangan ekosistem ekonomi digital	15.160,2	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Startup Digital yang dikembangkan	5 722,4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Tenant yang Dibina Menjadi Startup Inovasi	69.869,8	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
• Jaringan Pemasaran Dalam Negeri yang diperluas dan dikuatkan	15 000,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
• Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk UKM UKM yang difasilitasi peningkatan manajemen dan mutu produk UKM	12 740,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
• Calon Wirausaha (Startup) yang difasilitasi Inkubasi di Wilayah Indonesia Bagian Barat, Timur dan Tengah	5 000,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
• Inisiatif Digital Sektor Strategis	63.000,0	Kementerian Komunikasi dan Informatika
• Adopsi teknologi digital UMKM	55.000,0	Kementerian Komunikasi dan Informatika
• Roadmap 5G	8 920,0	Kementerian Komunikasi dan Informatika

Prioritas Nasional/*Major Project*/Proyek	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
• Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Manufaktur	1 500,0	Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Hasil Pembinaan Perusahaan Rintisan Terdepan	2.000,0	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
• Sosialisasi kepada Penerap Standar Nasional Indonesia	2.502,2	Badan Standarisasi Nasional (BSN)
• Peralatan Laboratorium SNSU Mekanika	20.154,9	Badan Standarisasi Nasional (BSN)
• Peralatan Laboratorium SNSU Termoelektrik	10.257,9	Badan Standarisasi Nasional (BSN)
• Peralatan Laboratorium SNSU Kimia	9 742,1	Badan Standarisasi Nasional (BSN)
• Pengembangan Desain melalui Indonesian Design Development Center	6.550,0	Kementerian Perdagangan
• Kebijakan Penurunan Hambatan Akses Pasar	22 875,0	Kementerian Perdagangan
• Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha	403,6	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
4) 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter, dengan proyek antara lain:	**7.318.468,2**	
• Pembangunan Jalan - Jalan Kolektor Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang	303.358,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalan - Jalan Arteri Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang	277 170,2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalan - Interchange Tol (KIT Subang)	279.831,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalan - Land Clearing Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang	154.860,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalan - Jalan Bintuni - Susumuk	32 327,4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalan Kawasan Prioritas (ProPN) - Jalan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang	3 481.645,9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Palapa Ring	1.980.242,7	Kementerian Komunikasi dan Informatika
• Industri logam yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas	5 000,0	Kementerian Perindustrian
• Industri yang terfasilitasi melalui Export Coaching Dalam Rangka Peningkatan Ekspor	5 000,0	Kementerian Perindustrian
• Industrial Intelligence dan Peluang Kerja Sama Industri di Luar Negeri	7.000,0	Kementerian Perindustrian
• Layanan Pendampingan Investasi Perusahaan Multinasional	1.500,0	Kementerian Perindustrian
• Peningkatan kemitraan dalam Global Value Chain	2.000,0	Kementerian Perindustrian
• Pengembangan Sistem Advokasi Pendampingan Industri dalam Akses Industri Internasional	1.000,0	Kementerian Perindustrian
• Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	5.000,0	Kementerian Perindustrian
• Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan	2 500,0	Kementerian Perindustrian
• Pengembangan Bandara Tanjung Harapan	20 649,2	Kementerian Perhubungan
• Emergency Assistance Loan For Rehabilitation and Reconstruction (PHLN) a. Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan b. Rekonstruksi Pelabuhan Donggala c. Rekonstruksi Pelabuhan Wani	76.611,3	Kementerian Perhubungan
• Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Bintuni - Kab. Teluk Bintuni	5 000,0	Kementerian Perhubungan
• Adopsi teknologi digital UMKM	55 000,0	Kementerian Komunikasi dan Informatika
• Fasilitasi Kebijakan Penanaman Modal	5 000,0	Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional	33.214,9	Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi	4.100,0	Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Eksekusi Realisasi Investasi pada Proyek-proyek PMA/PMDN Terdampak Covid-19 di Wilayah Barat	20.000,0	Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Wilayah IV	1 216,0	Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Eksekusi Realisasi Investasi pada Proyek-proyek PMA/PMDN Terdampak Covid-19 di Wilayah Timur	20.000,0	Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Pengembangan Kawasan, Industri yang Terintegrasi dengan Kawasan, dan Infrastruktur Penunjang Kawasan	91.500,0	Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Fasilitasi Rencana Penanaman Modal Proyek Strategis di Bidang Jasa dan Kawasan	1.500,0	Badan Koordinasi Penanaman Modal

Prioritas Nasional/*Major Project*/Proyek	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
• Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	153.200,0	Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan PTSP di BKPM	4.000,0	Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor	3 000,0	Kementerian Perdagangan
5) Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan, dengan proyek antara lain:	**7.977.879,4**	
• Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani	19 000,0	Kementerian Pertanian
• Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang terfasilitasi	19.169,0	Kementerian Pertanian
• Fasilitasi Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	38.589,5	Kementerian Pertanian
• Fasilitasi Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani	9 003,3	Kementerian Pertanian
• Sertifikat Produk Hortikultura	6 000,0	Kementerian Pertanian
• Penerapan GAP	6 000,0	Kementerian Pertanian
• Penerapan GHP	5 800,0	Kementerian Pertanian
• Prasarana Pascapanen Hortikultura	51.000,0	Kementerian Pertanian
• Prasarana Pengolahan Hortikultura	37.500,0	Kementerian Pertanian
• Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	31.150,0	Kementerian Pertanian
• Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	3.575,0	Kementerian Pertanian
• Optimasi Lahan	567 180,0	Kementerian Pertanian
• Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	600.783,0	Kementerian Pertanian
• Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura	54 000,0	Kementerian Pertanian
• Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi	51 630,6	Kementerian Pertanian
• Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	474.037,6	Kementerian Pertanian
• Asuransi Pertanian	150.753,6	Kementerian Pertanian
• Asuransi Usaha Ternak	26.926,4	Kementerian Pertanian
• Fasilitasi Pembiayaan mendukung Korporasi Petani	8 950,1	Kementerian Pertanian
• Sertifikat Benih padi	25 605,5	Kementerian Pertanian
• Model Pertanian Modern	12.000,0	Kementerian Pertanian
• Sertifikat Benih Hortikultura	13.700,0	Kementerian Pertanian
• Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	2.200,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Bidang tanah nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi sertifikatnya	1.375,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	2 400,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	1 367,8	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang disalurkan	21 600,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Rekomendasi Bidang Lahan pembudidaya ikan yang akan disertipikasi	2.000,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Bantuan Premi Asuransi Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil yang disalurkan	3.500,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program	4 608,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Kelompok Masyarakat untuk Membentuk Koperasi	5.500,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
• Pengurus atau Pengelola Koperasi yang diberikan Pelatihan	13.425,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
• Pelatihan bagi Pelaku Koperasi di Daerah	3.350,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
• Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian	403.128,7	Kementerian Pertanian
• Kawasan Ubi Kayu	108.500,0	Kementerian Pertanian
• Kawasan Kedelai	180 187,5	Kementerian Pertanian
• Jaringan Irigasi Tersier	328 485,0	Kementerian Pertanian
• Kawasan Padi	866 850,0	Kementerian Pertanian

Prioritas Nasional/*Major Project*/Proyek	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
• Area penyaluran benih jagung	1 442.100,0	Kementerian Pertanian
• Benih Sebar Umbi /RImpang Hortikultura	301.978,3	Kementerian Pertanian
6) Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit, dengan proyek antara lain:	**14.056,0**	
• Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat	6.166,0	Kementerian Pertanian
• Business Plan Industri IVO/ILO (Industrial Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil) sebagai bahan baku Industri Greenfuel/B100	800,0	Kementerian Perindustrian
• Studi Kelayakan (Feasibility Study) dan Detail Engineering Design (DED) yang disusun untuk pembangunan Pilot Plant Industri IVO/ILO (Industrial Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil) sebaga bahan baku Industri Greenfuel/B100	2.200,0	Kementerian Perindustrian
• Volume Biofuel untuk Domestik	3 090,0	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Hasil Uji Coba Demo Plant Biohidrokarbon dan Bioavtur di Palembang	1.800,0	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, dengan proyek antara lain:	**426.705,9**	
• Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang diproduksi	19.715,6	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Sarana Kawasan Perikanan Budidaya yang disalurkan ke masyarakat	135.240,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Kluster kawasan tambak Udang dan Bandeng yang dikembangkan	215.740,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	22.000,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
8) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional, dengan proyek antara lain:	**80.900,1**	
• Kapal perikanan bantuan yang disalurkan	38 000,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang disalurkan	7 500,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (NRI)	12.176,4	Kementerian Kelautan dan Perikanan
PN 2. MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	**10.221.809,2**	
9) Pembangunan Wilayah Batam – Bintan, dengan proyek antara lain:	**375.070,2**	
• Pengembangan Bandara Tambelan	27 565,8	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandara Ranai	5.100,0	Kementerian Perhubungan
• Jejaring Destinasi Pariwisata Regional I yang dikembangkan	6.337,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Jalan Kolektor yang Dikembangkan	47.850,2	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)
• Fasilitas Bandar Udara Hang Nadim	267.149,8	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)
• Rencana Induk Pengembangan dan PJM DPP Baru Batam-Bintan dsk dan Kawasan Perbatasan Riau-Malaysia	3.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Bendungan Sei Busung yang dibangun - Provinsi Kepulauan Riau	1 500,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10) Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar, dengan proyek antara lain:	**5.159.343,2**	
• Pengembangan UPPKB di Pulau Sumatera dan Jawa (Prov. Sumatera Selatan)	-	Kementerian Perhubungan (KPBU)
• Kereta api Makasar - Parepare	-	Kementerian Perhubungan (KPBU)
• PLTS Atap - Provinsi Sumatera Selatan	7 281,5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• PLTS Atap - Provinsi Kalimantan Selatan	9 708,7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• PLTS Atap - Provinsi Sulawesi Selatan	8.737,8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• PLTS Atap - Provinsi Bali	7.766,9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Prioritas Nasional/*Major Project*/Proyek	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
• Pembelian Layanan (Buy The Services) Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Kota Palembang (Prioritas Nasional) - Kota Palembang	48.566,4	Kementerian Perhubungan
• Pembelian Layanan (Buy The Services) Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Kawasan Perkotaan Denpasar (Prioritas Nasional) - Kota Denpasar	77.210,8	Kementerian Perhubungan
• Pembelian Layanan (Buy The Services) Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Kawasan Perkotaan Banjarmasin (Prioritas Nasional) - Kota Banjarmasin	19.324,5	Kementerian Perhubungan
• Pembelian Layanan (Buy The Services) Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Kawasan Perkotaan Makassar (Prioritas Nasional) - Kota Makassar	34 784,2	Kementerian Perhubungan
• Subsidi Perintis LRT Sumatera Selatan	114 063,5	Kementerian Perhubungan
• Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan Light Rail Transit Provinsi Sumatera Selatan termasuk supervisi	2.515 001,7	Kementerian Perhubungan
• Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar - Parepare Segmen 3 (Makassar - Barru)	420 000,0	Kementerian Perhubungan
• Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sanur	235 000,0	Kementerian Perhubungan
• Pengendalian banjir Sungai Lambidaro-Sekanak yang dibangun	52 000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Prasarana Air baku Tapin yang dibangun	30.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Prasarana Air baku sistem Gandus yang dibangun	95.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) - BTS Kota Palembang/BTS. Kab Banyuasin - Tj. Api-Api	100 824,1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman - Kota Makassar	15 600,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota - Kab. Ogan Komering Ilir	24 738,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota - Kota Palembang	212 960,4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota - Kab. Tanah Laut	20.525,9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI - Provinsi Sumatera Selatan	34.920,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Komunal - Provinsi Sumatera Selatan	12.750,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota - Kota Makassar	375.578,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI - Provinsi Kalimantan Selatan	56 859,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI - Provinsi Sulawesi Selatan	62 774,1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota - Provinsi Sulawesi Selatan	4.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu - Kab Ogan Komering Ilir	5 000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu - Kab Banyuasin	5.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu - Kab Ogan Ilir	5.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Perluasan SPAM Kabupaten/Kota - Kab Tanah Laut	24 086,8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu - Kab Takalar	5 000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Perluasan SPAM Kabupaten/Kota - Kab Lebak	10.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Air Minum	16.510,1	Pemda (DAK)
• Jalan	36 776,6	Pemda (DAK)
• Perumahan dan Permukiman	6 264,3	Pemda (DAK)
• Sanitasi	9 100,2	Pemda (DAK)
11) Ibu Kota Negara (IKN), dengan proyek antara lain:	**1.262.203,2**	
• Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto - Kota Samarinda	80.000,0	Kementerian Perhubungan
• Bendungan Sepaku Semoi yang dibangun - Provinsi Kalimantan Timur	158 000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	115 570,2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Prioritas Nasional/*Major Project*/Proyek	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
• Perluasan SPAM Kabupaten/Kota - Kab Penajam Paser Utara	28.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Data Center Nasional	691.794,8	Kementerian Komunikasi dan Informatika
12) Pengembangan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong, dengan proyek antara lain:	**860.742,2**	
• Pengembangan Bandara Tanjung Harapan	20.649,2	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok	71.518,5	Kementerian Perhubungan
• Pengendalian banjir Sungai Remu yang dibangun	105.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Bendungan Karian yang dibangun	331.696,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalan - Akses Jalan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor	18.828,6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) - Jalan Lingkar Sorong	37.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota - Kab. Lebak	21.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Perluasan SPAM Kabupaten/Kota - Kab. Bulungan	9.250,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat - Provinsi Maluku Utara	16 363,2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI - Provinsi Maluku Utara	19.534,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI - Provinsi Papua Barat	77.829,4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja - Provinsi Maluku Utara	28.615,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Air Minum	24.469,4	Pemda (DAK)
• Jalan	41.447,6	Pemda (DAK)
• Perumahan dan Permukiman	4.053,4	Pemda (DAK)
• Sanitasi	6.451,5	Pemda (DAK)
13) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, dengan proyek antara lain:	**649.129,0**	
• Jembatan Udara di Papua	93.289,4	Kementerian Perhubungan
• Pembangunan Bandara Sobaham	36.191,0	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandar Udara Wamena	74.745,0	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandara Illaga	50.151,6	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandara Anggi	25.111,4	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok	71.518,5	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandara Dekai (Nop Goliat Dekai)	29.289,0	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandara Oksibil	34.993,5	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandara Kiwirok	12.551,4	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandara Rendani	89.025,1	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandara Sinak	33 182,3	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandara Bilorai	13 403,2	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandara Elelim	19.684,3	Kementerian Perhubungan
• Prasarana Air Bersih di Daerah Tertinggal yang Dibangun - Kab. Jayawijaya	1 400,0	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
• Amenitas Wisata di DT yang Dibangun/Dikembangkan - Kab Jayawijaya	1 500,0	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
14) Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda), dengan proyek antara lain:	**858.821,7**	
• Pengembangan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri-Palu - Kota Palu	48.000,0	Kementerian Perhubungan
• Emergency Assistance Loan For Rehabilitation and Reconstruction (PHLN) a Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan b. Rekonstruksi Pelabuhan Donggala c. Rekonstruksi Pelabuhan Wani - Kota Palu	76.611,3	Kementerian Perhubungan
• Daerah irigasi Gumbasa (EARR dan IRSL) yang direhabilitasi	94 000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Prioritas Nasional/*Major Project*/Proyek	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
• Infrastructure Reconstruction Sector Loan Central Sulawesi yang dilaksanakan	39 493,7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengamanan Pantai Kalianda yang dibangun - Provinsi Lampung	154 660,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengamanan Pantai KEK Tanjung Lesung yang dibangun	100 000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah - Provinsi Sulawesi Tengah	39.656,7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Rumah Khusus - Provinsi Sulawesi Tengah	230.826,1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
15) Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke, dengan proyek antara lain:	**1.056.499,7**	
• Pembangunan Terminal Internasional Aruk (Prioritas Nasional) - Provinsi Kalimantan Barat	50.216,0	Kementerian Perhubungan
• Pembangunan Terminal Internasional Motaain (Prioritas Nasional) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	48 500,0	Kementerian Perhubungan
• Pembangunan Terminal Internasional Skouw (Prioritas Nasional) - Provinsi Papua	48 500,0	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandara Nunukan - Kab. Nunukan	19 624,5	Kementerian Perhubungan
• Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat - Kab. Belu	4.181,4	Kementerian Perdagangan
• Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat - Kab Sambas	4 181,4	Kementerian Perdagangan
• Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat - Kab. Merauke	4.181,4	Kementerian Perdagangan
• Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat - Kab. Nunukan	6.300,0	Kementerian Perdagangan
• Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) - Jalan BTS. Kec. Siding/Seluas - BTS. Kec. Sekayan/Entikong	97.100,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) - Jalan Temajuk - Aruk	135 000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) - Jalan Aruk - BTS Kec Siding/Seluas	44 390,9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) - Jalan Akses Plbn Oepoli - Noelelo	105 974,4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) - Jalan Henes - Dafala - Laktutus	115 200,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) - Jalan Nualain - Henes 1 (STA 73600-STA 88000)	15 403,6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) - Jalan Nunpo - Inbate (Haumeniana) - Napan	78.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) - Jalan Noelelo-Oenaek	79.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) - Peningkatan Jalan Sp. Nurobo - Umasukaer	15 000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jembatan Strategis ((ProPN) - Jembatan Sungai Sambas Besar	125.231,1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PN 3. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	**111.250.069,6**	
16) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, dengan proyek antara lain:	**8.586.553,2**	
• Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	127.612,8	Kementerian Kesehatan
• Balita kurus yang mendapat Makanan Tambahan	137.387,2	Kementerian Kesehatan
• Ibu hamil dan balita yang diberikan Pendidikan Gizi melalui Pemberian Makanan Tambahan Lokal	30.000,0	Kementerian Kesehatan
• Balita yang ditingkatkan Asupan Gizi Seimbang dalam rangka Percepatan Penanggulangan TB	380.100,0	Kementerian Kesehatan
• Koordinasi LP/LS Peningkatan Posyandu Aktif	25 559,5	Kementerian Kesehatan
• Promosi Peningkatan Literasi Germas melalui berbagai media	86.218,6	Kementerian Kesehatan
• Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Germas	60.967,3	Kementerian Kesehatan
• Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Posyandu Aktif	10 218,1	Kementerian Kesehatan
• Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Pencegahan Stunting	21 902,4	Kementerian Kesehatan
• Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin	978.322,0	Kementerian Kesehatan
• Paket Penyediaan obat gizi	291 679,0	Kementerian Kesehatan
• Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) Dekonsentrasi	48 137,4	Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/*Major Project*/Proyek	**Alokasi (Rp Juta)**	**Instansi Pelaksana**
• Pelatihan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu	46.634,9	Kementerian Kesehatan
• Media komunikasi, informasi, edukasi imunisasi	97.023,3	Kementerian Kesehatan
• Alat dan bahan kesehatan pendukung imunisasi	112.412,2	Kementerian Kesehatan
• Kampanye Gerakan Memasyarakatan Makan Ikan (Gemarikan)	71.535,9	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	2.134.207,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan SPAM Regional	726.745,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota	377.967,7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Peningkatan SPAM Regional	220 117,9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	1.342.203,4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Perluasan SPAM Regional	360.416,8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	252.045,8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	49.095,1	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
• Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	25.577,0	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
• Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	260 253,1	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
17) Pembangunan *Science Techno Park* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 Major Universitas), dengan proyek antara lain:	**21.939,6**	
• Kawasan Sains dan Teknologi yang Dikembangkan	21.939,6	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
18) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, dengan proyek antara lain:	**10.918.664,4**	
• Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan	146 769,3	Kementerian Pertanian
• Rancangan SKKNI Sektor Industri	4.000,0	Kementerian Perindustrian
• Tenaga Kerja Industri Kompeten yang Tersertifikasi	5 000,0	Kementerian Perindustrian
• Peralatan Pelatihan Vokasi Industri	3.900,0	Kementerian Perindustrian
• Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi)	505.111,6	Kementerian Perindustrian
• Pilot Project Learning Factory 4.0	164.691,2	Kementerian Perindustrian
• Bangunan/Gedung Pendidikan Tinggi Vokasi Industri	10 408,8	Kementerian Perindustrian
• Bangunan/Gedung Pendidikan Vokasi Industri	32 750,0	Kementerian Perindustrian
• SDM yang Mengikuti Pendidikan Menengah Kejuruan Industri	38.240,0	Kementerian Perindustrian
• Siswa SMK yang Tersertifikasi	55 408,4	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• SMK yang Direvitalisasi	1 301 544,3	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• SMK yang Dikembangkan Berbasis Bidang Revolusi Industri 4.0 dan Kawasan Prioritas Nasional	72.212,5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi	25.356,8	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri	253.863,6	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Pendidikan Tinggi Vokasi yang mendukung Kebutuhan Industri	104.895,8	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Guru Kejuruan dan instruktur kursus yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	145.130,2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Kepala SMK, Perguruan Tinggi Vokasi, dan Pengelola Kursus dan Pelatihan yang mengikuti Peningkatan Kapabilitas Manajerial Berbasis Industri	30 959,3	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri	30 764,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	205 658,2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Prioritas Nasional/*Major Project*/Proyek	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
• Dukungan Operasional PTN (BOPTN Vokasi)	106 064,1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Layanan Pembelajaran (BOPTN Vokasi)	127 701,8	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Sarana Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)	240.331,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Gedung Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)	356.026,5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Guru dan Dosen Vokasi yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi Berbasis Kerjasama Industri	41.400,3	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Buku Pustaka (BOPTN Vokasi)	3 959,1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN Vokasi)	38.212,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN Vokasi)	18.585,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN Vokasi)	33 612,8	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Guru Vokasi yang mendapatkan Pelatihan Kurikulum	42 092,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• PTK Vokasi yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang kejuruan	114.594,5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	26.550,0	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	170.904,5	Kementerian Ketenagakerjaan
• Bantuan Pengembangan BLK Komunitas	903 300,0	Kementerian Ketenagakerjaan
• Sarana dan Prasarana Bidang Pelatihan dan Produktivitas	561 406,2	Kementerian Ketenagakerjaan
• Transformasi BLK Baru	475 000,0	Kementerian Ketenagakerjaan
• PBK UPTP	288.704,2	Kementerian Ketenagakerjaan
• PBK di BLK Komunitas	225.392,0	Kementerian Ketenagakerjaan
• PBK Kerjasama Dengan Dunia Industri	32 554,2	Kementerian Ketenagakerjaan
• Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	60 698,0	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• Pembangunan Sekolah	15.302,0	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• Prasarana Pendidikan Menengah KP	23.266,1	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Sarana Pendidikan KP	28.305,9	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Prasarana Pendidikan Tinggi KP	43 780,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	121 637,2	Kementerian Kelautan dan Perikanan
19) Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh, dengan proyek antara lain:	**88.817.923,7**	
• Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	4.220.479,9	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	2.726.482,5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1 186.951,0	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1.538 519,3	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Santri PPS Ula/ Paket A/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	10 569,2	Kementerian Agama
• Santri PPS Wustha/ Paket B/ Hanya Mengaji/ Muadalah Terima PIP	69.399,8	Kementerian Agama
• Santri PPS Ulya/ Paket C/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	45 571,0	Kementerian Agama
• Santri Tk Ula/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	16.823,7	Kementerian Agama
• Santri Tk. Wustha/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	109.122,2	Kementerian Agama
• Santri Tk Ulya/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	104.887,5	Kementerian Agama
• Siswa Madrasah MI Penerima PIP	422.823,2	Kementerian Agama
• Siswa Madrasah MTs Penerima PIP	559 066,4	Kementerian Agama
• Siswa Madrasah MA Penerima PIP	320.372,0	Kementerian Agama
• Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Yang Diberdayakan	55.564,3	Kementerian Sosial

Prioritas Nasional/*Major Project*/Proyek	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
• Kabupaten /Kota yang mengembangkan SLRT	74.970,2	Kementerian Sosial
• Sumber Daya Manusia yang dikelola	1 545.854,4	Kementerian Sosial
• Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	28.782.227,7	Kementerian Sosial
• KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	16.872 133,0	Kementerian Sosial
• KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	15.993 793,5	Kementerian Sosial
• KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	12.511.121,6	Kementerian Sosial
• Pendamping Sosial PKH yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesos di BBPPKS REG I-VI - Kab. Bandung Barat	14 645,6	Kementerian Sosial
• Pendamping Sosial PKH yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesos di BBPPKS REG I-VI - Kab Sleman	19 043,2	Kementerian Sosial
• Pendamping Sosial PKH yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesos di BBPPKS REG I-VI - Kota Padang	8 533,3	Kementerian Sosial
• Pendamping Sosial PKH yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesos di BBPPKS REG I-VI - Kota Banjarbaru	6.909,9	Kementerian Sosial
• Pendamping Sosial PKH yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesos di BBPPKS REG I-VI - Kota Makassar	10.396,3	Kementerian Sosial
• Pendamping Sosial PKH yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesos di BBPPKS REG I-VI - Kota Jayapura	7 291,6	Kementerian Sosial
• Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	1.275.674,8	Kementerian Sosial
• Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	142 552,4	Kementerian Sosial
20) Penguatan Sistem Kesehatan Nasional, dengan proyek antara lain:	**2.904.988,7**	
• Balita yang ditingkatkan Asupan Gizi Seimbang dalam rangka Percepatan Penanggulangan TB	380.100,0	Kementerian Kesehatan
• Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB	412 387,2	Kementerian Kesehatan
• Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS	876 966,1	Kementerian Kesehatan
• Pelatihan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu	46 634,9	Kementerian Kesehatan
• Pelatihan Pemeriksaan PCR COVID19 BAGI Tenaga ATLM	1 576,8	Kementerian Kesehatan
• Pelatihan Investigasi Wabah/KLB Dengan Pendekatan One Health	1.787,0	Kementerian Kesehatan
• Pelatihan Tim Gerak Cepat di Puskesmas	55.006,7	Kementerian Kesehatan
• Pelatihan Promosi Kesehatan Bagi Petugas Puskesmas	5.038,0	Kementerian Kesehatan
• Pelatihan Surveilans Kesehatan Berbasis Epidemiologi Bagi Petugas Puskesmas	9.826,5	Kementerian Kesehatan
• Pelaksanaan Imunisasi di Daerah Sulit	7.206,4	Kementerian Kesehatan
• Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB	1 064.986,3	Kementerian Kesehatan
PN 5. MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	**35.961.971,0**	
21) Kereta Api Makassar-Pare Pare, dengan proyek antara lain:	**420.000,0**	
• Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar - Parepare Segmen 3 (Makassar - Barru)	420.000,0	Kementerian Perhubungan
• Kereta api Makasar - Parepare	-	Kementerian Perhubungan (KPBU)
22) Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar, dengan proyek antara lain:	**1.981.255,9**	
• Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracondong - Cicalengka Tahap 1 Segmen Gedebage - Haurpugur	389 725,3	Kementerian Perhubungan
• Penggantian Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Bandung dan Ciroyom	98 400,0	Kementerian Perhubungan
• Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakarta Kota	518.300,0	Kementerian Perhubungan
• Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I (PHLN)	89.505,2	Kementerian Perhubungan
• Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara) (Tahap II)	334.086,4	Kementerian Perhubungan
• Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Bekasi s/d Cikarang	170.000,0	Kementerian Perhubungan
• Penertiban Lahan untuk Pembangunan Jalan KA antara Medan - Binjai	60.000,0	Kementerian Perhubungan
• Pembebasan Lahan Jalur KA lintas Bekasi - Cikarang	50.000,0	Kementerian Perhubungan

Prioritas Nasional/*Major Project*/Proyek	**Alokasi (Rp Juta)**	**Instansi Pelaksana**
• Terminal Tipe A Jatiyajar	50.225,0	Kementerian Perhubungan
• Terminal Tipe A Pondok Cabe	14 768,6	Kementerian Perhubungan
23) Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak, dengan proyek antara lain:	**537,1**	
• Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	537,1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
24) Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA, dengan proyek antara lain:	**274.478,0**	
• PLTS Atap	262 134,4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
25) Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital, dengan proyek antara lain:	**8.936.738,9**	
• Satelit Multifungsi	-	Kementerian Komunikasi dan Informatika (KPBU)
• Data Center Nasional	691.794,8	Kementerian Komunikasi dan Informatika
• BTS/Lastmile	6.892.907,9	Kementerian Komunikasi dan Informatika
• Penyediaan Kapasitas Satelit	1.043 157,4	Kementerian Komunikasi dan Informatika
• Sistem Infrastruktur Penyiaran Digital	228 190,6	Televisi Republik Indonesia
26) Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa, dengan proyek antara lain:	**2.014.378,7**	
• Bendung gerak Cikarang Bekasi Laut yang dibangun	100 000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengamanan Pantai Dadap yang dibangun	75.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengamanan Pantai di Jakarta yang dibangun	229.935,2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendalian banjir Bengawan Solo Hilir yang dibangun	145.042,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendalian banjir dan rob di Kab. Pekalongan yang dibangun	81.004,2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendalian banjir Kali Bekasi yang dibangun	332.048,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendalian banjir Kali Blorong yang dibangun	70.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendalian banjir rob Semarang-Demak yang dibangun	600 000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendalian banjir Sungai Bringin yang dibangun	114.400,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
27) 18 Waduk Multiguna, dengan proyek antara lain:	**1.083.774,6**	
• Daerah irigasi Jurang Batu (SIMURP) yang direhabilitasi	30.500,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Daerah irigasi Rentang yang dimodernisasi	809.981,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Daerah irigasi Kedungputri (SIMURP) yang direhabilitasi	29.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Daerah irigasi Talang (SIMURP) yang direhabilitasi	29 500,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Bendungan Mbay yang dibangun	75.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Bendungan Jenelata yang dibangun	3.500,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
28) Jembatan Udara 37 Rute di Papua, dengan proyek antara lain:	**544.792,3**	
• Jembatan Udara di Papua	93.289,4	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandar Udara Wamena	74.745,0	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandara Illaga	50 151,6	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandara Tanah Merah	47.614,0	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandara Lapter Towe Hitam	18 327,6	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandara Timika	130 964,3	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandara Dekai (Nop Goliat Dekai)	29 289,0	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandara Oksibil	34.993,5	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandara Kiwirok	12 551,4	Kementerian Perhubungan

Prioritas Nasional/*Major Project*/Proyek	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
• Pengembangan Bandara Sinak	33 182,3	Kementerian Perhubungan
• Pengembangan Bandara Elelim	19 684,3	Kementerian Perhubungan
29) Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan, dengan proyek antara lain:	**524.836,4**	
• Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	180 367,2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	243 208,7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	98 376,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
30) Jalan Trans Papua Merauke - Sorong, dengan proyek antara lain:	**4.153.559,3**	
• Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)	599 802,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)	2 699.441,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
31) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga), dengan proyek antara lain:	**4.103.607,4**	
• Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1 987.696,1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	568.059,1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Komunal	999 950,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
32) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), dengan proyek antara lain:	**7.344.742,2**	
• Longstorage Air Baku Kab Serang yang dibangun	35 502,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Emergency Reconstruction and Rehabilitation Assistance (for Palu) (ADB) untuk Air Baku yang direhabilitasi	60.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Prasarana Air baku Bendungan Gondang yang dibangun	52,550,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Prasarana Air baku sistem Kesugihan yang dibangun	92.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Prasarana Air baku sistem Gandus yang dibangun	95 000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Prasarana Air baku Long Storage Yeh Empas yang dibangun	41.839,8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Prasarana Air Baku Jonggol dan Klapanunggal yang dibangun	84.636,9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	2.134 207,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pembangunan SPAM Regional	726 745,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	1 342 203,4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	1 571.634,6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• SPAM Pekanbaru	-	BUMD (KPBU)
• SPAM Umbulan	-	Provinsi Jawa Timur (KPBU)
• SPAM Semarang Barat	-	BUMD (KPBU)
33) Rumah Susun Perkotaan (1 Juta), dengan proyek antara lain:	**2.536.065,5**	
• Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI	1.371.063,2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja	1.165.002,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
34) Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah, dengan proyek antara lain:	**1.237.495,0**	
• Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	1.229.495,0	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
35) Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis, dengan proyek antara lain:	**800.899,8**	
• Kolam retensi Andir dan Polder-Polder di Kab. Bandung yang dibangun	138.660,1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pompa Ancol Sentiong yang dibangun	201.635,4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Prioritas Nasional/*Major Project*/Proyek	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
• Oxbow DAS Citarum yang ditangani	20 000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendalian banjir muara Sungai Cikapundung yang dibangun	17 500,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendalian banjir Sungai Ciliwung yang dibangun	50.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendalian banjir Sungai Cirasea yang dibangun	10.500,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendalian banjir Sungai Cisadane yang dibangun	50.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendalian banjir Sungai Cisangkuy yang dibangun	13.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendalian banjir Sungai Cisaranteun yang dibangun	4.400,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendalian banjir Sungai Cisunggalah yang direhabilitasi	10.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendalian banjir Sungai Citarum yang dibangun	15 000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendalian banjir Sungai Sunter yang dibangun	50.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendalian banjir upper Citarum yang dibangun	34 904,4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Pengendaliann banjir anak Sungai Citarum yang dibangun	5 300,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Sudetan Ciliwung-KBT yang dibangun	150 000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
36) Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km), dengan proyek antara lain:	**4.809,9**	
• Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi	1.754,0	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Lelang Ruas Transmisi dan atau Wilayah Jaringan Distribusi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus	2 555,9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
37) Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung		Badan Usaha (BUMN/Swasta)
38) KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)		Badan Usaha (BUMN/Swasta)
39) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu		Badan Usaha (BUMN/Swasta)
PN 6. MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	**1.694.788,0**	
40) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3, dengan proyek antara lain:	**149.938,4**	
• Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes	140 000,0	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
41) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana, dengan proyek antara lain:	**1.544.849,6**	
• Sistem Mitigasi Bencana Geologi Yang Dikembangkan	23 301,9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Pos Pengamatan Gunungapi yang Dikembangkan	11.785,2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Peta Zona Kerentanan Likuifaksi	1 120,7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Layanan Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami yang berkualitas	270 143,5	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
• Peralatan seismograf untuk Informasi gempabumi dan tsunami	127 000,0	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
• Peralatan monitoring gempabumi dan tsunami melalui Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP)	150.000,0	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
• Layanan Informasi iklim terapan melalui Sekolah lapang Iklim (SLI)	5 960,0	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
• Pembangunan Alat Pendeteksi Geser Angin (Windshear)	100.250,0	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
• Layanan Peringatan Dini Cuaca dengan Scaling Up Weather Capacity II	169.250,0	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
• Layanan Informasi meteorologi maritim (Strengthening of Marine Meteorology)	150.000,0	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
• Stasiun Ina-CORS yang dibangun	62.490,0	Badan Informasi Geospasial (BIG)
• Stasiun Pasang Surut Permanen yang dibangun	39.650,0	Badan Informasi Geospasial (BIG)
• Pembentukan Desa Tangguh Bencana Banjir dan Gunungapi	11.300,0	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/*Major Project*/Proyek	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
• Prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan	10 500,0	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
• Satuan Pendidikan Aman dari Bencana (SPAB)	3 200,0	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
• Layanan Sistem Peringatan Dini	4 600,0	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
• Lingkungan Hidup	1 300,0	Pemda (DAK)
PN 7. MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	**3.600.592,7**	
42) Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT, dengan proyek antara lain:	**839.699,4**	
• Pembangunan Ruang Pemantauan Siber dan Pusat Data SOC Kejaksaan RI	82.089,0	Kejaksaan Republik Indonesia
• Integrasi Cyber Intelligent Analytics (CIA)	50.000,0	Badan Intelijen Negara
• Perluasan Cakupan Area National Cybersecurity Operation Center (RKP 2021)	325 000,0	Badan Siber dan Sandi Negara
• Pembangunan Kapasitas Nasional Computer Security Incident Response Team (Nat-CSIRT) (Carry over) (RKP 2021)	150.000,0	Badan Siber dan Sandi Negara
• Penguatan National Data Center Berstandar Internasional (Carry Over) (RKP 2021)	175 000,0	Badan Siber dan Sandi Negara
43) Penguatan Keamanan Laut di Natuna, dengan proyek antara lain:	**2.760.893,3**	
• Operasi Militer Selain Perang Matra Laut (Prioritas)	276 709,7	Kementerian Pertahanan
• Sarpras militer pulau strategis (Prioritas)	73 006,0	Kementerian Pertahanan
• Senjata dan amunisi yang diadakan (Prioritas)	636 493,3	Kementerian Pertahanan
• KRI, KAL, Alpung dan Ranpur/Rantis Matra Laut (Prioritas)	1 744.684,3	Kementerian Pertahanan
• Unmanned Aerial Vehicle (UAV)	30.000,0	Badan Keamanan Laut

Keterangan:

1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) *Major Project*;
2) Beberapa proyek dalam proses finalisasi detail target dan alokasi;
3) Rincian pada masing-masing major project mencakup Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
4) Beberapa *Major Project* utamanya didukung oleh BUMN/Swasta/Daerah. Belanja KL dialokasikan sebagai fasilitator. Contoh: 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter, KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung), Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak, Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung, termasuk *Major Project* terkait pengembangan kewilayahan;
5) Perubahan rincian berserta pendanaannya dimungkinkan setelah mendapat persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 061735 A